

BUKU INFORMASI STATISTIK INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM

2014



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENGOLAHAN DATA (PUSDATA)

KATA PENGANTAR

Penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi statistik infrastruktur pekerjaan umum dalam berbagai bentuk penyajian dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum sangat diperlukan. Oleh sebab itu disusun Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut sebagai Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum (BIS-PU) sebagai output dari pekerjaan Penyusunan Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum.

Data dan informasi yang disajikan diupayakan berupa data terpilah yang berasal dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun dari luar Kementerian PU, serta memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Dalam Penyusunan BIS-PU ini disajikan data dan informasi infrastruktur pekerjaan umum tingkat nasional yang dirinci menurut provinsi atau data agregat per provinsi.

Ucapan terima kasih kepada Pimpinan Pusdata sebagai Pembina/Pengarah dalam kegiatan ini, serta kepada Tim Pelaksana Teknis kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Informasi Literal Pusdata. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para personil kerabat informasi di Sub Direktorat/Bidang Data dan Informasi Pusat, Balai dan Dinas Pekerjaan Umum di daerah, Badan Pusat Statistik pusat dan daerah, Badan Perencana Pembangunan Daerah tingkat provinsi, serta instansi terkait lainnya yang telah memberikan perhatian dan dukungan, baik data dan informasi maupun saran dan arahan yang positif demi terwujudnya penyajian Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum ini.

Tim Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan BIS-PU ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu saran dan masukan yang konstruktif dari para pengguna buku ini sangat diharapkan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Jakarta, September 2014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I - 1
B. Tujuan	I - 2
 BAB II : GAMBARAN UMUM INDONESIA	
A. Geografi Wilayah	II - 1
B. Administrasi Wilayah	II - 3
C. Demografi Wilayah	II - 8
D. Ekonomi Wilayah	II - 14
E. Alokasi Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum	II - 27
 BAB III : STATISTIK INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	
A. Sumber Air	III - 1
A.1. Wilayah Sungai dan Daerah Aliran Sungai	III - 1
A.2. Danau/Situ	III - 7
B. Bangunan Air	III - 9
B.1. Bendungan/Waduk	III - 9
B.2. Bendung	III - 11
B.3. Embung dan Embung Potensi	III - 13
C. Daerah Irigasi	III - 16
D. Analisis Statistik Infrastruktur Sumber Daya Air	III - 26
 BAB IV : STATISTIK INFRASTRUKTUR BINA MARGA	
A. Jalan Nasional	IV - 1

B. Jalan Strategis Nasional	IV - 10
C. Jalan Tol	IV - 12
D. Jembatan Nasional	IV - 18
E. Analisis Statistik Infrastruktur Jalan	IV - 27

BAB V : STATISTIK INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA

A. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	V - 1
B. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	V - 9
C. Pengembangan Permukiman	V - 13
D. Penataan Bangunan dan Lingkungan	V - 27
E. Analisis Statistik Infrastruktur Cipta Karya	V - 29

BAB VI: PENATAAN RUANG

A. Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	VI - 1
B. Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau/Kepulauan	VI - 8
C. Kawasan Lindung	VI - 19
D. Kawasan Andalan	VI - 30
E. Kawasan Strategis Nasional	VI - 38

BAB VII: STATISTIK SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN ISU GENDER

A. Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian PU	VII - 1
B. Isu Gender	VII - 12

BAB VIII: PENUTUP

DAFTAR TABEL

2.1.	Luas Daerah dan Jumlah Pulau di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2012	II - 2
2.2a.	Jumlah Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Desa di Indonesia Tahun 2009-2012	II - 4
2.2b.	Jumlah Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Desa di Indonesia Tahun 2009-2012 (<i>lanjutan</i>)	II - 6
2.3.	Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2012	II - 8
2.4.	Sebaran dan Kepadatan Penduduk Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2012	II - 10
2.5.	Proyeksi Penduduk Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2010-2035	II - 12
2.6.	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2010-2035	II - 13
2.7.	PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013	II - 15
2.8.	Persentase PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013	II - 16
2.9.	PDB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013	II - 18
2.10.	Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013	II - 18
2.11.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi Tahun 2009-2012	II - 21
2.12.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas Menurut Provinsi Tahun 2009-2012	II - 22
2.13.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Provinsi Tahun 2009-2012	II - 23

2.14.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tanpa Migas Menurut Provinsi Tahun 2009-2012	II - 25
2.15.	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Provinsi Tahun 2009-2012	II - 26
2.16.	Perkembangan Alokasi APBN untuk Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2009-2014	II - 28
2.17.	Perkembangan Alokasi APBN Kementerian Pekerjaan Umum Menurut Provinsi Tahun 2013-2014	II - 29
2.18.	Perkembangan Alokasi APBN Kementerian Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air Menurut Provinsi Tahun 2013-2014	II - 30
2.19.	Perkembangan Alokasi APBN Kementerian Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Menurut Provinsi Tahun 2013-2014	II - 31
2.20.	Perkembangan Alokasi APBN Kementerian Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Menurut Provinsi Tahun 2013-2014	II - 32
2.21.	Perkembangan Alokasi APBN Kementerian Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang Menurut Provinsi Tahun 2013-2014	II - 34
2.22.	Perkembangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum Menurut Provinsi Tahun 2013-2014	II - 35
3.1.	Wilayah Sungai Lintas Negara	III - 2
3.2.	Wilayah Sungai Lintas Provinsi	III - 2
3.3.	Wilayah Sungai Strategis Nasional	III - 4
3.4.	Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	III - 5
3.5.	Wilayah Sungai dalam Satu Kabupaten/Kota	III - 6
3.6.	Danau/Situ di Indonesia Menurut Provinsi	III - 8

3.7.	Rekapitulasi Bendungan di Indonesia Milik PU Menurut Provinsi (Kriteria Menurut PP Nomor 37 Tahun 2010)	III - 10
3.8.	Bendung di Indonesia Menurut Provinsi	III - 12
3.9.	Embung di Indonesia Menurut Provinsi	III - 14
3.10.	Embung Potensi di Indonesia Menurut Provinsi	III - 15
3.11a.	Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah	III - 18
3.11b.	Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah (<i>lanjutan</i>)	III - 19
3.12a.	Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi	III - 21
3.12b.	Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi (<i>lanjutan</i>)	III - 22
3.13a.	Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	III - 23
3.13b.	Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (<i>lanjutan</i>)	III - 24
3.14.	Luas Daerah Irigasi dan Produksi Padi Menurut Pulau Besar	III - 27
3.15.	Luas Daerah Irigasi dan Produksi Padi Menurut Provinsi	III - 28
4.1.	Panjang Jalan Nasional Menurut Provinsi dan Kondisi Umum Jalan Semester 2 Tahun 2013	IV - 4
4.2.	Persentase Jalan Nasional Menurut Provinsi dan Kondisi Umum Jalan Semester 2 Tahun 2013	IV - 5
4.3.	Panjang dan Persentase Jalan Nasional Menurut Provinsi dan Kemantapan Jalan Semester 2 Tahun 2013	IV - 7
4.4a.	Capaian Kemantapan Jalan Nasional Tahun 2010-2013	IV - 9
4.4b.	Capaian Kemantapan Jalan Nasional Tahun 2010-2013 (<i>lanjutan</i>)	IV - 9

4.5.	Jalan Strategis Nasional Rencana	IV - 11
4.6.	Progres Pembangunan Jalan Tol di Indonesia	IV - 13
4.7.	Jalan Tol Beroperasi di Indonesia	IV - 14
4.8.	Jalan Tol PPJT	IV - 15
4.9.	Jalan Tol dalam Proses Tender	IV - 17
4.10.	Jalan Tol dalam Persiapan Tender	IV - 17
4.11.	Jumlah Jembatan Nasional Menurut Provinsi dan Kondisi Status : 5 Desember 2014	IV - 18
4.12.	Panjang Jembatan Nasional Menurut Provinsi dan Kondisi Status : 5 Desember 2014	IV - 20
4.13.	Persentase Jumlah Jembatan Nasional Menurut Provinsi dan Kondisi Status : 5 Desember 2014	IV - 21
4.14.	Persentase Panjang Jembatan Nasional Menurut Provinsi dan Kondisi Status : 5 Desember 2014	IV - 23
4.15.	Jumlah dan Panjang Jembatan Nasional Menurut Provinsi dan Kemantapan (Status : 5 Desember 2014)	IV - 25
4.16.	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Pulau Besar di Indonesia Tahun 2012	IV - 28
4.17.	Panjang Jalan Menurut Pulau Besar dan Kewenangannya (km) Tahun 2012	IV - 30
4.18.	Persentase Panjang Jalan, Penduduk, Luas Wilayah dan Kendaraan Bermotor Menurut Pulau Besar dan Kewenangannya Tahun 2012	IV - 30
4.19.	Rasio Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Panjang Jalan Tahun 2012 ...	IV - 32

4.20.	Rasio Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Panjang Jalan Nasional Tahun 2012..	IV - 32
4.21.	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2012	IV - 35
4.22.	Panjang Jalan Menurut Provinsi dan Kewenangannya (km) Tahun 2012	IV - 36
4.23.	Rasio Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Panjang Jalan di Indonesia Menurut Provinsi	IV - 38
4.24.	Rasio Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Panjang Jalan Nasional di Indonesia Menurut Provinsi	IV - 39
5.1.	Perkembangan Kinerja PDAM Tahun 2010-2013	V - 2
5.2.	Kinerja PDAM di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2013	V - 3
5.3.	Kapasitas dan Layanan PDAM di Indonesia Menurut Provinsi	V - 5
5.4a.	Kegiatan Sektor Pengembangan Air Minum Tahun 2013	V - 7
5.4b.	Kegiatan Sektor Pengembangan Air Minum Tahun 2013 (<i>lanjutan</i>)	V - 8
5.5.	Infrastruktur Sektor Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Tahun 2013	V - 10
5.6.	Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Indonesia	V - 12
5.7a.	Infrastruktur Sektor Pengembangan Permukiman Tahun 2013	V - 14
5.7b.	Infrastruktur Sektor Pengembangan Permukiman Tahun 2013 (<i>lanjutan</i>)	V - 15
5.8.	Dukungan Infrastruktur Pengembangan Kawasan Agropolitan Tahun 2003-2012	V - 18
5.9.	Dukungan Infrastruktur Pengembangan Kawasan Minapolitan Tahun 2003-2012	V - 22

5.10.	Rusunawa di Indonesia Tahun 2003 – 2012	V - 24
5.11.	Infrastruktur Pengembangan Permukiman (Pemberdayaan Masyarakat) Tahun 2013	V - 26
5.12.	Infrastruktur Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan Tahun 2013	V - 28
5.13.	Layanan PDAM di Indonesia Tahun 2012.....	V - 30
6.1.	Progres Perda RTRW di Indonesia Status Agustus 2014	VI - 3
6.2.	Progres Perda RTRW Lingkup Provinsi di Indonesia Status Agustus 2014	VI - 3
6.3.	Progres Perda RTRW Lingkup Kabupaten di Indonesia Status Agustus 2014	VI - 5
6.4.	Progres Perda RTRW Lingkup Kota di Indonesia Status Agustus 2014	VI - 6
6.5.	Rencana Tata Ruang Pulau	VI - 8
6.6.	Kawasan Lindung Nasional di Indonesia	VI - 19
6.7.	Kawasan Andalan di Indonesia	VI - 31
6.8.	Kawasan Strategis di Indonesia	VI - 38
7.1a.	Perkembangan Jumlah SDM Kementerian PU Tahun 2010-2014	VII - 2
7.1b.	Perkembangan Jumlah SDM Kementerian PU Tahun 2010-2014 (<i>lanjutan</i>)	VII - 2
7.2a.	Persentase SDM Kementerian PU Tahun 2010-2014	VII - 4
7.2b.	Persentase SDM Kementerian PU Tahun 2010-2014 (<i>lanjutan</i>)	VII - 4
7.3a.	Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Golongan Kepangkatan Status : 5 September 2014	VII - 6

7.3b.	Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Golongan Kepangkatan Status : 5 September 2014 (<i>lanjutan</i>)	VII - 6
7.4a.	Persentase SDM Kementerian PU Menurut Golongan Kepangkatan Status : 5 September 2014	VII - 8
7.4b.	Persentase SDM Kementerian PU Menurut Golongan Kepangkatan Status : 5 September 2014 (<i>lanjutan</i>)	VII - 8
7.5.	Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan Tahun 2012-2014	VII - 10
7.6.	Persentase SDM Kementerian PU Menurut Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan Tahun 2012-2014	VII - 11
7.7a.	Jumlah Pejabat Kementerian PU Tahun 2010-2014	VII - 17
7.7b.	Jumlah Pejabat Kementerian PU Tahun 2010-2014 (<i>lanjutan</i>)	VII - 18
7.8a.	Persentase Pejabat Kementerian PU Tahun 2010-2014	VII - 19
7.8b.	Persentase Pejabat Kementerian PU Tahun 2010-2014 (<i>lanjutan</i>)	VII - 19
7.9.	Jumlah Pejabat Kementerian PU Menurut Jenjang Eselon Status : 5 September 2014	VII - 20
7.10a.	Persentase Pejabat Kementerian PU Menurut Jenjang Eselon Status : 5 September 2014	VII - 22
7.10b.	Persentase Pejabat Kementerian PU Menurut Jenjang Eselon (<i>lanjutan</i>) Status : 5 September 2014	VII - 22

DAFTAR GAMBAR

2.1.	Jumlah Kabupaten di Indonesia Tahun 2009-2012	II - 7
2.2.	Jumlah Kecamatan di Indonesia Tahun 2009-2012	II - 7
2.3.	Jumlah Kota di Indonesia Tahun 2009-2012	II - 7
2.4.	Jumlah Desa di Indonesia Tahun 2009-2012	II - 7
2.5.	Sebaran Penduduk Indonesia Menurut Pulau Besar Tahun 2012	II - 11
2.6.	Distribusi PDB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012	II - 17
2.7.	Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2008-2012	II - 19
2.8.	Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2012	II - 20
3.1.	Persentase Luas Daerah Irigasi di Indonesia Berdasarkan Kewenangan (ha)	III - 26
3.2.	Luas Daerah Irigasi Menurut Provinsi (ha)	III - 30
3.3.	Produksi Padi Tahun 2013 Menurut Provinsi (ton)	III - 31
3.4.	Rasio Luas Daerah Irigasi dengan Produksi Padi Tahun 2013 Menurut Provinsi (ton/ha)	III - 32
4.1.	Panjang Jalan Nasional Menurut Provinsi dan Kondisi Umum Jalan Semester 2 Tahun 2013	IV - 5
4.2.	Persentase Jalan Nasional Menurut Provinsi dan Kondisi Umum Jalan Semester 2 Tahun 2013	IV - 7
4.3.	Capaian Kemantapan Jalan Nasional Tahun 2010-2013	IV - 10

4.4.	Jumlah Jembatan Nasional Menurut Kondisi Status : 5 Desember 2014	IV - 24
4.5.	Panjang Jembatan Nasional Menurut Kondisi Status : 5 Desember 2014	IV - 25
4.6.	Sebaran Penduduk dan Luas Wilayah Indonesia Menurut Pulau Besar (%)	IV - 28
4.7.	Persentase Panjang Jalan, Penduduk, Luas Wilayah dan Kendaraan Bermotor Menurut Pulau Besar dan Kewenangannya Tahun 2012	IV - 31
4.8.	Rasio Jumlah Penduduk terhadap Panjang Jalan Menurut Pulau Besar	IV - 34
4.9.	Rasio Jumlah Penduduk terhadap Panjang Jalan Nasional Menurut Pulau Besar	IV - 34
4.10.	Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Panjang Jalan Menurut Pulau Besar	IV - 34
4.11.	Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Panjang Jalan Nasional Menurut Pulau Besar	IV - 34
4.12.	Rasio Luas Wilayah terhadap Panjang Jalan Menurut Pulau Besar	IV - 34
4.13.	Rasio Luas Wilayah terhadap Panjang Jalan Nasional Menurut Pulau Besar	IV - 34
4.14.	Rasio Jumlah Penduduk terhadap Panjang Jalan Menurut Provinsi	IV - 41
4.15.	Rasio Jumlah Penduduk terhadap Panjang Jalan Nasional Menurut Provinsi	IV - 41
4.16.	Rasio Luas Wilayah terhadap Panjang Jalan Menurut Provinsi	IV - 42
4.17.	Rasio Luas Wilayah terhadap Panjang Jalan Nasional Menurut Provinsi	IV - 42

4.18.	Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Panjang Jalan Menurut Provinsi	IV - 43
4.19.	Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Panjang Jalan Nasional Menurut Provinsi	IV - 43
5.1.	Perkembangan Kinerja PDAM Tahun 2010-2013	V - 3
5.2.	Persentase Evaluasi Kinerja PDAM di Indonesia Tahun 2013	V - 5
5.3.	Cakupan Pelayanan PDAM Menurut Provinsi di Indonesia (%)	V - 32
5.4.	Rata-Rata Tingkat Kehilangan Air PDAM Menurut Provinsi di Indonesia (%)	V - 33
5.5.	Rasio Kapasitas Produksi terhadap Jumlah Penduduk Terlayani (ltr/dtk per 1000 pelanggan)	V - 34
7.1.	Perkembangan Jumlah SDM Kementerian PU Tahun 2010-2014	VII - 3
7.2.	Persentase SDM Kementerian PU Tahun 2014	VII - 5
7.3.	Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Golongan Kepangkatan Status : 5 September 2014	VII - 7
7.4.	Persentase SDM Kementerian PU Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2014	VII - 9
7.5.	Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan Tahun 2012-2014	VII - 11
7.6.	Persentase SDM Kementerian PU Menurut Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan Tahun 2014	VII - 12
7.7.	Persentase SDM Kementerian PU Tahun 2010-2014	VII - 14
7.8.	Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin dan Unit Organisasi Tahun 2014	VII - 15

7.9.	Persentase SDM Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin dan Unit Organisasi Tahun 2014	VII - 15
7.10.	Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2014	VII - 16
7.11.	Persentase SDM Kementerian PU Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2014	VII - 16
7.12.	Jumlah Pejabat Kementerian PU Tahun 2010-2014	VII - 18
7.13.	Persentase Pejabat Kementerian PU Tahun 2010-2014	VII - 20
7.14.	Jumlah Pejabat Kementerian PU Menurut Jenjang Eselon Status : 5 September 2014	VII - 21
7.15.	Persentase Pejabat Kementerian PU Menurut Jenjang Eselon Status : 5 September 2014	VII - 23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum yang berwawasan lingkungan demi peningkatan kesejahteraan rakyat dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh, serta memberikan dukungan pada sektor-sektor lain secara maksimal. Aktivitas pembangunan yang ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum adalah bagian dari pendukung program sektor lain. Dalam proses pembangunan bidang Pekerjaan Umum tersebut perlu adanya informasi literal dan kestatistikan untuk mendukung perencanaan umum program, desain, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program, serta pemanfaatan pembangunan.

Dalam kaitannya dengan fungsi Pusat Pengolahan Data (Pusdata) yang salah satunya sebagai unit pengelola serta penyedia data spasial dan literal, maka Unit Kerja Eselon III di PUSDATA yaitu Balai Informasi Literal mempunyai tugas untuk menyediakan data infrastruktur ke-PU-an beserta pendukungnya yang dituangkan dalam Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum (BIS-PU). BIS-PU diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan pembangunan ke-PU-an secara menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang dibuat dapat terlaksana dengan baik dan program kegiatan yang direncanakan dapat terwujud sesuai dengan yang diinginkan, sehingga pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana yang telah ada dapat dilaksanakan. Dengan adanya dukungan data terpilah, pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana/infrastruktur bidang Pekerjaan Umum tersebut dapat terwujud sesuai dengan kebutuhan per wilayah dan dapat diakses serta dimanfaatkan oleh masyarakat secara merata dan adil.

Sebagai salah satu instansi yang menyelenggarakan pembangunan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana sumber daya air, jalan dan jembatan, serta permukiman. Keberadaan infrastruktur tersebut telah dirasakan manfaatnya dalam melayani kebutuhan

masyarakat, meskipun masih ada beberapa infrastruktur yang membutuhkan perbaikan atau peningkatan kapasitas, dan ada pula yang masih dalam tahap pelaksanaan pembangunan.

Infrastruktur yang dibangun sangat beragam dari skala besar, menengah hingga kecil, dan keberadaannya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu inventarisasi data infrastruktur pekerjaan umum menjadi suatu hal yang amat penting. Dari data tersebut akan dapat diperoleh suatu informasi dan gambaran mengenai karakteristik dan keberadaan infrastruktur Pekerjaan Umum.

Keberadaan infrastruktur mutlak diperlukan oleh setiap negara. Infrastruktur juga dijadikan salah satu indikator dalam menentukan indeks persaingan global suatu negara. Pemerintah menyadari pentingnya penyediaan infrastruktur yang baik karena dapat memacu pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan lapangan pekerjaan dan mendorong berkembangnya sektor ekonomi lain seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, pertambangan, industri, dan lain-lain. Melalui penyediaan infrastruktur yang memadai diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

B. Tujuan

Penyusunan Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum (BIS-PU) ini bertujuan untuk menyajikan data dan informasi statistik bidang Pekerjaan Umum serta informasi sektor-sektor terkait lainnya dan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pimpinan dan unit-unit organisasi dan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan instansi lainnya, serta untuk masyarakat pengguna informasi.

BIS-PU secara garis besar memberikan gambaran umum tentang hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum yang dilengkapi dengan data statistik yang terdiri dari data statistik bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang, dan data bidang/sektor terkait lainnya yang sedapat mungkin terpilah menurut gender. Selain itu di dalam BIS-PU disajikan analisis statistik bidang Pekerjaan Umum yang dihubungkan dengan data bidang/sektor terkait.

BAB II

GAMBARAN UMUM INDONESIA

A. Geografi Wilayah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 baik yang bernama maupun belum bernama. Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5,2 juta km² yang terdiri atas 1,9 juta km² daratan dan 3,3 juta km² lautan. Lima pulau besar di Indonesia adalah Sumatera dengan luas 480.793,28 km², Jawa 129.438,28 km², Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia) 544.150,07 km², Sulawesi 188.522,36 km², dan Papua 416.060,32 km².

Letak geografis Indonesia berada di antara 6° Lintang Utara - 11° Lintang Selatan dan 95° Bujur Timur - 141° Bujur Timur. Jika dibentangkan, maka wilayah Indonesia berada di sepanjang 3.977 mil antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Posisi Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudera memberi pengaruh besar terhadap kebudayaan, sosial, dan ekonomi masyarakatnya. Begitu pula dengan sejarah bangsa Indonesia di masa lalu yang banyak dipengaruhi oleh bangsa lain, salah satunya dikarenakan posisi Indonesia yang sangat strategis sehingga sering disinggahi oleh penjelajah asing.

Di Indonesia terdapat 3 sistem gunung api, yaitu Sirkum Mediterania, Sirkum Pasifik dan Sirkum Lingkar Australia. Karena faktor geografisnya ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki potensi alam sangat besar sekaligus menjadi rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan tsunami.

Tabel 2.1.
Luas Daerah dan Jumlah Pulau di Indonesia Menurut Provinsi
Tahun 2012

Provinsi	Ibukota Provinsi	Luas (km ²) ¹⁾	Persen	Jumlah Pulau ²⁾
Aceh	Banda Aceh	57.956,00	3,03	663
Sumatera Utara	Medan	72.981,23	3,82	419
Sumatera Barat	Padang	42.012,89	2,20	391
Riau	Pekanbaru	87.023,66	4,55	139
Jambi	Jambi	50.058,16	2,62	19
Sumatera Selatan	Palembang	91.592,43	4,79	53
Bengkulu	Bengkulu	19.919,33	1,04	47
Lampung	Bandar Lampung	34.623,80	1,81	188
Kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang	16.424,06	0,86	950
Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	8.201,72	0,43	2.408
DKI Jakarta	Jakarta	664,01	0,03	218
Jawa Barat	Bandung	35.377,76	1,85	131
Jawa Tengah	Semarang	32.800,69	1,72	296
DI Yogyakarta	Yogyakarta	3.133,15	0,16	23
Jawa Timur	Surabaya	47.799,75	2,50	287
Banten	Serang	9.662,92	0,51	131
Bali	Denpasar	5.780,06	0,30	85
Nusa Tenggara Barat	Mataram	18.572,32	0,97	864
Nusa Tenggara Timur	Kupang	48.718,10	2,55	1.192
Kalimantan Barat	Pontianak	147.307,00	7,71	339
Kalimantan Tengah	Palangkar aya	153.564,50	8,04	32
Kalimantan Selatan	Banjarmasin	38.744,23	2,03	320
Kalimantan Timur	Samarinda	129.066,64	6,75	370
Kalimantan Utara ⁴⁾	Bulungan	75.467,70	3,95	-
Sulawesi Utara	Manado	13.851,64	0,72	668
Sulawesi Tengah	Palu	61.841,29	3,24	750
Sulawesi Selatan	Makassar	46.717,48	2,44	295
Sulawesi Tenggara	Kendari	38.067,70	1,99	651
Gorontalo	Gorontalo	11.257,07	0,59	136

Provinsi	Ibukota Provinsi	Luas (km ²) ¹⁾	Persen	Jumlah Pulau ²⁾
Sulawesi Barat ³⁾	Mamuju	16.787,18	0,88	-
Maluku	Ambon	46.914,03	2,46	1.422
Maluku Utara	Ternate	31.982,50	1,67	1.474
Papua Barat	Manokwari	97.024,27	5,08	1.945
Papua	Jayapura	319.036,05	16,70	598
Indonesia	Jakarta	1.910.931,32	100,00	17.504

Sumber : Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri
Statistik Indonesia 2014, BPS RI

Catatan : ¹⁾ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011

²⁾ Berdasarkan informasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2004

³⁾ Jumlah Pulau Sulawesi Selatan termasuk dengan Sulawesi Barat, Kalimantan Timur termasuk dengan Kalimantan Utara

⁴⁾ Luas Wilayah Kalimantan Utara Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2012

B. Administrasi Wilayah

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik atau disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Batas-batas NKRI adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Filipina, Malaysia, Singapura, India dan Samudera Pasifik.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Negara Australia, Timor Leste dan Samudera Hindia.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini dan Samudera Pasifik.

Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden yang dipilih langsung. Tiap provinsi di Indonesia dipimpin oleh seorang gubernur dan memiliki DPRD Provinsi. Kabupaten dipimpin oleh seorang bupati dan memiliki DPRD Kabupaten. Sementara kota dipimpin oleh seorang walikota dan memiliki DPRD Kota. Namun di DKI Jakarta tidak terdapat DPRD Kabupaten atau Kota karena kabupaten dan kota di DKI Jakarta bukanlah daerah otonom, melainkan daerah administratif yang berarti tidak memiliki perwakilan rakyat tersendiri.

Negara Indonesia juga mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Satuan pemerintahan daerah ini memiliki hak istimewa legislatur yang lebih besar dan tingkat otonomi yang lebih tinggi dibanding provinsi lainnya. Provinsi-provinsi yang diberikan otonomi khusus adalah DKI Jakarta, Aceh, Papua dan Papua Barat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas 33 provinsi (belum termasuk Provinsi Kalimantan Utara yang dibentuk pada Oktober 2012). Pada tahun 2012, Indonesia terdiri dari 399 kabupaten dan 98 kota yang di dalamnya terdapat 6.879 kecamatan. Sementara desa sebagai satuan administrasi terkecil sebanyak 79.702.

Tabel 2.2a.
Jumlah Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Desa di Indonesia
Tahun 2009-2012

Provinsi	2009				2010			
	Kab	Kota	Kec	Desa	Kab	Kota	Kec	Desa
Aceh	18	5	276	6.424	18	5	280	6.459
Sumatera Utara	25	8	417	5.742	25	8	419	5.770
Sumatera Barat	12	7	176	1.010	12	7	176	1.014
Riau	10	2	151	1.637	10	2	153	1.645
Jambi	9	2	128	1.371	9	2	131	1.371
Sumatera Selatan	11	4	217	3.154	11	4	220	3.165
Bengkulu	9	1	121	1.444	9	1	123	1.507

Provinsi	2009				2010			
	Kab	Kota	Kec	Desa	Kab	Kota	Kec	Desa
Lampung	12	2	206	2.404	12	2	214	2.463
Kepulauan Bangka Belitung	6	1	43	360	6	1	44	361
Kepulauan Riau	5	2	59	353	5	2	59	353
DKI Jakarta	1	5	44	267	1	5	44	267
Jawa Barat	17	9	625	5.879	17	9	625	5.891
Jawa Tengah	29	6	573	8.574	29	6	573	8.577
DI Yogyakarta	4	1	78	438	4	1	78	438
Jawa Timur	29	9	662	8.506	29	9	662	8.506
Banten	4	4	154	1.535	4	4	154	1.535
Bali	8	1	57	714	8	1	57	715
Nusa Tenggara Barat	8	2	116	919	8	2	116	989
Nusa Tenggara Timur	20	1	287	2.836	20	1	289	2.874
Kalimantan Barat	12	2	175	1.894	12	2	175	1.894
Kalimantan Tengah	13	1	125	1.510	13	1	125	1.514
Kalimantan Selatan	11	2	151	1.981	11	2	151	1.985
Kalimantan Timur	10	4	136	1.435	10	4	136	1.465
Sulawesi Utara	11	4	156	1.652	11	4	159	1.673
Sulawesi Tengah	10	1	154	1.778	10	1	155	1.815
Sulawesi Selatan	21	3	304	2.961	21	3	304	2.976
Sulawesi Tenggara	10	2	201	2.087	10	2	201	2.088
Gorontalo	5	1	66	619	5	1	66	619
Sulawesi Barat	5	0	69	603	5	0	69	603
Maluku	9	2	73	906	9	2	77	964
Maluku Utara	7	2	112	1.062	7	2	112	1.063
Papua Barat	10	1	154	1.367	10	1	167	1.410
Papua	28	1	385	3.561	28	1	385	3.579
Indonesia	399	98	6.651	76.983	399	98	6.699	77.548

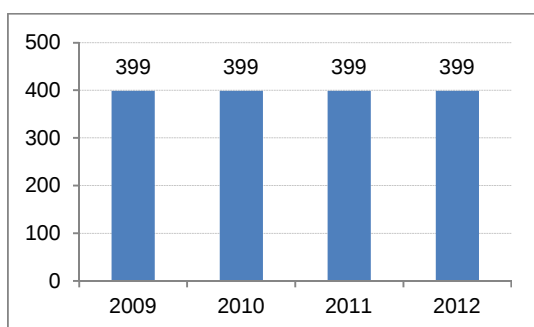
Tabel 2.2b.
Jumlah Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Desa di Indonesia
Tahun 2009-2012 (*lanjutan*)

Provinsi	2011				2012			
	Kab	Kota	Kec	Desa	Kab	Kota	Kec	Desa
Aceh	18	5	287	6.491	18	5	289	6.493
Sumatera Utara	25	8	421	5.872	25	8	422	5.876
Sumatera Barat	12	7	176	1.032	12	7	176	1.140
Riau	10	2	157	1.664	10	2	163	1.759
Jambi	9	2	131	1.480	9	2	138	1.506
Sumatera Selatan	11	4	223	3.186	11	4	230	3.205
Bengkulu	9	1	124	1.508	9	1	127	1.517
Lampung	12	2	214	2.463	12	2	225	2.576
Kepulauan Bangka Belitung	6	1	46	373	6	1	47	381
Kepulauan Riau	5	2	59	371	5	2	63	383
DKI Jakarta	1	5	44	267	1	5	44	267
Jawa Barat	17	9	626	5.918	17	9	626	5.962
Jawa Tengah	29	6	573	8.578	29	6	573	8.578
DI Yogyakarta	4	1	78	438	4	1	78	438
Jawa Timur	29	9	662	8.503	29	9	664	8.505
Banten	4	4	154	1.535	4	4	155	1.551
Bali	8	1	57	716	8	1	57	716
Nusa Tenggara Barat	8	2	116	1.117	8	2	116	1.146
Nusa Tenggara Timur	20	1	293	2.918	20	1	306	3.213
Kalimantan Barat	12	2	176	1.967	12	2	176	1.982
Kalimantan Tengah	13	1	130	1.528	13	1	136	1.559
Kalimantan Selatan	11	2	151	2.000	11	2	152	2.007
Kalimantan Timur	10	4	146	1.465	10	4	150	1.486
Sulawesi Utara	11	4	159	1.691	11	4	164	1.738
Sulawesi Tengah	10	1	161	1.848	10	1	170	1.922
Sulawesi Selatan	21	3	304	2.982	21	3	306	3.025
Sulawesi Tenggara	10	2	204	2.156	10	2	209	2.215
Gorontalo	5	1	70	723	5	1	77	732
Sulawesi Barat	5	0	69	641	5	0	69	645

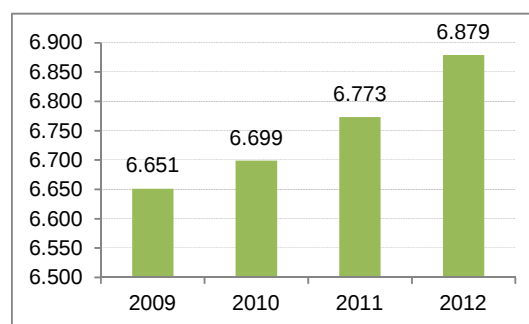
Provinsi	2011				2012			
	Kab	Kota	Kec	Desa	Kab	Kota	Kec	Desa
Maluku	9	2	86	999	9	2	95	1.041
Maluku Utara	7	2	112	1.071	7	2	112	1.077
Papua Barat	10	1	175	1.438	10	1	175	1.442
Papua	28	1	389	3.619	28	1	389	3.619
Indonesia	399	98	6.773	78.558	399	98	6.879	79.702

Sumber : Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri
Statistik Indonesia 2013, BPS RI

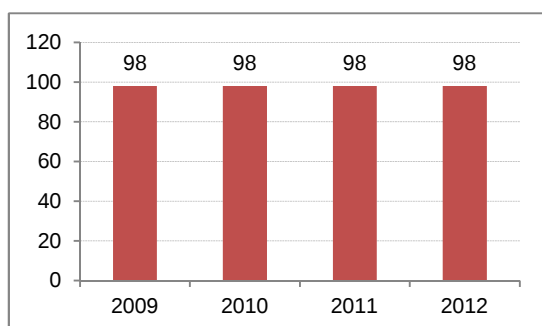
Gambar 2.1.
Jumlah Kabupaten di Indonesia
Tahun 2009–2012



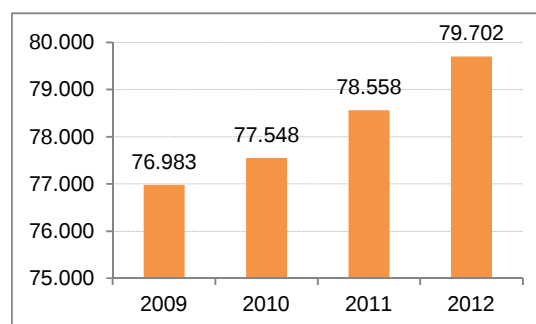
Gambar 2.2.
Jumlah Kecamatan di Indonesia
Tahun 2009–2012



Gambar 2.3.
Jumlah Kota di Indonesia
Tahun 2009–2012



Gambar 2.4.
Jumlah Desa di Indonesia
Tahun 2009–2012



C. Demografi Wilayah

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari beragam suku, bahasa dan agama. Sebagian besar penduduk Indonesia adalah bangsa Melayu yang menempati hampir seluruh wilayah Indonesia di bagian barat dan tengah. Terdapat juga kelompok suku-suku Melanesia, Polinesia dan Mikronesia terutama di Indonesia bagian timur. Selain itu ada pula penduduk pendatang, seperti Tionghoa, India, dan Arab. Penduduk pendatang sebagian besar masuk ke wilayah nusantara melalui jalur perdagangan, kemudian menetap dan menjadi bagian dari penduduk Indonesia.

Berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan tahun 2012, jumlah penduduk Indonesia adalah 251,86 juta jiwa yang terdiri dari 129,56 juta atau 51,44% penduduk laki-laki dan 122,29 juta atau 48,56% penduduk perempuan.

Tabel 2.3.

Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2012

Provinsi	Jumlah Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Aceh	2.541.235	2.473.999	5.015.234
Sumatera Utara	7.691.902	7.535.817	15.227.719
Sumatera Barat	2.845.316	2.772.661	5.617.977
Riau	3.347.886	3.108.436	6.456.322
Jambi	1.825.407	1.706.719	3.532.126
Sumatera Selatan	4.380.993	4.147.726	8.528.719
Bengkulu	1.030.247	966.291	1.996.538
Lampung	4.976.172	4.610.320	9.586.492
Kepulauan Bangka Belitung	697.297	651.902	1.349.199
Kepulauan Riau	977.733	917.857	1.895.590
DKI Jakarta	4.944.914	4.658.503	9.603.417
Jawa Barat	20.888.318	19.021.956	39.910.274
Jawa Tengah	16.873.505	15.704.852	32.578.357
DI Yogyakarta	1.763.015	1.695.014	3.458.029
Jawa Timur	18.927.259	18.342.626	37.269.885

Provinsi	Jumlah Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Banten	5.206.766	4.732.054	9.938.820
Bali	2.129.385	2.098.320	4.227.705
Nusa Tenggara Barat	2.705.029	2.693.544	5.398.573
Nusa Tenggara Timur	2.684.322	2.659.580	5.343.902
Kalimantan Barat	2.681.647	2.511.625	5.193.272
Kalimantan Tengah	1.381.383	1.258.687	2.640.070
Kalimantan Selatan	2.127.184	2.018.659	4.145.843
Kalimantan Timur	2.207.672	1.947.282	4.154.954
Sulawesi Utara	1.343.564	1.273.591	2.617.155
Sulawesi Tengah	1.511.676	1.423.667	2.935.343
Sulawesi Selatan	4.658.314	4.709.793	9.368.107
Sulawesi Tenggara	1.374.791	1.316.832	2.691.623
Gorontalo	578.496	569.032	1.147.528
Sulawesi Barat	811.669	777.493	1.589.162
Maluku	949.405	916.843	1.866.248
Maluku Utara	647.733	610.621	1.258.354
Papua Barat	579.030	512.141	1.091.171
Papua	2.274.198	1.950.034	4.224.232
Indonesia	129.563.463	122.294.477	251.857.940

Sumber: Data Agregat Kependudukan per Kecamatan, Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2012

Salah satu ciri penduduk Indonesia adalah sebaran penduduknya yang tidak merata antar pulau dan provinsi. Sebagian besar penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali, yaitu sebesar 54,39%. Pulau Jawa menjadi salah satu daerah terpadat di dunia dengan jumlah penduduk 132,76 juta jiwa dan kepadatannya mencapai 1.025 jiwa per km². Setelah Pulau Jawa, kemudian Pulau Sumatera 23,51% Sulawesi 8,08%, Kalimantan 6,41%, Nusa Tenggara 4,27%, Papua dan Papua Barat 2,11%, serta Maluku dan Maluku Utara 1,24%.

Tabel 2.4.
Sebaran dan Kepadatan Penduduk Indonesia Menurut Provinsi
Tahun 2012

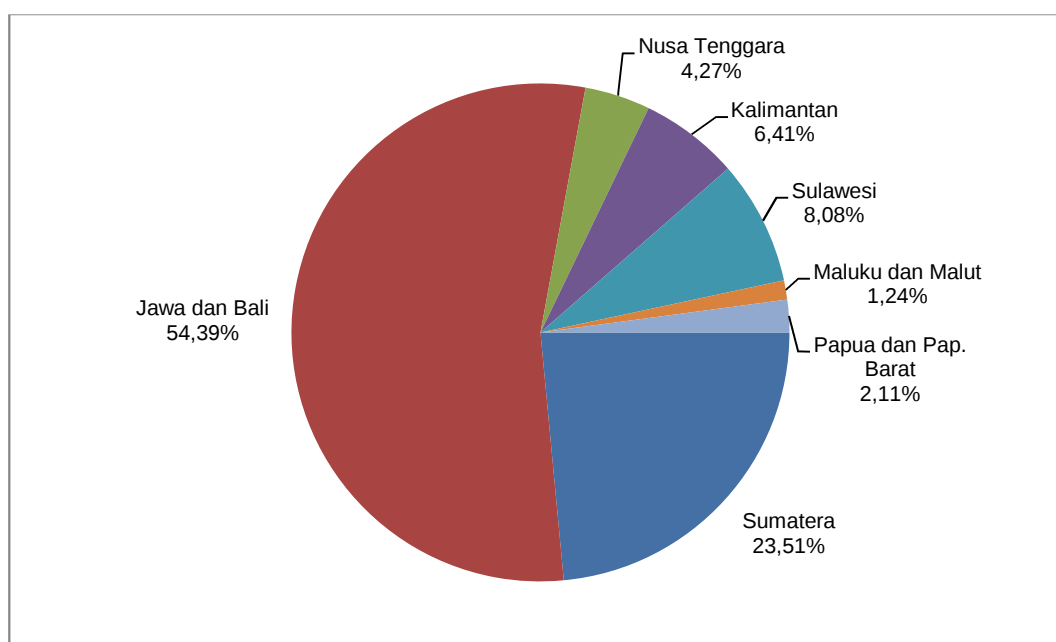
Provinsi	Jumlah	Persentase	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk per km ²
Aceh	5.015.234	1,99	57.956,00	87
Sumatera Utara	15.227.719	6,05	72.981,23	209
Sumatera Barat	5.617.977	2,23	42.012,89	134
Riau	6.456.322	2,56	87.023,66	74
Jambi	3.532.126	1,40	50.058,16	71
Sumatera Selatan	8.528.719	3,39	91.592,43	93
Bengkulu	1.996.538	0,79	19.919,33	100
Lampung	9.586.492	3,81	34.623,80	277
Kepulauan Bangka Belitung	1.349.199	0,54	16.424,06	82
Kepulauan Riau	1.895.590	0,75	8.201,72	231
DKI Jakarta	9.603.417	3,81	664,01	14.463
Jawa Barat	39.910.274	15,85	35.377,76	1.128
Jawa Tengah	32.578.357	12,94	32.800,69	993
DI Yogyakarta	3.458.029	1,37	3.133,15	1.104
Jawa Timur	37.269.885	14,80	47.799,75	780
Banten	9.938.820	3,95	9.662,92	1.029
Bali	4.227.705	1,68	5.780,06	731
Nusa Tenggara Barat	5.398.573	2,14	18.572,32	291
Nusa Tenggara Timur	5.343.902	2,12	48.718,10	110
Kalimantan Barat	5.193.272	2,06	147.307,00	35
Kalimantan Tengah	2.640.070	1,05	153.564,50	17
Kalimantan Selatan	4.145.843	1,65	38.744,23	107
Kalimantan Timur	4.154.954	1,65	204.534,34	20
Sulawesi Utara	2.617.155	1,04	13.851,64	189
Sulawesi Tengah	2.935.343	1,17	61.841,29	47
Sulawesi Selatan	9.368.107	3,72	46.717,48	201
Sulawesi Tenggara	2.691.623	1,07	38.067,70	71
Gorontalo	1.147.528	0,46	11.257,07	102
Sulawesi Barat	1.589.162	0,63	16.787,18	95

Provinsi	Jumlah	Persentase	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk per km ²
Maluku	1.866.248	0,74	46.914,03	40
Maluku Utara	1.258.354	0,50	31.982,50	39
Papua Barat	1.091.171	0,43	97.024,27	11
Papua	4.224.232	1,68	319.036,05	13
Indonesia	251.857.940	100,00	1.910.931,32	132

Sumber : Diolah dari : Data Agregat Kependudukan per Kecamatan, Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2012

Gambar 2.5.

Sebaran Penduduk Indonesia Menurut Pulau Besar Tahun 2012



Badan Pusat Statistik RI melakukan perhitungan proyeksi penduduk untuk memperkirakan jumlah penduduk Indonesia di masa yang akan datang. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian dan perpindahan dari Sensus Penduduk 2010 serta hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Proyeksi penduduk dimaksudkan agar dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang salah satunya adalah perencanaan jangka panjang.

Hasil dari proyeksi penduduk tersebut menunjukkan jumlah penduduk Indonesia meningkat selama kurun dua puluh lima tahun dari 238,5 juta jiwa di tahun 2010 menjadi 305,6 juta jiwa di tahun 2035. Namun demikian, laju pertumbuhan penduduk Indonesia cenderung turun dari 1,38% per tahun di 2010-2015 menjadi 0,62% per tahun di 2030-2035.

Tabel 2.5.

Proyeksi Penduduk Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2010-2035

(dalam ribu jiwa)

Provinsi	Tahun					
	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Aceh	4.523,1	5.002,0	5.459,9	5.870,0	6.227,6	6.541,4
Sumatera Utara	13.028,7	13.937,8	14.703,5	15.311,2	15.763,7	16.073,4
Sumatera Barat	4.865,3	5.196,3	5.498,8	5.757,8	5.968,3	6.130,4
Riau	5.574,9	6.344,4	7.128,3	7.898,5	8.643,3	9.363,0
Jambi	3.107,6	3.402,1	3.677,9	3.926,6	4.142,3	4.322,9
Sumatera Selatan	7.481,6	8.052,3	8.567,9	9.000,4	9.345,2	9.610,7
Bengkulu	1.722,1	1.874,9	2.019,8	2.150,5	2.264,3	2.360,6
Lampung	7.634,0	8.117,3	8.521,2	8.824,6	9.026,2	9.136,1
Kepulauan Bangka Belitung	1.230,2	1.372,8	1.517,6	1.657,5	1.788,9	1.911,0
Kepulauan Riau	1.692,8	1.973,0	2.242,2	2.501,5	2.768,5	3.050,5
DKI Jakarta	9.640,4	10.177,9	10.645,0	11.034,0	11.310,0	11.459,6
Jawa Barat	43.227,1	46.709,6	49.935,7	52.785,7	55.193,8	57.137,3
Jawa Tengah	32.443,9	33.774,1	34.940,1	35.958,6	36.751,7	37.219,4
DI Yogyakarta	3.467,5	3.679,2	3.882,3	4.064,6	4.220,2	4.348,5
Jawa Timur	37.565,8	38.847,6	39.886,3	40.646,1	41.077,3	41.127,7
Banten	10.688,6	11.955,2	13.160,5	14.249,0	15.201,7	16.033,1
Bali	3.907,4	4.152,8	4.380,8	4.586,0	4.765,4	4.912,4
Nusa Tenggara Barat	4.516,1	4.835,6	5.125,6	5.375,6	5.583,8	5.754,2
Nusa Tenggara Timur	4.706,2	5.120,1	5.541,4	5.970,8	6.402,2	6.829,1
Kalimantan Barat	4.411,4	4.789,6	5.134,8	5.432,6	5.679,2	5.878,1
Kalimantan Tengah	2.220,8	2.495,0	2.769,2	3.031,0	3.273,6	3.494,5
Kalimantan Selatan	3.642,6	3.989,8	4.304,0	4.578,3	4.814,2	5.016,3
Kalimantan Timur	3.576,1	4.068,6	4.561,7	5.040,7	5.497,0	5.929,2

Provinsi	Tahun					
	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Sulawesi Utara	2.277,7	2.412,1	2.528,8	2.624,3	2.696,1	2.743,7
Sulawesi Tengah	2.646,0	2.876,7	3.097,0	3.299,5	3.480,6	3.640,8
Sulawesi Selatan	8.060,4	8.520,3	8.928,0	9.265,5	9.521,7	9.696,0
Sulawesi Tenggara	2.243,6	2.499,5	2.755,6	3.003,0	3.237,7	3.458,1
Gorontalo	1.044,8	1.133,2	1.219,6	1.299,7	1.370,2	1.430,1
Sulawesi Barat	1.164,6	1.282,2	1.405,0	1.527,8	1.647,2	1.763,3
Maluku	1.541,9	1.686,5	1.831,9	1.972,7	2.104,2	2.227,8
Maluku Utara	1.043,3	1.162,3	1.278,8	1.391,0	1.499,4	1.603,6
Papua Barat	765,3	871,5	981,8	1.092,2	1.200,1	1.305,0
Papua	2.857,0	3.149,4	3.435,4	3.701,7	3.939,5	4.144,6
Indonesia	238.518,8	255.461,7	271.066,4	284.829,0	296.405,1	305.652,4

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, BPS RI, 2013

Tabel 2.6.

Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2010-2035

Provinsi	Tahun				
	2010-2015	2015-2020	2020-2025	2025-2030	2030-2035
Aceh	2,03	1,77	1,46	1,19	0,99
Sumatera Utara	1,36	1,08	0,81	0,58	0,39
Sumatera Barat	1,33	1,14	0,92	0,72	0,54
Riau	2,62	2,36	2,07	1,82	1,61
Jambi	1,83	1,57	1,32	1,08	0,86
Sumatera Selatan	1,48	1,25	0,99	0,75	0,56
Bengkulu	1,71	1,50	1,26	1,04	0,84
Lampung	1,24	0,98	0,70	0,45	0,24
Kepulauan Bangka Belitung	2,22	2,03	1,78	1,54	1,33
Kepulauan Riau	3,11	2,59	2,21	2,05	1,96
DKI Jakarta	1,09	0,90	0,72	0,50	0,26
Jawa Barat	1,56	1,34	1,12	0,90	0,69
Jawa Tengah	0,81	0,68	0,58	0,44	0,25
DI Yogyakarta	1,19	1,08	0,92	0,75	0,60
Jawa Timur	0,67	0,53	0,38	0,21	0,02

Provinsi	Tahun				
	2010-2015	2015-2020	2020-2025	2025-2030	2030-2035
Banten	2,27	1,94	1,60	1,30	1,07
Bali	1,23	1,07	0,92	0,77	0,61
Nusa Tenggara Barat	1,38	1,17	0,96	0,76	0,60
Nusa Tenggara Timur	1,70	1,59	1,50	1,40	1,30
Kalimantan Barat	1,66	1,40	1,13	0,89	0,69
Kalimantan Tengah	2,36	2,11	1,82	1,55	1,31
Kalimantan Selatan	1,84	1,53	1,24	1,01	0,83
Kalimantan Timur	2,61	2,31	2,02	1,75	1,53
Sulawesi Utara	1,15	0,95	0,74	0,54	0,35
Sulawesi Tengah	1,69	1,49	1,27	1,07	0,90
Sulawesi Selatan	1,12	0,94	0,74	0,55	0,36
Sulawesi Tenggara	2,18	1,97	1,73	1,52	1,33
Gorontalo	1,64	1,48	1,28	1,06	0,86
Sulawesi Barat	1,94	1,85	1,69	1,52	1,37
Maluku	1,81	1,67	1,49	1,30	1,15
Maluku Utara	2,18	1,93	1,70	1,51	1,35
Papua Barat	2,63	2,41	2,15	1,90	1,69
Papua	1,97	1,75	1,50	1,25	1,02
Indonesia	1,38	1,19	1,00	0,80	0,62

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, BPS RI, 2013

D. Ekonomi Wilayah

Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan *output* (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. PDB merupakan nilai akhir dari keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam suatu negara, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara lain yang tinggal di negara tersebut.

Penghitungan nilai PDB dilakukan atas dua dasar harga, yaitu atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Meskipun bukan menjadi tujuan akhir pembangunan di

bidang ekonomi, namun PDB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara. PDB atas dasar harga berlaku yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan dapat digunakan untuk melihat perkembangan struktur ekonomi pada tahun tersebut. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun.

Berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku, kontribusi terbesar terhadap struktur ekonomi masyarakat Indonesia di tahun 2012 berasal dari Sektor Industri Pengolahan, yaitu sebesar 23,97%, kemudian Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan sebesar 14,50 %. Hal ini menunjukkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat Indonesia tidak lagi didominasi oleh sektor agraris, melainkan dari sektor industri. Meskipun demikian, sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan tetap menghasilkan output yang besar dan perlu ditingkatkan mengingat sektor ini berkaitan sangat erat dengan kemandirian bangsa terutama dalam hal ketahanan pangan. Nilai dan persentase PDB atas dasar harga berlaku menurut sektor dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan 2.8 serta Gambar 2.6.

Tabel 2.7.

PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013

(dalam miliar rupiah)

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012*	2013**
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	857.196,80	985.470,50	1.091.447,10	1.193.452,90	1.311.037,30
Pertambangan dan Penggalian	592.060,90	719.710,10	876.983,80	970.823,80	1.020.773,20
Industri Pengolahan	1.477.541,50	1.599.073,10	1.806.140,50	1.972.523,60	2.152.592,90
Listrik, Gas & Air Bersih	46.680,00	49.119,00	55.882,30	62.234,60	70.074,60
Konstruksi	555.192,50	660.890,50	753.554,60	844.090,90	907.267,00
Perdagangan, Hotel dan Restoran	744.513,50	882.487,20	1.023.724,80	1.148.690,60	1.301.506,30
Pengangkutan dan Komunikasi	353.739,70	423.172,20	491.287,00	549.105,40	636.888,40

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012*	2013**
Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	405.162,00	466.563,80	535.152,90	598.523,20	683.009,80
Jasa-jasa	574.116,50	660.365,50	785.014,10	889.994,40	1.000.822,70
PDB	5.606.203,40	6.446.851,90	7.419.187,10	8.229.439,40	9.083.972,20
PDB Tanpa Migas	5.141.414,40	5.941.951,90	6.795.885,60	7.588.322,50	8.416.039,50

Sumber : BPS RI

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.8.

Persentase PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2009-2013

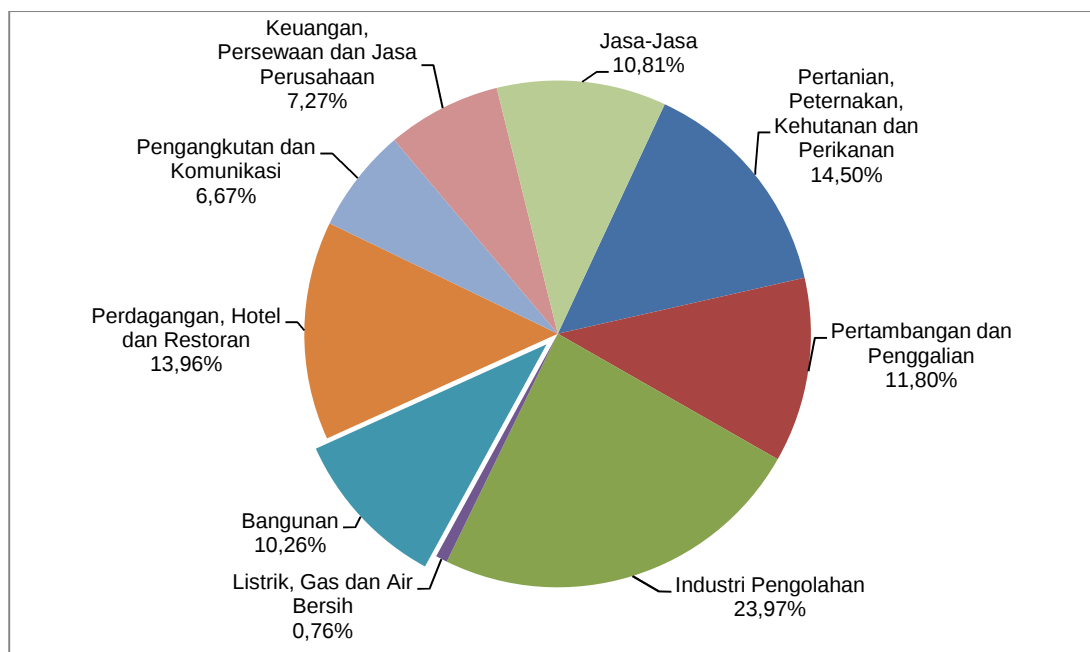
Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012*	2013**
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	15,29	15,29	14,71	14,50	14,43
Pertambangan dan Penggalan	10,56	11,16	11,82	11,80	11,24
Industri Pengolahan	26,36	24,80	24,34	23,97	23,70
Listrik, Gas & Air Bersih	0,83	0,76	0,75	0,76	0,77
Bangunan	9,90	10,25	10,16	10,26	9,99
Perdagangan, Hotel dan Restoran	13,28	13,69	13,80	13,96	14,33
Pengangkutan dan Komunikasi	6,31	6,56	6,62	6,67	7,01
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	7,23	7,24	7,21	7,27	7,52
Jasa-Jasa	10,24	10,24	10,58	10,81	11,02
PDB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PDB Tanpa Migas	91,71	92,17	91,60	92,21	92,65

Sumber : BPS RI

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Gambar 2.6.
Distribusi PDB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012



Dari nilai PDB atas dasar harga konstan di tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 6,26% dan pertumbuhan ekonomi tanpa migas adalah 6,85%. Laju pertumbuhan ini menunjukkan perkembangan agregat pendapatan tahun 2012 terhadap tahun 2011. Setelah pada tahun 2009 sempat berada pada angka 4,63%, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2010 hingga 2012 menunjukkan nilai yang cenderung stabil berada di atas 6% per tahun. Hal ini didukung oleh konsumsi domestik dan investasi swasta yang menjadi pengaman ketahanan ekonomi ketika krisis ekonomi melanda beberapa negara di dunia. Konsumsi domestik yang didukung oleh demografi penduduk menjadi salah satu pendorong investor untuk masuk dan menanamkan investasinya di Indonesia.

Jika dilihat menurut lapangan usaha, maka sektor yang cukup pesat pertumbuhannya pada tahun 2012 adalah Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Sektor Konstruksi dengan masing-masing angka pertumbuhannya sebesar 9,98%, 8,15% dan 7,39%. Laju pertumbuhan PDB atas dasar harga konstan menurut sektor dapat dilihat pada Tabel 2.9 dan 2.10 serta Gambar 2.7 dan 2.8.

Tabel 2.9.

PDB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013

(dalam miliar rupiah)

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012*	2013**
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	295.883,80	304.777,10	315.036,80	328.279,70	339.890,20
Pertambangan dan Penggalian	180.200,50	187.152,50	190.143,20	193.115,70	195.708,50
Industri Pengolahan	570.102,50	597.134,90	633.781,90	670.190,60	707.457,80
Listrik, Gas & Air Bersih	17.136,80	18.050,20	18.899,70	20.080,70	21.201,00
Konstruksi	140.267,80	150.022,40	159.122,90	170.884,80	182.117,90
Perdagangan, Hotel dan Restoran	368.463,00	400.474,90	437.472,90	473.110,60	501.158,40
Pengangkutan dan Komunikasi	192.198,80	217.980,40	241.303,00	265.383,70	292.421,50
Kuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	209.163,00	221.024,20	236.146,60	253.022,70	272.151,90
Jasa-jasa	205.434,20	217.842,20	232.659,10	244.869,90	258.237,90
PDB	2.178.850,40	2.314.458,80	2.464.566,10	2.618.938,40	2.770.345,10
PDB Tanpa Migas	2.036.685,50	2.171.113,50	2.322.653,10	2.481.796,70	2.636.976,00

Sumber : BPS RI

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.10.

Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012*	2013**
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	3,96	3,01	3,37	4,20	3,54
Pertambangan dan Penggalian	4,47	3,86	1,60	1,56	1,34
Industri Pengolahan	2,21	4,74	6,14	5,74	5,56

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012*	2013**
Listrik, Gas & Air Bersih	14,29	5,33	4,71	6,25	5,58
Konstruksi	7,07	6,95	6,07	7,39	6,57
Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,28	8,69	9,24	8,15	5,93
Pengangkutan dan Komunikasi	15,85	13,41	10,70	9,98	10,19
Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	5,21	5,67	6,84	7,15	7,56
Jasa-jasa	6,42	6,04	6,80	5,25	5,46
PDB	4,63	6,22	6,49	6,26	5,78
PDB Tanpa Migas	5,00	6,60	6,98	6,85	6,25

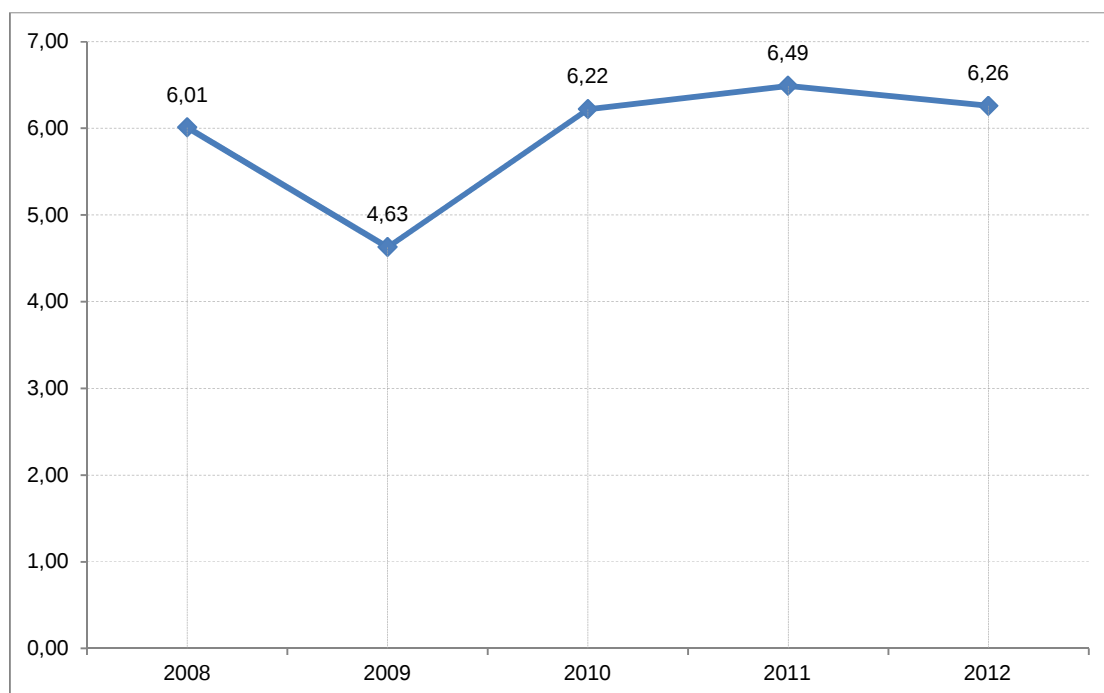
Sumber : BPS RI

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

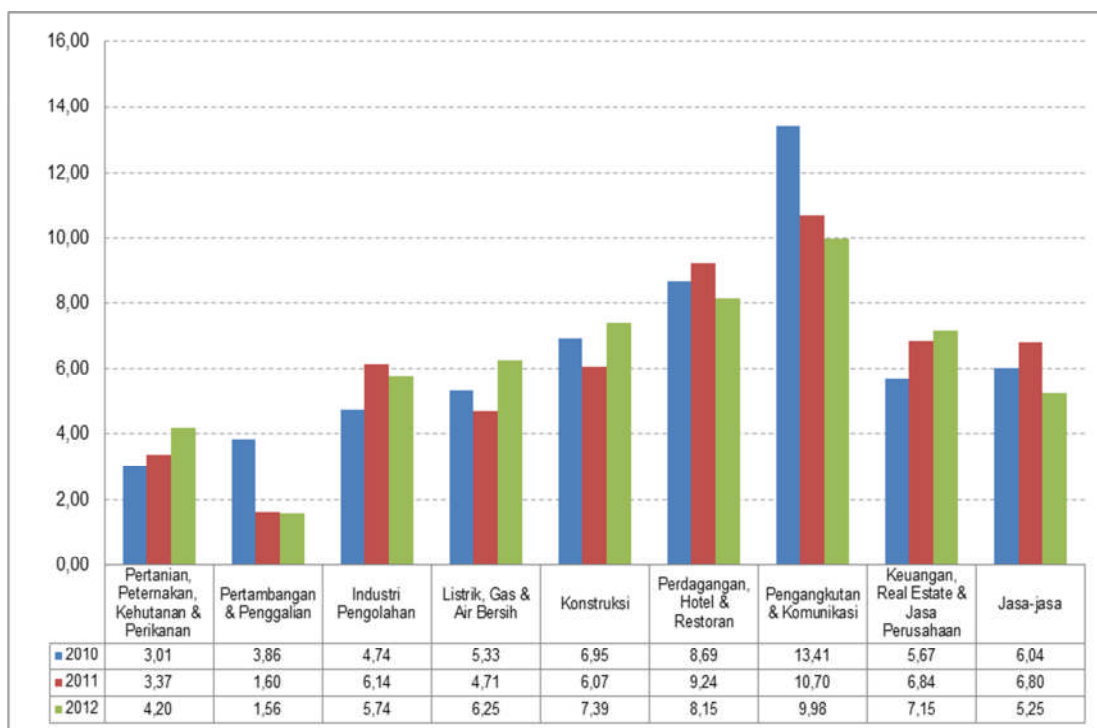
Gambar 2.7.

Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2008-2012



Gambar 2.8.

Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2010-2012



PDRB provinsi menjadi salah satu indikator ekonomi makro yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan dalam lingkup provinsi. Melalui pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

PDRB DKI Jakarta atas dasar harga berlaku di tahun 2012 yang bernilai 1.103.737,6 miliar rupiah merupakan yang tertinggi di antara 33 provinsi di Indonesia. Begitu pula untuk PDRB DKI Jakarta atas dasar harga konstan yang sebesar 449,820,8 miliar rupiah. Sementara PDRB Maluku Utara atas dasar harga berlaku sebesar 6.918,4 miliar rupiah merupakan yang paling kecil.

Tabel 2.11.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi Tahun 2009-2012

(dalam miliar rupiah)

Provinsi	2009	2010	2011*	2012**
Aceh	71.987,0	79.145,3	87.995,0	96.161,1
Sumatera Utara	236.353,6	275.056,5	314.372,4	351.118,2
Sumatera Barat	76.752,9	87.226,6	98.957,3	110.103,9
Riau	297.173,0	345.773,8	413.706,1	469.073,0
Jambi	44.127,0	53.857,7	63.355,3	72.654,2
Sumatera Selatan	137.331,8	157.735,0	182.390,5	206.330,9
Bengkulu	16.385,4	18.600,1	21.269,2	24.173,3
Lampung	88.934,9	108.404,3	127.908,3	144.561,4
Kepulauan Bangka Belitung	22.997,9	26.713,0	30.415,6	34.325,4
Kepulauan Riau	63.892,9	71.614,5	80.237,8	91.716,7
DKI Jakarta	757.696,6	861.992,1	982.521,4	1.103.737,6
Jawa Barat	689.841,3	771.593,9	860.982,0	946.860,8
Jawa Tengah	397.903,9	444.666,0	498.763,8	556.479,9
DI Yogyakarta	41.407,0	45.625,6	51.785,1	57.034,4
Jawa Timur	686.847,6	778.564,2	884.502,6	1.001.720,9
Banten	152.556,2	171.747,6	192.227,5	212.856,6
Bali	60.292,2	67.194,2	74.029,2	83.939,3
Nusa Tenggara Barat	44.014,6	49.631,6	48.824,9	49.529,4
Nusa Tenggara Timur	24.179,4	27.746,3	31.221,5	35.253,4
Kalimantan Barat	54.281,2	60.541,6	66.913,5	75.027,3
Kalimantan Tengah	37.161,8	42.571,1	49.047,5	55.876,3
Kalimantan Selatan	51.460,2	59.823,1	68.186,9	75.923,1
Kalimantan Timur	285.590,8	321.764,4	391.408,5	419.101,6
Sulawesi Utara	33.033,6	36.809,0	41.831,5	47.198,3
Sulawesi Tengah	32.461,3	37.314,4	44.312,2	51.062,1
Sulawesi Selatan	99.954,6	117.862,2	137.389,8	159.427,1
Sulawesi Tenggara	25.655,9	28.376,6	32.113,0	36.600,7
Gorontalo	7.069,1	8.056,5	9.153,7	10.368,1
Sulawesi Barat	9.403,4	10.985,2	12.884,0	14.407,6
Maluku	7.069,6	8.084,8	9.599,1	11.468,8
Maluku Utara	4.691,2	5.389,8	6.038,7	6.918,4

Provinsi	2009	2010	2011*	2012**
Papua Barat	18.144,5	26.873,1	36.178,8	42.759,9
Papua	76.886,7	87.733,4	76.559,1	77.765,0
Jumlah 33 Provinsi	4.653.539,2	5.295.073,6	6.027.081,8	6.731.534,5

Sumber : BPS RI

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.12.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tanpa Migas Menurut Provinsi Tahun 2009-2012

(dalam miliar rupiah)

Provinsi	2009	2010	2011*	2012**
Aceh	58.907,8	66.005,8	73.527,8	81.043,0
Sumatera Utara	234.473,5	272.893,4	312.008,1	348.806,9
Sumatera Barat	76.752,9	87.226,6	98.957,3	110.103,9
Riau	179.037,3	214.655,2	253.466,3	296.432,0
Jambi	36.755,1	45.098,6	52.696,5	61.837,9
Sumatera Selatan	98.907,5	115.327,0	134.949,3	157.328,3
Bengkulu	16.385,4	18.600,1	21.269,2	24.173,3
Lampung	87.949,0	107.165,2	126.436,7	143.031,5
Kepulauan Bangka Belitung	22.434,7	26.107,4	29.778,7	33.676,7
Kepulauan Riau	59.061,7	66.504,9	75.002,3	85.923,5
DKI Jakarta	754.540,8	858.291,0	977.587,1	1.098.555,5
Jawa Barat	658.040,6	738.590,4	824.061,9	908.449,5
Jawa Tengah	347.231,4	390.879,8	441.216,2	497.778,1
DI Yogyakarta	41.407,0	45.625,6	51.785,1	57.034,4
Jawa Timur	684.479,0	775.301,1	880.433,9	997.866,7
Banten	152.556,2	171.747,6	192.227,5	212.856,6
Bali	60.292,2	67.194,2	74.029,2	83.939,3
Nusa Tenggara Barat	44.014,6	49.631,6	48.824,9	49.529,4
Nusa Tenggara Timur	24.179,4	27.746,3	31.221,5	35.253,4
Kalimantan Barat	54.281,2	60.541,6	66.913,5	75.027,3
Kalimantan Tengah	37.161,8	42.571,1	49.047,5	55.876,3

Provinsi	2009	2010	2011*	2012**
Kalimantan Selatan	50.813,7	59.143,8	67.481,9	75.217,5
Kalimantan Timur	155.204,1	190.494,0	242.058,7	272.688,5
Sulawesi Utara	32.993,1	36.767,2	41.785,9	47.141,7
Sulawesi Tengah	31.817,0	36.548,2	43.366,1	50.032,5
Sulawesi Selatan	99.757,7	117.644,0	137.146,1	159.154,3
Sulawesi Tenggara	25.655,9	28.376,6	32.113,0	36.600,7
Gorontalo	7.069,1	8.056,5	9.153,7	10.368,1
Sulawesi Barat	9.403,4	10.985,2	12.884,0	14.407,6
Maluku	7.049,3	8.064,5	9.575,0	11.441,2
Maluku Utara	4.691,2	5.389,8	6.038,7	6.918,4
Papua Barat	12.124,0	14.057,0	16.575,6	18.778,8
Papua	76.886,7	87.733,4	76.559,1	77.765,0
Jumlah 33 Provinsi	4.242.314,4	4.850.964,7	5.510.178,3	6.195.037,6

Sumber : BPS RI

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.13.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Provinsi Tahun 2009-2012

(dalam miliar rupiah)

Provinsi	2009	2010	2011*	2012**
Aceh	32.219,1	33.103,10	34.789,40	36.599,70
Sumatera Utara	111.559,2	118.718,90	126.587,60	134.463,90
Sumatera Barat	36.683,2	38.862,10	41.291,90	43.911,90
Riau	93.786,2	97.735,60	102.666,00	106.308,70
Jambi	16.274,9	17.471,70	18.963,50	20.373,50
Sumatera Selatan	60.452,9	63.859,10	68.008,50	72.094,20
Bengkulu	7.859,9	8.339,70	8.877,80	9.464,30
Lampung	36.256,3	38.389,90	40.858,90	43.505,80
Kepulauan Bangka Belitung	10.270,1	10.884,90	11.587,70	12.251,00
Kepulauan Riau	38.318,8	41.075,90	43.809,80	47.404,70
DKI Jakarta	371.469,5	395.622,40	422.237,20	449.820,80

Provinsi	2009	2010	2011*	2012**
Jawa Barat	303.405,3	322.223,80	343.111,20	364.405,40
Jawa Tengah	176.673,5	186.993,00	198.270,10	210.848,40
DI Yogyakarta	20.064,3	21.044,00	22.131,80	23.309,20
Jawa Timur	320.861,2	342.280,80	366.983,30	393.666,40
Banten	83.453,7	88.552,20	94.206,70	99.999,80
Bali	27.290,9	28.882,50	30.757,80	32.804,40
Nusa Tenggara Barat	18.874,4	20.072,60	19.440,00	19.221,40
Nusa Tenggara Timur	11.920,6	12.546,80	13.253,40	13.971,60
Kalimantan Barat	28.756,9	30.328,70	32.138,40	34.013,60
Kalimantan Tengah	17.657,8	18.805,70	20.078,10	21.420,50
Kalimantan Selatan	29.051,6	30.675,40	32.552,60	34.418,50
Kalimantan Timur	105.564,9	110.953,50	115.475,70	120.067,30
Sulawesi Utara	17.149,6	18.376,80	19.735,50	21.286,60
Sulawesi Tengah	16.207,6	17.624,20	19.236,90	21.019,40
Sulawesi Selatan	47.326,1	51.199,90	55.098,70	59.708,60
Sulawesi Tenggara	10.768,6	11.653,90	12.698,10	14.020,30
Sulawesi Barat	4.239,5	4.743,70	5.233,10	5.704,30
Gorontalo	2.710,7	2.917,50	3.141,50	3.383,60
Maluku	3.993,1	4.251,40	4.509,20	4.861,30
Maluku Utara	2.812,0	3.035,60	3.230,10	3.445,50
Papua Barat	7.287,0	9.361,40	11.896,20	13.781,20
Papua	23.138,4	22.400,10	21.207,80	21.436,20
Jumlah 33 Provinsi	2.094.358,0	2.222.986,90	2.364.064,50	2.512.992,40

Sumber : BPS RI

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.14.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tanpa Migas Menurut Provinsi Tahun 2009-2012

(dalam miliar rupiah)

Provinsi	2009	2010	2011*	2012**
Aceh	27.574,80	29.072,00	30.809,50	32.676,60
Sumatera Utara	110.850,70	117.979,00	125.805,40	133.705,30
Sumatera Barat	36.683,20	38.862,10	41.291,90	43.911,90
Riau	45.391,90	48.644,90	52.420,10	56.517,40
Jambi	14.675,30	15.678,40	16.765,00	18.222,10
Sumatera Selatan	47.029,30	50.315,00	54.386,20	58.701,20
Bengkulu	7.859,90	8.339,70	8.877,80	9.464,30
Lampung	35.855,30	38.014,70	40.463,40	43.111,10
Kepulauan Bangka Belitung	10.100,20	10.714,80	11.414,90	12.079,70
Kepulauan Riau	36.600,80	39.349,80	42.072,10	45.548,50
DKI Jakarta	370.533,50	394.672,70	421.246,20	448.838,50
Jawa Barat	294.324,40	313.190,50	334.457,10	356.309,70
Jawa Tengah	166.176,20	176.187,00	187.244,90	199.838,60
DI Yogyakarta	20.064,30	21.044,00	22.131,80	23.309,20
Jawa Timur	319.531,40	340.613,70	365.151,40	391.888,80
Banten	83.453,70	88.552,20	94.206,70	99.999,80
Bali	27.290,90	28.882,50	30.757,80	32.804,40
Nusa Tenggara Barat	18.874,40	20.072,60	19.440,00	19.221,40
Nusa Tenggara Timur	11.920,60	12.546,80	13.253,40	13.971,60
Kalimantan Barat	28.756,90	30.328,70	32.138,40	34.013,60
Kalimantan Tengah	17.657,80	18.805,70	20.078,10	21.420,50
Kalimantan Selatan	28.578,30	30.205,80	32.101,10	33.986,90
Kalimantan Timur	60.031,00	67.041,30	75.105,30	83.597,20
Sulawesi Utara	17.116,80	18.343,30	19.699,00	21.243,00
Sulawesi Tengah	15.943,30	17.334,40	18.929,40	20.718,00
Sulawesi Selatan	47.225,00	51.091,40	54.983,70	59.591,00
Sulawesi Tenggara	10.768,60	11.653,90	12.698,10	14.020,30
Sulawesi Barat	4.239,50	4.743,70	5.233,10	5.704,30
Gorontalo	2.710,70	2.917,50	3.141,50	3.383,60

Provinsi	2009	2010	2011*	2012**
Maluku	3.980,10	4.237,80	4.494,80	4.846,00
Maluku Utara	2.812,00	3.035,60	3.230,10	3.445,50
Papua Barat	5.446,50	5.910,70	6.514,30	6.996,80
Papua	23.138,40	22.400,10	21.207,80	21.436,20
Jumlah 33 Provinsi	1.953.195,80	2.080.782,40	2.221.750,30	2.374.523,20

Sumber : BPS RI

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Jika dilihat dari laju pertumbuhannya, maka PDRB Papua Barat tahun 2012 menunjukkan pertumbuhan yang paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain, yaitu 15,84% dari tahun sebelumnya. Sementara dari nilai PDRB tanpa migas tahun 2012, maka Kalimantan Timur yang mencatat pertumbuhan tertinggi dengan 11,31% dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.15.

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Provinsi
Tahun 2009-2012

Provinsi	Dengan Migas				Tanpa Migas			
	2009	2010	2011*	2012**	2009	2010	2011*	2012**
Aceh	-5,51	2,74	5,09	5,20	3,97	5,43	5,98	6,06
Sumatera Utara	5,07	6,42	6,63	6,22	5,14	6,43	6,63	6,28
Sumatera Barat	4,28	5,94	6,25	6,35	4,28	5,94	6,25	6,35
Riau	2,97	4,21	5,04	3,55	6,56	7,17	7,76	7,82
Jambi	6,39	7,35	8,54	7,44	6,99	6,84	6,93	8,69
Sumatera Selatan	4,11	5,63	6,50	6,01	5,06	6,99	8,09	7,93
Bengkulu	5,62	6,10	6,45	6,61	5,62	6,10	6,45	6,61
Lampung	5,26	5,88	6,43	6,48	5,52	6,02	6,44	6,54
Kepulauan Bangka Belitung	3,74	5,99	6,46	5,72	3,98	6,08	6,53	5,82
Kepulauan Riau	3,52	7,19	6,66	8,21	3,66	7,51	6,92	8,26
DKI Jakarta	5,02	6,50	6,73	6,53	5,03	6,51	6,73	6,55

Provinsi	Dengan Migas				Tanpa Migas			
	2009	2010	2011*	2012**	2009	2010	2011*	2012**
Jawa Barat	4,19	6,20	6,48	6,21	4,10	6,41	6,79	6,53
Jawa Tengah	5,14	5,84	6,03	6,34	5,66	6,02	6,28	6,73
DI Yogyakarta	4,43	4,88	5,17	5,32	4,43	4,88	5,17	5,32
Jawa Timur	5,01	6,68	7,22	7,27	4,95	6,60	7,20	7,32
Banten	4,71	6,11	6,39	6,15	4,71	6,11	6,39	6,15
Bali	5,33	5,83	6,49	6,65	5,33	5,83	6,49	6,65
Nusa Tenggara Barat	12,14	6,35	-3,15	-1,12	12,14	6,35	-3,15	-1,12
Nusa Tenggara Timur	4,29	5,25	5,63	5,42	4,29	5,25	5,63	5,42
Kalimantan Barat	4,80	5,47	5,97	5,83	4,80	5,47	5,97	5,83
Kalimantan Tengah	5,57	6,50	6,77	6,69	5,57	6,50	6,77	6,69
Kalimantan Selatan	5,29	5,59	6,12	5,73	5,38	5,69	6,27	5,87
Kalimantan Timur	2,28	5,10	4,08	3,98	7,05	11,68	12,03	11,31
Sulawesi Utara	7,85	7,16	7,39	7,86	7,83	7,17	7,39	7,84
Sulawesi Tengah	7,71	8,74	9,15	9,27	8,00	8,72	9,20	9,45
Sulawesi Selatan	6,23	8,19	7,61	8,37	6,23	8,19	7,62	8,38
Sulawesi Tenggara	7,57	8,22	8,96	10,41	7,57	8,22	8,96	10,41
Gorontalo	7,54	7,63	7,68	7,71	7,54	7,63	7,68	7,71
Sulawesi Barat	6,03	11,89	10,32	9,01	6,03	11,89	10,32	9,01
Maluku	5,44	6,47	6,06	7,81	5,44	6,47	6,07	7,81
Maluku Utara	6,07	7,95	6,40	6,67	6,07	7,95	6,40	6,67
Papua Barat	13,87	28,47	27,08	15,84	9,18	8,52	10,21	7,41
Papua	22,22	-3,19	-5,32	1,08	22,22	-3,19	-5,32	1,08
33 Provinsi	4,77	6,14	6,35	6,30	5,33	6,53	6,77	6,88

Sumber : BPS RI

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

E. Alokasi Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum

Pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan mengingat peran dan kontribusinya terhadap pertumbuhan suatu bangsa baik dalam sektor ekonomi, pendidikan,

pertanian, sosial, budaya, keamanan dan sektor-sektor lainnya. Peran aktif pemerintah bersama dengan swasta dan masyarakat amat diperlukan dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Salah satu peran pemerintah dalam memfasilitasi pertumbuhan infrastruktur adalah dengan mengalokasikan anggaran belanja yang besar untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk infrastruktur Pekerjaan Umum.

Selama kurun 5 tahun terakhir (2009 – 2013), tidak kurang dari 270 triliun rupiah atau rata-rata 4,6 persen per tahunnya dari APBN Indonesia dialokasikan untuk penyelenggaraan yang meliputi pembangunan, rehabilitasi serta operasionalisasi infrastruktur Pekerjaan Umum. Infrastruktur yang dimaksud diantaranya adalah jaringan irigasi, bendungan, bendung, rawa, jalan dan jembatan nasional, rusunawa, air bersih, drainase serta sanitasi. Pada Tabel 2.16 di bawah ini ditampilkan perkembangan alokasi dana Kementerian Pekerjaan Umum dalam APBN Nasional sejak tahun 2009 hingga 2014.

Tabel 2.16.
Perkembangan Alokasi APBN untuk Kementerian Pekerjaan Umum
Tahun 2009-2014

(dalam miliar rupiah)

Tahun	APBN Nasional Kementerian Pekerjaan Umum
2009	36.172
2010	37.773
2011	57.961
2012	62.563
2013	77.978
2014	84.148

Sumber : Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum

Sementara alokasi APBN Kementerian Pekerjaan Umum menurut provinsi dan bidang pembangunannya ditampilkan pada Tabel 2.17. – 2.21. berikut ini.

Tabel 2.17.
Perkembangan Alokasi APBN Kementerian Pekerjaan Umum
Menurut Provinsi Tahun 2013-2014

(dalam miliar rupiah)

Provinsi	TA 2013			TA 2014		
	RPM	PLN	Total	RPM	PLN	Total
Aceh	1.603,44	102,05	1.705,49	1.373,21	186,34	1.559,55
Sumatera Utara	2.308,10	489,28	2.797,38	2.222,05	491,08	2.713,13
Sumatera Barat	1.812,48	302,71	2.115,19	1.562,51	211,36	1.773,87
Riau	1.281,55	40,55	1.322,10	1.061,06	36,29	1.097,35
Jambi	1.173,92	51,05	1.224,97	1.235,01	58,21	1.293,22
Sumatera Selatan	1.430,87	380,11	1.810,98	1.375,23	181,00	1.556,23
Bengkulu	764,05	122,76	886,81	682,69	119,09	801,78
Lampung	1.273,38	194,55	1.467,93	1.167,35	177,51	1.344,86
Kepulauan Bangka Belitung	593,78	19,01	612,78	512,56	48,21	560,77
Kepulauan Riau	706,00	13,77	719,77	677,89	17,39	695,28
DKI Jakarta	-	-	-	1.653,45	826,86	2.480,31
Jawa Barat	4.847,55	1.276,69	6.124,24	3.878,39	1.141,86	5.020,25
Jawa Tengah	3.964,49	857,55	4.822,04	3.306,80	1.073,07	4.379,87
DI Yogyakarta	1.186,29	104,60	1.290,89	885,01	275,94	1.160,95
Jawa Timur	1.635,39	290,51	2.925,90	2.544,76	461,54	3.006,30
Banten	892,6	340,42	1.233,02	788,76	260,19	1.048,95
Bali	1.675,25	85,70	1.760,95	1.310,97	19,62	1.330,59
Nusa Tenggara Barat	1.574,18	72,98	1.647,16	2.332,42	141,50	2.473,92
Nusa Tenggara Timur	1.772,68	40,44	1.813,13	2.216,70	155,33	2.372,03
Kalimantan Barat	2.145,90	420,86	2.566,76	1.347,23	387,52	1.734,75
Kalimantan Tengah	1.711,63	2,75	1.714,38	1.709,48	10,65	1.720,13
Kalimantan Selatan	1.270,37	95,09	1.365,46	1.337,59	111,10	1.448,69
Kalimantan Timur	2.900,70	183,95	3.084,64	2.723,48	246,02	2.969,50
Sulawesi Utara	2.099,29	58,05	2.157,34	2.240,57	90,02	2.330,59
Sulawesi Tengah	1.382,80	2,68	1.385,47	1.353,43	23,91	1.377,34
Sulawesi Selatan	1.928,60	366,62	2.295,21	2.288,14	271,99	2.560,13
Sulawesi Tenggara	1.129,98	7,37	1.137,35	1.363,92	46,18	1.410,10
Gorontalo	955,17	40,63	995,80	1.329,11	35,14	1.364,25
Sulawesi Barat	679,14	26,82	705,96	789,57	54,00	843,57

Provinsi	TA 2013			TA 2014		
	RPM	PLN	Total	RPM	PLN	Total
Maluku	1.416,30	15,71	1.432,01	2.398,57	51,06	2.449,63
Maluku Utara	1.104,62	4,72	1.109,35	1.884,82	16,33	1.901,15
Papua Barat	1.968,16	2,05	1.970,20	2.935,27	12,03	2.947,30
Papua	3.940,24	2,00	3.942,23	5.174,23	10,88	5.185,11

Sumber : Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum

Tabel 2.18.

Perkembangan Alokasi APBN Kementerian Pekerjaan Umum
Bidang Sumber Daya Air Menurut Provinsi Tahun 2013-2014

(dalam miliar rupiah)

Provinsi	TA 2013			TA 2014		
	RPM	PLN	Total	RPM	PLN	Total
Aceh	363,84	-	363,84	272,32	-	272,32
Sumatera Utara	450,56	4,94	455,50	427,90	2,73	430,63
Sumatera Barat	509,38	55,95	565,33	285,61	45,32	330,93
Riau	178,38	-	178,38	177,06	-	177,06
Jambi	382,41	7,18	389,59	469,13	8,00	477,13
Sumatera Selatan	429,17	259,35	688,52	437,19	88,40	525,59
Bengkulu	234,68	-	234,68	252,77	-	252,77
Lampung	391,30	12,89	404,19	421,18	81,76	502,94
Kepulauan Bangka Belitung	171,78	-	171,78	167,21	-	167,21
Kepulauan Riau	159,76	-	159,76	120,37	-	120,37
DKI Jakarta	-	-	-	831,72	98,79	930,51
Jawa Barat	2.829,45	486,62	3.316,07	1.512,65	880,52	2.393,17
Jawa Tengah	1.321,68	485,86	1.807,54	1.175,95	467,70	1.643,65
DI Yogyakarta	656,46	25,59	682,05	339,45	181,82	521,27
Jawa Timur	703,50	127,27	830,78	689,50	96,72	786,22
Banten	268,88	261,21	530,09	213,09	201,68	414,77
Bali	518,37	2,00	520,37	367,04	-	367,04
Nusa Tenggara Barat	623,16	20,88	644,04	434,11	14,86	448,97
Nusa Tenggara Timur	522,71	4,89	527,60	474,55	42,00	516,55
Kalimantan Barat	218,28	-	218,28	244,08	-	244,08
Kalimantan Tengah	271,67	-	271,67	264,39	-	264,39

Provinsi	TA 2013			TA 2014		
	RPM	PLN	Total	RPM	PLN	Total
Kalimantan Selatan	221,71	6,50	228,21	168,48	1,50	169,98
Kalimantan Timur	362,57	18,28	380,84	356,90	13,73	370,63
Sulawesi Utara	385,50	36,30	421,80	411,39	40,46	481,85
Sulawesi Tengah	241,84	-	241,84	261,83	-	261,83
Sulawesi Selatan	741,09	118,82	859,90	893,61	46,40	940,01
Sulawesi Tenggara	232,19	1,00	233,19	326,30	-	326,30
Gorontalo	304,53	39,06	343,58	542,52	21,60	564,12
Sulawesi Barat	183,03	20,30	203,33	247,68	16,58	264,26
Maluku	363,13	12,31	375,44	517,34	30,23	547,57
Maluku Utara	216,80	-	216,80	397,00	-	397,00
Papua Barat	353,35	-	353,35	507,67	-	507,67
Papua	372,27	-	372,27	599,01	-	599,01

Sumber : Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum

Catatan : Data Tahun 2014 status 5 Agustus 2014

Tabel 2.19.

Perkembangan Alokasi APBN Kementerian Pekerjaan Umum
Bidang Bina Marga Menurut Provinsi Tahun 2013-2014

(dalam miliar rupiah)

Provinsi	TA 2013			TA 2014		
	RPM	PLN	Total	RPM	PLN	Total
Aceh	1.032,88	35,45	1.068,33	832,39	107,87	940,26
Sumatera Utara	1.663,32	268,17	1.931,48	1.385,29	226,48	1.611,77
Sumatera Barat	1.121,06	187,89	1.308,95	958,68	86,34	1.045,02
Riau	953,46	-	953,46	736,34	-	736,34
Jambi	621,30	13,54	634,84	626,86	-	626,86
Sumatera Selatan	813,57	1,40	814,97	677,26	0,05	677,31
Bengkulu	388,10	92,48	480,58	281,11	39,44	320,55
Lampung	718,18	104,65	822,83	531,54	50,23	581,77
Kepulauan Bangka Belitung	287,60	-	287,60	200,45	-	200,45
Kepulauan Riau	401,91	-	401,91	379,34	-	379,34
DKI Jakarta	-	-	-	671,33	674,80	1.346,13

Provinsi	TA 2013			TA 2014		
	RPM	PLN	Total	RPM	PLN	Total
Jawa Barat	1.682,85	480,00	2.162,85	1.280,64	101,00	1.381,64
Jawa Tengah	1.959,35	84,95	2.044,30	1.589,47	116,05	1.705,52
DI Yogyakarta	364,31	-	364,31	261,04	-	261,04
Jawa Timur	1.215,89	50,70	1.266,59	1.331,16	36,00	1.367,66
Banten	469,96	14,46	484,42	356,22	0,05	356,27
Bali	751,80	-	751,80	489,34	-	489,34
Nusa Tenggara Barat	749,70	0,30	750,00	1.623,79	0,05	1.623,84
Nusa Tenggara Timur	949,33	30,67	980,00	1.489,20	71,61	1.560,81
Kalimantan Barat	1.132,98	400,44	1.533,43	959,72	325,20	1.284,92
Kalimantan Tengah	1.268,62	-	1.268,62	1.254,88	-	1.254,88
Kalimantan Selatan	825,99	71,44	897,43	949,06	20,85	969,91
Kalimantan Timur	2.223,19	159,46	2.382,65	2.137,66	207,05	2.344,71
Sulawesi Utara	1.468,87	5,00	1.473,87	1.517,49	0,05	1.517,54
Sulawesi Tengah	996,42	0,10	996,52	946,84	4,45	951,29
Sulawesi Selatan	893,80	147,04	1.040,83	915,25	83,88	999,13
Sulawesi Tenggara	719,64	-	719,64	725,23	20,72	972,95
Gorontalo	523,59	-	523,59	639,26	-	639,26
Sulawesi Barat	360,66	-	360,66	411,15	-	411,15
Maluku	832,57	-	832,57	1.554,87	-	1.554,87
Maluku Utara	639,92	-	639,92	1.087,81	-	1.087,81
Papua Barat	1.369,30	-	1.369,30	2.197,37	-	2.197,37
Papua	3.293,71	-	3.293,71	4.330,80	-	4.330,80

Sumber : Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum

Tabel 2.20.

Perkembangan Alokasi APBN Kementerian Pekerjaan Umum
Bidang Cipta Karya Menurut Provinsi Tahun 2013-2014

(dalam miliar rupiah)

Provinsi	TA 2013			TA 2014		
	RPM	PLN	Total	RPM	PLN	Total
Aceh	197,43	66,60	264,03	244,17	78,47	322,64
Sumatera Utara	184,01	216,18	400,19	384,58	261,87	645,45
Sumatera Barat	117,18	55,87	236,04	303,78	79,69	383,47

Provinsi	TA 2013			TA 2014		
	RPM	PLN	Total	RPM	PLN	Total
Riau	144,66	40,55	185,21	141,22	36,29	177,52
Jambi	164,92	30,33	195,25	132,38	50,21	182,59
Sumatera Selatan	182,88	119,36	302,24	242,07	92,55	334,62
Bengkulu	137,24	30,28	167,51	143,69	79,64	223,33
Lampung	160,17	77,01	237,18	204,80	45,52	250,32
Kepulauan Bangka Belitung	130,25	19,01	149,26	137,12	48,21	185,33
Kepulauan Riau	138,67	13,77	152,44	170,05	17,39	187,44
DKI Jakarta	-	-	-	115,33	53,27	168,60
Jawa Barat	329,29	310,07	639,36	693,44	160,34	853,78
Jawa Tengah	677,15	286,76	963,81	473,72	489,33	963,06
DI Yogyakarta	160,90	79,02	239,91	248,61	94,12	342,73
Jawa Timur	709,25	112,53	821,78	703,65	328,32	1.031,97
Banten	150,66	64,74	215,40	213,96	58,46	272,42
Bali	380,18	83,70	463,88	382,28	19,62	401,90
Nusa Tenggara Barat	196,14	51,80	247,94	258,17	126,59	384,76
Nusa Tenggara Timur	292,75	4,87	297,63	237,96	41,71	279,67
Kalimantan Barat	785,89	20,42	806,31	129,11	62,32	191,43
Kalimantan Tengah	164,69	2,75	167,45	181,51	10,65	192,15
Kalimantan Selatan	217,08	17,15	234,23	189,64	88,75	278,39
Kalimantan Timur	303,95	6,21	310,16	216,12	25,25	241,37
Sulawesi Utara	236,95	16,75	253,70	298,55	49,50	348,06
Sulawesi Tengah	138,83	2,58	141,40	134,00	19,46	153,46
Sulawesi Selatan	282,96	100,77	383,72	438,57	141,71	580,28
Sulawesi Tenggara	171,20	6,37	177,57	276,07	25,46	301,53
Gorontalo	123,18	1,57	124,75	140,08	13,54	153,62
Sulawesi Barat	132,12	6,52	138,64	124,61	37,42	162,03
Maluku	213,17	3,40	216,58	314,57	20,82	335,39
Maluku Utara	197,18	4,72	201,90	394,05	16,33	410,38
Papua Barat	238,50	2,05	240,54	222,14	12,03	234,17
Papua	263,83	2,00	265,83	214,05	10,87	224,93

Sumber : Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum

Tabel 2.21.

Perkembangan Alokasi APBN Kementerian Pekerjaan Umum
Bidang Penataan Ruang Menurut Provinsi Tahun 2013-2014

(dalam miliar rupiah)

Provinsi	TA 2013			TA 2014		
	RPM	PLN	Total	RPM	PLN	Total
Aceh	9,29	-	9,29	11,70	-	11,70
Sumatera Utara	11,29	-	11,29	10,72	-	10,72
Sumatera Barat	4,87	-	4,87	14,45	-	14,45
Riau	5,05	-	5,05	6,43	-	6,43
Jambi	5,30	-	5,30	6,64	-	6,64
Sumatera Selatan	5,25	-	5,25	6,88	-	6,88
Bengkulu	4,04	-	4,04	5,10	-	5,10
Lampung	3,73	-	3,73	9,83	-	9,83
Kepulauan Bangka Belitung	4,15	-	4,15	7,78	-	7,78
Kepulauan Riau	5,65	-	5,65	8,13	-	8,13
DKI Jakarta	-	-	-	10,01	-	10,01
Jawa Barat	5,96	-	5,96	14,58	-	14,58
Jawa Tengah	6,30	-	6,30	19,61	-	19,61
DI Yogyakarta	4,63	-	4,63	5,74	-	5,74
Jawa Timur	32,71	-	32,71	22,35	-	22,35
Banten	3,10	-	3,10	5,49	-	5,49
Bali	24,90	-	24,90	27,03	-	27,03
Nusa Tenggara Barat	5,18	-	5,18	11,75	-	11,75
Nusa Tenggara Timur	7,90	-	7,90	14,98	-	14,98
Kalimantan Barat	8,75	-	8,75	14,31	-	14,31
Kalimantan Tengah	6,65	-	6,65	8,71	-	8,71
Kalimantan Selatan	5,59	-	5,59	9,84	-	9,84
Kalimantan Timur	10,99	-	10,99	12,81	-	12,81
Sulawesi Utara	7,97	-	7,97	13,13	-	13,13
Sulawesi Tengah	5,71	-	5,71	10,76	-	10,76
Sulawesi Selatan	10,76	-	10,76	7,99	-	7,99
Sulawesi Tenggara	6,95	-	6,95	9,32	-	9,32
Gorontalo	3,88	-	3,88	7,26	-	7,26
Sulawesi Barat	3,33	-	3,33	6,13	-	6,13

Provinsi	TA 2013			TA 2014		
	RPM	PLN	Total	RPM	PLN	Total
Maluku	7,42	-	7,42	11,79	-	11,79
Maluku Utara	5,73	-	5,73	5,96	-	5,96
Papua Barat	7,01	-	7,01	8,09	-	8,09
Papua	10,42	-	10,42	12,62	-	12,62

Sumber : Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum

Selain alokasi APBN, infrastruktur pekerjaan umum di daerah juga berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) yang merupakan alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk dana perimbangan di samping DAU (Dana Alokasi Umum). Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan berdasarkan kriteria umum, khusus serta teknis dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Berikut ini adalah besaran DAK masing-masing provinsi untuk pembangunan infrastruktur pekerjaan umum, terutama jalan, irigasi serta air minum dan sanitasi.

Tabel 2.22.

Perkembangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum
Menurut Provinsi Tahun 2013-2014

(dalam miliar rupiah)

Provinsi	TA 2013					TA 2014			
	Jalan	Irigasi	AMS	Tambahan	Total	Jalan	Irigasi	AMS	Total
Aceh	208,940	89,867	62,992	58,556	420,356	317,199	117,015	93,656	527,870
Sumatera Utara	300,509	71,963	75,117	28,356	475,945	348,389	120,842	84,772	554,003
Sumatera Barat	182,031	96,810	52,791	43,918	375,550	289,143	106,723	80,466	476,333
Riau	117,850	3,615	4,945	-	126,410	153,573	-	2,39	155,967
Jambi	91,540	29,140	20,150	-	140,830	92,880	31,516	20,938	145,334
Sumatera Selatan	98,728	17,553	34,400	35,846	186,526	193,225	69,184	61,425	323,835
Bengkulu	90,047	41,130	23,211	26,394	180,782	136,413	57,481	42,330	236,224

Provinsi	TA 2013					TA 2014			
	Jalan	Irigasi	AMS	Tambah an	Total	Jalan	Irigasi	AMS	Total
Lampung	123,937	54,865	30,664	21,297	230,767	197,349	63,949	49,711	311,009
Kepulauan Bangka Belitung	69,700	22,660	17,750	6,054	116,167	79,859	20,747	19,839	120,444
Kepulauan Riau	51,387	-	6,011	9,980	67,380	82,370	10,030	11,985	104,385
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	132,869	85,321	31,574	11,646	261,411	159,893	112,138	94,369	366,399
Jawa Tengah	216,440	128,118	87,397	-	431,955	246,283	133,523	112,735	492,541
DI Yogyakarta	35,088	27,173	13,054	-	75,315	38,061	22,195	12,296	72,552
Jawa Timur	221,141	126,492	98,657	21,150	435,277	297,172	179,540	140,615	617,326
Banten	30,627	21,173	12,295	9,912	74,000	35,164	35,865	26,237	97,266
Bali	62,611	34,716	18,821	-	116,148	64,676	28,496	16,333	109,505
NTB	85,919	58,407	34,270	35,805	214,403	139,815	85,362	56,488	281,666
NTT	185,358	85,470	55,700	91,337	417,865	343,503	162,048	107,024	612,575
Kalimantan Barat	169,824	62,087	42,413	40,190	314,474	285,607	104,213	67,281	457,101
Kalimantan Tengah	137,381	52,275	19,666	4,711	214,034	155,488	58,655	25,547	239,690
Kalimantan Selatan	81,810	27,328	24,388	12,235	145,761	106,870	72,411	30,143	209,424
Kalimantan Timur	82,071	21,846	15,568	20,537	140,023	94,062	24,104	20,496	138,663
Sulawesi Utara	133,492	38,899	35,930	15,256	223,577	152,272	50,153	42,152	244,578
Sulawesi Tengah	107,489	56,034	25,596	48,306	237,425	162,413	88,619	43,402	294,434
Sulawesi Selatan	220,637	101,445	49,871	-	371,962	241,575	135,302	62,439	439,316
Sulawesi Tenggara	127,352	44,074	28,702	47,272	247,400	196,904	76,566	47,100	320,571
Gorontalo	61,411	22,366	13,291	15,219	112,287	92,272	30,742	19,628	142,643
Sulawesi Barat	61,214	29,594	16,310	25,779	132,897	80,383	44,114	28,039	152,536
Maluku	114,024	30,800	28,113	39,84	212,780	189,029	47,759	43,612	280,400
Maluku Utara	127,815	24,637	-	39,740	203,273	164,215	41,263	38,938	244,417
Papua Barat	137,81	25,4	27,34	46,330	236,873	191,616	40,245	38,672	270,532
Papua	520,805	84,054	121,644	200,724	927,227	778,087	118,159	173,514	1.069,760

Sumber : Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum

Catatan : Data Tahun 2014 status 5 Agustus 2014

BAB III

STATISTIK INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

A. Sumber Air

A.1. Wilayah Sungai dan Daerah Aliran Sungai

Pengelolaan sumber daya air yang dilakukan pemerintah diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi. Salah satu yang menjadi isu strategis dalam pengelolaan sumber daya air adalah isu yang berkaitan dengan sungai. Sejak dulu keberadaan sungai sangat penting perannya bagi manusia. Terlihat dari berkembangnya peradaban manusia di muka bumi, sebagian besar terjadi di sekitar wilayah sungai. Dalam kehidupan yang semakin maju saat ini, manusia tetap harus memelihara serta mengelola sungai sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai keperluan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menjelaskan bahwa **Wilayah Sungai (WS)** adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km². Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa **Daerah Aliran Sungai (DAS)** adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Berdasarkan lokasinya, Wilayah Sungai yang terdiri dari satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil meliputi :

1. Wilayah Sungai Lintas Negara;

2. Wilayah Sungai Lintas Provinsi;
3. Wilayah Sungai Strategis Nasional;
4. Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota; dan
5. Wilayah Sungai dalam Satu Kabupaten/Kota.

Pada Tabel 3.1 sampai dengan Tabel 3.5 di bawah ini ditampilkan daftar wilayah sungai di Indonesia menurut statusnya beserta jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat pada WS tersebut. Jumlah DAS pada WS direkap dari Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012.

Tabel 3.1.
Wilayah Sungai Lintas Negara

Nama Wilayah Sungai (WS)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS)	Lokasi
Benanain	45	NTT - Timor Leste
Noelmina	186	NTT - Timor Leste
Sesayap	19	Kalimantan Timur - Serawak (Malaysia)
Mamberamo - Tami - Apauvar	25	Papua - Papua Nugini
Einlanden - Digul - Bikuma	29	Papua - Papua Nugini

Sumber : Lampiran I.1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai

Tabel 3.2.
Wilayah Sungai Lintas Provinsi

Nama Wilayah Sungai (WS)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
Alas - Singkil	8	Aceh - Sumatera Utara
Batang Natal - Batang Batahan	40	Sumatera Utara - Sumatera Barat
Rokan	15	Sumatera Utara - Riau - Sumatera Barat
Kampar	7	Riau - Sumatera Barat
Indragiri - Akuaman	24	Riau - Sumatera Barat
Batanghari	2	Jambi - Sumatera Barat
Teramang - Muar	15	Bengkulu - Jambi

Nama Wilayah Sungai (WS)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
Nasal - Padang Guci	19	Bengkulu - Sumatera Selatan - Lampung
Musi - Sugihan - Banyuasin - Lema	28	Sumatera Selatan - Jambi - Bengkulu - Lampung
Mesuji - Tulang Bawang	2	Lampung - Sumatera Selatan
Cidanau - Ciujung - Cidurian *	34	Banten - Jawa Barat
Kepulauan Seribu	40	DKI Jakarta - Banten
Ciliwung - Cisadane *	15	DKI Jakarta - Banten - Jawa Barat
Cimanuk - Cisarunggarung	25	Jawa Barat - Jawa Tengah
Citanduy	24	Jawa Barat - Jawa Tengah
Progo - Opak - Serang	3	DI Yogyakarta - Jawa Tengah
Bengawan Solo	96	Jawa Timur - Jawa Tengah
Jelai - Kendawangan	11	Kalimantan Tengah - Kalimantan Barat
Barito	4	Kalimantan Tengah - Kalimantan Selatan
Dumoga - Sangkub	55	Sulawesi Utara - Gorontalo
Limboto - Bolango - Bone	75	Gorontalo - Sulawesi Utara
Randangan	14	Gorontalo - Sulawesi Tengah
Palu - Lariang	52	Sulawesi Tengah - Sulawesi Barat - Sulawesi Selatan
Kalukku - Karama	74	Sulawesi Barat - Sulawesi Selatan - Sulawesi Tengah
Pompengan - Larona	27	Sulawesi Selatan - Sulawesi Utara
Saddang	24	Sulawesi Selatan - Sulawesi Barat
Towari - Lasusua	28	Sulawesi Utara - Sulawesi Selatan
Lasolo - Konawe	25	Sulawesi Utara - Sulawesi Tengah
Omba	73	Papua Barat - Papua

Sumber : Lampiran I.2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai

Catatan : * Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai tersebut dengan tetap menjamin kebutuhan air baku Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tabel 3.3.
Wilayah Sungai Strategis Nasional

Nama Wilayah Sungai (WS)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
Aceh - Meureudu	30	Aceh
Woyla - Bateue	13	Aceh
Jambo Aye	13	Aceh
Belawan - Ular - Padang	11	Sumatera Utara
Toba - Asahan	1	Sumatera Utara
Siak	2	Riau
Kepulauan Batam - Bintan	31	Kepulauan Riau
Bangka	63	Kepulauan Bangka Belitung
Seputih - Sekampung	42	Lampung
Citarum *	19	Jawa Barat
Serayu - Bogowonto	15	Jawa Tengah
Jratunseluna	69	Jawa Tengah
Brantas	220	Jawa Timur
Bali - Penida	391	Bali
Lombok	197	Nusa Tenggara Barat
Sumbawa	555	Nusa Tenggara Barat
Flores	472	Nusa Tenggara Timur
Kapuas	9	Kalimantan Barat
Mentaya - Katingan	2	Kalimantan Tengah
Mahakam	12	Kalimantan Timur
Tondano - Sangihe - Talaud - Miangas	89	Sulawesi Utara
Paguyaman	20	Gorontalo
Parigi - Poso	50	Sulawesi Tengah
Walanae - Cenranae	39	Sulawesi Selatan
Jeneberang	58	Sulawesi Selatan
Halmahera Utara	130	Maluku Utara
Halmahera Selatan	265	Maluku Utara
Ambon - Seram	166	Maluku
Kepulauan Yamdena - Wetar	153	Maluku

Sumber : Lampiran I.3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai

Catatan : * Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai tersebut dengan tetap menjamin kebutuhan air baku Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tabel 3.4.
Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota

Nama Wilayah Sungai (WS)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
Teunom - Lambeuso	14	Aceh
Pase - Peusangan	10	Aceh
Tamiang - Langsa	17	Aceh
Baru - Kluet	21	Aceh
Wampu - Besitang	13	Sumatera Utara
Bah Bolon	5	Sumatera Utara
Nias	43	Sumatera Utara
Sibundong - Batang Toru	16	Sumatera Utara
Barumun - Kualuh	2	Sumatera Utara
Batang Angkola - Batang Gadis	5	Sumatera Utara
Reteh	3	Riau
Bengkalis - Meranti	37	Riau
Masang - Pasaman	8	Sumatera Barat
Silaut - Tarusan	17	Sumatera Barat
Pengabuan - Lagan	5	Jambi
Sebelat - Ketahun - Lais	19	Bengkulu
Bengkulu - Alas - Talo	9	Bengkulu
Belitung	91	Kepulauan Bangka Belitung
Semangka	116	Lampung
Cibaliung - Cisawarna	75	Banten
Ciliman - Cibungur	27	Banten
Cisadea - Cibareno	74	Jawa Barat
Ciwulan - Cilaki	72	Jawa Barat
Pemali - Comal	32	Jawa Tengah
Bodri - Kuto	12	Jawa Tengah
Madura - Bawean	173	Jawa Timur
Welang - Rejoso	36	Jawa Timur
Bondoyudo - Bedadung	47	Jawa Timur
Pekalen - Sampean	56	Jawa Timur
Baru - Bajulmati	60	Jawa Timur
Sumba	130	Nusa Tenggara Timur

Nama Wilayah Sungai (WS)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
Flotim Kepulauan - Lembata - Alor	439	Nusa Tenggara Timur
Sambas	4	Kalimantan Barat
Mempawah	5	Kalimantan Barat
Seruyan	3	Kalimantan Tengah
Kahayan	2	Kalimantan Tengah
Cengal - Batulicin	62	Kalimantan Selatan
Kendilo	9	Kalimantan Timur
Karangan	43	Kalimantan Timur
Berau - Kelai	15	Kalimantan Timur
Kayan	9	Kalimantan Timur
Poigar - Ranoyapo	24	Sulawesi Utara
Lambunu - Buol	99	Sulawesi Tengah
Bongka - Mentawa	109	Sulawesi Tengah
Laa - Tambalako	89	Sulawesi Tengah
Poleang - Roraya	174	Sulawesi Tenggara
Muna	106	Sulawesi Tenggara
Buton	95	Sulawesi Tenggara
Kepulauan Sula - Obi	184	Maluku Utara
Buru	53	Maluku
Kepulauan Kei - Aru	211	Maluku
Kamundan - Sebyar	91	Papua Barat
Wapoga - Mimika	97	Papua

Sumber : Lampiran I.4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai

Tabel 3.5.
Wilayah Sungai dalam Satu Kabupaten/Kota

Nama Wilayah Sungai (WS)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi	Kabupaten /Kota
Simeulue	26	Aceh	Simeuleu
Kubu	8	Riau	Rokan Hilir
Bukit Batu	2	Riau	Bengkalis
Rawa	6	Riau	Siak
Guntung - Kateman	4	Riau	Indragiri Hilir

Nama Wilayah Sungai (WS)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi	Kabupaten /Kota
Kepulauan Karimun	22	Kepulauan Riau	Karimun
Kep. Lingga - Singkep	35	Kepulauan Riau	Lingga
Kep. Natuna - Anambas	29	Kepulauan Riau	Natuna
Siberut - Pagai - Sipora	86	Sumatera Barat	Mentawai
Enggano	10	Bengkulu	Bengkulu Utara
Kepulauan Karimunjawa	20	Jawa Tengah	Jepara
Wiso - Gelis	27	Jawa Tengah	Jepara
Pawan	6	Kalimantan Barat	Ketapang
Pulau Laut	41	Kalimantan Selatan	Kota Baru
Kepulauan Banggai	185	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan

Sumber : Lampiran I.5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai

A.2. Danau/Situ

Danau merupakan cekungan pada permukaan bumi yang berisi air serta ekosistem yang terbentuk secara alamiah termasuk situ dan wadah air sejenis dengan sebutan istilah lokal. Situ atau danau buatan berfungsi sebagai daerah resapan air, pemasok cadangan air tanah, pendingin suhu udara kota, pengendalian banjir, wisata olahraga air (perahu dayung, kano, memancing), habitat satwa liar, media budidaya ikan dan penambah keindahan kota. Hal ini menunjukkan pentingnya keberadaan situ atau danau karena memiliki nilai ekologi, ekonomi, edukatif, serta estetika.

Dalam Konferensi Nasional Danau Indonesia II yang diselenggarakan pada tahun 2011 di Semarang, ditegaskan kembali prioritas penanganan 15 danau di Indonesia yang telah ditetapkan pada konferensi sebelumnya di Bali. Lima belas danau tersebut dipilih berdasarkan parahnya tingkat kerusakan dan besarnya dampak terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Danau-danau kritis tersebut adalah Danau Toba (Sumatera Utara), Danau Maninjau dan Danau Singkarak (Sumatera Barat), Danau Kerinci (Jambi), Rawa Danau (Banten), Danau Rawa Pening (Jawa Tengah), Danau Batur (Bali), Danau Tempe dan Danau Matana (Sulawesi Selatan), Danau Poso (Sulawesi Tengah), Danau Tondano (Sulawesi Utara), Danau Limboto (Gorontalo),

Danau Sentarum (Kalimantan Barat), Danau Cascade Mahakam-Semayang, Danau Melintang dan Danau Jempang (Kalimantan Timur), serta Danau Sentani (Papua).

Pada Tabel 3.6. berikut ini disajikan data jumlah danau menurut provinsi di Indonesia. Indonesia memiliki begitu banyak danau yang menunjukkan besarnya potensi yang dimiliki dalam bidang sumber daya air. Dibutuhkan kesadaran untuk melestarikan danau dan lingkungan hidup dalam pengelolaan danau yang berkelanjutan untuk menghindari bencana yang tidak diinginkan akibat rusaknya ekosistem danau.

Tabel 3.6.
Danau/Situ di Indonesia Menurut Provinsi

Provinsi	Jumlah Danau/Situ	Luas (km ²)	Volume Tampung (juta m ³)
Aceh	8	5.798,00	242.000,00
Sumatera Utara	91	732,00	3.291.500,00
Sumatera Barat	58	398,11	5.569.356,00
Riau	32	137,00	
Jambi	14	5.000,00	
Sumatera Selatan	17	21.432,00	262,00
Bengkulu	7	309,00	2.100.000,00
Lampung	44	97,00	5.884.790,00
Kepulauan Bangka Belitung	546	28,01	72,01
Kepulauan Riau			
DKI Jakarta	45	25,00	
Jawa Barat	127	3.226,60	
Jawa Tengah	34		1,70
DI Yogyakarta	131	1,20	7,04
Jawa Timur	12		
Banten	78	21.163,73	2.902,00
Bali	17	25,72	1.024,35
Nusa Tenggara Barat	11	30,65	25,00
Nusa Tenggara Timur	60	26,00	995.612,00
Kalimantan Barat	55	305,80	
Kalimantan Tengah	46	195,43	

Provinsi	Jumlah Danau/Situ	Luas (km ²)	Volume Tampung (juta m ³)
Kalimantan Selatan	3		
Kalimantan Timur	23	59.250,00	1.300,00
Sulawesi Utara	35	5,00	100.000,00
Sulawesi Tengah	38	426,85	
Sulawesi Selatan	16	881,71	40.424,90
Sulawesi Tenggara	14	244,00	748.957,00
Gorontalo	1		
Sulawesi Barat			
Maluku	3		
Maluku Utara	1		
Papua Barat			
Papua	27	2.449,78	0,00

Sumber : SISDA Sumber Daya Air (Juli 2013)

B. Bangunan Air

B.1. Bendungan/Waduk

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan dijelaskan bahwa **bendungan** adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*) atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Sementara **waduk** adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.

Tujuan dibangunnya bendungan antara lain untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air, pengawetan air, pengendali daya rusak air, dan fungsi pengamanan tampungan limbah tambang (*tailing*) atau tampungan lumpur dalam rangka menjaga keamanan serta keselamatan lingkungan hidup. Secara umum, ada dua manfaat dibangunnya bendungan, yaitu *single purpose dam* dan *multi purpose dam*. *Single purpose dam* adalah ketika bendungan dibuat hanya untuk satu tujuan khusus seperti penyediaan air irigasi atau untuk pengendalian banjir. Sedangkan *multi purpose dam* seperti salah satunya adalah bendungan Jatiluhur, dibangun dengan desain untuk

berbagai keperluan seperti irigasi, air baku atau air minum dan juga untuk pembangkit listrik serta pengembangan lokasi kawasan wisata. Ketersediaan air pada suatu bendungan merupakan faktor penentu yang manfaatnya sangat vital bagi masyarakat, terutama sebagai penyedia air irigasi di masa musim tanam ketika tidak sedang musim hujan serta penjamin ketersediaan air baku.

Yang menjadi pemilik bendungan adalah Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau badan usaha yang bertanggung jawab atas pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya. Pada Tabel 3.7. di bawah ini disajikan data rekapitulasi jumlah bendungan besar milik PU yang sesuai dengan kriteria dalam PP No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan beserta volume efektif dan manfaatnya menurut provinsi di Indonesia.

Tabel 3.7.

Rekapitulasi Bendungan di Indonesia Milik PU Menurut Provinsi
(Kriteria menurut PP Nomor 37 Tahun 2010)

Provinsi	Jumlah	Volume Efektif (10 ³ m ³)	Luas Genangan (10 ³ m ²)	Manfaat		
				Irigasi (ha)	PLTA (MW)	Air Baku (m ³ /dtk)
Aceh	2	141.790,00	2.654,50	5.640,50	0,00	0,00
Sumatera Utara	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sumatera Barat	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riau	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jambi	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sumatera Selatan	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bengkulu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lampung	3	597.250,00	25.161,00	0,00	28,00	0,00
Kepulauan Bangka Belitung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kepulauan Riau	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DKI Jakarta	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jawa Barat	23	2.634.268,73	93.823,00	6.445,00	150,00	0,00
Jawa Tengah	44	1.698.426,36	1.958.438,00	116.218,00	53,40	6,61

Provinsi	Jumlah	Volume Efektif (10 ³ m ³)	Luas Genangan (10 ³ m ²)	Manfaat		
				Irigasi (ha)	PLTA (MW)	Air Baku (m ³ /dtk)
DI Yogyakarta	2	25.000,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
Jawa Timur	97	760.564,52	60.420,45	89.595,00	519,75	36,00
Banten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bali	5	15.051,00	3.450,00	4.370,00	0,00	1.320,00
Nusa Tenggara Barat	51	252.774,50	21.444,61	24.479,00	1,11	0,00
Nusa Tenggara Timur	19	85.706,67	813,00	2.220,00	0,00	0,00
Kalimantan Barat	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalimantan Tengah	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalimantan Selatan	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalimantan Timur	5	58.116,00	306,35	1.000,00	0,00	0,53
Sulawesi Utara	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sulawesi Tengah	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sulawesi Selatan	4	125.800,00	34.142,00	0,00	24,15	0,00
Sulawesi Tenggara	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gorontalo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sulawesi Barat	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maluku	2	775,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Maluku Utara	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Papua Barat	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Papua	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	257	6.395.522,77	1.964.958,00	246.710,00	776,41	1.363,14

Sumber : Subdit Data dan Informasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU

B.2. Bendung

Bendung adalah suatu bangunan air dengan kelengkapannya yang dibangun melintang sungai atau sudetan yang sengaja dibuat untuk meninggikan taraf muka air atau untuk mendapatkan tinggi terjun, sehingga air sungai dapat disadap dan dialirkan secara gravitasi atau dengan pompa ke tempat tertentu yang membutuhkannya dan/atau untuk mengendalikan dasar sungai, debit dan angkutan sedimen (SNI 03-2401-1991).

Fungsi utama dari bendung adalah untuk meninggikan elevasi muka air dari sungai yang dibendung sehingga air bisa disadap dan dialirkan ke saluran lewat bangunan pengambilan (*intake structure*). Bendung juga berfungsi sebagai alat pengendali dan pemonitor seluruh tata pengaturan air dan sebagai antisipasi bencana banjir.

Berdasarkan konstruksinya, terdapat dua tipe bendung, yaitu bendung sederhana dan bendung permanen. Terdapat dua jenis bendung permanen, yaitu bendung tetap dan bendung gerak. Bendung tetap adalah bendung yang terdiri dari ambang tetap, sehingga muka air banjir tak dapat diatur elevasinya. Bendung gerak adalah bendung yang terdiri dari ambang tetap dilengkapi pintu bendung yang dapat digerakkan untuk mengatur muka air di bagian hulu, sehingga air sungai dapat disadap sesuai dengan kebutuhan dan muka air banjir dapat diatur. Kemudian berdasarkan bentuk alat pengaturnya, bendung gerak terbagi menjadi *sluice gate*, *radial gate*, dan bendung karet. Alat pengatur dari bendung karet dapat dikembangkan-kempiskan sesuai kebutuhan dengan menambah atau mengurangi isinya.

Tabel 3.8.

Bendung di Indonesia Menurut Provinsi

Provinsi	Jumlah Bendung	Layanan/Manfaat Irigasi (ha)
Aceh	46	214.542
Sumatera Utara	46	101.942
Sumatera Barat	63	146.346
Riau	22	15.587
Jambi	28	46.574
Sumatera Selatan	17	128.217
Bengkulu	41	63.916
Lampung	34	118.362
Kepulauan Bangka Belitung	17	14.044
Kepulauan Riau	2	700
DKI Jakarta	8	
Jawa Barat	83	415.961
Jawa Tengah	230	9.445.286

Provinsi	Jumlah Bendung	Layanan/Manfaat Irigasi (ha)
DI Yogyakarta	9	21.792
Jawa Timur	133	4.232.018
Banten	52	111.325
Bali	36	10.601.454
Nusa Tenggara Barat	49	73.509
Nusa Tenggara Timur	3	15.722
Kalimantan Barat	66	31.941
Kalimantan Tengah	16	12.305
Kalimantan Selatan	47	63.770
Kalimantan Timur	27	36.472
Sulawesi Utara	46	43.625
Sulawesi Tengah	74	101.635
Sulawesi Selatan	103	288.976
Sulawesi Tenggara	61	40.683
Gorontalo	36	49.984
Sulawesi Barat	18	29.333
Maluku	14	25.109
Maluku Utara	11	14.763
Papua Barat	3	4.300
Papua	5	12.000

Sumber : SIGI PU

B.3. Embung dan Embung Potensi

Salah satu upaya untuk menanggulangi kekurangan air ketika musim kemarau adalah memanfaatkan limpahan air hujan dengan membangun embung (*onfarm reservoir*). **Embung** merupakan bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan dan air limpahan atau air rembesan. Embung akan menyimpan air di musim hujan, kemudian airnya dapat dimanfaatkan pada musim kemarau atau saat kekurangan air. Sementara embung potensi adalah titik-titik yang memungkinkan bagi pembangunan embung atau bangunan konservasi air buatan.

Selain berfungsi sebagai media konservasi air, embung juga bisa menjadi habitat bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan, kemudian sebagai pengatur fungsi hidrolis, dan

menjaga sistem serta proses-proses alami karena secara tidak langsung berperan sebagai penghasil oksigen melalui proses fotosintesa oleh berbagai jenis fitoplankton yang hidup di dalamnya.

Pada Tabel 3.9. dan 3.10. berikut ini ditampilkan jumlah embung dan embung potensi di Indonesia menurut provinsi. Tidak menutup kemungkinan jika kedepannya embung serta embung potensi dikembangkan menjadi media konservasi air layaknya bendungan atau waduk.

Tabel 3.9.
Embung di Indonesia Menurut Provinsi

Provinsi	Jumlah Embung	Kapasitas (m3)
Aceh	19	1,60
Sumatera Utara		
Sumatera Barat	26	
Riau		
Jambi		
Sumatera Selatan		
Bengkulu		
Lampung	47	6.287.541,60
Kepulauan Bangka Belitung	1	724.500,00
Kepulauan Riau		
DKI Jakarta		
Jawa Barat		
Jawa Tengah	260	4.600,00
DI Yogyakarta	13	597.624,75
Jawa Timur	2	2.150,00
Banten		
Bali	1	
Nusa Tenggara Barat	129	110,00
Nusa Tenggara Timur	311	499.471,00
Kalimantan Barat		
Kalimantan Tengah		

Provinsi	Jumlah Embung	Kapasitas (m3)
Kalimantan Selatan		
Kalimantan Timur		
Sulawesi Utara		
Sulawesi Tengah		
Sulawesi Selatan	57	7.308.687,00
Sulawesi Tenggara	19	3.632.692,00
Gorontalo		
Sulawesi Barat		
Maluku	34	219.611.295,00
Maluku Utara		
Papua Barat		
Papua	19	857.042,00

Sumber : SISDA Sumber Daya Air (Juli 2013)

Tabel 3.10.
Embung Potensi di Indonesia Menurut Provinsi

Provinsi	Jumlah Embung Potensi	Kapasitas (m ³)	Layanan Irigasi (ha)
Aceh	0	0,00	0,00
Sumatera Utara	62	4.865.000,00	11.483,00
Sumatera Barat	0	0,00	0,00
Riau	6	1.976.125,00	0,00
Jambi	0	0,00	0,00
Sumatera Selatan	0	0,00	0,00
Bengkulu	0	0,00	0,00
Lampung	30	6.135.419,00	435,00
Kepulauan Bangka Belitung	0	0,00	0,00
Kepulauan Riau	0	0,00	0,00
DKI Jakarta	0	0,00	0,00
Jawa Barat	0	0,00	0,00
Jawa Tengah	55	25.757.500,00	8.393,00
DI Yogyakarta	32	506.461,50	0,00
Jawa Timur	231	71.766.764,00	14.181,00

Provinsi	Jumlah Embung Potensi	Kapasitas (m ³)	Layanan Irigasi (ha)
Banten	0	0,00	0,00
Bali	29	3.134.093,00	16.793,00
Nusa Tenggara Barat	408	47.097.820,37	32.494,76
Nusa Tenggara Timur	161	31.127.981,31	4.885,44
Kalimantan Barat	0	0,00	0,00
Kalimantan Tengah	0	0,00	0,00
Kalimantan Selatan	0	0,00	0,00
Kalimantan Timur	0	0,00	0,00
Sulawesi Utara	0	0,00	0,00
Sulawesi Tengah	17	1.560.000,00	1.835,00
Sulawesi Selatan	73	11.027.100,00	22.751,00
Sulawesi Tenggara	10	9.230.390,00	1.820,00
Gorontalo	0	0,00	0,00
Sulawesi Barat	0	0,00	0,00
Maluku	13	1.039.880,00	100,00
Maluku Utara	0	0,00	0,00
Papua Barat	0	0,00	0,00
Papua	16	228.412,86	262,98

Sumber : SISDA Sumber Daya Air (Juli 2013)

C. Daerah Irigasi

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi menjelaskan bahwa **Irigasi** adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa **Daerah Irigasi (DI)** adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Jaringan irigasi terdiri dari saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan dalam penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Dengan adanya alih fungsi lahan irigasi, pemekaran wilayah, dan pengembangan jaringan irigasi, perlu dilakukan penetapan kembali status daerah irigasi sesuai

dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Penetapan status daerah irigasi dimaksudkan untuk menegaskan Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Berdasarkan letaknya, daerah irigasi terdiri dari :

1. Daerah irigasi lintas negara merupakan daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada pada lebih dari satu negara.
2. Daerah irigasi lintas provinsi merupakan daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada pada lebih dari satu wilayah provinsi, tetapi masih dalam satu negara.
3. Daerah irigasi lintas kabupaten/kota merupakan daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada pada lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, tetapi masih dalam satu wilayah provinsi.
4. Daerah irigasi yang terletak utuh pada satu kabupaten/kota merupakan daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang seluruh bangunan dan saluran serta luasannya berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Daerah Irigasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri adalah Daerah Irigasi yang sudah dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang jenisnya meliputi :

- a. irigasi permukaan;
- b. irigasi rawa;
- c. irigasi air bawah tanah;
- d. irigasi pompa; dan
- e. irigasi tambak.

Pada Tabel 3.11a. dan Tabel 3.11b. di bawah ini ditampilkan luasan daerah irigasi berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaannya berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 293/KPTS/M/2014 Tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah ada sebanyak 406 DI dengan luas 3.142.532 ha atau 34,40% dari luas DI seluruh kewenangan; kewenangan Pemerintah Provinsi sebanyak 1.296 DI dengan luas 1.634.467 ha atau 17,89%; dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 54.589 DI dengan luas 4.359.028 ha atau 47,71%.

Tabel 3.11a.

Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah

Provinsi	Irigasi Permukaan		Irigasi Air Tanah		Irigasi Pompa	
	DI	Ha	DI	Ha	DI	Ha
Aceh	12	101.622	-	-	-	-
Sumatera Utara	11	64.211	-	-	-	-
Sumatera Barat	11	76.471	-	-	-	-
Riau	2	6.054	-	-	-	-
Jambi	3	10.629	-	-	-	-
Sumatera Selatan	7	89.445	-	-	-	-
Bengkulu	6	33.649	-	-	-	-
Lampung	14	185.333	-	-	-	-
Kepulauan Bangka Belitung	2	7.418	-	-	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	20	405.510	-	-	-	-
Jawa Tengah	33	347.674	-	-	-	-
DI Yogyakarta	3	12.460	-	-	-	-
Jawa Timur	32	289.508	-	-	-	-
Banten	5	62.209	-	-	-	-
Bali	9	42.589	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	16	70.874	-	-	-	-

Provinsi	Irigasi Permukaan		Irigasi Air Tanah		Irigasi Pompa	
	DI	Ha	DI	Ha	DI	Ha
Nusa Tenggara Timur	26	106.689	-	-	-	-
Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Tengah	1	3.794	-	-	-	-
Kalimantan Selatan	8	36.264	-	-	1	5.987
Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	4	20.602	-	-	-	-
Sulawesi Tengah	6	30.309	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	25	243.315	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	7	43.974	-	-	-	-
Gorontalo	3	13.188	-	-	-	-
Sulawesi Barat	2	13.251	-	-	-	-
Maluku	7	27.483	-	-	-	-
Maluku Utara	2	7.730	-	-	-	-
Papua Barat	3	9.666	-	-	-	-
Papua	3	14.600	-	-	5	30.740
Jumlah	283	2.376.521	0	0	6	36.727

Tabel 3.11b.

Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah (lanjutan)

Provinsi	Irigasi Rawa		Irigasi Tambak		Total	
	DI	Ha	DI	Ha	DI	Ha
Aceh	-	-	1	7.000	13	108.622
Sumatera Utara	6	37.611	-	-	17	101.822
Sumatera Barat	2	8.500	-	-	13	84.971
Riau	12	41.898	-	-	14	47.952
Jambi	2	7.342	-	-	5	17.971
Sumatera Selatan	22	237.133	-	-	29	326.578
Bengkulu	-	-	-	-	6	33.649
Lampung	4	48.372	-	-	18	233.705
Kepulauan Bangka Belitung	5	15.923	-	-	7	23.341

Provinsi	Irigasi Rawa		Irigasi Tambak		Total	
	DI	Ha	DI	Ha	DI	Ha
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	-	-	-	-	20	405.510
Jawa Tengah	-	-	-	-	33	347.674
DI Yogyakarta	-	-	-	-	3	12.460
Jawa Timur	-	-	1	3.322	33	292.830
Banten	-	-	-	-	5	62.209
Bali	-	-	-	-	9	42.589
Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	16	70.874
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	26	106.689
Kalimantan Barat	17	68.483	-	-	17	68.483
Kalimantan Tengah	19	143.988	-	-	20	147.782
Kalimantan Selatan	14	60.347	-	-	23	102.598
Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Utara	3	15.616	-	-	3	15.616
Sulawesi Utara	-	-	-	-	4	20.602
Sulawesi Tengah	2	11.500	-	-	8	41.809
Sulawesi Selatan	-	-	-	-	25	243.315
Sulawesi Tenggara	2	6.649	5	15.600	14	66.223
Gorontalo	-	-	-	-	3	13.188
Sulawesi Barat	-	-	-	-	2	13.251
Maluku	-	-	-	-	7	27.483
Maluku Utara	-	-	-	-	2	7.730
Papua Barat	-	-	-	-	3	9.666
Papua	-	-	-	-	8	45.340
Jumlah	110	703.362	7	25.922	406	3.142.532

Sumber : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No : 293/KPTS/M/2014 Tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 3.12a.
Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi

Provinsi	Irigasi Permukaan		Irigasi Air Tanah		Irigasi Pompa	
	DI	Ha	DI	Ha	DI	Ha
Aceh	38	65.409	-	-	-	-
Sumatera Utara	76	86.999	-	-	-	-
Sumatera Barat	65	65.007	-	-	-	-
Riau	8	10.035	-	-	-	-
Jambi	4	6.029	-	-	-	-
Sumatera Selatan	28	41.541	-	-	-	-
Bengkulu	10	12.288	-	-	-	-
Lampung	19	21.045	-	-	-	-
Kepulauan Bangka Belitung	3	3.350	-	-	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	97	93.736	-	-	-	-
Jawa Tengah	108	86.865	-	-	-	-
DI Yogyakarta	41	13.987	-	-	-	-
Jawa Timur	176	164.823	-	-	2	2.305
Banten	21	29.221	-	-	-	-
Bali	14	9.271	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	35	58.105	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	42	60.328	-	-	-	-
Kalimantan Barat	12	6.765	-	-	-	-
Kalimantan Tengah	2	3.000	-	-	-	-
Kalimantan Selatan	6	8.170	-	-	-	-
Kalimantan Timur	8	12.060	-	-	-	-
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	12	18.302	-	-	-	-
Sulawesi Tengah	30	47.640	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	38	58.858	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	12	14.445	-	-	-	-
Gorontalo	7	9.868	-	-	-	-
Sulawesi Barat	11	19.114	-	-	-	-

Provinsi	Irigasi Permukaan		Irigasi Air Tanah		Irigasi Pompa	
	DI	Ha	DI	Ha	DI	Ha
Maluku	18	22.570	-	-	-	-
Maluku Utara	29	37.209	-	-	-	-
Papua Barat	11	15.010	-	-	-	-
Papua	3	4.425	-	-	-	-
Jumlah	984	1.105.474	0	0	2	2.305

Tabel 3.12b.

Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi *(lanjutan)*

Provinsi	Irigasi Rawa		Irigasi Tambak		Total	
	DI	Ha	DI	Ha	DI	Ha
Aceh	3	5.724	6	7.335	47	78.468
Sumatera Utara	14	26.846	-	-	90	113.845
Sumatera Barat	3	5.700	-	-	68	70.707
Riau	50	106.936	-	-	58	116.971
Jambi	10	13.039	-	-	14	19.068
Sumatera Selatan	27	49.509	-	-	55	91.050
Bengkulu	3	3.995	-	-	13	16.283
Lampung	1	2.578	-	-	20	23.623
Kepulauan Bangka Belitung	7	12.144	-	-	10	15.494
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	-	-	6	6.864	103	100.600
Jawa Tengah	-	-	-	-	108	86.865
DI Yogyakarta	-	-	-	-	41	13.987
Jawa Timur	-	-	5	6.959	183	174.087
Banten	-	-	1	1.635	22	30.856
Bali	-	-	-	-	14	9.271
Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	35	58.105
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	42	60.328
Kalimantan Barat	35	54.521	1	1.350	48	62.636
Kalimantan Tengah	20	32.753	-	-	22	35.753
Kalimantan Selatan	34	48.833	-	-	40	57.003

Provinsi	Irigasi Rawa		Irigasi Tambak		Total	
	DI	Ha	DI	Ha	DI	Ha
Kalimantan Timur	14	23.000	-	-	22	35.060
Kalimantan Utara	5	8.500	1	1.286	6	9.786
Sulawesi Utara	-	-	-	-	12	18.302
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	30	47.640
Sulawesi Selatan	2	3.100	27	43.708	67	105.666
Sulawesi Tenggara	8	17.664	10	16.750	30	48.859
Gorontalo	-	-	-	-	7	9.868
Sulawesi Barat	-	-	12	17.500	23	36.614
Maluku	-	-	-	-	18	22.570
Maluku Utara	-	-	-	-	29	37.209
Papua Barat	-	-	-	-	11	15.010
Papua	5	8.460	-	-	8	12.885
Jumlah	241	423.302	69	103.386	1.296	1.634.467

Sumber : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No : 293/KPTS/M/2014 Tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 3.13a.

Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Provinsi	Irigasi Permukaan		Irigasi Air Tanah		Irigasi Pompa	
	DI	Ha	DI	Ha	DI	Ha
Aceh	1.350	196.261	66	1.858	-	-
Sumatera Utara	1.923	269.195	86	1.139	-	-
Sumatera Barat	3.133	222.828	49	994	-	-
Riau	63	8.180	-	-	-	-
Jambi	461	33.109	-	-	-	-
Sumatera Selatan	696	66.699	-	-	-	-
Bengkulu	771	60.669	-	-	-	-
Lampung	1.084	126.823	112	2.857	-	-
Kepulauan Bangka Belitung	43	3.301	-	-	-	-
Kepulauan Riau	8	1.726	-	-	-	-
Jawa Barat	4.921	350.798	234	5.722	-	-

Provinsi	Irigasi Permukaan		Irigasi Air Tanah		Irigasi Pompa	
	DI	Ha	DI	Ha	DI	Ha
Jawa Tengah	11.401	519.265	679	16.872	-	-
DI Yogyakarta	1.235	37.986	151	6.550	3	45
Jawa Timur	8.703	480.352	1.573	45.288	23	3.870
Banten	1.327	106.938	-	-	11	1.283
Bali	674	55.757	140	2.729	-	-
Nusa Tenggara Barat	440	101.780	485	7.767	-	-
Nusa Tenggara Timur	2.020	181.540	1.049	7.413	-	-
Kalimantan Barat	931	85.867	-	-	-	-
Kalimantan Tengah	40	8.666	-	-	-	-
Kalimantan Selatan	397	71.047	-	-	-	-
Kalimantan Timur	333	67.959	-	-	-	-
Kalimantan Utara	58	17.464	-	-	-	-
Sulawesi Utara	288	42.557	184	3.747	-	-
Sulawesi Tengah	445	80.134	178	1.873	-	-
Sulawesi Selatan	2.509	279.519	225	3.135	-	-
Sulawesi Tenggara	610	89.860	214	1.978	-	-
Gorontalo	110	17.891	133	3.277	-	-
Sulawesi Barat	592	38.440	-	-	-	-
Maluku	123	18.670	23	57	-	-
Maluku Utara	28	9.487	-	-	-	-
Papua Barat	16	5.371	-	-	-	-
Papua	28	7.034	78	345	-	-
Jumlah	46.761	3.663.173	5.659	113.600	37	5.198

Tabel 3.13b.

Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

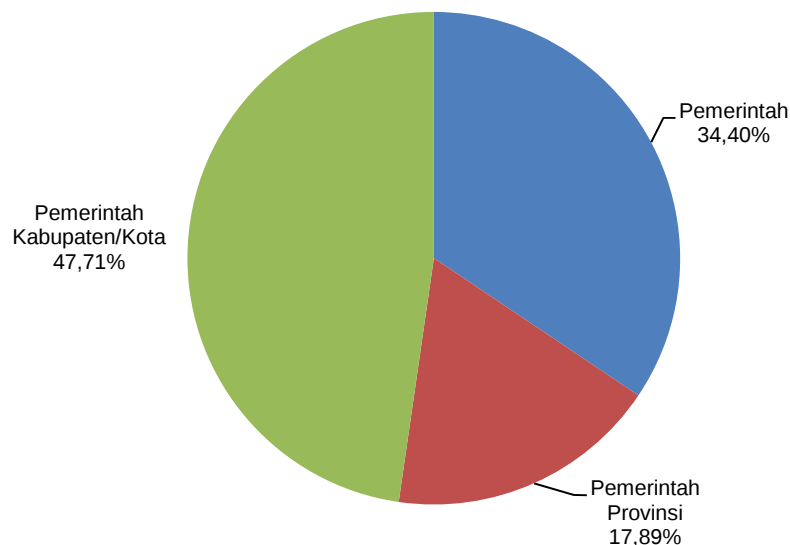
(lanjutan)

Provinsi	Irigasi Rawa		Irigasi Tambak		Total	
	DI	Ha	DI	Ha	DI	Ha
Aceh	-	-	23	5.309	1.439	203.428
Sumatera Utara	31	14.414	-	-	2.040	284.748
Sumatera Barat	14	5.520	-	-	3.196	229.342

Provinsi	Irigasi Rawa		Irigasi Tambak		Total	
	DI	Ha	DI	Ha	DI	Ha
Riau	125	40.537	-	-	188	48.717
Jambi	130	29.959	-	-	591	63.068
Sumatera Selatan	119	39.398	-	-	815	106.097
Bengkulu	4	394	-	-	775	61.063
Lampung	3	1.623	-	-	1.199	131.303
Kepulauan Bangka Belitung	8	3.950	-	-	51	7.251
Kepulauan Riau	-	-	-	-	8	1.726
Jawa Barat	-	-	11	9.057	5.166	365.577
Jawa Tengah	21	1.556	73	6.295	12.174	543.988
DI Yogyakarta	-	-	-	-	1.389	44.581
Jawa Timur	-	-	12	3.525	10.311	533.034
Banten	-	-	54	12.644	1.392	120.865
Bali	-	-	-	-	814	58.486
Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	925	109.547
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	3.069	188.952
Kalimantan Barat	196	55.858	-	-	1.127	141.725
Kalimantan Tengah	459	165.662	3	1.000	502	175.328
Kalimantan Selatan	535	128.942	-	-	932	199.989
Kalimantan Timur	44	12.257	10	4.246	387	84.462
Kalimantan Utara	5	2.623	4	1.452	67	21.539
Sulawesi Utara	-	-	-	-	472	46.304
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	623	82.008
Sulawesi Selatan	2	1.294	57	14.566	2.793	298.514
Sulawesi Tenggara	22	3.495	9	2.345	855	97.679
Gorontalo	-	-	-	-	243	21.168
Sulawesi Barat	-	-	-	-	592	38.440
Maluku	-	-	-	-	146	18.727
Maluku Utara	-	-	-	-	28	9.487
Papua Barat	2	800	-	-	18	6.171
Papua	156	8.337	-	-	262	15.716
Jumlah	1.876	516.619	256	60.439	54.589	4.359.028

Sumber : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No : 293/KPTS/M/2014 Tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Gambar 3.1.
Persentase Luas Daerah Irigasi di Indonesia
Berdasarkan Kewenangan (ha)



D. Analisis Statistik Infrastruktur Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air menjadi bagian yang amat penting bagi keberlangsungan bangsa suatu bangsa. Air sebagai sumber kehidupan perlu pengelolaan yang bijak agar manfaatnya dapat dinikmati tidak hanya oleh generasi saat ini, melainkan juga generasi berikutnya. Namun di samping itu, air juga dapat mendatangkan bencana jika daya rusaknya tidak dikendalikan.

Untuk meminimalisir dampak krisis sumber daya air yang telah dan mungkin akan terjadi, dilakukan upaya penanganan baik secara fisik maupun non fisik. Upaya-upaya yang dilakukan di antaranya ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional, pengentasan kemiskinan dengan memperluas akses terhadap air bersih, penyediaan air baku, pengamanan pantai, dan sebagainya. Salah satu infrastruktur SDA yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional adalah irigasi.

Sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam meningkatkan kinerja pelayanan irigasi, yaitu belum optimalnya dukungan daerah dalam operasional jaringan irigasi, kurangnya kualitas konstruksi bangunan sumber daya air dan kondisi alam yang harus diantisipasi (seperti debit fluktuatif, serta masalah kualitas dan kuantitas air). Sebagian besar pasokan air untuk daerah irigasi sangat berhubungan dengan daerah aliran sungai musiman. Sampai saat ini, hanya sekitar 800.000 ha daerah irigasi yang pasokan airnya terjamin oleh waduk.

Kuantitas produksi padi di Indonesia sebagian besar dihasilkan di Pulau Jawa & Bali, lalu kemudian Pulau Sumatera. Hal ini juga didukung oleh keberadaan daerah irigasi yang mampu melayani seluas 3,2 juta ha lahan di Pulau Jawa dan Bali serta 2,6 juta ha di Pulau Sumatera. Daerah irigasi yang dimaksud terdiri dari daerah irigasi kewenangan Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Namun jika dilihat nilai rasio hasil produksi padi dengan luas daerah irigasi, maka selain Pulau Jawa dengan produktivitasnya sebesar 11,82 ton/ha, Pulau Sulawesi juga memiliki produktivitas yang tinggi, yaitu 6,41 ton/ha di tahun 2013. Nilai rasio produksi padi dengan luas daerah irigasi per pulau besar dapat dilihat pada Tabel 3.14. di bawah ini.

Tabel 3.14.

Luas Daerah Irigasi dan Produksi Padi menurut Pulau Besar

Provinsi	Total		Produksi Padi Tahun 2013 (ton)	Persentase Produksi Padi (%)	Rasio Produksi Padi dengan Luas Daerah Irigasi (ton/ha)
	DI	Ha			
Sumatera	10.799	2.660.863	16.749.659	23,50	6,29
Jawa dan Bali	31.820	3.245.469	38.375.112	53,84	11,82
Nusa Tenggara	4.113	594.495	2.923.364	4,10	4,92
Kalimantan	3.216	1.157.760	4.849.720	6,80	4,19
Sulawesi	5.803	1.249.450	8.007.871	11,23	6,41
Maluku dan Maluku	230	123.206	174.280	0,24	1,41
Papua dan Papua Barat	310	104.788	199.703	0,28	1,91
Jumlah	56.291	9.136.031	71.279.709	100,00	7,80

Sumber : Daerah Irigasi :Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No : 293/KPTS/M/2014

Luasan daerah irigasi dan produksi padi juga dapat dilihat pada tingkat provinsi seperti dalam Tabel 3.15. dan Gambar 3.2. - 3.3. Secara kuantitas, produksi padi di tahun 2013 paling tinggi berasal dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Sementara dari nilai rasio produksi padi terhadap daerah irigasi secara nasional tahun 2013 adalah 7,8 ton/ha. Rasio paling kecil adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 0,62 ton/ha dan yang paling tinggi adalah Jawa Barat dan Yogyakarta dengan masing-masing 13,86 dan 12,98 ton/ha.

Tabel 3.15.

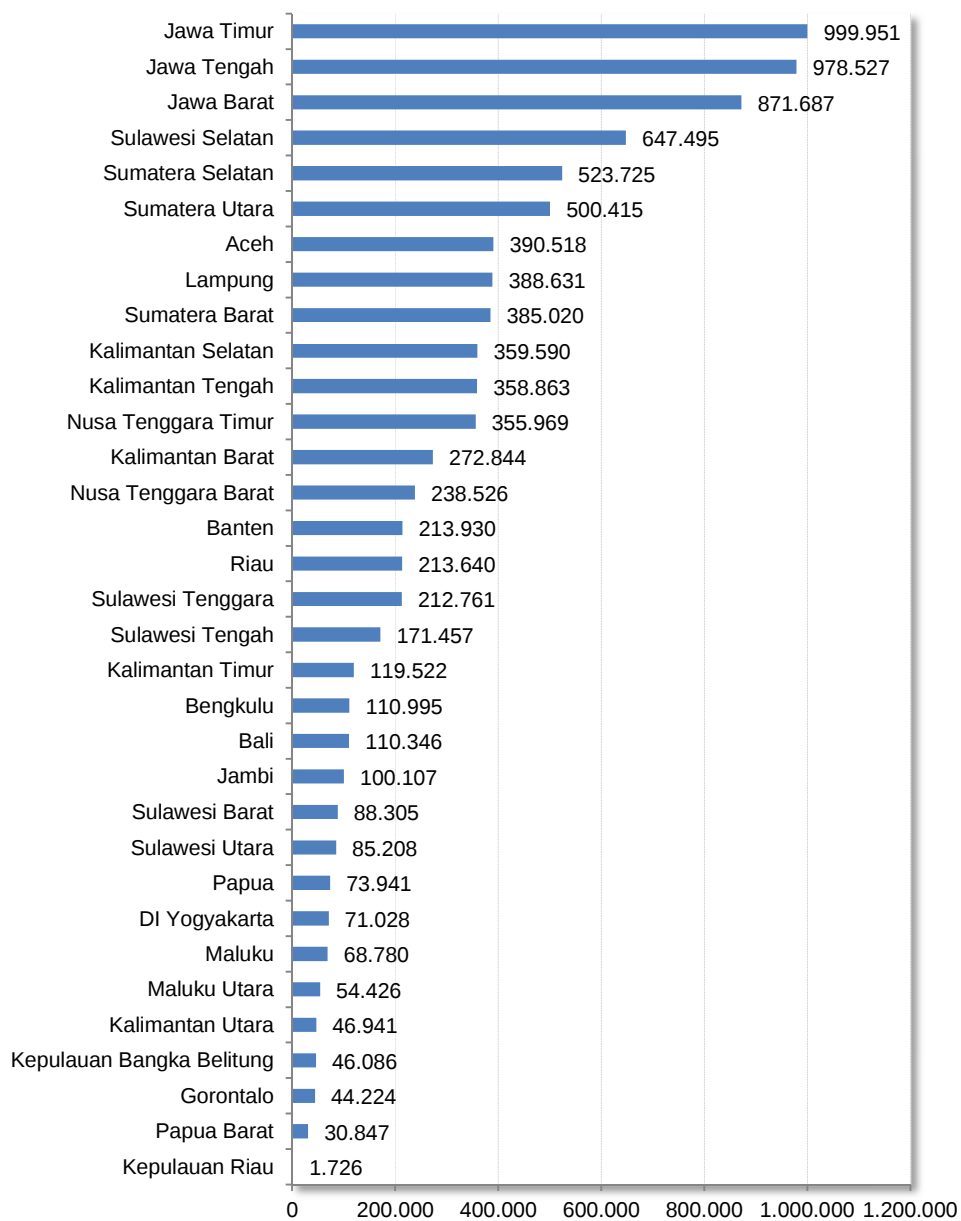
Luas Daerah Irigasi dan Produksi Padi menurut Provinsi

Provinsi	Total		Produksi Padi Tahun 2013 (ton)	Rasio Produksi Padi dengan Luas Daerah Irigasi (ton/ha)
	DI	Ha		
Aceh	1.499	390.518	1.956.940	5,01
Sumatera Utara	2.147	500.415	3.727.249	7,45
Sumatera Barat	3.277	385.020	2.430.384	6,31
Riau	260	213.640	434.144	2,03
Jambi	610	100.107	664.535	6,64
Sumatera Selatan	899	523.725	3.676.723	7,02
Bengkulu	794	110.995	622.832	5,61
Lampung	1.237	388.631	3.207.002	8,25
Kepulauan Bangka Belitung	68	46.086	28.480	0,62
Kepulauan Riau	8	1.726	1.370	0,79
DKI Jakarta	-	-	10.268	-
Jawa Barat	5.289	871.687	12.083.162	13,86
Jawa Tengah	12.315	978.527	10.344.816	10,57
DI Yogyakarta	1.433	71.028	921.824	12,98
Jawa Timur	10.527	999.951	12.049.342	12,05
Banten	1.419	213.930	2.083.608	9,74
Bali	837	110.346	882.092	7,99
Nusa Tenggara Barat	976	238.526	2.193.698	9,20
Nusa Tenggara Timur	3.137	355.969	729.666	2,05
Kalimantan Barat	1.192	272.844	1.441.876	5,28
Kalimantan Tengah	544	358.863	812.652	2,26

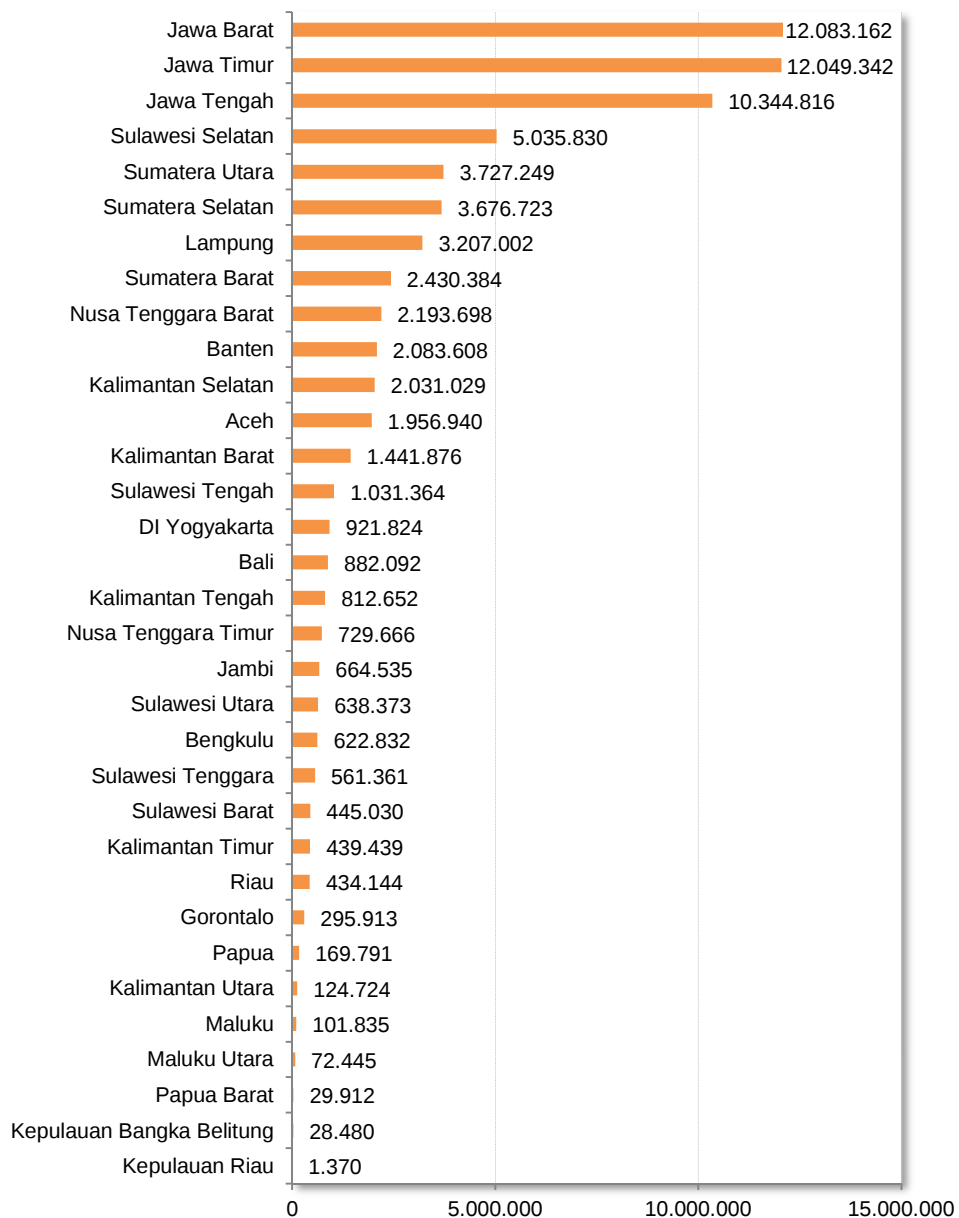
Provinsi	Total		Produksi Padi Tahun 2013 (ton)	Rasio Produksi Padi dengan Luas Daerah Irigasi (ton/ha)
	DI	Ha		
Kalimantan Selatan	995	359.590	2.031.029	5,65
Kalimantan Timur	409	119.522	439.439	3,68
Kalimantan Utara	76	46.941	124.724	2,66
Sulawesi Utara	488	85.208	638.373	7,49
Sulawesi Tengah	661	171.457	1.031.364	6,02
Sulawesi Selatan	2.885	647.495	5.035.830	7,78
Sulawesi Tenggara	899	212.761	561.361	2,64
Gorontalo	253	44.224	295.913	6,69
Sulawesi Barat	617	88.305	445.030	5,04
Maluku	171	68.780	101.835	1,48
Maluku Utara	59	54.426	72.445	1,33
Papua Barat	32	30.847	29.912	0,97
Papua	278	73.941	169.791	2,30
Jumlah	56.291	9.136.027	71.279.709	7,80

Sumber : Daerah Irigasi :Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No : 293/KPTS/M/2014
 Produksi Padi : BPS RI

Gambar 3.2.
Luas Daerah Irigasi Menurut Provinsi (ha)

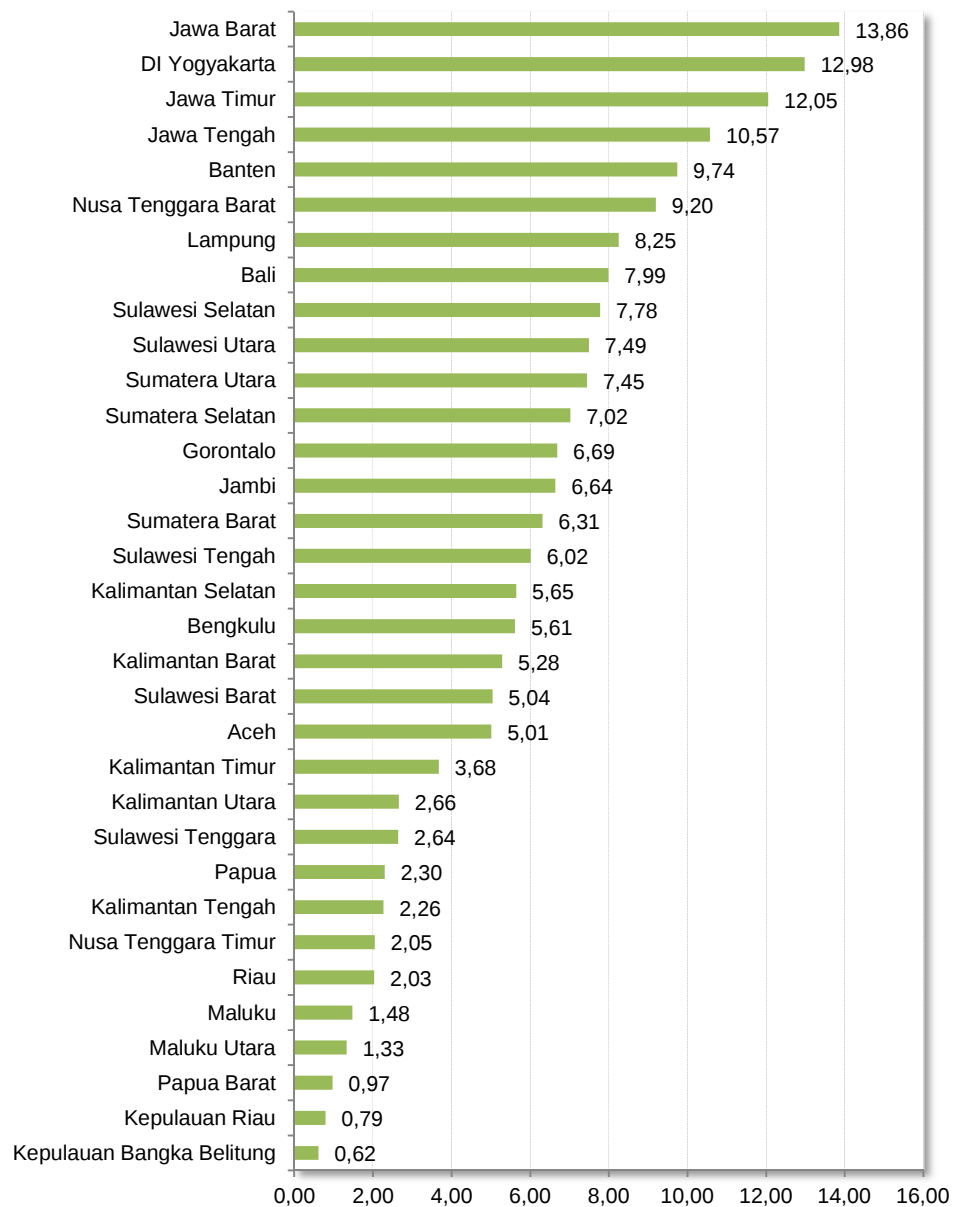


Gambar 3.3.
Produksi Padi Tahun 2013 Menurut Provinsi (ton)



Gambar 3.4.

Rasio Luas Daerah Irigasi dengan Produksi Padi Tahun 2013 Menurut Provinsi (ton/ha)



BAB IV

STATISTIK INFRASTRUKTUR BINA MARGA

A. Jalan Nasional

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi pengembangan sistem transportasi di Tanah Air. Infrastruktur jalan menjadi unsur sentral dalam pengembangan wilayah serta peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. Jaringan transportasi yang baik akan membawa dampak pada peningkatan kegiatan ekonomi suatu wilayah. Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi program prioritas seiring dengan semakin bertambahnya populasi penduduk dan kendaraan pengguna jalan.

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 menegaskan tiga peran jalan, yaitu :

1. Sebagai bagian dari prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan dan lingkungan hidup serta wajib dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat bangsa dan negara.
3. Sebagai satu kesatuan sistem jaringan jalan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dalam UU tersebut juga dijelaskan bahwa terdapat dua jenis jalan, yaitu Jalan Umum dan Jalan Khusus. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan status jalannya. Sementara Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Sistem jaringan jalan terdiri atas Sistem Jaringan Jalan Primer dan Sekunder. Sistem Jaringan Jalan Primer berperan untuk melayani distribusi barang dan jasa dalam rangka pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, serta menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sistem Jaringan Jalan Sekunder berfungsi untuk melayani distribusi barang dan jasa bagi masyarakat di kawasan perkotaan.

Pada setiap kelompok jaringan jalan primer dan sekunder, jalan dibagi menurut fungsinya, yaitu :

1. Jalan Arteri, jalan yang digunakan untuk melayani angkutan utama jarak jauh dengan kecepatan rata-rata tinggi. Jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
2. Jalan Kolektor, jalan yang digunakan untuk melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
3. Jalan Lokal, jalan yang digunakan untuk melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
4. Jalan Lingkungan, jalan yang digunakan untuk melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Sementara menurut statusnya, jalan dibagi berdasarkan pembinaannya, yaitu :

1. Jalan Nasional, merupakan jalan Arteri dan Jalan Kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan Primer. Jalan ini menghubungkan ibukota provinsi, jalan strategis nasional, serta jalan tol. Tanggung jawab pembinaannya berada pada Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum).
2. Jalan Provinsi, merupakan Jalan Kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan Primer. Jalan ini menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, dan

jalan strategis provinsi. Pembinaannya menjadi tanggung jawab Gubernur/Pemerintah Provinsi.

3. Jalan Kabupaten, adalah jalan yang merupakan Jalan Lokal dalam Sistem Jaringan Jalan Primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi. Jalan ini menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal. Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder di wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten juga termasuk dalam Jalan Kabupaten. Pembinaannya menjadi tanggung jawab Bupati/Pemerintah Kabupaten.
4. Jalan Kota, adalah jalan yang merupakan Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder. Jalan ini menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, pusat pelayanan dengan persil, antar persil, serta antar pusat permukiman di dalam kota. Pembinaannya menjadi tanggung jawab Walikota/Pemerintah Kota.
5. Jalan Desa, adalah Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta Jalan Lingkungan. Pembinaannya menjadi tanggung jawab Bupati/Pemerintah Kabupaten.

Pada Tabel 4.1 - 4.3 di bawah ini ditampilkan data panjang dan persentase jalan nasional dirinci menurut provinsi dan kondisi umum serta kemantapan jalan. Pada Semester 2 Tahun 2013, jalan nasional dalam kondisi baik sepanjang 24.545,12 km atau 63,64%; dalam kondisi sedang 11.305,33 km atau 29,31%; kondisi rusak ringan 1.516,45 km atau 3,93%; dan dalam kondisi rusak berat sepanjang 1.202,93 km atau 3,12%.

Jika dilihat dari kemantapannya, maka jalan yang dikatakan dalam kondisi mantap adalah jalan yang dalam kondisi baik dan sedang. Sementara jalan tidak mantap terdiri dari rusak ringan dan rusak berat. Jalan nasional dalam kondisi mantap di Semester 2 Tahun 2013 sepanjang 35.850,44 km atau 92,95% dan dalam kondisi tidak mantap sepanjang 2.719,38 km atau 7,05%.

Tabel 4.1.
Panjang Jalan Nasional Menurut Provinsi dan Kondisi Umum Jalan
Semester 2 Tahun 2013

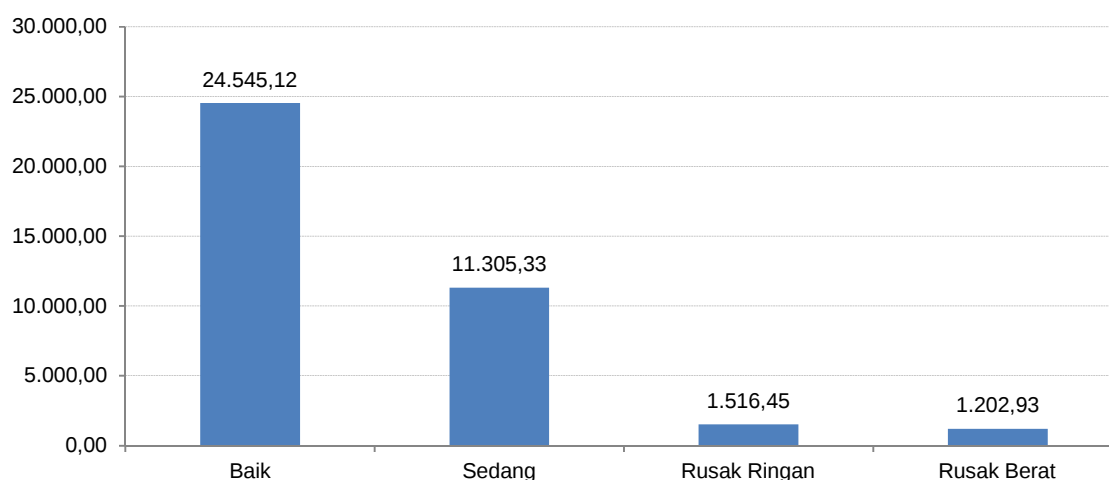
Provinsi	Panjang Total (km)	Kondisi Permukaan Jalan (km)			
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
Aceh	1.803,35	1.166,69	532,58	45,92	58,16
Sumatera Utara	2.249,64	584,76	1.249,01	207,90	207,98
Sumatera Barat	1.212,89	595,90	560,20	47,04	9,75
Riau	1.134,47	828,65	209,26	61,28	35,27
Jambi	936,48	442,86	456,89	24,69	12,04
Sumatera Selatan	1.444,26	609,44	780,46	52,96	1,40
Bengkulu	783,87	513,51	232,51	24,22	13,62
Lampung	1.159,57	279,22	833,25	27,22	19,89
Kepulauan Bangka Belitung	509,59	493,33	15,96	0,30	0,00
Kepulauan Riau	334,00	276,14	49,84	7,82	0,20
DKI Jakarta	142,65	46,11	95,15	1,38	0,00
Jawa Barat	1.351,13	986,77	338,72	23,05	2,60
Jawa Tengah	1.390,57	843,00	477,48	70,08	0,00
DI Yogyakarta	223,16	206,32	15,37	1,47	0,00
Jawa Timur	2.027,01	1.488,63	445,60	76,25	16,52
Banten	476,49	296,93	149,32	25,62	4,62
Bali	535,23	441,39	93,33	0,51	0,00
Nusa Tenggara Barat	632,17	538,85	91,36	1,67	0,29
Nusa Tenggara Timur	1.406,68	959,28	392,01	48,79	6,60
Kalimantan Barat	1.664,55	1.338,38	203,65	75,60	46,92
Kalimantan Tengah	1.714,83	1.044,08	508,46	103,93	58,35
Kalimantan Selatan	866,09	794,64	66,84	4,00	0,60
Kalimantan Timur	2.118,17	1.488,18	416,40	117,66	95,92
Sulawesi Utara	1.319,23	515,26	705,92	22,61	75,44
Sulawesi Tengah	2.181,95	1.408,20	610,11	83,56	80,08
Sulawesi Selatan	1.722,86	1.236,69	470,46	14,90	0,80
Sulawesi Tenggara	1.397,05	957,08	255,41	143,25	41,30
Gorontalo	606,70	232,55	302,90	34,85	36,40
Sulawesi Barat	571,98	410,02	156,38	4,59	1,00

Provinsi	Panjang Total (km)	Kondisi Permukaan Jalan (km)			
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
Maluku	1.066,65	890,73	71,08	21,10	83,74
Maluku Utara	511,89	498,42	12,00	1,47	0,00
Papua Barat	963,24	727,12	73,98	87,72	74,41
Papua	2.111,44	1.405,96	433,44	53,03	219,00
Indonesia	38.569,84	24.545,12	11.305,33	1.516,45	1.202,93

Sumber : Sub Direktorat Informasi dan Komunikasi, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga

Gambar 4.1.

Panjang Jalan Nasional Menurut Provinsi dan Kondisi Umum Jalan
Semester 2 Tahun 2013



Tabel 4.2.

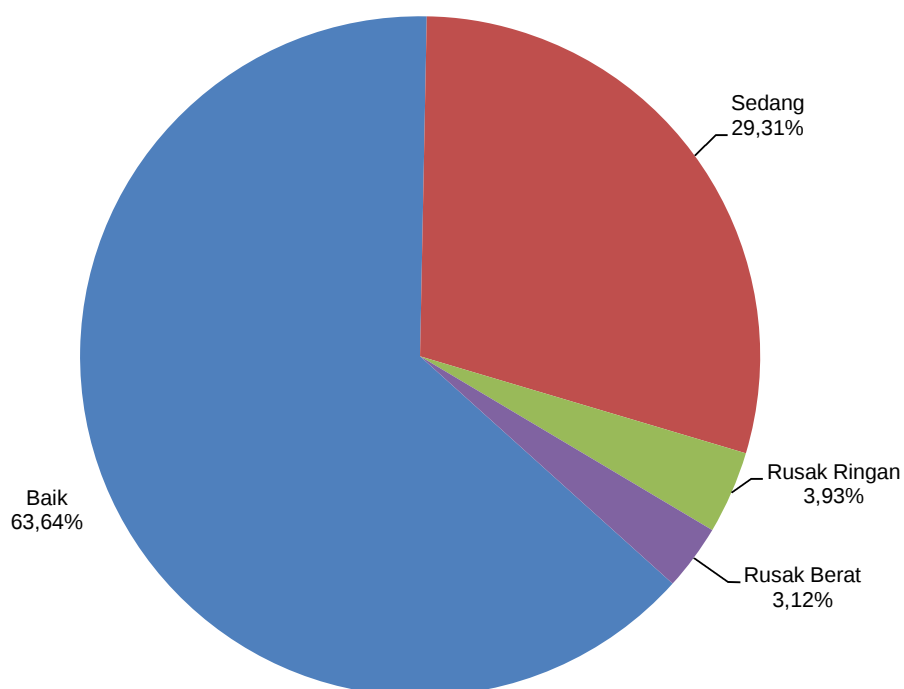
Persentase Jalan Nasional Menurut Provinsi dan Kondisi Umum Jalan
Semester 2 Tahun 2013

Provinsi	Kondisi Permukaan Jalan (%)			
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
Aceh	64,70	29,53	2,55	3,22
Sumatera Utara	25,99	55,52	9,24	9,25
Sumatera Barat	49,13	46,19	3,88	0,80

Provinsi	Kondisi Permukaan Jalan (%)			
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
Riau	73,04	18,45	5,40	3,11
Jambi	47,29	48,79	2,64	1,29
Sumatera Selatan	42,20	54,04	3,67	0,10
Bengkulu	65,51	29,66	3,09	1,74
Lampung	24,08	71,86	2,35	1,72
Kepulauan Bangka Belitung	96,81	3,13	0,06	0,00
Kepulauan Riau	82,68	14,92	2,34	0,06
DKI Jakarta	32,33	66,71	0,97	0,00
Jawa Barat	73,03	25,07	1,71	0,19
Jawa Tengah	60,62	34,34	5,04	0,00
DI Yogyakarta	92,45	6,89	0,66	0,00
Jawa Timur	73,44	21,98	3,76	0,81
Banten	62,32	31,34	5,38	0,97
Bali	82,47	17,44	0,09	0,00
Nusa Tenggara Barat	85,24	14,45	0,26	0,05
Nusa Tenggara Timur	68,19	27,87	3,47	0,47
Kalimantan Barat	80,40	12,23	4,54	2,82
Kalimantan Tengah	60,89	29,65	6,06	3,40
Kalimantan Selatan	91,75	7,72	0,46	0,07
Kalimantan Timur	70,26	19,66	5,55	4,53
Sulawesi Utara	39,06	53,51	1,71	5,72
Sulawesi Tengah	64,54	27,96	3,83	3,67
Sulawesi Selatan	71,78	27,31	0,86	0,05
Sulawesi Tenggara	68,51	18,28	10,25	2,96
Gorontalo	38,33	49,93	5,74	6,00
Sulawesi Barat	71,68	27,34	0,80	0,17
Maluku	83,51	6,66	1,98	7,85
Maluku Utara	97,37	2,34	0,29	0,00
Papua Barat	75,49	7,68	9,11	7,73
Papua	66,59	20,53	2,51	10,37
Indonesia	63,64	29,31	3,93	3,12

Sumber : Sub Direktorat Informasi dan Komunikasi, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga

Gambar 4.2.
Persentase Jalan Nasional Menurut Provinsi dan Kondisi Umum
Jalan Semester 2 Tahun 2013



Tabel 4.3.
Panjang dan Persentase Jalan Nasional Menurut Provinsi
dan Kemantapan Jalan Semester 2 Tahun 2013

Provinsi	Kondisi Kemantapan (km)			
	Mantap		Tidak Mantap	
	Panjang (km)	Persen (%)	Panjang (km)	Persen (%)
Aceh	1.699,27	94,23	104,08	5,77
Sumatera Utara	1.833,77	81,51	415,88	18,49
Sumatera Barat	1.156,10	95,32	56,79	4,68
Riau	1.037,91	91,49	96,55	8,51
Jambi	899,74	96,08	36,74	3,92

Provinsi	Kondisi Kemantapan (km)			
	Mantap		Tidak Mantap	
	Panjang (km)	Persen (%)	Panjang (km)	Persen (%)
Sumatera Selatan	1.389,90	96,24	54,36	3,76
Bengkulu	746,02	95,17	37,84	4,83
Lampung	1.112,47	95,94	47,10	4,06
Kepulauan Bangka Belitung	509,29	99,94	0,30	0,06
Kepulauan Riau	325,98	97,60	8,02	2,40
DKI Jakarta	141,26	99,03	1,38	0,97
Jawa Barat	1.325,48	98,10	25,65	1,90
Jawa Tengah	1.320,49	94,96	70,08	5,04
DI Yogyakarta	221,69	99,34	1,47	0,66
Jawa Timur	1.934,23	95,42	92,77	4,58
Banten	446,25	93,65	30,24	6,35
Bali	534,72	99,91	0,51	0,09
Nusa Tenggara Barat	630,21	99,69	1,96	0,31
Nusa Tenggara Timur	1.351,29	96,06	55,39	3,94
Kalimantan Barat	1.542,03	92,64	122,53	7,36
Kalimantan Tengah	1.552,55	90,54	162,29	9,46
Kalimantan Selatan	861,48	99,47	4,60	0,53
Kalimantan Timur	1.904,59	89,92	213,58	10,08
Sulawesi Utara	1.221,18	92,57	98,05	7,43
Sulawesi Tengah	2.018,31	92,50	163,64	7,50
Sulawesi Selatan	1.707,16	99,09	15,70	0,91
Sulawesi Tenggara	1.212,49	86,79	184,56	13,21
Gorontalo	535,45	88,26	71,25	11,74
Sulawesi Barat	566,39	99,02	5,59	0,98
Maluku	961,81	90,17	104,84	9,83
Maluku Utara	510,42	99,71	1,47	0,29
Papua Barat	801,10	83,17	162,14	16,83
Papua	1.839,41	87,12	272,03	12,88
Indonesia	35.850,44	92,95	2.719,38	7,05

Sumber : Sub Direktorat Informasi dan Komunikasi, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga

Secara umum, perkembangan jalan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan kondisi yang baik sesuai dengan target program yang telah dicanangkan setiap tahunnya. Dengan kondisi ini diharapkan dapat mendorong konektivitas yang semakin baik di sektor transportasi. Pada Tabel 4.4a. – 4.4b. dan Gambar 4.3. di bawah ini merupakan capaian kondisi dan kemantapan jalan nasional dari tahun 2010-2013.

Tabel 4.4a.

Capaian Kemantapan Jalan Nasional Tahun 2010-2013

Tahun Anggaran	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
	Panjang (km)	Persen (%)	Panjang (km)	Persen (%)	Panjang (km)	Persen (%)	Panjang (km)	Persen (%)
2010	19.117,50	49,57	14.452,55	37,47	1.364,98	3,54	3.634,79	9,42
2011	21.685,22	56,22	12.148,50	31,50	2.869,09	7,44	1.867,02	4,84
2012	22.369,21	58,00	12.661,56	32,83	2.174,34	5,64	1.364,63	3,54
2013	24.545,12	63,64	11.305,33	29,31	1.516,45	3,93	1.202,93	3,12

Tabel 4.4b.

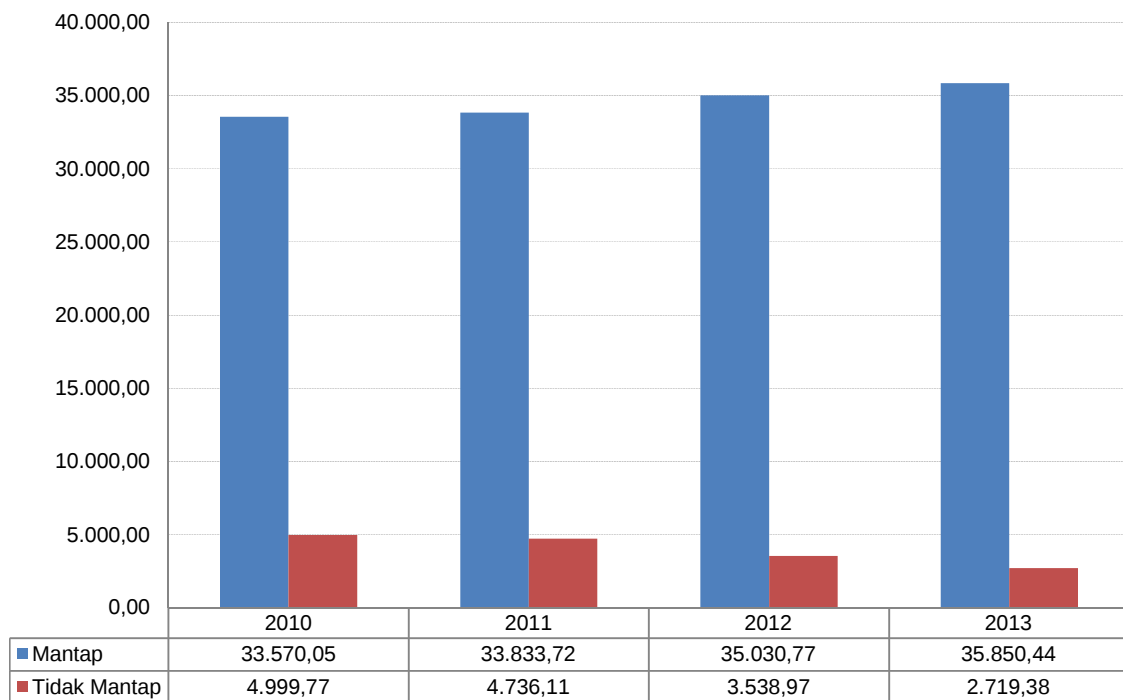
Capaian Kemantapan Jalan Nasional Tahun 2010-2013 (*lanjutan*)

Tahun Anggaran	Mantap		Tidak Mantap	
	Panjang (km)	Persen (%)	Panjang (km)	Persen (%)
2010	33.570,05	87,04	4.999,77	12,96
2011	33.833,72	87,72	4.736,11	12,28
2012	35.030,77	90,82	3.538,97	9,18
2013	35.850,44	92,95	2.719,38	7,05

Sumber: Tahun 2010-2012 : Infrastruktur Jalan Kabinet Indonesia Bersatu-II 2010-2012

Tahun 2013 : Sub Direktorat Informasi dan Komunikasi, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga

Gambar 4.3.
Capaian Kemantapan Jalan Nasional Tahun 2010-2013



B. Jalan Strategis Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan juga dijelaskan bahwa **Jalan Strategis Nasional** adalah jalan yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah-daerah rawan, bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antarnegara, serta dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Pada Tabel 4.5. di bawah ini ditampilkan data panjang jalan strategis nasional rencana sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 92/KPTS/M/2011.

Tabel 4.5.
Jalan Strategis Nasional Rencana

Provinsi	Panjang Ruas (km)
Aceh	520.680
Sumatera Utara	483.187
Sumatera Barat	267.406
Riau	270.926
Jambi	347.915
Sumatera Selatan	137.320
Bengkulu	121.400
Lampung	18.160
Kepulauan Riau	117.373
DKI Jakarta	7.600
Jawa Barat	492.268
Jawa Tengah	414.436
DI Yogyakarta	145.521
Jawa Timur	726.841
Banten	187.224
Bali	2.330
Nusa Tenggara Barat	202.838
Nusa Tenggara Timur	1.103.585
Kalimantan Barat	528.689
Kalimantan Tengah	538.782
Kalimantan Selatan	238.597
Kalimantan Timur	313.910
Sulawesi Utara	293.052
Sulawesi Tengah	359.463
Sulawesi Selatan	34.173
Sulawesi Tenggara	113.568
Gorontalo	80.000
Sulawesi Barat	120.750
Maluku	289.682
Maluku Utara	486.805
Papua Barat	1.226.066
Papua	1.387.260
Indonesia	11.577.807

Sumber : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No: 92/KPTS/M/2011

C. Jalan Tol

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum bertekad terus melakukan pengembangan infrastruktur khususnya jalan untuk mendorong terciptanya pengembangan wilayah dan peningkatan ekonomi, salah satunya adalah melalui pembangunan jalan tol. **Jalan tol** atau disebut jalan bebas hambatan adalah jalan yang masuknya dikendalikan secara penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik jalan dan median, serta paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur setiap arah dengan lebar lajur minimal 3,5 m. Jalan tol merupakan jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Jalan Tol Jagorawi yang menghubungkan Jakarta, Bogor dan Ciawi merupakan jalan tol pertama di Indonesia yang diresmikan penggunaannya pada tahun 1978. Pembangunannya pada saat itu dilakukan oleh pemerintah dengan dana dari anggaran pemerintah dan pinjaman luar negeri yang diserahkan kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sebagai penyertaan modal. Selanjutnya PT Jasa Marga (Persero) Tbk. diberikan tugas oleh pemerintah untuk membangun jalan tol dengan tanah yang dibiayai oleh pemerintah.

Upaya pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan jalan tol sempat terhenti pada tahun 1997 dikarenakan terjadinya krisis moneter. Pada tahun 1998 Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam penyediaan infrastruktur. Kemudian di tahun 2002 pemerintah meneruskan proyek-proyek infrastruktur dan melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek jalan tol yang tertunda.

Percepatan pembangunan jalan tol kembali dilakukan mulai tahun 2005 dengan dibentuknya Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai regulator jalan tol yang selama ini dipegang oleh PT Jasa Marga. Ke depannya, pemerintah akan melakukan pembangunan jalan tol dengan tiga metode pendanaan, yaitu pembiayaan penuh oleh swasta, pembiayaan oleh pemerintah dan swasta, dan pembiayaan pembangunan oleh pemerintah dengan operasional oleh swasta.

Dengan terbukanya peluang investasi bagi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur jalan tol dapat mengisi keterbatasan dana pemerintah di satu sisi dan membawa manfaat untuk berinvestasi dari pendapatan tol. Selain itu, manfaat yang dirasakan masyarakat selaku pengguna jalan berupa penghematan biaya operasi kendaraan pengguna jalan tol, penghematan waktu tempuh dan peningkatan kenyamanan bagi pengguna jalan tol maupun non tol karena perpindahan sebagian kendaraan ke jalan tol. Manfaat lain bagi pemerintah adalah pengembangan wilayah serta peningkatan ekonomi sebagai hasil dari pengalihan alokasi dana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari kota besar, pada umumnya, ke daerah yang belum berkembang.

Sampai tahun 2013 jalan tol yang beroperasi di Indonesia sepanjang 784,06 km di empat pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Bali dan Sulawesi. Dari jumlah tersebut, sepanjang 550,32 km dioperasikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan 233,74 km lainnya oleh swasta lain. Ada pula ruas-ruas jalan tol dimana Pemerintah telah menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan status dalam tahap desain dan/atau pengadaan tanah dan/atau konstruksi. Jalan tol yang dalam tahap penandatanganan PPJT tersebut ada sebanyak 24 ruas dengan panjang 874,79 km. Progres pembangunan serta jumlah dan panjang jalan tol di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6.
Progres Pembangunan Jalan Tol di Indonesia

Status	Jumlah Ruas	Panjang (km)	Nilai Investasi (miliar rupiah)
Beroperasi	29	784,06	
Penandatanganan Perjanjian Konsensi (PPJT)	24	874,79	113.224,00
Dalam Proses Tender	3	159,77	51.777,48
Proyek Prioritas	7	395,21	52.084,00
Jumlah	63	2.213,83	217.085,48

Sumber : Peluang Investasi Jalan Tol
Badan Pengatur Jalan Tol, Oktober 2013

Tabel 4.7.
Jalan Tol Beroperasi di Indonesia

Jalan Tol	Panjang (km)		Investor	Mulai Beroperasi
	Jalan Utama	Akses		
Jakarta - Bogor - Ciawi	50,00	9,00	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	1978
Jakarta - Tangerang	27,00	6,00	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	1983 - 1998
Surabaya - Gempol	43,00	6,00	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	1984
Jakarta - Cikampek	72,00	11,00	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	1985
Padalarang - Cileunyi	35,63	28,77	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	1986
Prof DR. Soedyatmo	14,30		PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	1986
Lingkar Dalam Kota Jakarta	23,55		PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	1988
Belmera	33,70	9,00	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	1989 & 1996
Semarang Seksi A, B, C	24,75		PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	1987, 1983 & 1998
Ulujami - Pondok Aren	5,55		PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	2001
Palimanan - Kanci	26,30		PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	1998
JORR Selatan (Pondok Pinang - Taman Mini)	14,25		PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	1995 - 1996
JORR W2 Selatan (Pondok Pinang - Veteran)	6,20		PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	1991
JORR E1 Selatan (Taman Mini - Hankam Raya)	4,00		PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	1998
JORR E1 Utara (Hankam Raya - Cikunir)	8,10		PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	2005
JORR E2 (Cikunir - Cakung)	9,07		PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	2001 - 2003
JORR E3 (Cakung - Cilincing)	3,75		PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	2005
Cikampek - Padalarang	58,50		PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	2005
Jembatan Surabaya - Madura (Suramadu)	20,90		PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	2009
Tangerang - Merak	73,00		PT Marga Mandala Sakti	1987 - 1996
Ir. Wiyoto Wiyono, MSc.	15,50		PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.	1990
Harbour Road	11,55		PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.	1995 - 1996
Surabaya - Gresik	20,70		PT Margabumi Matraraya	1993 - 1996
Ujung Pandang Tahap I	6,05		PT Bosawa Marga Nusantara	1998
Serpong - Pondok Aren	7,25		PT Bintaro Serpong Damai	1999

Jalan Tol	Panjang (km)		Investor	Mulai Beroperasi
	Jalan Utama	Akses		
SS Waru - Bandara Juanda	12,80		PT Citra Margatama Surabaya	2008
Makassar Seksi IV	11,60		PT Jalan Tol Seksi Empat	2008
Bogor Ring Road Seksi I	3,85		PT Marga Sarana Jabar	2009
Kanci - Pejagan	35,00		PT Semesta Marga Raya	2010
JORR W1	9,85		PT Jakarta Lingkar Baratsatu	2010
Surabaya - Mojokerto Seksi IA	1,89		PT Marga Nujuyasumo Agung	2011
Semarang - Solo Seksi Semarang - Ungaran	11,00		PT Trans Marga Jateng	2011
Cinere - Jagorawi Seksi I	3,70		PT Translingkar Kita Jaya	2012
Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (Bali Mandara)	10,00		PT Jasa Marga Bali Tol	2013
Jumlah Jalan Utama dan Jalan Akses	784,06			

Sumber : Peluang Investasi Jalan Tol
Badan Pengatur Jalan Tol, Oktober 2013

Tabel 4.8.
Jalan Tol PPJT

Jalan Tol	Panjang (km)	Nilai Investasi (milyar rupiah)	Investor	Penandatanganan PPJT
Surabaya - Mojokerto*)	36,27	3.379,00	PT Marga Nujuyasumo Agung	06 April 2006
Bogor Ring Road Section II & III	7,15	983,00	PT Marga Sarana Jabar	29 Mei 2006
Cinere - Jagorawi (Cimanggis*)	14,64	2.621,00	PT Translingkar Kita Jaya	30 Juni 2006
Kertosono - Mojokerto	40,50	3.480,00	PT Marga Harjaya Infrastruktur	29 Mei 2006
Semarang - Solo*)	72,64	8.144,00	PT Trans Marga Jateng	15 Desember 2006
Gempol - Pasuruan	34,15	2.769,00	PT Trans Marga Jatim Pasuruan	29 Mei 2006
Gempol - Pandaan	13,61	1.167,00	PT Margabumi Adhikaraya	19 Desember 2006
Depok - Antasari	21,54	3.000,00	PT Citra Waspphutowa	29 Mei 2006

Jalan Tol	Panjang (km)	Nilai Investasi (milyar rupiah)	Investor	Penandatanganan PPJT
Bekasi - Cawang - Kampung Melayu	21,04	7.581,00	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	22 Februari 2007
Cikampek - Palimanan	116,75	12.563,00	PT Lintas Marga Sedaya	21 Juli 2006
Cibitung - Cilincing	34,02	4.220,00	MTD-CTP Expressways	29 Januari 2007
Pejagan - Pemalang	57,50	5.518,00	PT Pejagan Pemalang Tol Road	21 Juli 2006
Pemalang - Batang	39,20	4.077,00	PT Pemalang Batang Tol Road	21 Juli 2006
Semarang - Batang	75,00	7.214,00	PT Marga Setiapuritama	21 Juli 2006
JORR W2 Utara	7,67	2.229,00	PT Marga Lingkar Jakarta	07 Juli 2006
Ciawi - Sukabumi	54,00	7.775,00	PT Trans Jabar Tol	27 Juli 2007
Waru (Aloha) Wonokromo - Tanjung Perak	18,20	11.110,00	PT Margaraya Jawa Tol	19 Juli 2007
Pasuruan - Probolinggo	31,30	3.551,00	PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol	25 Juni 2007
Kunciran - Serpong	11,19	2.623,00	PT Marga Trans Nusantara	22 September 2008
Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran	14,19	3.507,00	PT Marga Kunciran Cengkareng	27 Juli 2007
Cimanggis - Cibitung	25,39	4.524,00	PT Cimanggis Cibitung Tollways	02 Maret 2009
Serpong - Cinere	10,14	2.219,00	PT Cinere Serpong Jaya	28 Juni 2011
Solo - Ngawi**)	69,20	5.138,00	PT Solo Ngawi Jaya	28 Juni 2011
Ngawi - Kertosono**)	49,50	3.832,00	PT Ngawi Kertosono Jaya	28 Juni 2011
Total	874,79	113.224,00		

Sumber : Peluang Investasi Jalan Tol
Badan Pengatur Jalan Tol, Oktober 2013

Catatan : *) Sebagian sudah beroperasi

**) Sebagian dibangun oleh Pemerintah

Tabel 4.9.
Jalan Tol dalam Proses Tender

Jalan Tol	Panjang (km)	Nilai Investasi (milyar rupiah)
Kemayoran - Kampung Melayu	9,60	5.296,44
Semanan - Sunter	20,23	10.816,40
Ulujami - Tanah Abang	8,70	5.325,32
Pasar Minggu - Casablanca	9,15	6.140,01
Sunter - Pulo Gebang - Tambelang	9,44	4.880,53
Duri Pulo - Kampung Melayu	12,65	7.851,79
Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi	60,00	6.290,00
Serpong - Balaraja	30,00	5.177,00
Total	159,77	51.777,48

Sumber : Peluang Investasi Jalan Tol
Badan Pengatur Jalan Tol, Oktober 2013

Tabel 4.10.
Jalan Tol dalam Persiapan Tender

Jalan Tol	Panjang	Harga Tanah (milyar)	Nilai Investasi (milyar rupiah)
Cileunyi - Sumedang - Dawuan	58,50	1.295,00	12.331
Manado - Bitung	38,70	365,00	4.163
Pandaan - Malang	37,62	294,00	3.990
Medan - Binjai	15,80	256,00	1.293
Pekanbaru - Kandis - Dumai	135,00	477,00	17.021
Pasirkoja - Soreang	10,57	425,00	1.886
Balikpapan - Samarinda	99,02	1.266,64	11.400
Total	395,21	4.378,64	52.084,00

Sumber : Peluang Investasi Jalan Tol
Badan Pengatur Jalan Tol, Oktober 2013

D. Jembatan Nasional

Jembatan merupakan bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai penghubung dua ujung jalan yang terputus oleh sungai, saluran, lembah, selat, laut, jalan raya dan jalan kereta api. Kondisi geografis Indonesia yang merupakan kepulauan, memiliki banyak sungai, dan juga lembah mengakibatkan keberadaan jembatan sangat dibutuhkan. Teknologi pembangunan jembatan juga telah berkembang dengan pesat, mulai dari perencanaan, teknologi bahan (beton, baja, kabel), teknologi perencanaan dan pelaksanaan serta teknologi rehabilitasi dan perkuatan.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah mengembangkan suatu sistem pengelolaan jembatan yang dikenal sebagai Sistem Manajemen Jembatan (*Bridge Management System/BMS*). Peran dari sistem ini terutama untuk penyimpanan data pekerjaan konstruksi dan rehabilitasi serta data inspeksi atau monitoring. Berdasarkan data BMS tahun 2014, terdapat sebanyak 14.932 unit jembatan nasional dengan kategori panjang lebih atau sama dengan 6 meter. Jumlah tersebut sama dengan total panjang 382.082,7 m.

Tabel 4.11.

Jumlah Jembatan Nasional Menurut Provinsi dan Kondisi
Status : 5 Desember 2014

Provinsi	Jumlah Jembatan (unit)						Total
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Kritis	Runtuh/ Putus	
Aceh	693	66	71	76	4	0	910
Sumatera Utara	105	218	324	123	11	0	781
Sumatera Barat	212	114	81	60	8	1	476
Riau	32	89	146	92	3	0	362
Jambi	74	60	82	15	2	1	234
Sumatera Selatan	210	66	48	67	0	0	391
Bengkulu	68	43	76	65	32	0	284

Provinsi	Jumlah Jembatan (unit)						Total
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Kritis	Runtuh/ Putus	
Lampung	151	211	60	11	2	0	435
Kepulauan Bangka Belitung	38	28	27	3	0	0	96
Kepulauan Riau	16	5	20	12	0	0	53
DKI Jakarta	77	18	24	6	1	0	126
Jawa Barat	571	26	50	14	2	1	664
Jawa Tengah	349	112	146	62	6	0	675
DI Yogyakarta	80	7	6	2	0	1	96
Jawa Timur	374	266	75	36	6	1	758
Banten	98	16	30	16	0	0	160
Bali	226	33	25	8	0	0	292
Nusa Tenggara Barat	87	51	88	35	3	0	264
Nusa Tenggara Timur	170	105	116	27	1	0	419
Kalimantan Barat	161	149	237	109	35	0	691
Kalimantan Tengah	291	30	43	6	92	16	478
Kalimantan Selatan	244	97	62	63	15	0	481
Kalimantan Timur	270	121	63	6	0	0	460
Sulawesi Utara	308	149	133	26	2	7	625
Sulawesi Tengah	634	96	150	46	0	1	927
Sulawesi Selatan	300	144	154	41	2	1	642
Sulawesi Tenggara	182	286	168	46	4	0	686
Gorontalo	69	9	127	24	0	0	229
Sulawesi Barat	118	54	61	31	1	1	266
Maluku	114	315	75	30	11	0	545
Maluku Utara	175	15	69	25	2	1	287
Papua Barat	229	74	25	14	14	12	368
Papua	271	128	113	207	50	2	771
Indonesia	6.997	3.201	2.975	1.404	309	46	14.932

Sumber : Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga

Tabel 4.12.
Panjang Jembatan Nasional Menurut Provinsi dan Kondisi
Status : 5 Desember 2014

Provinsi	Panjang Jembatan (m)						Total
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Kritis	Runtuh/ Putus	
Aceh	14.807,7	2.366,1	2.954,9	1.871,2	77,7	0,0	22.077,6
Sumatera Utara	2.811,9	4.932,3	8.103,4	2.539,4	384,4	0,0	18.771,4
Sumatera Barat	4.767,5	2.613,0	2.342,2	2.225,4	220,2	36,0	12.204,3
Riau	682,1	1.626,9	4.625,6	5.095,0	121,9	0,0	12.151,5
Jambi	1.247,7	2.400,3	2.463,6	338,8	97,4	40,3	6.588,1
Sumatera Selatan	4.791,1	2.776,5	2.659,5	2.752,1	0,0	0,0	12.979,2
Bengkulu	1.667,5	1.023,2	2.946,6	2.549,6	841,2	0,0	9.028,1
Lampung	3.713,5	4.865,9	2.262,8	325,4	24,2	0,0	11.191,8
Kepulauan Bangka Belitung	685,1	408,1	931,4	40,4	0,0	0,0	2.065,0
Kepulauan Riau	472,1	94,5	1.424,4	2.017,1	0,0	0,0	4.008,1
DKI Jakarta	11.437,8	695,0	656,7	213,1	10,2	0,0	13.012,8
Jawa Barat	16.125,8	716,8	1.157,4	752,2	189,0	28,0	18.969,2
Jawa Tengah	9.638,0	2.854,4	3.703,9	1.822,2	218,7	0,0	18.237,2
DI Yogyakarta	3.786,8	637,8	353,0	25,2	0,0	177,9	4.980,7
Jawa Timur	7.077,9	6.115,1	2.541,5	1.124,7	218,1	31,0	17.108,3
Banten	2.477,7	240,8	966,3	393,5	0,0	0,0	4.078,3
Bali	6.442,3	998,5	506,1	283,5	0,0	0,0	8.230,4
Nusa Tenggara Barat	1.356,5	1.246,0	1.377,8	351,3	83,0	0,0	4.414,6
Nusa Tenggara Timur	3.864,0	1.933,9	1.779,9	275,3	10,2	0,0	7.863,3
Kalimantan Barat	4.023,9	2.985,8	6.122,4	2.281,4	700,4	0,0	16.113,9
Kalimantan Tengah	5.581,6	1.138,0	3.173,2	980,0	1.009,5	220,5	12.102,8
Kalimantan Selatan	5.469,3	2.644,0	1.436,5	1.111,8	406,4	0,0	11.068,0
Kalimantan Timur	8.057,7	2.440,8	2.160,2	519,3	0,0	0,0	13.178,0
Sulawesi Utara	6.680,2	3.105,0	2.362,6	434,9	30,0	135,4	12.748,1
Sulawesi Tengah	14.049,1	2.174,5	2.726,1	630,4	0,0	46,0	19.626,1

Provinsi	Panjang Jembatan (m)						
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Kritis	Runtuh/ Putus	Total
Sulawesi Selatan	5.648,3	3.130,5	5.197,2	1.139,9	160,0	125,0	15.400,9
Sulawesi Tenggara	3.154,8	4.497,9	2.494,5	634,4	56,8	0,0	10.838,4
Gorontalo	1.670,5	131,0	2.330,6	568,3	0,0	0,0	4.700,4
Sulawesi Barat	2.630,6	1.395,1	1.639,9	1.147,7	23,0	60,7	6.897,0
Maluku	4.913,5	8.168,6	1.945,8	611,7	329,8	0,0	15.969,4
Maluku Utara	2.943,9	414,8	1.056,0	482,8	47,0	30,5	4.975,0
Papua Barat	6.651,8	1.356,1	601,3	463,5	169,5	730,0	9.972,2
Papua	6.796,5	4.386,2	3.689,9	4.633,3	886,7	140,0	20.532,6
Indonesia	176.124,7	76.513,4	80.693,2	40.634,8	6.315,3	1.801,3	382.082,7

Sumber : Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga

Tabel 4.13.

Persentase Jumlah Jembatan Nasional Menurut Provinsi dan Kondisi

Status : 5 Desember 2014

Provinsi	Jumlah Jembatan (%)					
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Kritis	Runtuh/ Putus
Aceh	76,15	7,25	7,80	8,35	0,44	0,00
Sumatera Utara	13,44	27,91	41,49	15,75	1,41	0,00
Sumatera Barat	44,54	23,95	17,02	12,61	1,68	0,21
Riau	8,84	24,59	40,33	25,41	0,83	0,00
Jambi	31,62	25,64	35,04	6,41	0,85	0,43
Sumatera Selatan	53,71	16,88	12,28	17,14	0,00	0,00
Bengkulu	23,94	15,14	26,76	22,89	11,27	0,00
Lampung	34,71	48,51	13,79	2,53	0,46	0,00
Kepulauan Bangka Belitung	39,58	29,17	28,13	3,13	0,00	0,00
Kepulauan Riau	30,19	9,43	37,74	22,64	0,00	0,00
DKI Jakarta	61,11	14,29	19,05	4,76	0,79	0,00

Provinsi	Jumlah Jembatan (%)					
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Kritis	Runtuh/ Putus
Jawa Barat	85,99	3,92	7,53	2,11	0,30	0,15
Jawa Tengah	51,70	16,59	21,63	9,19	0,89	0,00
DI Yogyakarta	83,33	7,29	6,25	2,08	0,00	1,04
Jawa Timur	49,34	35,09	9,89	4,75	0,79	0,13
Banten	61,25	10,00	18,75	10,00	0,00	0,00
Bali	77,40	11,30	8,56	2,74	0,00	0,00
Nusa Tenggara Barat	32,95	19,32	33,33	13,26	1,14	0,00
Nusa Tenggara Timur	40,57	25,06	27,68	6,44	0,24	0,00
Kalimantan Barat	23,30	21,56	34,30	15,77	5,07	0,00
Kalimantan Tengah	60,88	6,28	9,00	1,26	19,25	3,35
Kalimantan Selatan	50,73	20,17	12,89	13,10	3,12	0,00
Kalimantan Timur	58,70	26,30	13,70	1,30	0,00	0,00
Sulawesi Utara	49,28	23,84	21,28	4,16	0,32	1,12
Sulawesi Tengah	68,39	10,36	16,18	4,96	0,00	0,11
Sulawesi Selatan	46,73	22,43	23,99	6,39	0,31	0,16
Sulawesi Tenggara	26,53	41,69	24,49	6,71	0,58	0,00
Gorontalo	30,13	3,93	55,46	10,48	0,00	0,00
Sulawesi Barat	44,36	20,30	22,93	11,65	0,38	0,38
Maluku	20,92	57,80	13,76	5,50	2,02	0,00
Maluku Utara	60,98	5,23	24,04	8,71	0,70	0,35
Papua Barat	62,23	20,11	6,79	3,80	3,80	3,26
Papua	35,15	16,60	14,66	26,85	6,49	0,26
Indonesia	46,86	21,44	19,92	9,40	2,07	0,31

Sumber : Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga

Tabel 4.14.
 Persentase Panjang Jembatan Nasional Menurut Provinsi dan Kondisi
 Status : 5 Desember 2014

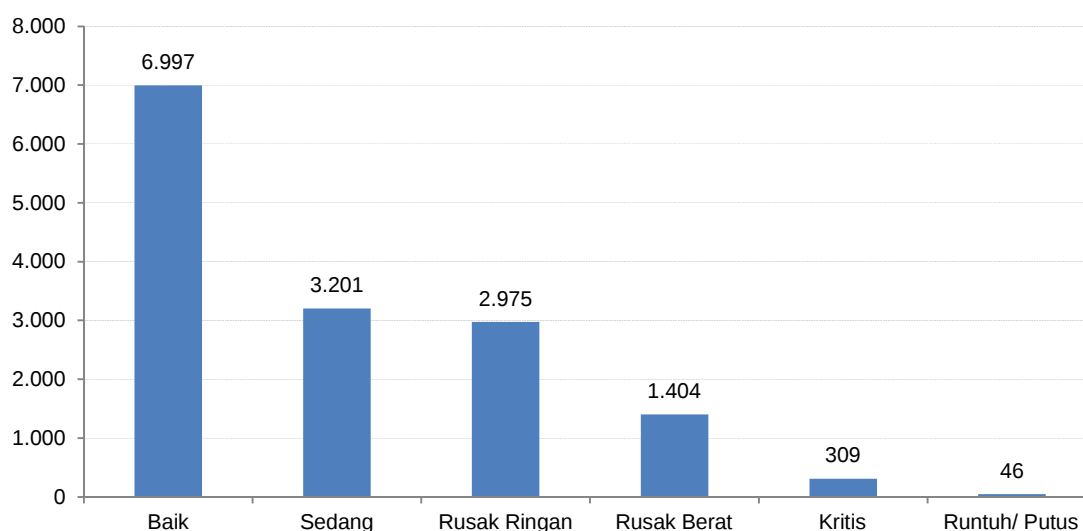
Provinsi	Panjang Jembatan (%)					
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Kritis	Runtuh/ Putus
Aceh	67,07	10,72	13,38	8,48	0,35	0,00
Sumatera Utara	14,98	26,28	43,17	13,53	2,05	0,00
Sumatera Barat	39,06	21,41	19,19	18,23	1,80	0,29
Riau	5,61	13,39	38,07	41,93	1,00	0,00
Jambi	18,94	36,43	37,39	5,14	1,48	0,61
Sumatera Selatan	36,91	21,39	20,49	21,2	0,00	0,00
Bengkulu	18,47	11,33	32,64	28,24	9,32	0,00
Lampung	33,18	43,48	20,22	2,91	0,22	0,00
Kepulauan Bangka Belitung	33,18	19,76	45,10	1,96	0,00	0,00
Kepulauan Riau	11,78	2,36	35,54	50,33	0,00	0,00
DKI Jakarta	87,90	5,34	5,05	1,64	0,08	0,00
Jawa Barat	85,01	3,78	6,10	3,97	1,00	0,15
Jawa Tengah	52,85	15,65	20,31	9,99	1,20	0,00
DI Yogyakarta	76,03	12,81	7,09	0,51	0,00	3,57
Jawa Timur	41,37	35,74	14,86	6,57	1,27	0,18
Banten	60,75	5,90	23,69	9,65	0,00	0,00
Bali	78,27	12,13	6,15	3,44	0,00	0,00
Nusa Tenggara Barat	30,73	28,22	31,21	7,96	1,88	0,00
Nusa Tenggara Timur	49,14	24,59	22,64	3,50	0,13	0,00
Kalimantan Barat	24,97	18,53	37,99	14,16	4,35	0,00
Kalimantan Tengah	46,12	9,40	26,22	8,10	8,34	1,82
Kalimantan Selatan	49,42	23,89	12,98	10,05	3,67	0,00
Kalimantan Timur	61,15	18,52	16,39	3,94	0,00	0,00
Sulawesi Utara	52,40	24,36	18,53	3,41	0,24	1,06
Sulawesi Tengah	71,58	11,08	13,89	3,21	0,00	0,23
Sulawesi Selatan	36,68	20,33	33,75	7,40	1,04	0,81
Sulawesi Tenggara	29,11	41,5	23,02	5,85	0,52	0,00
Gorontalo	35,54	2,79	49,58	12,09	0,00	0,00
Sulawesi Barat	38,14	20,23	23,78	16,64	0,33	0,88

Provinsi	Panjang Jembatan (%)					
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Kritis	Runtuh/ Putus
Maluku	30,77	51,15	12,18	3,83	2,07	0,00
Maluku Utara	59,17	8,34	21,23	9,70	0,94	0,61
Papua Barat	66,70	13,6	6,03	4,65	1,70	7,32
Papua	33,10	21,36	17,97	22,57	4,32	0,68
Indonesia	46,10	20,03	21,12	10,64	1,65	0,47

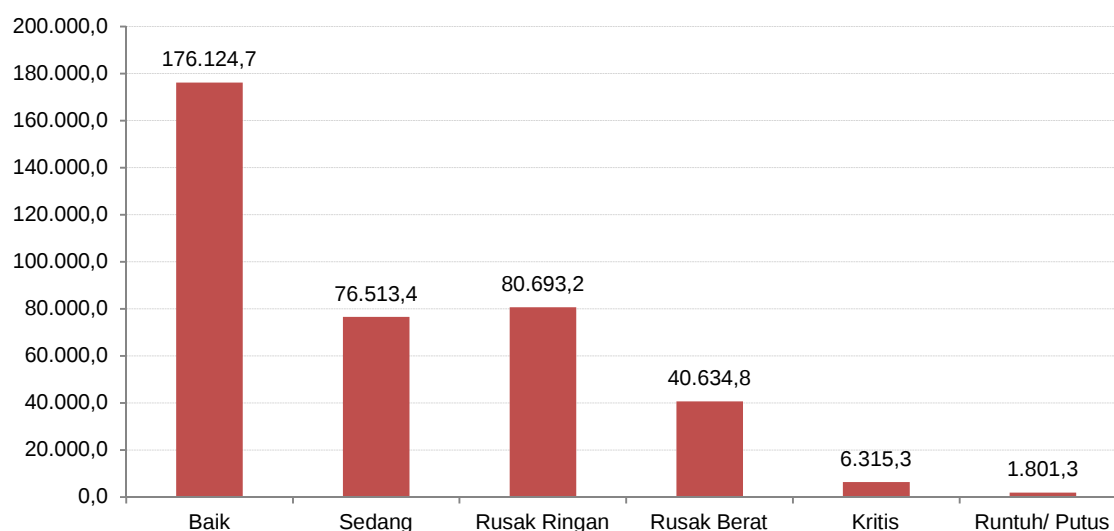
Sumber : Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga

Kondisi jembatan berdasarkan monitoring diklasifikasikan menjadi 6 kondisi, yaitu baik, sedang, rusak ringan, rusak berat, kritis dan putus atau tidak ada jembatan. Hasil monitoring di tahun 2014 menunjukkan ada sebanyak 6.997 unit jembatan nasional dalam kondisi baik, 3.201 sedang, 2.975 rusak ringan, 1.404 rusak berat, 309 kritis, dan 46 unit dalam kondisi putus atau tidak ada jembatan. Jumlah tersebut sama dengan 176.124,7 m jembatan dalam kondisi baik, 76.513,4 m sedang, 80.693,2 m rusak ringan, 40.634,8 m rusak berat, 6.315,3 kritis, dan 1.801,3 putus atau tidak ada jembatan.

Gambar 4.4.
Jumlah Jembatan Nasional Menurut Kondisi
Status : 5 Desember 2014



Gambar 4.5.
Panjang Jembatan Nasional Menurut Kondisi
Status : 5 Desember 2014



Sementara dari kemantapannya, yang termasuk jembatan mantap adalah kondisi baik, sedang dan rusak ringan, sementara tidak mantap adalah rusak berat, kritis dan runtuh/putus. Dilihat dari kemantapannya, sebanyak 13.173 unit atau 333.331,3 m jembatan nasional termasuk mantap dan 1.759 unit atau 48.751,4 m jembatan tidak mantap.

Tabel 4.15.
Jumlah dan Panjang Jembatan Nasional
Menurut Provinsi dan Kemantapan (Status : 5 Desember 2014)

Provinsi	Mantap				Tidak Mantap			
	Jumlah		Panjang		Jumlah		Panjang	
	unit	%	m	%	unit	%	m	%
Aceh	830	91,2	20.128,7	91,2	80	8,79	1.948,9	8,83
Sumatera Utara	647	82,8	15.847,6	84,4	134	17,20	2.923,8	15,60
Sumatera Barat	407	85,5	9.722,7	79,7	69	14,50	2.481,6	20,30

Provinsi	Mantap				Tidak Mantap			
	Jumlah		Panjang		Jumlah		Panjang	
	unit	%	m	%	unit	%	m	%
Riau	267	73,8	6.934,6	57,1	95	26,20	5.216,9	42,90
Jambi	216	92,3	6.111,6	92,8	18	7,69	476,5	7,23
Sumatera Selatan	324	82,9	10.227,1	78,8	67	17,10	2.752,1	21,20
Bengkulu	187	65,9	5.637,3	62,4	97	34,20	3.390,8	37,60
Lampung	422	97,0	10.842,2	96,9	13	2,99	349,6	3,12
Kepulauan Bangka Belitung	93	96,9	2.024,6	98,0	3	3,13	40,4	1,96
Kepulauan Riau	41	77,4	1.991,0	49,7	12	22,60	2.017,1	50,30
DKI Jakarta	119	94,4	12.789,5	98,3	7	5,56	223,3	1,72
Jawa Barat	647	97,4	18.000,0	94,9	17	2,56	969,2	5,11
Jawa Tengah	607	89,9	16.196,3	88,8	68	10,10	2.040,9	11,20
DI Yogyakarta	93	96,9	4.777,6	95,9	3	3,13	203,1	4,08
Jawa Timur	715	94,3	15.734,5	92,0	43	5,67	1.373,8	8,03
Banten	144	90,0	3.684,8	90,4	16	10,00	393,5	9,65
Bali	284	97,3	7.946,9	96,6	8	2,74	283,5	3,44
Nusa Tenggara Barat	226	85,6	3.980,3	90,2	38	14,40	434,3	9,84
Nusa Tenggara Timur	391	93,3	7.577,8	96,4	28	6,68	285,5	3,63
Kalimantan Barat	547	79,2	13.132,1	81,5	144	20,80	2.981,8	18,50
Kalimantan Tengah	364	76,2	9.892,8	81,7	114	23,90	2.210,0	18,30
Kalimantan Selatan	403	83,8	9.549,8	86,3	78	16,20	1.518,2	13,70
Kalimantan Timur	454	98,7	12.658,7	96,1	6	1,30	519,3	3,94
Sulawesi Utara	590	94,4	12.147,8	95,3	35	5,60	600,3	4,71
Sulawesi Tengah	880	94,9	18.949,7	96,6	47	5,07	676,4	3,45
Sulawesi Selatan	598	93,2	13.976,0	90,8	44	6,85	1.424,9	9,25
Sulawesi Tenggara	636	92,7	10.147,2	93,6	50	7,29	691,2	6,38
Gorontalo	205	89,5	4.132,1	87,9	24	10,50	568,3	12,10
Sulawesi Barat	233	87,6	5.665,6	82,2	33	12,40	1.231,4	17,90
Maluku	504	92,5	15.027,9	94,1	41	7,52	941,5	5,90
Maluku Utara	259	90,2	4.414,7	88,7	28	9,76	560,3	11,30
Papua Barat	328	89,1	8.609,2	86,3	40	10,90	1.363,0	13,70
Papua	512	66,4	14.872,6	72,4	259	33,60	5.660,0	27,60
Indonesia	13.173	88,2	333.331,3	87,2	1.759	11,80	48.751,4	12,80

Sumber : Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga

E. Analisis Statistik Infrastruktur Jalan

Jaringan jalan menjadi bagian penting dalam sistem transportasi nasional. Pemeliharaan dan pembangunan terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas layanan jaringan jalan. Jaringan jalan juga merupakan penunjang utama dalam melakukan kegiatan perekonomian dan dapat menjadi media untuk menjalin komunikasi dan interaksi antar masyarakat agar terjaga kesatuan dan dapat berkembang secara lebih merata.

Berdasarkan rencana tata ruang pulau/kepulauan yang tercantum dalam PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar dan gugusan kepulauan yang memiliki satu kesatuan ekosistem. Pulau-pulau besar tersebut meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Sementara gugusan pulau meliputi Kepulauan Maluku dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Tahun 2012 berjumlah 251,86 juta jiwa. Penyebaran penduduk berdasarkan pulau besar adalah: Pulau Sumatera dengan luas wilayahnya 25,16% dihuni oleh 23,51% penduduk, Pulau Jawa dan Bali dengan luas 7,08% dihuni oleh 54,39% penduduk, Pulau Nusa Tenggara dengan luas 3,52% dihuni oleh 4,27% penduduk, Pulau Kalimantan dengan luas 28,48% dihuni oleh 6,41% penduduk, Pulau Sulawesi dengan luas 9,87% dihuni oleh 8,08% penduduk, Pulau Maluku dan Maluku Utara dengan luas 4,13% dihuni oleh 1,24% penduduk, serta Papua dan Papua Barat dengan luas 21,77% dihuni oleh 2,11% penduduk. Sementara penyebaran kendaraan bermotor secara umum urutannya mengikuti penyebaran penduduk karena berkaitan dengan alat transportasi masyarakat.

Tabel 4.16.
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor
Menurut Pulau Besar di Indonesia Tahun 2012

Pulau Besar	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kendaraan Bermotor (unit)
Sumatera	59.205.916,00	480.793,28	23.590.794,00
Jawa & Bali	136.986.487,00	135.218,34	51.885.405,00
Nusa Tenggara	10.742.475,00	67.290,42	2.713.944,00
Kalimantan	16.134.139,00	544.150,07	7.167.013,00
Sulawesi	20.348.918,00	188.522,36	7.743.408,00
Maluku & Maluku Utara	3.124.602,00	78.896,53	605.443,00
Papua & Papua Barat	5.315.403,00	416.060,32	667.317,00
Indonesia	251.857.940,00	1.910.931,32	94.373.324,00

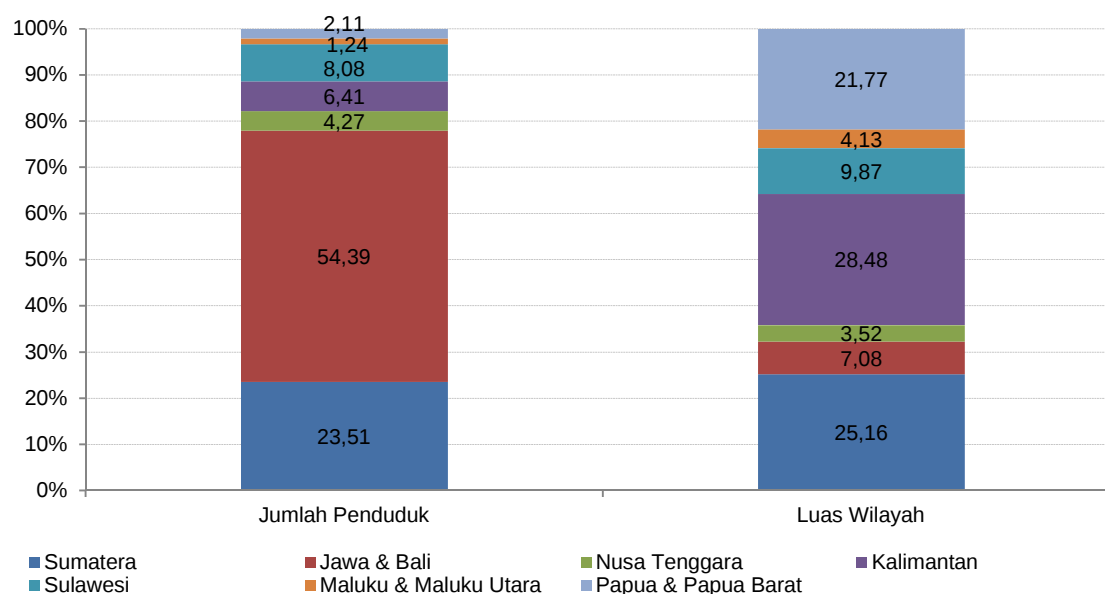
Sumber : Jumlah Penduduk : Data Agregat Kependudukan per Kecamatan, Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2012

Luas Wilayah : Statistik Indonesia 2014

Jumlah Kendaraan Bermotor : Kepolisian Republik Indonesia, Statistik Indonesia 2014

Catatan: Jumlah Kendaraan Bermotor terdiri dari mobil penumpang, bus, truk, dan sepeda motor

Gambar 4.6.
Sebaran Penduduk dan Luas Wilayah Indonesia
Menurut Pulau Besar (%)



Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan harus memperhatikan tiga aspek yang amat penting secara bersamaan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Selain untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan, jaringan jalan juga berperan untuk menyeimbangkan pengembangan kawasan, mengamankan teritorial dan mempersatu keutuhan NKRI. Melihat kondisi serta tingkat perkembangan yang belum merata, pembangunan jalan dilakukan dengan pendekatan yang memperhatikan tingkat perkembangan masing-masing wilayah dan pembangunan berkelanjutan. Dari “Jaringan Jalan Nasional” di Indonesia, diketahui bahwa ada tiga kawasan perkembangan jalan di Indonesia, yaitu wilayah sudah berkembang, wilayah sedang berkembang, dan wilayah pengembangan baru.

Wilayah sudah berkembang meliputi Pulau Sumatera, Jawa dan Bali. Jaringan jalan di wilayah sudah berkembang yang berpotensi penting adalah Lintas Pantai Utara Pulau Jawa, Lintas Timur Sumatera dan Lintas Tengah Sumatera yang juga menjadi bagian dari jaringan jalan ASEAN dan *Asian Highway*. Di wilayah sudah berkembang, kegiatan ekonominya relatif telah maju dengan dukungan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) barat (Selat Sunda – Laut Natuna), begitu pula dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan yang begitu besar, maka mobilitas penduduk di wilayah ini juga tinggi.

Wilayah sedang berkembang meliputi Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat. Di wilayah sedang berkembang jaringannya relatif masih dalam pengembangan, diantaranya menjadi bagian dari jaringan *ASEAN Highway* dan *Pan Borneo Highway*. Pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dicirikan oleh kegiatan-kegiatan yang mulai berkembang dengan dukungan ALKI tengah (Selat Lombok – Selat Makassar). Keberadaan jaringan jalan akan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Selain itu, keberadaan jaringan jalan di wilayah sedang berkembang, terutama di Pulau Kalimantan, juga sebagai identitas bangsa. Hal ini mengingat di Pulau Kalimantan terdapat perbatasan darat langsung dengan negara tetangga.

Kawasan perkembangan jalan yang ketiga adalah wilayah pengembangan baru meliputi Kepulauan Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Wilayah ini didukung oleh ALKI timur (Laut Arafuru – Laut Banda – Laut Maluku). Di wilayah

pengembangan baru lokasi kegiatan ekonominya lebih banyak menyebar dan terisolasi satu dengan lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam di bidang pertanian, sumber daya air dan potensi kelautan memerlukan sistem transportasi terpadu (laut, darat dan udara). Keberadaan jaringan jalan selain akan membantu kegiatan ekonomi, juga sangat dibutuhkan masyarakat untuk menghubungkan daerah-daerah yang masih terisolasi.

Tabel 4.17.
Panjang Jalan Menurut Pulau Besar dan Kewenangannya (km)
Tahun 2012

Pulau Besar	Panjang Jalan ¹⁾			
	Nasional	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah
Sumatera	11.568,12	15.247,00	147.177,00	173.992,12
Jawa & Bali	6.146,24	16.153,00	99.898,00	122.197,24
Nusa Tenggara	2.038,85	3.580,00	22.712,00	28.330,85
Kalimantan	6.363,64	5.730,00	44.689,00	56.782,64
Sulawesi	7.799,77	6.274,00	68.734,00	82.807,77
Maluku & Maluku Utara	1.578,54	3.479,00	8.363,00	13.420,54
Papua & Papua Barat	3.074,68	3.179,00	18.184,00	24.437,68
Indonesia	38.569,84	53.642,00	409.757,00	501.968,84

Sumber : Jalan Nasional : Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum No. 630/KPTS/M/2009

Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, Statistik Indonesia 2014

Catatan : ¹⁾ Tidak termasuk jalan tol

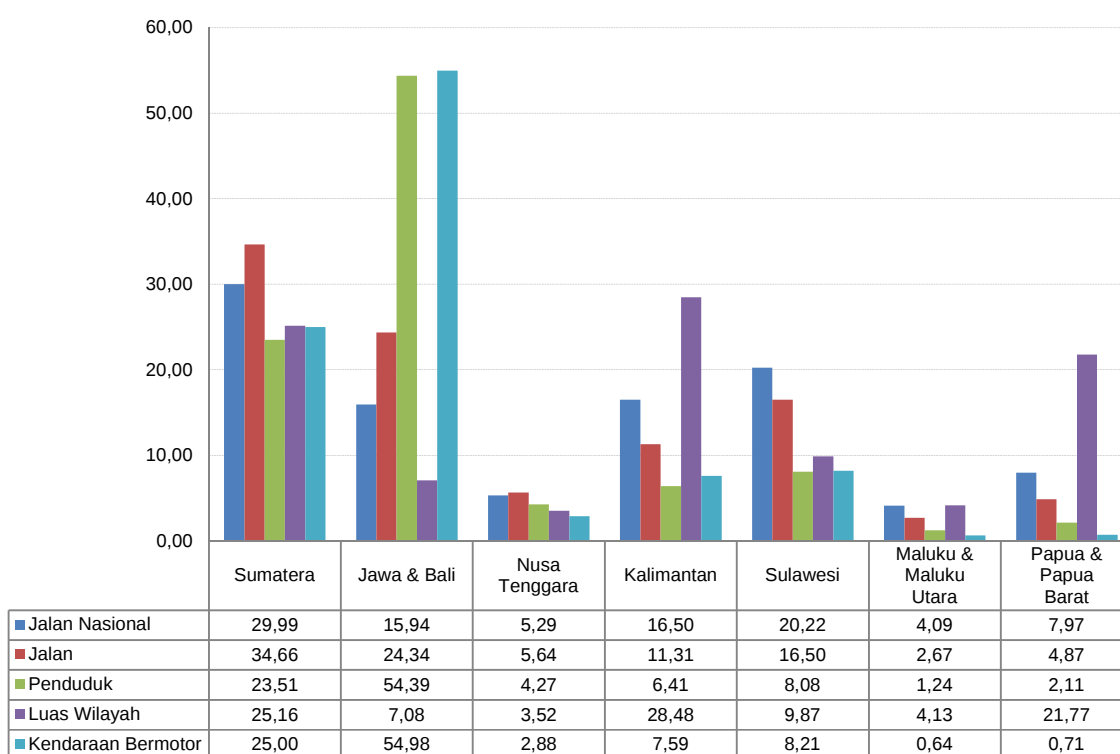
Tabel 4.18.
Persentase Panjang Jalan, Penduduk, Luas Wilayah dan Kendaraan Bermotor
Menurut Pulau Besar dan Kewenangannya Tahun 2012

Pulau Besar	Jalan Nasional	Jalan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Jumlah Kendaraan Bermotor
Sumatera	29,99	34,66	23,51	25,16	25,00
Jawa & Bali	15,94	24,34	54,39	7,08	54,98
Nusa Tenggara	5,29	5,64	4,27	3,52	2,88

Pulau Besar	Jalan Nasional	Jalan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Jumlah Kendaraan Bermotor
Kalimantan	16,50	11,31	6,41	28,48	7,59
Sulawesi	20,22	16,50	8,08	9,87	8,21
Maluku & Maluku Utara	4,09	2,67	1,24	4,13	0,64
Papua & Papua Barat	7,97	4,87	2,11	21,77	0,71
Indonesia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar 4.7.

Persentase Panjang Jalan, Penduduk, Luas Wilayah dan Kendaraan Bermotor Menurut Pulau Besar dan Kewenangannya Tahun 2012



Tabel 4.19.

Rasio Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan
Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Panjang Jalan Tahun 2012

Pulau Besar	Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Panjang Jalan	Rasio Luas Wilayah Terhadap Panjang Jalan	Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Panjang Jalan
Sumatera	340,28	2,76	135,59
Jawa & Bali	1.121,03	1,11	424,60
Nusa Tenggara	379,18	2,38	95,79
Kalimantan	284,14	9,58	126,22
Sulawesi	245,74	2,28	93,51
Maluku & Maluku Utara	232,82	5,88	45,11
Papua & Papua Barat	217,51	17,03	27,31
Indonesia	501,74	3,81	188,01

Tabel 4.20.

Rasio Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan
Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Panjang Jalan Nasional Tahun 2012

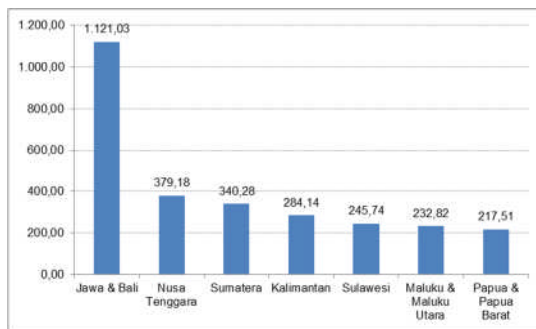
Pulau Besar	Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Panjang Jalan Nasional	Rasio Luas Wilayah Terhadap Panjang Jalan Nasional	Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Panjang Jalan Nasional
Sumatera	5.118,02	41,56	2.039,29
Jawa & Bali	22.287,85	22,00	8.441,81
Nusa Tenggara	5.268,89	33,00	1.331,12
Kalimantan	2.535,36	85,51	1.126,24
Sulawesi	2.608,91	24,17	992,77
Maluku & Maluku Utara	1.979,43	49,98	383,55
Papua & Papua Barat	1.728,77	135,32	217,04
Indonesia	6.529,92	49,54	2.446,82

Dalam Tabel 4.19. disajikan angka rasio jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah kendaraan bermotor terhadap panjang jalan (nasional, provinsi dan kabupaten/kota) menurut pulau besar. Sementara angka rasio terhadap panjang jalan nasional terdapat pada Tabel 4.20. Nilai tersebut menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk, luas wilayah, dan kendaraan bermotor terhadap panjang jalan (nasional, provinsi dan kabupaten/kota) dan panjang jalan nasional di pulau-pulau besar di Indonesia. Perbandingan jumlah penduduk dan kendaraan bermotor terhadap panjang jalan dapat digunakan sebagai informasi tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah. Jika nilai perbandingan antara jumlah penduduk dan kendaraan bermotor terhadap panjang jalan tinggi, maka penggunaan jalan di wilayah tersebut juga semakin tinggi, meskipun tidak mencerminkan kepadatan jalannya.

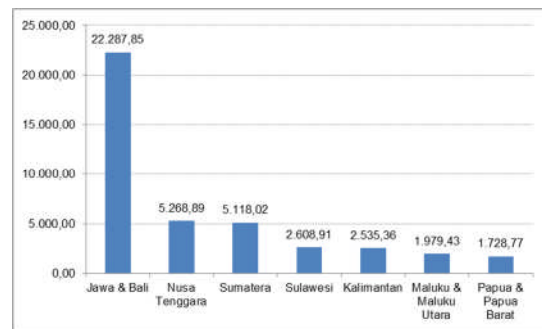
Dari Tabel 4.19. dan 4.20. diketahui nilai rasio jumlah penduduk terhadap panjang jalan paling tinggi berada di Jawa dan Bali. Begitu pula dengan urutan rasio pada jalan nasional. Untuk nilai rasio jumlah kendaraan bermotor terhadap panjang jalan, yang paling tinggi berada di Jawa dan Bali, Sumatera dan Kalimantan. Sementara pada rasio terhadap panjang jalan nasionalnya, paling tinggi berada di Jawa dan Bali, Sumatera dan Nusa Tenggara. Walaupun Nusa Tenggara dan Kalimantan termasuk dalam wilayah yang akan berkembang dan sedang berkembang, namun penggunaan jalannya cukup tinggi dilihat dari jumlah penduduk dan kendaraan bermotornya.

Nilai rasio berikutnya adalah perbandingan luas wilayah terhadap panjang jalan yang dapat digunakan sebagai informasi proporsi jalan terhadap luas wilayah. Nilai rasio luas wilayah terhadap panjang jalan yang besar, berarti proporsi panjang jalan terhadap luas wilayahnya masih kecil. Papua dan Papua Barat sebagai pulau yang nilai perbandingan luas wilayah terhadap panjang jalan paling besar, berarti panjang jalan di wilayah ini relatif masih kecil dibandingkan dengan luas wilayahnya, baik untuk panjang jalan keseluruhan maupun jalan nasional saja.

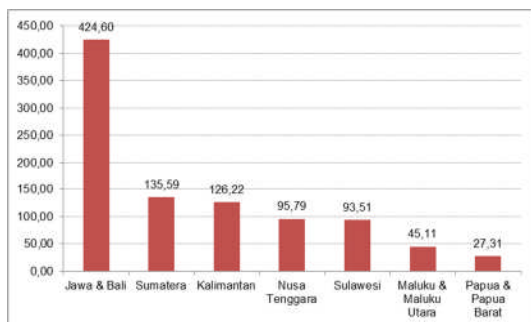
Gambar 4.8.
Rasio Jumlah Penduduk terhadap
Panjang Jalan
Menurut Pulau Besar



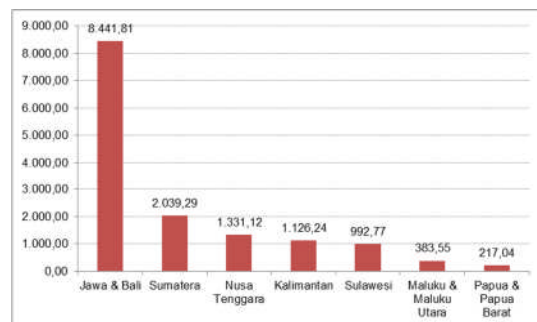
Gambar 4.9.
Rasio Jumlah Penduduk terhadap
Panjang Jalan Nasional Menurut Pulau
Besar



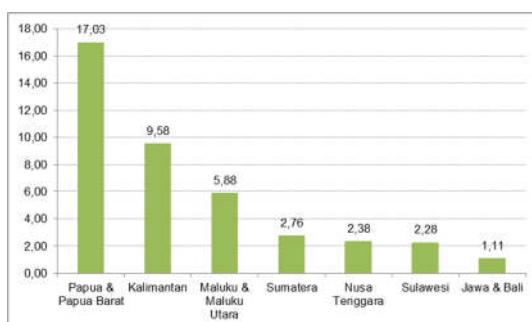
Gambar 4.10.
Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor
terhadap Panjang Jalan
Menurut Pulau Besar



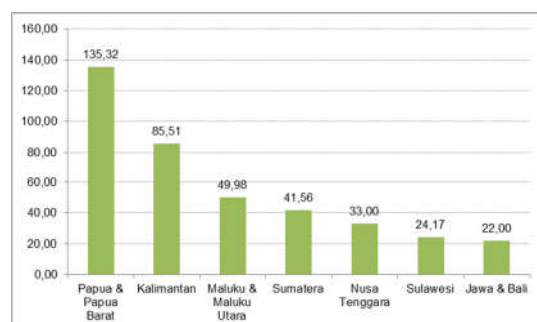
Gambar 4.11.
Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor
terhadap Panjang Jalan Nasional
Menurut Pulau Besar



Gambar 4.12
Rasio Luas Wilayah terhadap Panjang
Jalan Menurut Pulau Besar



Gambar 4.13.
Rasio Luas Wilayah terhadap Panjang
Jalan Nasional Menurut Pulau Besar



Rasio jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah kendaraan bermotor terhadap panjang jalan juga dapat dilihat pada tingkat provinsi. Untuk rasio jumlah penduduk dan kendaraan bermotor terhadap panjang jalannya, beberapa provinsi yang paling tinggi nilainya pada umumnya ada di Pulau Jawa dan Bali, yaitu Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dan Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Sementara untuk perbandingan luas wilayah terhadap panjang jalan, provinsi yang nilainya paling tinggi pada umumnya di wilayah Papua dan Papua Barat, Kalimantan serta Maluku dan Maluku Utara.

Tabel 4.21.

Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor
Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2012

Provinsi	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kendaraan Bermotor (unit) *)
Aceh	5.015.234	57.956,00	2.424.563
Sumatera Utara	15.227.719	72.981,23	5.332.725
Sumatera Barat	5.617.977	42.012,89	1.800.512
Riau	6.456.322	87.023,66	2.333.180
Jambi	3.532.126	50.058,16	3.420.540
Sumatera Selatan	8.528.719	91.592,43	3.793.024
Bengkulu	1.996.538	19.919,33	873.037
Lampung	9.586.492	34.623,80	1.975.955
Kepulauan Bangka Belitung	1.349.199	16.424,06	679.674
Kepulauan Riau	1.895.590	8.201,72	957.584
DKI Jakarta	9.603.417	664,01	13.283.545
Jawa Barat	39.910.274	35.377,76	6.871.721
Jawa Tengah	32.578.357	32.800,69	11.146.912
DI Yogyakarta	3.458.029	3.133,15	3.477.261
Jawa Timur	37.269.885	47.799,75	12.225.306
Banten	9.938.820	9.662,92	1.121.170
Bali	4.227.705	5.780,06	3.759.490
Nusa Tenggara Barat	5.398.573	18.572,32	1.649.466
Nusa Tenggara Timur	5.343.902	48.718,10	1.064.478

Provinsi	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kendaraan Bermotor (unit) *)
Kalimantan Barat	5.193.272	147.307,00	1.868.025
Kalimantan Tengah	2.640.070	153.564,50	1.072.144
Kalimantan Selatan	4.145.843	38.744,23	1.921.022
Kalimantan Timur	4.154.954	204.534,34	2.305.822
Sulawesi Utara	2.617.155	13.851,64	1.099.021
Sulawesi Tengah	2.935.343	61.841,29	2.050.281
Sulawesi Selatan	9.368.107	46.717,48	3.048.988
Sulawesi Tenggara	2.691.623	38.067,70	1.176.558
Gorontalo	1.147.528	11.257,07	368.560
Sulawesi Barat	1.589.162	16.787,18	-
Maluku	1.866.248	46.914,03	544.236
Maluku Utara	1.258.354	31.982,50	61.207
Papua Barat	1.091.171	97.024,27	-
Papua	4.224.232	319.036,05	667.317
Indonesia	251.857.940	1.910.931,32	94.373.324

Sumber: Jumlah Penduduk : Data Agregat Kependudukan per Kecamatan, Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2012
 Luas Wilayah : Statistik Indonesia 2014
 Jumlah Kendaraan Bermotor : Kepolisian Republik Indonesia, Statistik Indonesia 2014\

Catatan : *) Jumlah Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan termasuk Sulawesi Barat, dan Papua termasuk Papua Barat

Jumlah Kendaraan Bermotor terdiri dari mobil penumpang, bus, truk, dan sepeda motor

Tabel 4.22.

Panjang Jalan Menurut Provinsi dan Kewenangannya (km) Tahun 2012

Provinsi	Panjang Jalan ¹⁾			
	Nasional	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah
Aceh	1.803,35	1.702	19.151	22.656
Sumatera Utara	2.249,64	2.752	31.695	36.697
Sumatera Barat	1.212,89	1.154	20.287	22.654
Riau	1.134,47	1.872	21.524	24.530
Jambi	936,48	1.025	11.110	13.071

Provinsi	Panjang Jalan ¹⁾			
	Nasional	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah
Sumatera Selatan	1.444,26	1.748	13.719	16.911
Bengkulu	783,87	1.563	5.994	8.341
Lampung	1.159,57	2.368	15.911	19.439
Kepulauan Bangka Belitung	509,59	551	3.852	4.913
Kepulauan Riau	334,00	512	3.934	4.780
DKI Jakarta	142,65	6.951	-	7.094
Jawa Barat	1.351,13	2.199	20.999	24.549
Jawa Tengah	1.390,57	2.540	25.411	29.342
DI Yogyakarta	223,16	690	3.679	4.592
Jawa Timur	2.027,01	2.001	38.484	42.512
Banten	476,49	889	5.141	6.506
Bali	535,23	883	6.184	7.602
Nusa Tenggara Barat	632,17	1.843	5.592	8.067
Nusa Tenggara Timur	1.406,68	1.737	17.120	20.264
Kalimantan Barat	1.664,55	1.656	11.580	14.901
Kalimantan Tengah	1.714,83	1.708	11.753	15.176
Kalimantan Selatan	866,09	812	9.874	11.552
Kalimantan Timur	2.118,17	1.554	11.482	15.154
Sulawesi Utara	1.319,23	941	5.914	8.174
Sulawesi Tengah	2.181,95	2.037	14.168	18.387
Sulawesi Selatan	1.722,86	1.260	29.796	32.779
Sulawesi Tenggara	1.397,05	1.187	9.275	11.859
Gorontalo	606,70	408	3.679	4.694
Sulawesi Barat	571,98	441	5.902	6.915
Maluku	1.066,65	1.612	4.992	7.671
Maluku Utara	511,89	1.867	3.371	5.750
Papua Barat	963,24	1.306	5.820	8.089
Papua	2.111,44	1.873	12.364	16.348
Indonesia	38.569,84	53.642	409.757	501.969

Sumber : Jalan Nasional : Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum No. 630/KPTS/M/2009

Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, Statistik Indonesia 2014

Catatan : ¹⁾ Tidak termasuk jalan tol

Tabel 4.23.

Rasio Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor
terhadap Panjang Jalan di Indonesia Menurut Provinsi

Provinsi	Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Panjang Jalan	Rasio Luas Wilayah Terhadap Panjang Jalan	Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Panjang Jalan
Aceh	221,36	2,56	107,01
Sumatera Utara	414,96	1,99	145,32
Sumatera Barat	247,99	1,85	79,48
Riau	263,20	3,55	95,11
Jambi	270,22	3,83	261,68
Sumatera Selatan	504,32	5,42	224,29
Bengkulu	239,37	2,39	104,67
Lampung	493,17	1,78	101,65
Kepulauan Bangka Belitung	274,64	3,34	138,35
Kepulauan Riau	396,57	1,72	200,33
DKI Jakarta	1.353,80	0,09	1.872,60
Jawa Barat	1.625,73	1,44	279,92
Jawa Tengah	1.110,31	1,12	379,90
DI Yogyakarta	753,03	0,68	757,22
Jawa Timur	876,69	1,12	287,57
Banten	1.527,52	1,49	172,32
Bali	556,11	0,76	494,52
Nusa Tenggara Barat	669,20	2,30	204,47
Nusa Tenggara Timur	263,72	2,40	52,53
Kalimantan Barat	348,53	9,89	125,37
Kalimantan Tengah	173,97	10,12	70,65
Kalimantan Selatan	358,88	3,35	166,29
Kalimantan Timur	274,18	13,50	152,16
Sulawesi Utara	320,17	1,69	134,45
Sulawesi Tengah	159,64	3,36	111,51

Provinsi	Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Panjang Jalan	Rasio Luas Wilayah Terhadap Panjang Jalan	Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Panjang Jalan
Sulawesi Selatan	285,80	1,43	93,02
Sulawesi Tenggara	226,97	3,21	99,21
Gorontalo	244,48	2,40	78,52
Sulawesi Barat	229,81	2,43	-
Maluku	243,30	6,12	70,95
Maluku Utara	218,85	5,56	10,64
Papua Barat	134,89	11,99	-
Papua	258,39	19,51	40,82

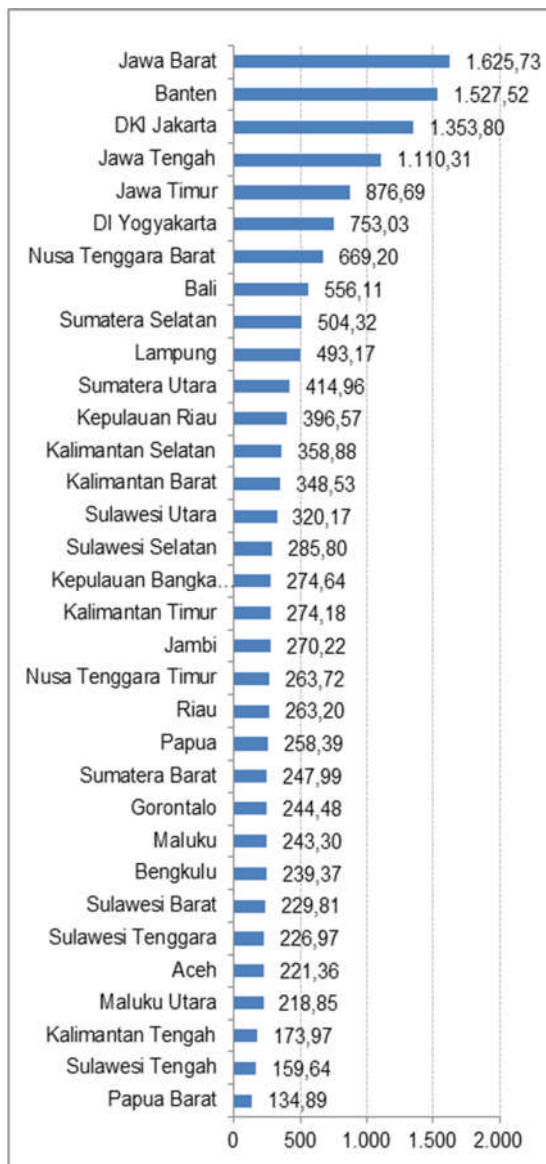
Tabel 4.24.

Rasio Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Panjang Jalan Nasional di Indonesia Menurut Provinsi

Provinsi	Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Panjang Jalan Nasional	Rasio Luas Wilayah Terhadap Panjang Jalan Nasional	Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Panjang Jalan Nasional
Aceh	2.781,07	32,14	1.344,48
Sumatera Utara	6.768,96	32,44	2.370,48
Sumatera Barat	4.631,89	34,64	1.484,48
Riau	5.691,05	76,71	2.056,63
Jambi	3.771,70	53,45	3.652,55
Sumatera Selatan	5.905,25	63,42	2.626,28
Bengkulu	2.547,03	25,41	1.113,75
Lampung	8.267,28	29,86	1.704,04
Kepulauan Bangka Belitung	2.647,62	32,23	1.333,77
Kepulauan Riau	5.675,42	24,56	2.867,02
DKI Jakarta	67.321,54	4,65	93.119,84
Jawa Barat	29.538,44	26,18	5.085,91
Jawa Tengah	23.428,06	23,59	8.016,07

Provinsi	Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Panjang Jalan Nasional	Rasio Luas Wilayah Terhadap Panjang Jalan Nasional	Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Panjang Jalan Nasional
DI Yogyakarta	15.495,74	14,04	15.581,92
Jawa Timur	18.386,63	23,58	6.031,20
Banten	20.858,40	20,28	2.352,98
Bali	7.898,86	10,80	7.024,06
Nusa Tenggara Barat	8.539,75	29,38	2.609,21
Nusa Tenggara Timur	3.798,95	34,63	756,73
Kalimantan Barat	3.119,93	88,50	1.122,24
Kalimantan Tengah	1.539,55	89,55	625,22
Kalimantan Selatan	4.786,85	44,73	2.218,04
Kalimantan Timur	1.961,58	96,56	1.088,59
Sulawesi Utara	1.983,85	10,50	833,08
Sulawesi Tengah	1.345,28	28,34	939,66
Sulawesi Selatan	5.437,53	27,12	1.769,72
Sulawesi Tenggara	1.926,65	27,25	842,17
Gorontalo	1.891,43	18,55	607,48
Sulawesi Barat	2.778,35	29,35	-
Maluku	1.749,63	43,98	510,23
Maluku Utara	2.458,25	62,48	119,57
Papua Barat	1.132,81	100,73	-
Papua	2.000,64	151,10	316,05

Gambar 4.14.
Rasio Jumlah Penduduk
terhadap Panjang Jalan
Menurut Provinsi



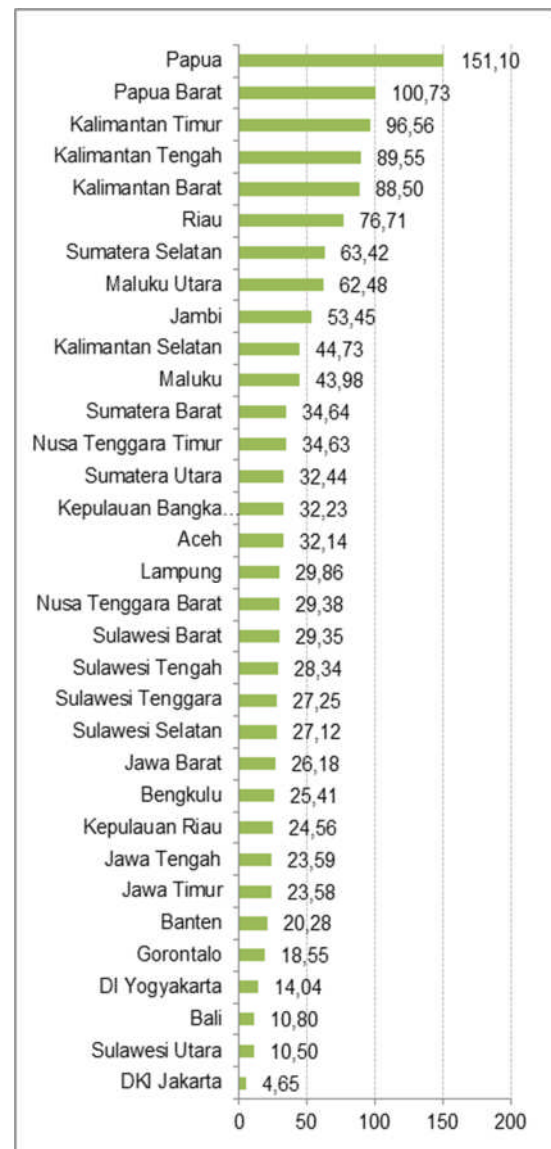
Gambar 4.15.
Rasio Jumlah Penduduk
terhadap Panjang Jalan Nasional
Menurut Provinsi



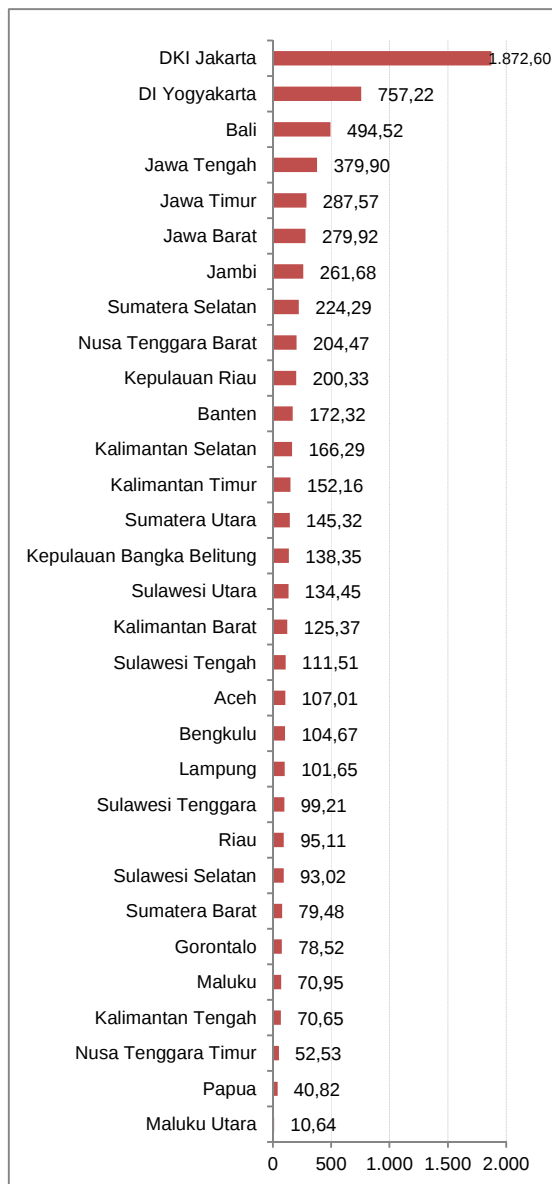
Gambar 4.16.
Rasio Luas Wilayah terhadap
Panjang Jalan
Menurut Provinsi



Gambar 4.17.
Rasio Luas Wilayah terhadap
Panjang Jalan Nasional
Menurut Provinsi



Gambar 4.18.
Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor
terhadap Panjang Jalan
Menurut Provinsi



Gambar 4.19.
Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor
terhadap Panjang Jalan Nasional
Menurut Provinsi



BAB V**STATISTIK INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA****A. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Peningkatan populasi manusia dan aktivitasnya telah membawa dampak terhadap ketersediaan dan kualitas air di alam.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum didefinisikan sebagai satu kesatuan fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. Pengembangan sarana dan prasarana SPAM bertujuan untuk membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Tantangan yang dihadapi dalam penyediaan air minum saat ini antara lain masih rendahnya cakupan pelayanan. Hal ini merupakan refleksi dari pengelolaan yang kurang efisien maupun kurangnya pendanaan untuk pengembangan sistem yang ada. Kondisi PDAM yang tidak sehat juga menjadi salah satu penyebab rendahnya akses masyarakat mendapatkan air minum layak.

Untuk dapat meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum, kondisi PDAM harus sehat sehingga mampu mengoperasikan SPAM secara efektif dan efisien melalui manajemen internal PDAM yang kuat. Evaluasi kinerja penyelenggaraan SPAM PDAM setiap tahunnya menghasilkan PDAM yang memiliki kinerja sehat, kurang sehat, dan sakit. Penilaian kinerja PDAM tersebut dilakukan dengan

melibatkan empat aspek penilaian, yaitu keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia.

Pada tahun 2012 ada sebanyak 375 PDAM di Indonesia. Di 2013 data keanggotaan Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia (Perpamsi) menunjukkan bahwa jumlah penyelenggara SPAM sebanyak 422, dengan 391 diantaranya berbentuk PDAM, dan 31 lainnya merupakan non PDAM. Dari 391 penyelenggara PDAM, 8 di antaranya sudah berubah menjadi non PDAM. Sehingga dari hasil pemutakhiran data Perpamsi tahun 2013 diperoleh jumlah penyelenggara SPAM sebanyak 383.

Evaluasi terhadap kinerja PDAM di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) merupakan kegiatan penilaian dan pengukuran aspek-aspek kinerja sehingga dapat diketahui kualitas dan capaian kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat di wilayahnya serta mengukur tingkat kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan, sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan PDAM yang bersangkutan.

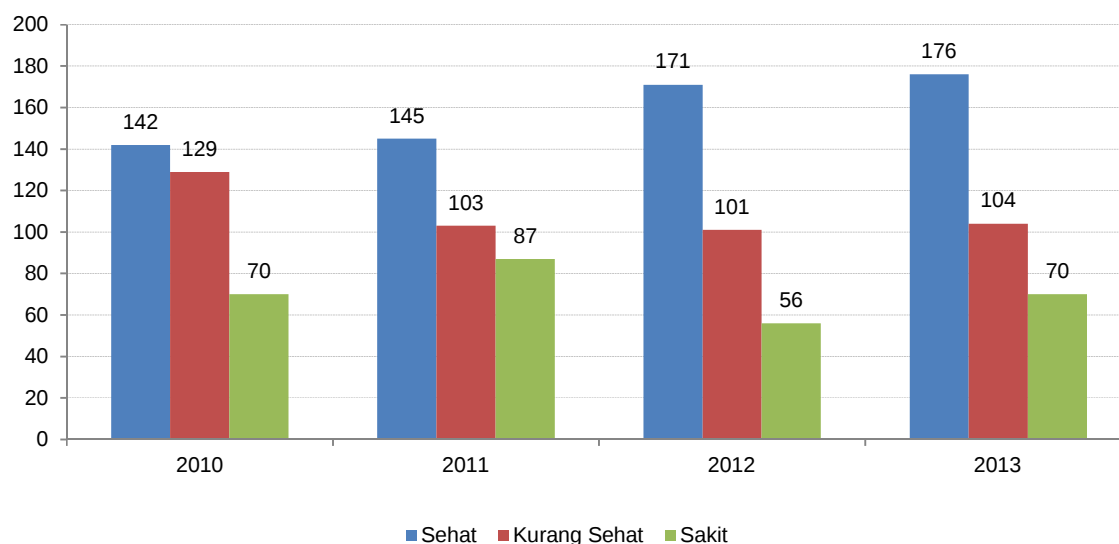
Namun demikian, evaluasi yang dilakukan belum mampu menjangkau seluruh PDAM di Indonesia. Pada Tabel 5.1. ditampilkan perkembangan hasil evaluasi kinerja PDAM tahun 2010-2013 yang dilakukan oleh BPPSPAM. Terlihat jumlah PDAM yang dievaluasi mengalami peningkatan di tahun 2013 dengan jumlah PDAM dalam kondisi sehat sebanyak 176 atau 50,29%, kurang sehat 104 atau 29,71% dan dalam kondisi sakit 70 PDAM atau 20%.

Tabel 5.1.
Perkembangan Kinerja PDAM Tahun 2010-2013

Tahun	Kinerja PDAM				Persentase PDAM		
	Sehat	Kurang Sehat	Sakit	Jumlah	Sehat	Kurang Sehat	Sakit
2010	142	129	70	341	41,64	37,83	20,53
2011	145	103	87	335	43,28	30,75	25,97
2012	171	101	56	328	52,13	30,79	17,07
2013	176	104	70	350	50,29	29,71	20,00

Sumber : Kinerja PDAM 2012, 2013, BPPSPAM-PU

Gambar 5.1.
Perkembangan Kinerja PDAM Tahun 2010-2013



Pada Tabel 5.2. di bawah ini ditampilkan hasil evaluasi kinerja PDAM tahun 2013 menurut provinsi. Sementara pada Tabel 5.3. disajikan data hasil rekapitulasi kapasitas serta jumlah pelanggan dan penduduk terlayani PDAM di masing-masing provinsi di Indonesia.

Tabel 5.2.
Kinerja PDAM di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2013

Provinsi	Sehat	Kurang Sehat	Sakit	Jumlah
Aceh	3	6	5	14
Sumatera Utara	6	6	4	16
Sumatera Barat	5	6	5	16
Riau	0	4	1	5
Jambi	2	4	3	9
Sumatera Selatan	3	6	3	12
Bengkulu	1	3	2	6
Lampung	1	2	4	7
Kepulauan Bangka Belitung	0	0	4	4

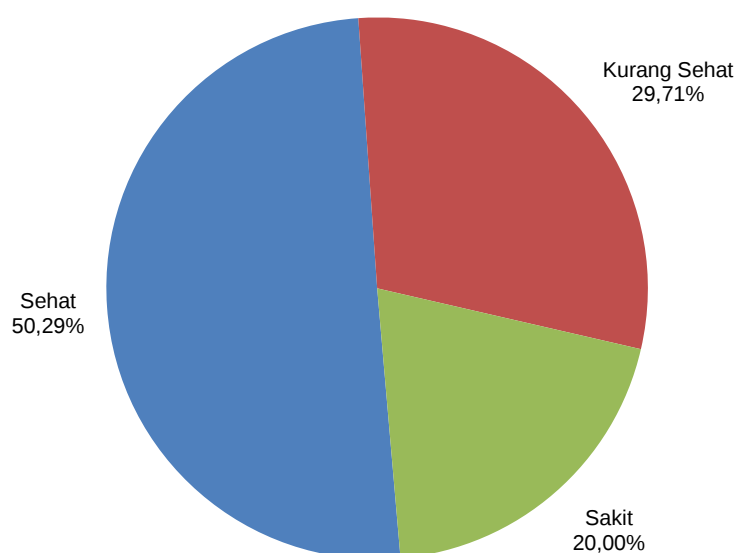
Provinsi	Sehat	Kurang Sehat	Sakit	Jumlah
Kepulauan Riau	0	3	0	3
DKI Jakarta	1	0	0	1
Jawa Barat	21	1	0	22
Jawa Tengah	32	3	0	35
DI Yogyakarta	4	1	0	5
Jawa Timur	22	10	6	38
Banten	6	0	0	6
Bali	8	1	0	9
Nusa Tenggara Barat	4	1	1	6
Nusa Tenggara Timur	6	5	4	15
Kalimantan Barat	1	6	4	11
Kalimantan Tengah	6	5	3	14
Kalimantan Selatan	11	1	0	12
Kalimantan Timur	7	2	0	9
Kalimantan Utara	4	0	0	4
Sulawesi Utara	1	4	2	7
Sulawesi Tengah	3	5	1	9
Sulawesi Selatan	8	7	8	23
Sulawesi Tenggara	0	5	4	9
Gorontalo	2	2	1	5
Sulawesi Barat	1	2	0	3
Maluku	2	1	3	6
Maluku Utara	2	2	0	4
Papua Barat	1	0	1	2
Papua	2	0	1	3
Indonesia	176	104	70	350

Sumber : Kinerja PDAM 2013

Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Gambar 5.2.

Persentase Evaluasi Kinerja PDAM di Indonesia Tahun 2013



Tabel 5.3.

Kapasitas dan Layanan PDAM di Indonesia Menurut Provinsi

Provinsi	Kapasitas Terpasang (litr/dtk)	Kapasitas Produksi (litr/dtk)	Jumlah Pelanggan (Unit SL)	Jumlah Penduduk di Wilayah Pelayanan (jiwa)	Penduduk Terlayani (jiwa)
Aceh	3.455	2.059	150.992	2.227.717	933.486
Sumatera Utara	10.362	9.309	649.761	8.669.743	3.808.558
Sumatera Barat	4.327	2.768	218.554	3.516.865	1.462.336
Riau	1.265	707	51.429	1.937.174	355.500
Jambi	2.534	1.442	183.461	1.910.495	864.060
Sumatera Selatan	6.656	4.558	305.442	3.996.572	2.175.808
Bengkulu	1.522	1.056	60.969	806.804	344.956
Lampung	1.467	966	56.796	1.858.025	390.794
Kepulauan Bangka Belitung	660	187	11.909	497.177	76.855
Kepulauan Riau	500	355	21.741	283.274	127.916

Provinsi	Kapasitas Terpasang (ltr/dtk)	Kapasitas Produksi (ltr/dtk)	Jumlah Pelanggan (Unit SL)	Jumlah Penduduk di Wilayah Pelayanan (jiwa)	Penduduk Terlayani (jiwa)
DKI Jakarta	18.075	15.337	800.093	9.197.982	5.541.882
Jawa Barat	19.053	14.522	1.167.119	23.673.551	8.823.917
Jawa Tengah	18.388	12.860	1.142.125	21.622.430	7.634.615
DI Yogyakarta	2.422	1.314	125.284	2.709.944	925.318
Jawa Timur	27.960	19.127	1.468.823	23.940.863	9.620.723
Banten	6.363	5.946	213.675	4.813.032	1.057.363
Bali	5.701	4.342	319.350	3.100.186	1.886.805
Nusa Tenggara Barat	2.680	2.119	160.688	2.961.463	960.971
Nusa Tenggara Timur	2.206	1.282	103.634	2.261.217	719.612
Kalimantan Barat	3.039	1.921	145.956	2.286.668	814.144
Kalimantan Tengah	1.529	1.062	103.462	1.134.430	610.688
Kalimantan Selatan	4.728	3.073	288.023	2.881.244	1.676.015
Kalimantan Timur	6.497	5.071	318.570	2.862.800	1.943.362
Kalimantan Utara	836	520	31.772	337.745	188.716
Sulawesi Utara	1.603	853	60.107	864.425	397.120
Sulawesi Tengah	1.584	913	74.366	1.772.047	484.179
Sulawesi Selatan	7.585	4.936	344.846	4.840.700	2.236.648
Sulawesi Tenggara	1.403	719	68.180	1.471.249	426.018
Gorontalo	1.125	499	46.103	960.936	356.019
Sulawesi Barat	400	184	22.291	333.564	151.954
Maluku	1.001	498	27.843	776.031	182.482
Maluku Utara	923	423	29.809	339.908	169.892
Papua Barat	132	122	9.419	138.333	55.614
Papua	989	826	33.694	394.365	184.664

Sumber : Direkap dari Kinerja PDAM 2013
Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Catatan : SL : Sambungan Langsung

Pemerintah memberikan perhatian yang besar dalam pengembangan prasarana dan sarana air minum dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai dari segi kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan baik untuk masyarakat di

perkotaan maupun perdesaan. Beberapa kegiatan pengadaan prasarana dan sarana air minum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya diantaranya adalah SPAM terfasilitasi, SPAM di Ibu Kota Kecamatan (IKK), SPAM kawasan khusus, SPAM di kawasan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), SPAM Perdesaan dan SPAM Regional. Output dari kegiatan pengembangan air minum di tahun 2013 terdapat pada Tabel 5.4a. dan 5.4b. di bawah ini.

Tabel 5.4a.

Kegiatan Sektor Pengembangan Air Minum Tahun 2013

Provinsi	SPAM Terfasilitasi (PDAM)	SPAM di Ibu Kota Kecamatan (IKK)	SPAM Kawasan Khusus (Kawasan)
Aceh	6	9	-
Sumatera Utara	6	7	15
Sumatera Barat	5	5	15
Riau	2	6	-
Jambi	4	10	-
Sumatera Selatan	3	7	-
Bengkulu	1	3	-
Lampung	3	1	11
Kepulauan Bangka Belitung	-	4	-
Kepulauan Riau	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	3	10	13
Jawa Tengah	3	8	25
DI Yogyakarta	-	-	-
Jawa Timur	10	5	14
Banten	-	4	13
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	3	3	1
Kalimantan Barat	-	-	-
Kalimantan Tengah	-	-	-
Kalimantan Selatan	-	2	-

Provinsi	SPAM Terfasilitasi (PDAM)	SPAM di Ibu Kota Kecamatan (IKK)	SPAM Kawasan Khusus (Kawasan)
Kalimantan Timur	-	-	
Sulawesi Utara	6	2	8
Sulawesi Tengah	1	-	-
Sulawesi Selatan	7	-	-
Sulawesi Tenggara	-	-	-
Gorontalo	1	6	7
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	-	-	-
Maluku Utara	1	-	1
Papua Barat	-	-	-
Papua	-	-	-
Jumlah	65	92	123

Tabel 5.4b.

Kegiatan Sektor Pengembangan Air Minum Tahun 2013 *(lanjutan)*

Provinsi	SPAM di Kawasan MBR (Kawasan)	SPAM Perdesaan (Desa)	SPAM Regional (Kawasan)
Aceh	7	2	-
Sumatera Utara	2	8	-
Sumatera Barat	3	10	-
Riau	3	2	-
Jambi	16	12	-
Sumatera Selatan	7	9	-
Bengkulu	11	6	-
Lampung	16	10	-
Kepulauan Bangka Belitung	4	7	-
Kepulauan Riau	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	11	14	-
Jawa Tengah	19	3	2
DI Yogyakarta	-	-	-

Provinsi	SPAM di Kawasan MBR (Kawasan)	SPAM Perdesaan (Desa)	SPAM Regional (Kawasan)
Jawa Timur	20	14	-
Banten	10	12	-
Bali	-	2	-
Nusa Tenggara Barat	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	8	20	-
Kalimantan Barat	-	-	-
Kalimantan Tengah	-	1	-
Kalimantan Selatan	6	1	-
Kalimantan Timur	-	-	-
Sulawesi Utara	1	10	-
Sulawesi Tengah	-	-	-
Sulawesi Selatan	19	-	-
Sulawesi Tenggara	-	-	-
Gorontalo	9	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-
Papua Barat	-	-	-
Papua	-	-	-
Jumlah	172	143	2

Sumber : Direktorat Jenderal Cipta Karya
Direkap Desember 2014

B. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mengubah kawasan kumuh menjadi lebih baik adalah menyediakan sarana dan prasarana dasar kehidupan yang dibutuhkan masyarakat secara memadai. Tempat tinggal atau lingkungan yang sehat dapat diartikan sebagai lingkungan yang terbebas dari pencemaran air, udara, dan tanah. Kondisi lingkungan yang sehat akan tercipta apabila limbah di lingkungan permukiman dapat dikelola

dengan baik, termasuk limbah cair. Sebaliknya, air limbah yang dibuang tanpa melalui proses pengolahan akan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan termasuk pada sumber air baku baik air permukaan maupun air tanah.

Pada sektor Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP), terdapat beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya adalah infrastruktur pengelolaan air limbah, drainase, tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah serta pengolahan sampah terpadu/3R. Hasil kegiatan tersebut pada tahun 2013 dalam satuan kawasan dan kab/kota ditampilkan pada Tabel 5.5. berikut ini. Sementara untuk infrastruktur TPA akan dibahas lebih lanjut.

Tabel 5.5.

Infrastruktur Sektor Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
Tahun 2013

Provinsi	Air Limbah (Kawasan)	Drainase Perkotaan (Kab/Kota)	Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Kab/Kota)	Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R (Kawasan)
Aceh	21	1	9	-
Sumatera Utara	18	3	-	5
Sumatera Barat	11	2	3	11
Riau	8	1	7	8
Jambi	9	-	2	-
Sumatera Selatan	7	3	7	4
Bengkulu	10	1	4	3
Lampung	13	4	7	4
Kepulauan Bangka Belitung	6	1	1	-
Kepulauan Riau	-	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	58	-	2	7
Jawa Tengah	403	6	-	10
DI Yogyakarta	-	-	-	-
Jawa Timur	-	-	-	-
Banten	16	2	-	-

Provinsi	Air Limbah (Kawasan)	Drainase Perkotaan (Kab/Kota)	Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (Kab/Kota)	Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R (Kawasan)
Bali	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	10	3	2	2
Kalimantan Barat	-	-	-	-
Kalimantan Tengah	6	3	3	-
Kalimantan Selatan	17	3	2	6
Kalimantan Timur	10	1	4	4
Sulawesi Utara	10	2	4	2
Sulawesi Tengah	-	-	-	-
Sulawesi Selatan	1	-	1	-
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
Gorontalo	5	4	-	2
Sulawesi Barat	-	-	-	-
Maluku	-	-	-	-
Maluku Utara	5	4	7	-
Papua Barat	-	-	-	-
Papua	-	-	-	-
Jumlah	644	44	65	68

Sumber : Direktorat Jenderal Cipta Karya
Direkap Desember 2014

Dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, didefinisikan bahwa sampah adalah barang sisa yang harus dibuang. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sementara sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, atau fasilitas lainnya. Sampah yang merupakan barang sisa butuh untuk dikelola dengan tepat agar dapat menghasilkan keuntungan secara finansial, kesehatan sekaligus kelestarian lingkungan.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. Di tempat tersebut sampah serta residu hasil pengolahannya dikembalikan ke media lingkungan secara aman yang didahului dengan dilakukan pengolahan untuk merubah karakteristik, komposisi dan jumlah/volume sampah.

Operasi TPA di Indonesia pada awalnya, dan sampai saat ini sebagian masih tergolong *open dumping* yang berakibat pada tercemarnya lingkungan. Hal ini menyebabkan turunnya kualitas lingkungan perkotaan termasuk air tanah. Namun sistem tersebut mulai dilarang seiring dengan terbitnya UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Oleh karena itu, diperlukan rehabilitasi TPA secara lebih memadai. Keterbatasan lahan TPA di kota-kota besar juga mengakibatkan kebutuhan pengelolaan TPA bersama secara regional. Percontohan TPA *sanitary landfill* regional terdapat di beberapa daerah seperti di Yogyakarta (Kartamantul), Denpasar (Sarbagita) Kab. Bangli, dan Gorontalo.

Tabel 5.6.

Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Indonesia

Provinsi	Jumlah TPA	Luas TPA (ha)
Aceh	16	32,5
Sumatera Utara	13	39,0
Sumatera Barat	9	50,9
Riau	12	29,0
Jambi	14	167,3
Sumatera Selatan	14	148,5
Bengkulu	7	24,9
Lampung	12	33,8
Kepulauan Bangka Belitung	4	24,7
Kepulauan Riau	5	38,5
Jawa Barat	47	236,0
Jawa Tengah	38	4.861,0
DI Yogyakarta	4	14,9

Provinsi	Jumlah TPA	Luas TPA (ha)
Jawa Timur	55	1.247,8
Banten	6	37,9
Bali	9	24,8
Nusa Tenggara Barat	8	57,0
Nusa Tenggara Timur	9	34,3
Kalimantan Barat	16	84,9
Kalimantan Tengah	13	94,5
Kalimantan Selatan	11	78,1
Kalimantan Timur	10	73,3
Sulawesi Utara	4	19,0
Sulawesi Tengah	11	40,8
Sulawesi Tenggara	3	7,7
Gorontalo	2	20,6
Sulawesi Barat	9	10,7
Maluku	4	506,0
Maluku Utara	4	48,0
Papua Barat	6	28,9
Papua	6	29,9

Sumber : SIGI PU

C. Pengembangan Permukiman

Permukiman merupakan kawasan baik di perkotaan maupun perdesaan yang fungsi utamanya adalah sebagai tempat tinggal. Kelayakan suatu permukiman tidak hanya ditentukan oleh lokasi/wilayahnya, namun juga kelengkapan infrastruktur pendukung yang ada di dalamnya. Permukiman layak merupakan permukiman yang mempunyai kecukupan prasarana dan sarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagai tempat bermukim baik bagi warga perkotaan dan perdesaan.

Perbedaan lokasi disertai pula dengan perbedaan karakter dan situasi yang dihadapi. Pembangunan infrastruktur di perdesaan lebih dilatari oleh potensi yang belum berkembang, keterbelakangan dan letak yang terpencil atau di kawasan perbatasan. Pengembangan kawasan perdesaan selain dapat meningkatkan kehidupan

masyarakat pedesaan, juga dapat pemeratakan ekonomi serta mencegah perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan menghidupkan potensi perdesaan. Sementara pembangunan kawasan permukiman kota lebih ditujukan untuk menata atau mengubah kawasan kumuh menjadi permukiman layak huni. Salah satu hambatan yang dihadapi di wilayah perkotaan adalah keterbatasan lahan dan kepadatan penduduk yang tinggi. Pelaksanaan infrastruktur kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan dalam skala kawasan tahun 2013 seperti terdapat pada Tabel 5.7a. dan 5.7b. di bawah ini.

Tabel 5.7a.

Infrastruktur Sektor Pengembangan Permukiman Tahun 2013

Provinsi	Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan				
	Desa Potensial	Rawan Bencana	Pulau Kecil dan Perbatasan	Output	Satuan
Aceh	3	1	-	4	Kawasan
Sumatera Utara	5	4	-	9	Kawasan
Sumatera Barat	5	2	-	7	Kawasan
Riau	2	-	-	2	Kawasan
Jambi	11	-	-	11	Kawasan
Sumatera Selatan	6	-	-	6	Kawasan
Bengkulu	5	2	-	7	Kawasan
Lampung	6	-	1	7	Kawasan
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	Kawasan
Kepulauan Riau	-	-	-	-	Kawasan
DKI Jakarta	-	-	-	-	Kawasan
Jawa Barat	6	-	-	6	Kawasan
Jawa Tengah	6	2	2	10	Kawasan
DI Yogyakarta	-	-	-	-	Kawasan
Jawa Timur	6	-	-	6	Kawasan
Banten	2	-	-	2	Kawasan
Bali	-	-	-	-	Kawasan
Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	Kawasan
Nusa Tenggara Timur	1	-	16	17	Kawasan
Kalimantan Barat	-	-	-	-	Kawasan

Provinsi	Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan				
	Desa Potensial	Rawan Bencana	Pulau Kecil dan Perbatasan	Output	Satuan
Kalimantan Tengah	6	-	-	6	Kawasan
Kalimantan Selatan	7	-	-	7	Kawasan
Kalimantan Timur	3	-	-	3	Kawasan
Kalimantan Utara	-	-	-	-	Kawasan
Sulawesi Utara	5	-	5	10	Kawasan
Sulawesi Tengah	-	-	-	-	Kawasan
Sulawesi Selatan	1	-	-	1	Kawasan
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	Kawasan
Gorontalo	3	-	-	3	Kawasan
Sulawesi Barat	-	-	-	-	Kawasan
Maluku	-	-	-	-	Kawasan
Maluku Utara	5	-	-	5	Kawasan
Papua Barat	-	-	-	-	Kawasan
Papua	-	-	-	-	Kawasan
Jumlah	94	11	24	129	Kawasan

Tabel 5.7b.

Infrastruktur Sektor Pengembangan Permukiman Tahun 2013 *(lanjutan)*

Provinsi	Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan			
	Kumuh	Rumah Sederhana Sehat (RSH)/MBR	Output	Satuan
Aceh	4	1	5	Kawasan
Sumatera Utara	6	4	10	Kawasan
Sumatera Barat	6	2	8	Kawasan
Riau	3	3	6	Kawasan
Jambi	8		8	Kawasan
Sumatera Selatan	7	6	13	Kawasan
Bengkulu	5	2	7	Kawasan
Lampung	9	2	11	Kawasan
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	Kawasan
Kepulauan Riau	-	-	-	Kawasan

Provinsi	Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan			
	Kumuh	Rumah Sederhana Sehat (RSH)/MBR	Output	Satuan
DKI Jakarta	-	-	-	Kawasan
Jawa Barat	6	6	12	Kawasan
Jawa Tengah	9	9	18	Kawasan
DI Yogyakarta	4	-	4	Kawasan
Jawa Timur	5	3	8	Kawasan
Banten	4	3	7	Kawasan
Bali	-	-	-	Kawasan
Nusa Tenggara Barat	-	-	-	Kawasan
Nusa Tenggara Timur	4	2	6	Kawasan
Kalimantan Barat	-	-	-	Kawasan
Kalimantan Tengah	8	-	8	Kawasan
Kalimantan Selatan	5	-	5	Kawasan
Kalimantan Timur	4	3	7	Kawasan
Kalimantan Utara	-	-	-	Kawasan
Sulawesi Utara	18	4	22	Kawasan
Sulawesi Tengah	-	-	-	Kawasan
Sulawesi Selatan	1	-	1	Kawasan
Sulawesi Tenggara	-	-	-	Kawasan
Gorontalo	5	2	7	Kawasan
Sulawesi Barat	-	-	-	Kawasan
Maluku	1	-	1	Kawasan
Maluku Utara	2	3	5	Kawasan
Papua Barat	-	-	-	Kawasan
Papua	-	-	-	Kawasan
Jumlah	124	55	179	Kawasan

Sumber : Direktorat Jenderal Cipta Karya
Direkap Desember 2014

Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Sementara

kawasan minapolitan merupakan turunan dari kawasan agropolitan, yaitu kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterikatan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem minabisnis.

Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan ditujukan sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan potensi lokal sebagai roda pertumbuhan ekonomi di perdesaan termasuk daerah pesisir agar tercipta pemerataan pembangunan dan tidak hanya tumbuh pesat di wilayah perkotaan. Dengan demikian, kawasan agropolitan dan minapolitan mampu memainkan peran sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang memiliki daya saing di tingkat interregional maupun intraregional.

Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan juga berorientasi pada kekuatan pasar yang dilaksanakan melalui pemberdayaan dan kegiatan agribisnis/minabisnis hulu sampai hilir. Pengembangan kawasan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan sistem agribisnis/minabisnis yang utuh dan terintegrasi melalui penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) seperti peningkatan jalan lingkungan poros desa, peningkatan jalan usaha tani, pembangunan jembatan, saluran drainase, pasar gudang penyimpanan, Stasiun Terminal Agribisnis (STA), peningkatan pasar ikan dan pembangunan lainnya. Pada Tabel 5.8. dan Tabel 5.9. berikut ini ditampilkan pencapaian pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan dari tahun 2003 hingga 2012.

Tabel 5.8.
Dukungan Infrastruktur Pengembangan Kawasan Agropolitan
Tahun 2003 – 2012

Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Kab	Jumlah Kota	Kawasan	Jumlah Kawasan
Aceh	Aceh Besar, Pidie, Aceh Tamiang, Aceh Selatan, Aceh Timur, Bireun	6		Indrapuri, Lembah Seulawah, Mutiara, Peudada, Kluet, Idi	6
Sumatera Utara	Karo, Asahan, Toba Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara, Dairi, Humbang Hasundutan, Samosir, Serdang Berdagai, Mandailing Natal, Batubara, Kota Medan	11	1	Merek, Tanjung Sigoni, Lumban Julu, Pematang Cengkering, Silimakuta, Parbuluan, Medang Deras, Tanjung Tiram, Siborong-Borong, Dolok Sanggul, Harian, Tanjung Beringin, Sikara-Kara, Medan Utara	14
Sumatera Barat	Agam, Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Lima Puluh Koto, Dharmasyara, Pasaman, Sijunjung, Payakumbuh	9	1	IV Angkat Candung, Koto Gadang, Lembah Gumanti, X Koto, Sutura, VII Koto, Mungka, Sitiung, Mandeh, Rao, Palangki, Bukit P. Sembilan, Kamang Magek	13
Riau	Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Indragili Hulu, Kuantan Senggigi, Pelalawan, Dumai	7		Tempuling, Rambah Samo, Tapung Hilir, XII Koto Kampar, Rengat Barat, Benai, Kebun Durian Gunung Sahilan, Sei Bagan, Sungai Sembilan, Sei Upih Teluk Beringin	13
Jambi	Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Kerinci, Sorolangun, Merangin, Batanghari	6		Rantau Rasau, Kumpeh Hulu, Kayu Aro, Singkut, Batang Mesumai, Pemayung	6
Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Induk, Banyu Asin, Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Rawas, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Kota Pagar Alam, Kota Palembang	8	2	Martapura, Dempo Utara, Lengkiti, Pulau Beringin, Banyu Urip, Tugu Mulyo, Tanjung Lago, Muara Beliti, Gandus, Bakung, Baturaja Timur, Lempuing	12
Bengkulu	Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kepahiang, Bengkulu Selatan, Lebong, Seluma, Kaur	7		Selupu Rejang, Padang Jaya, Ujan Mas, Seginim, Lebong Tengah, Seluma Selatan, Maje dan Kaur Selatan, Maje dan Nasal	8

Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Kab	Jumlah Kota	Kawasan	Jumlah Kawasan
Lampung	Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Timur, Lampung Selatan, Tulang Bawang, Lampung Barat, Pesawaran, Pringsewu	8		Terbagi Besar, Gisting, Sribawono, Jati Ayu, Ketapang, Sidomulyo, Mesuji Atas, Batu Brak, Srikaton, Padang Cermin-Punduh Pidada	10
Kepulauan Bangka Belitung	Belitung, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Selatan	4		Mambalong, Tanjung Binga, Pangkalan Baru, Sungai Selatan, Sungailiat, Tanjung Gunung, Mendo Barat, Salepliat	8
Kepulauan Riau	Karimun, Bintan, Natuna	3		Kundur, Tuapaya, Mantang, Serasan	4
DKI Jakarta					
Jawa Barat	Cianjur, Indramayu, Kuningan, Bogor, Purwakarta, Bandung, Garut, Ciamis, Sukabumi, Subang, Majalengka, Cirebon, Karawang	13		Pacet, Jatinyuat Karangsong, Eretan, Cigugur, Leuwiliang, Ciseeng, Bojong, Pangalengan, Cisarup, Panumbangan, Kadudampit, Sukamaju, Ciemas, Sagala Herang, Serang Panjang, Lemah Sugih, Losari, Cilamaya	18
Jawa Tengah	Semarang, Pemalang, Wonosobo, Batang, Magelang, Purbalingga, Karanganyar, Brebes, Boyolali, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purworejo, Pekalongan	14		Sumowono, Belik, Rojonoto, Surbanwali, Merapi Merbabu, Larangan, Bunga Kondang, Sutomadansih, Goasebo, Beji, Jayabaya, Bagelen, Majenang, Talang Kerido	14
DI Yogyakarta	Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul, Bantul	4		Kali Bawang, Temon, Turi, Karangmojo, Playen, Bejiharjo, Girisobo, Imogiri, Gading Sari	9
Jawa Timur	Ngawi, Banyuwangi, Mojokerto, Lumajang, Tulungagung, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Pacitan, Madiun, Pamekasan, Ponorogo, Trenggalek, Nagnjuk, Malang, Lamongan, Tuban, Gresik	18		Paron, Bangorejo, Muncar, Pacet, Senduro, Sendang, Soburbang, Kanigoro, Nglegok, Tutar, Nawangan Bandar Tamperan, Gedangsari, Pakong dan Waru, Ngebel, Bendungan, Sukomoro, Wajak, Poncokusumo, Ngimbang, Paseban, Sidayu	21

Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Kab	Jumlah Kota	Kawasan	Jumlah Kawasan
Banten	Pandeglang, Serang, Tangerang, Lebak	4		Menes, Mandalawangi, Pontang, Waringin Kurung, Pabuaran, Baros, Gunung Sari, Sepatan, Kronjo, Wanasalam	10
Bali	Bangli, Gianyar, Tabanan, Jembrana, Buleleng, Badung, Karang Asem, Klungkung	8		Catur-Kintamani, Payangan, Baturiti, Melaya, Depeha, Sibeta (Bebandem), Plaga, Nusa Penida	8
Nusa Tenggara Barat	Dompu, Lombok Timur, Sumbawa, Lombok Tengah, Lombok Barat, Sumbawa Barat, Bima	7		Manggelawa, Sikur, Alas Utan, Aik Meneng, Pekat, Lembah Sempage Akar-Akar Kuripan, Sembalun, Keruwak Jerowaru, Kemuter Telu, Woha	10
Nusa Tenggara Timur	Kupang, Manggarai, Bellu, Sumba Timur, Sikka, Sumba Barat	6		Oesao, Iteng, Betun, Koba Lima, Kambaniru, Pesisir Sikka, Lamboya	7
Kalimantan Barat	Sambas, Pontianak, Bengkayang, Sintang, Ketapang, Singkawang, Kubu Raya, Kota Pontianak	7	1	Sepinggan-Semparuk, Pontianak Utara, Sungai Kakap, Sanggau Ledo, Rasau Jaya, Sei Tebelian, Matan Hilir Selatan, Pangmilang, Rasau Jaya, Sungai Rengas, Jawai Selatan, Semparuk, Matan Hilir Sel. Pasaguan	13
Kalimantan Tengah	Kapuas, Barito Timur, Sukamara, Kotawaringin Barat, Seruyan, Kotawaringin Timur, Pulau Pisau, Katingan	8		Basarang, Dusun Tengah, Pangkalan Lada, Jelai, Seruyan Hilir, Teluk Sampit, Sei Bakau, Sebuai, Teluk Sampit, Katingan Kuala	10
Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Banjar, Tabalong	6		Labuhan Amas Utara, Terantang, Pelaihari, Amuntal, Cindai Alus, Tanjung	6
Kalimantan Timur	Kutai Timur, Bulungan, Paser, Paser Utara, Malinau, Berau	6		Sanggata, Pasopati, Padang Pangprapat, Penajam, Rantau Pulung, Kalamok, Sabitta	7
Sulawesi Utara	Minahasa Selatan, Minahasa, Sangihe, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow, Tomohon, Bolaang Mongondow Utara, Bitung, Bolaang Mongondow Timur	9		Modoinding, Tengasinonsayang, Ngasaan, Tatapaan, Pakakaan, Dagho, Tabukan Selatan, Klabat, Managabata, Dumoga, Lolayan, Tomohon, Bolaang Mongondow Utara, Mondayag, PPN Bitung	15
Sulawesi Tengah	Donggala, Parigi Moutong, Banggai, Toli-Toli, Tojo Una-Una, Poso, Morowali	7		Biromaru, Labean, Bolano Lambunu, Kasimbar, Desa Kasimbar, Tolli, Galang, Wakai, Napu, Witaponda	10

Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Kab	Jumlah Kota	Kawasan	Jumlah Kawasan
Sulawesi Selatan	Barru, Enrekang, Soppeng, Tana Toraja, Bulukumba, Selayar, Bone, Sidrap, Gowa, Luwu Timur, Jeneponto, Pangkep, Sinjai, Luwu	14		Barru, Maiwa, Lajoa, Rindingallo, Gantarang, Bontomanai, Pasaka, Alakuang, Bontonompo, Malili, Kelar Rumbia, Labakkang, Sinjai Timur, Belopa	14
Sulawesi Tenggara	Kendari, Bombana, Muna, Buton, Konawe Selatan, Kolaka	6		Bondoala, Lantari, Kabangka, Lasalimu Selatan, Tinanggea, Lelembuu, Wolo	7
Gorontalo	Pohuwato, Boalemo, Gorontalo, Bone Bolango, Gorontalo Utara	5		Randangan, Bongo Nol, Pulubala, Kabila, Tumbilato, Kwandang, Anggrek	7
Sulawesi Barat	Polewali Mandar, Mamuju Utara, Majene, Mamuju	4		Matakali, Pasang Kayu, Sendana, PPI Bonda	4
Maluku	Seram Bagian Barat, Maluku Tenggara Barat, Buru, Buru Selatan, Seram Bagian Timur, Ambon	6		Waihatu, Waimital & Piru, Kairatu, Wrinama & Bula, Kairatu & Buano, PPN Ambon	5
Maluku Utara	Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Ternate	5	1	Sahu, Waioro, Toliwang, Wasile, Mekar Sari, Manggayoang, PPN Ternate	7
Papua Barat	Manokwari, Sorong, Raja Ampat, Fak-Fak	4		Prafi, Aimas, Selat Segawin, Bomberai	4
Papua	Jayapura, Nabire, Yapen, Waropen, Kota Jayapura	4	1	Grime Sekori, Wanggar, Distrik Kosiwo, Distrik Waropen, Koya Distrik Muara Tami	5

Sumber : Agropolitan dan Minapolitan Konsep Kawasan Menuju Keharmonian, 2012
 Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Tabel 5.9.
Dukungan Infrastruktur Pengembangan Kawasan Minapolitan
Tahun 2003 – 2012

Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Kab	Kawasan	Jumlah Kawasan
Aceh	Aceh Selatan	1	Kluet, Idie	2
Sumatera Utara	Serdang Berdagai	1	Tanjung Beringin	1
Sumatera Barat	Pesisir Selatan	1	Mandeh	1
Riau	Kampar, Kuantan Senggigi	2	XIII Koto Kampar, Teso Benai	2
Jambi	Batang Hari, Muaro Jambi	2	Pemayung, Kumpeh Ulu	2
Sumatera Selatan	Ogan Ilir, Palembang	2	Bakung, Gandus	2
Bengkulu	Kaur	1	Nasal	1
Lampung	Lampung Selatan	1	Ketapang	1
Kepulauan Bangka Belitung	Bangka, Bangka Selatan	2	Sungai Liat, Salepliat	2
Kepulauan Riau	Bintan	1	Mantang	1
DKI Jakarta				
Jawa Barat	Bogor, Sukabumi	2	Leuwiliang, Ciseeng, Pelabuhan	3
Jawa Tengah	Banyumas, Cilacap	2	Beji, Majenang	2
DI Yogyakarta	Gunung Kidul	1	Playen	1
Jawa Timur	Malang, Blitar, Pacitan	3	Wajak, Nglegok, PPI Tamperang	3
Banten	Serang	1	Pontang, Pabuaran	2
Bali	Klungkung	1	Nusa Penida	1
Nusa Tenggara Barat	Bima, Lombok Timur	2	Woha, Keruak Jerowaru	2
Nusa Tenggara Timur	Sikka, Belu	2	Pesisir Sikka, Koba Lima	2
Kalimantan Barat	Sambas	1	Jawal	1
Kalimantan Tengah				
Kalimantan Selatan	Pulau Pisang, Banjar	2	Telok Gohong, Cindai Alus	2
Kalimantan Timur	Malinau	1	Kaliyamok	1

Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah Kab	Kawasan	Jumlah Kawasan
Sulawesi Utara	Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Sangihe	3	Klabat, Managabata, Tatapaan, Tabukan Selatan	3
Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una, Donggala	2	Wakai, Labean	2
Sulawesi Selatan	Luwu Timur, Gowa, Pangkep	3	Malili, Bontonompo, Pangkajene	1
Sulawesi Tenggara	Kolaka, Konawe Selatan	2	Wolo, Tinanggea	3
Gorontalo	Gorontalo Utara	1	Anggrek	1
Sulawesi Barat	Mamuju	1	Bonda	1
Maluku				
Maluku Utara				
Papua Barat	Raja Ampat	1	Selat Segawin	1
Papua	Waropen, Jayapura	2	Waropen Bawah, Muara Tami	2

Sumber : Agropolitan dan Minapolitan Konsep Kawasan Menuju Keharmonian, 2012
Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Rumah susun sederhana sewa (rusunawa) adalah rumah susun yang dibangun untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah (< Rp 2,5 juta/bulan). Selain rusunawa, ada pula rumah susun sederhana milik (rusunami) yang diperuntukkan masyarakat berpenghasilan menengah.

Dibangunnya rusunawa beserta infrastruktur pendukungnya menjadi bagian dari upaya penataan/peremajaan kawasan kumuh di kota yang memiliki lahan terbatas. Pembangunan rusunawa juga dimaksudkan untuk mengatasi beberapa permasalahan permukiman, yaitu:

- Penyediaan tempat hunian yang layak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- Penanggulangan permukiman perkotaan yang berkembang tidak sehat (kumuh).
- Menjembatani masyarakat yang belum mempunyai rumah untuk mendapatkan tempat hunian yang layak dengan cara menyewa sesuai kondisi dan kemampuan pendapatan termasuk hunian untuk mahasiswa.

Rusunawa telah dirintis oleh Kementerian PU sejak tahun 2003. Ketika itu hanya tujuh provinsi yang menjadi lokasi pembangunan Rusunawa, yaitu Riau, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Tak kurang dari 1.240 unit hunian dibangun pada waktu itu, dan mendapat tanggapan positif baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat setempat. Hingga tahun 2012 ada sebanyak 305,5 *twin block* dengan 29.738 unit rusunawa yang telah terbangun di 26 provinsi. Pada Tabel 5.10. berikut ini ditampilkan jumlah rusunawa terbangun menurut provinsi di Indonesia.

Tabel 5.10.
Rusunawa di Indonesia Tahun 2003 – 2012

Provinsi	Jumlah Twin Block (TB)	Jumlah Unit
Aceh	4,0	396
Sumatera Utara	18,0	1.761
Sumatera Barat	5,0	492
Riau	5,0	457
Jambi	0,0	0
Sumatera Selatan	8,0	783
Bengkulu	1,0	96
Lampung	4,0	390
Kepulauan Bangka Belitung	4,0	396
Kepulauan Riau	14,0	1.386
DKI Jakarta	20,0	1.959
Jawa Barat	39,0	3.721
Jawa Tengah	51,0	4.986
DI Yogyakarta	21,0	2.022
Jawa Timur	56,0	5.478
Banten	6,5	636
Bali	0,0	0
Nusa Tenggara Barat	1,0	99
Nusa Tenggara Timur	1,0	96
Kalimantan Barat	3,0	294
Kalimantan Tengah	1,0	96

Provinsi	Jumlah Twin Block (TB)	Jumlah Unit
Kalimantan Selatan	3,0	291
Kalimantan Timur	6,0	588
Sulawesi Utara	4,0	393
Sulawesi Tengah	2,0	198
Sulawesi Selatan	18,0	1.746
Sulawesi Tenggara	7,0	690
Gorontalo	0,0	0
Sulawesi Barat	0,0	0
Maluku	0,0	0
Maluku Utara	0,0	0
Papua Barat	0,0	0
Papua	3,0	288
Jumlah	305,5	29.738

Sumber : Direkap dari : Data Pembangunan Rusunawa Tahun Anggaran 2003 – 2012
 Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan Strategis
 Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU

Dalam pengembangan permukiman terdapat pula program berbasis pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mengentaskan kemiskinan melalui percepatan pembangunan di perdesaan. Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan (PPIP) dan *Rural Infrastructure Support (RIS)* merupakan salah satu program di bawah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang kegiatannya meliputi fasilitasi dan mobilisasi masyarakat sehingga mampu melakukan identifikasi permasalahan ketersediaan dan akses ke infrastruktur dasar, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur.

PISEW juga merupakan salah satu bentuk dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang ditujukan untuk mengembangkan ekonomi lokal, memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan. Berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan melalui PNPM PISEW adalah pembangunan infrastruktur dasar perdesaan (transportasi, produksi pertanian, pemasaran pertanian, air bersih dan sanitasi, pendidikan serta kesehatan), pembentukan kawasan strategis (KSK), peningkatan kemampuan dan keterampilan

masyarakat, serta dukungan metodologi kepada pemerintah daerah agar lebih efektif memfasilitasi pelaksanaan pembangunan.

Tabel 5.11.
Infrastruktur Pengembangan Permukiman (Pemberdayaan Masyarakat)
Tahun 2013

Provinsi	PPIP/RIS PNPM		RISE/PISEW	
	Output	Satuan	Output	Satuan
Aceh	66	Desa	-	Kecamatan
Sumatera Utara	588	Desa	16	Kecamatan
Sumatera Barat	48	Desa	-	Kecamatan
Riau	27	Desa	60	Kecamatan
Jambi	243	Desa	12	Kecamatan
Sumatera Selatan	-	Desa	-	Kecamatan
Bengkulu	30	Desa	5	Kecamatan
Lampung	-	Desa	-	Kecamatan
Kepulauan Bangka Belitung	-	Desa	-	Kecamatan
Kepulauan Riau	-	Desa	-	Kecamatan
DKI Jakarta	-	Desa	-	Kecamatan
Jawa Barat	69	Desa	-	Kecamatan
Jawa Tengah	96	Desa	-	Kecamatan
DI Yogyakarta	-	Desa	-	Kecamatan
Jawa Timur	-	Desa	-	Kecamatan
Banten	21	Desa	-	Kecamatan
Bali	-	Desa	-	Kecamatan
Nusa Tenggara Barat	-	Desa	-	Kecamatan
Nusa Tenggara Timur	264	Desa	-	Kecamatan
Kalimantan Barat	-	Desa	-	Kecamatan
Kalimantan Tengah	51	Desa	-	Kecamatan
Kalimantan Selatan	134	Desa	5	Kecamatan
Kalimantan Timur	6	Desa	-	Kecamatan
Kalimantan Utara	-	Desa	-	Kecamatan
Sulawesi Utara	39	Desa	-	Kecamatan

Provinsi	PPIP/RIS PNPM		RISE/PISEW	
	Output	Satuan	Output	Satuan
Sulawesi Tengah	-	Desa	-	Kecamatan
Sulawesi Selatan	-	Desa	-	Kecamatan
Sulawesi Tenggara	-	Desa	-	Kecamatan
Gorontalo	296	Desa	-	Kecamatan
Sulawesi Barat	-	Desa	-	Kecamatan
Maluku	27	Desa	-	Kecamatan
Maluku Utara	66	Desa	-	Kecamatan
Papua Barat	-	Desa	-	Kecamatan
Papua	-	Desa	-	Kecamatan
Jumlah	2.071	Desa	98	Kecamatan

Sumber : Direktorat Jenderal Cipta Karya
Direkap Desember 2014

D. Penataan Bangunan dan Lingkungan

Gedung negara merupakan salah satu aset kepunyaan negara yang memiliki nilai strategis karena menjadi tempat berlangsungnya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaannya pun perlu dikelola agar fungsional, andal, efektif dan efisien. Dalam penataan bangunan dan lingkungan dilakukan tugas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang penataan bangunan dan lingkungan termasuk pembinaan pengelolaan gedung dan rumah negara.

Dalam penataan bangunan dan lingkungan juga dilakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya yang digerakkan melalui pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui proses pembelajaran dan penguatan kapasitas masyarakat yang kemudian akan tumbuh kemandirian dan pembangunan yang berkelanjutan. Kegiatan keswadayaan masyarakat yang dilakukan dalam skala kelurahan/desa serta pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan tahun 2013 terdapat pada Tabel 5.12. berikut ini.

Tabel 5.12.

Infrastruktur Sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan Tahun 2013

Provinsi	Bangunan Gedung dan Fasilitasnya (Kab/Kota)	Keswadayaan Masyarakat (Kel/Desa)	Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman (Kawasan)
Aceh	2	450	4
Sumatera Utara	9	625	-
Sumatera Barat	1	374	4
Riau	2	94	7
Jambi	-	-	1
Sumatera Selatan	2	311	1
Bengkulu	1	134	4
Lampung	-	-	2
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	1	-	5
Jawa Tengah	1	1.976	7
DI Yogyakarta	-	-	-
Jawa Timur	-	-	4
Banten	-	-	-
Bali	-	-	2
Nusa Tenggara Barat	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	1	131	7
Kalimantan Barat	-	-	-
Kalimantan Tengah	-	-	57
Kalimantan Selatan	-	145	10
Kalimantan Timur	-	-	3
Sulawesi Utara	-	308	7
Sulawesi Tengah	-	-	-
Sulawesi Selatan	-	-	-
Sulawesi Tenggara	-	-	-
Gorontalo	1	20	4
Sulawesi Barat	-	-	1
Maluku	6	88	4

Provinsi	Bangunan Gedung dan Fasilitasnya (Kab/Kota)	Keswadayaan Masyarakat (Kel/Desa)	Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman (Kawasan)
Maluku Utara	2	150	2
Papua Barat	-	-	-
Papua	-	-	-
Jumlah	29	4.806	136

Sumber : Direktorat Jenderal Cipta Karya
Direkap Desember 2014

E. Analisis Statistik Infrastruktur Cipta Karya

Air sebagai kebutuhan dasar hidup manusia, menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam mewujudkan permukiman layak huni. Pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, yang salah satunya adalah PDAM berupaya untuk menyediakan air bersih untuk melayani kepentingan masyarakat. Data mengenai penyediaan air minum melalui Kinerja PDAM Tahun 2013 menginformasikan tentang kapasitas terpasang, kapasitas produksi, jumlah penduduk di wilayah pelayanan, dan jumlah penduduk terlayani.

Sebuah analisis dilakukan untuk melihat cakupan pelayanan, rata-rata tingkat kehilangan air dan rasio antara kapasitas produksi dengan jumlah penduduk terlayani menurut provinsi. Cakupan pelayanan merupakan persentase jumlah penduduk terlayani terhadap penduduk di wilayah pelayanan untuk mengetahui sejauh mana PDAM mampu memberikan pelayanan terhadap wilayah pelayanan teknisnya. Rata-rata tingkat kehilangan air untuk melihat efisiensi sistem distribusi terhadap penjualan air. Sementara rasio kapasitas produksi dengan jumlah penduduk terlayani sebagai informasi untuk mengetahui kemampuan PDAM dalam memproduksi air (l/dt) per 1000 pelanggan. Semakin tinggi nilai rasio kapasitas produksi terhadap jumlah penduduk terlayani, maka kemampuan PDAM dalam memproduksi air untuk melayani pelanggannya semakin baik dari sisi kuantitas.

Jika diurutkan menurut provinsi, cakupan pelayanan PDAM di Indonesia paling tinggi adalah Kalimantan Timur yang mencapai 67,88% dari jumlah penduduk di wilayah pelayanannya. Untuk rata-rata tingkat kehilangan air, dua provinsi yang mencatatkan angka di bawah 25%, yaitu Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan dengan nilai masing-masing 20,10% dan 22,83%. Kemudian untuk rasio kapasitas produksi terhadap jumlah penduduk terlayani yang paling tinggi adalah Banten dengan 5,62 l/dt per 1000 pelanggan.

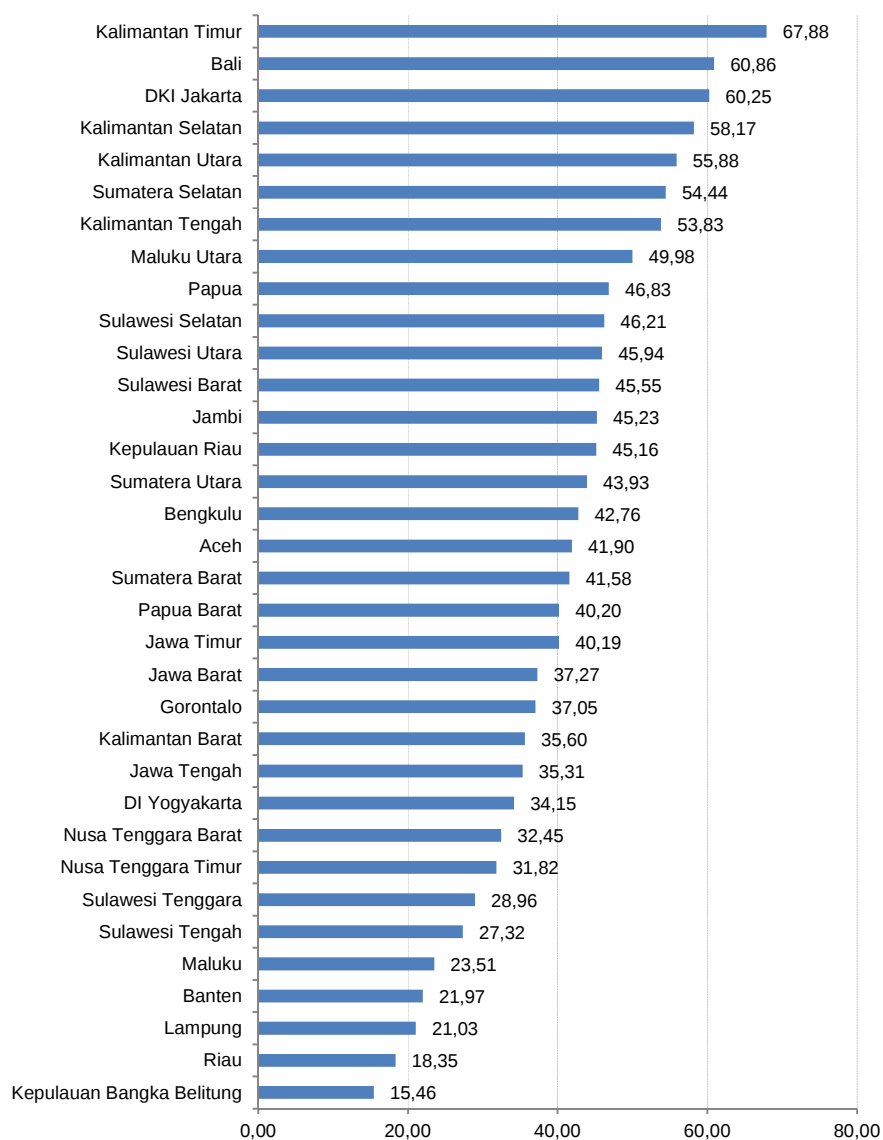
Tabel 5.13.
Layanan PDAM di Indonesia Tahun 2012

Provinsi	Cakupan Pelayanan (%)	Rata-Rata Tingkat kehilangan Air (%)	Rasio Kapasitas Produksi terhadap Jumlah Penduduk Terlayani (ltr/dtk per 1000 pelanggan)
Aceh	41,90	43,13	2,21
Sumatera Utara	43,93	36,81	2,44
Sumatera Barat	41,58	34,80	1,89
Riau	18,35	41,14	1,99
Jambi	45,23	27,18	1,67
Sumatera Selatan	54,44	31,42	2,09
Bengkulu	42,76	45,98	3,06
Lampung	21,03	43,90	2,47
Kepulauan Bangka Belitung	15,46	28,53	2,43
Kepulauan Riau	45,16	53,27	2,78
DKI Jakarta	60,25	42,30	2,77
Jawa Barat	37,27	30,37	1,65
Jawa Tengah	35,31	30,30	1,68
DI Yogyakarta	34,15	33,02	1,42
Jawa Timur	40,19	29,77	1,99
Banten	21,97	25,53	5,62
Bali	60,86	28,46	2,30
Nusa Tenggara Barat	32,45	37,20	2,21
Nusa Tenggara Timur	31,82	30,56	1,78
Kalimantan Barat	35,60	39,21	2,36
Kalimantan Tengah	53,83	25,30	1,74

Provinsi	Cakupan Pelayanan (%)	Rata-Rata Tingkat kehilangan Air (%)	Rasio Kapasitas Produksi terhadap Jumlah Penduduk Terlayani (litr/dtk per 1000 pelanggan)
Kalimantan Selatan	58,17	22,83	1,83
Kalimantan Timur	67,88	29,40	2,61
Kalimantan Utara	55,88	27,43	2,76
Sulawesi Utara	45,94	48,07	2,15
Sulawesi Tengah	27,32	31,41	1,89
Sulawesi Selatan	46,21	35,54	2,21
Sulawesi Tenggara	28,96	40,14	1,69
Gorontalo	37,05	34,16	1,40
Sulawesi Barat	45,55	20,10	1,21
Maluku	23,51	37,73	2,73
Maluku Utara	49,98	26,00	2,49
Papua Barat	40,20	37,00	2,19
Papua	46,83	40,90	4,47

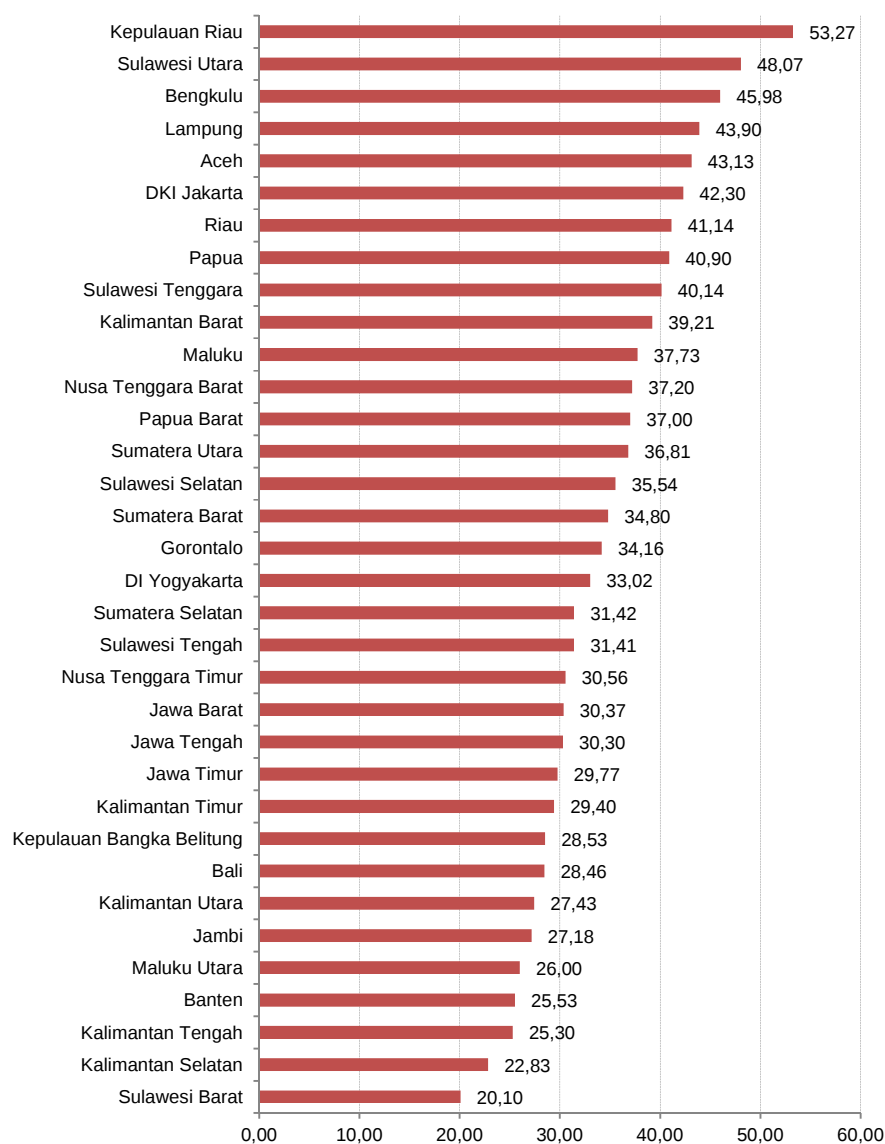
Sumber : Diolah dari : Kinerja PDAM 2013
Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Gambar 5.3.
Cakupan Pelayanan PDAM Menurut Provinsi di Indonesia (%)



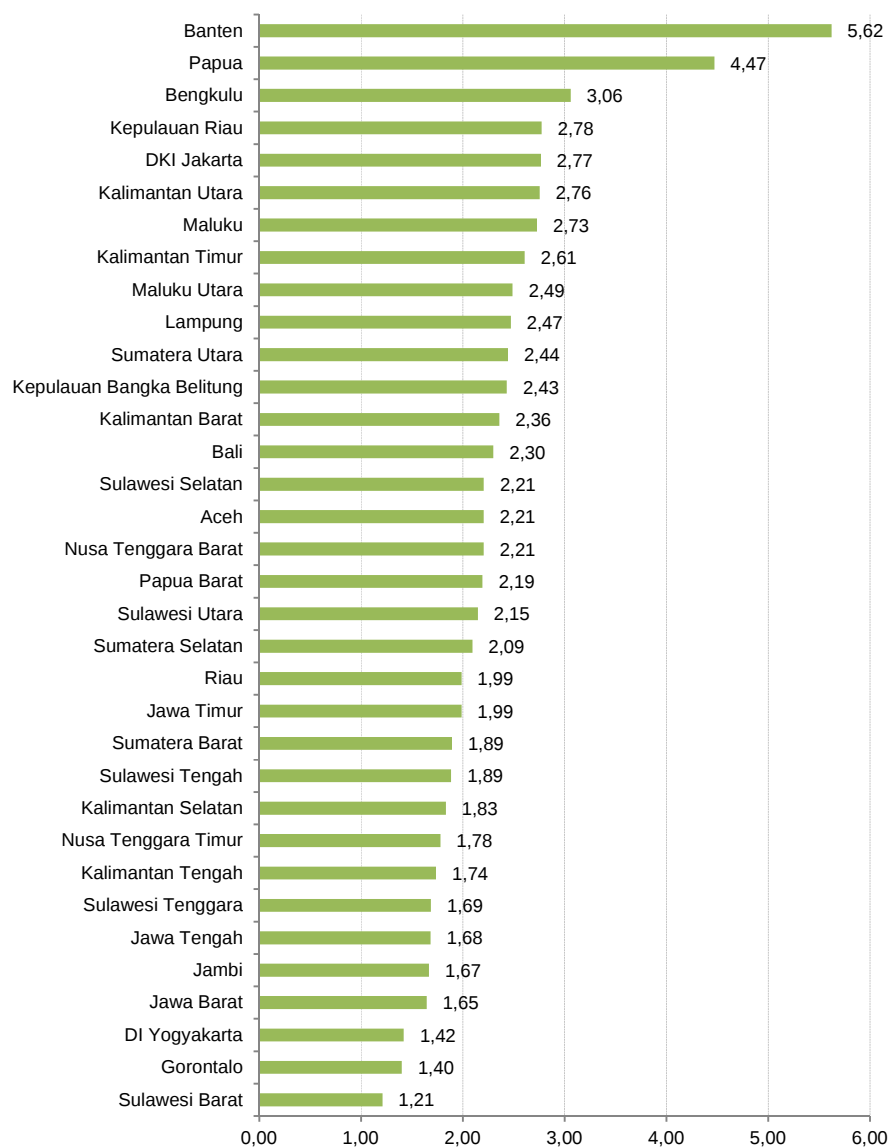
Gambar 5.4.

Rata-Rata Tingkat Kehilangan Air PDAM Menurut Provinsi di Indonesia (%)



Gambar 5.5.

Rasio Kapasitas Produksi terhadap Jumlah Penduduk Terlayani
(ltr/dtk per 1000 pelanggan)



BAB VI

PENATAAN RUANG

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa **penataan ruang** adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tata ruang melingkupi struktur ruang dan pola ruang. **Struktur ruang** adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sementara **pola ruang** adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Penyelenggaraan penataan ruang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

A. Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Perencanaan tata ruang merupakan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi peyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Rencana umum tata ruang secara hierarki terdiri atas:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Rencana rinci tata ruang terdiri atas:

- a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
- b. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
- c. rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Rencana tata ruang kemudian dijadikan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar memiliki ketetapan hukum. RTRW Nasional (RTRWN) menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah nasional, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi serta keserasian antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional, serta penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Perda RTRW menjadi pedoman pembangunan di daerah agar lebih fokus dan terarah.

Sampai dengan Agustus 2014 progres penyelesaian RTRW menjadi Perda telah mensahkan 25 dari 33 Perda RTRW Provinsi, 305 dari 398 Perda RTRW Kabupaten, dan 77 dari 93 Perda RTRW Kota. Dapat dikatakan progress Perda RTRW Provinsi mencapai 75,8%; Perda RTRW Kabupaten 76,6%; dan Perda RTRW Kota 82,8% seperti yang terdapat pada Tabel 6.1.

Provinsi yang belum memiliki RTRW sebagai Perda dengan lingkup provinsi adalah Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Untuk rincian jumlah RTRW Provinsi, kabupaten dan kota yang telah maupun belum menjadi Perda terdapat pada Tabel 6.2 – 6.4.

Tabel 6.1.
Progres Perda RTRW di Indonesia
Status Agustus 2014

Status Perda RTRW	Provinsi	Kabupaten	Kota
Proses Revisi	0	0	0
Proses Rekomendasi Gubernur	0	0	0
Sudah Pembahasan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)	0	0	0
Sudah Mendapatkan Persetujuan Substansi Menteri PU	8	93	16
Perda	25	305	77
Jumlah	33	398	93
Progres Persetujuan Substansi	100,0%	100,0%	100,0%
Progres Perda RTRW	75,8%	76,6%	82,8%

Sumber : Direktorat Jenderal Penataan Ruang

Tabel 6.2.
Progres Perda RTRW Lingkup Provinsi di Indonesia
Status Agustus 2014

Provinsi	Jumlah Perda RTRW Provinsi	Proses RTRW				Perda
		Revisi	Rekomendasi Gubernur	Pembahasan BKPRN	Persetujuan Substansi Menteri PU	
Aceh	1	0	0	0	0	1
Sumatera Utara	1	0	0	0	1	0
Sumatera Barat	1	0	0	0	0	1
Riau	1	0	0	0	1	0
Jambi	1	0	0	0	0	1
Sumatera Selatan	1	0	0	0	1	0

Provinsi	Jumlah Perda RTRW Provinsi	Proses RTRW				Perda
		Revisi	Rekomendasi Gubernur	Pembahasan BKPRN	Persetujuan Substansi Menteri PU	
Bengkulu	1	0	0	0	0	1
Lampung	1	0	0	0	0	1
Kepulauan Bangka Belitung	1	0	0	0	0	1
Kepulauan Riau	1	0	0	0	1	0
DKI Jakarta	1	0	0	0	0	1
Jawa Barat	1	0	0	0	0	1
Jawa Tengah	1	0	0	0	0	1
DI Yogyakarta	1	0	0	0	0	1
Jawa Timur	1	0	0	0	0	1
Banten	1	0	0	0	0	1
Bali	1	0	0	0	0	1
Nusa Tenggara Barat	1	0	0	0	0	1
Nusa Tenggara Timur	1	0	0	0	0	1
Kalimantan Barat	1	0	0	0	1	0
Kalimantan Tengah	1	0	0	0	1	0
Kalimantan Selatan	1	0	0	0	1	0
Kalimantan Timur	1	0	0	0	1	0
Sulawesi Utara	1	0	0	0	0	1
Sulawesi Tengah	1	0	0	0	0	1
Sulawesi Selatan	1	0	0	0	0	1
Sulawesi Tenggara	1	0	0	0	0	1
Gorontalo	1	0	0	0	0	1
Sulawesi Barat	1	0	0	0	0	1
Maluku	1	0	0	0	0	1
Maluku Utara	1	0	0	0	0	1
Papua Barat	1	0	0	0	0	1
Papua	1	0	0	0	0	1
Indonesia	33	0	0	0	8	25

Sumber : Direktorat Jenderal Penataan Ruang

Tabel 6.3.
Progres Perda RTRW Lingkup Kabupaten di Indonesia
Status Agustus 2014

Provinsi	Jumlah Perda RTRW Kabupaten	Proses RTRW				Perda
		Revisi	Rekomendasi Gubernur	Pembahasan BKPRN	Persetujuan Substansi Menteri PU	
Aceh	18	0	0	0	4	14
Sumatera Utara	25	0	0	0	19	6
Sumatera Barat	12	0	0	0	1	11
Riau	10	0	0	0	10	0
Jambi	9	0	0	0	1	8
Sumatera Selatan	11	0	0	0	1	10
Bengkulu	9	0	0	0	1	8
Lampung	12	0	0	0	1	11
Kepulauan Bangka Belitung	6	0	0	0	3	3
Kepulauan Riau	5	0	0	0	0	5
DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0
Jawa Barat	17	0	0	0	1	16
Jawa Tengah	29	0	0	0	0	29
DI Yogyakarta	4	0	0	0	0	4
Jawa Timur	29	0	0	0	1	28
Banten	4	0	0	0	0	4
Bali	8	0	0	0	0	8
Nusa Tenggara Barat	8	0	0	0	0	8
Nusa Tenggara Timur	20	0	0	0	1	19
Kalimantan Barat	12	0	0	0	12	0
Kalimantan Tengah	13	0	0	0	10	3
Kalimantan Selatan	11	0	0	0	5	6
Kalimantan Timur	10	0	0	0	5	5
Sulawesi Utara	11	0	0	0	4	7
Sulawesi Tengah	10	0	0	0	1	9

Provinsi	Jumlah Perda RTRW Kabupaten	Proses RTRW				Perda
		Revisi	Rekomendasi Gubernur	Pembahasan BKPRN	Persetujuan Substansi Menteri PU	
Sulawesi Selatan	21	0	0	0	0	21
Sulawesi Tenggara	10	0	0	0	1	9
Gorontalo	5	0	0	0	0	5
Sulawesi Barat	5	0	0	0	2	3
Maluku	9	0	0	0	0	9
Maluku Utara	7	0	0	0	0	7
Papua Barat	10	0	0	0	2	8
Papua	28	0	0	0	7	21
Indonesia	398	0	0	0	93	305

Sumber : Direktorat Jenderal Penataan Ruang

Tabel 6.4.
Progres Perda RTRW Lingkup Kota di Indonesia
Status Agustus 2014

Provinsi	Jumlah Perda RTRW Kota	Proses RTRW				Perda
		Revisi	Rekomendasi Gubernur	Pembahasan BKPRN	Persetujuan Substansi Menteri PU	
Aceh	5	0	0	0	1	4
Sumatera Utara	8	0	0	0	2	6
Sumatera Barat	7	0	0	0	0	7
Riau	2	0	0	0	2	0
Jambi	2	0	0	0	0	2
Sumatera Selatan	4	0	0	0	1	3
Bengkulu	1	0	0	0	0	1
Lampung	2	0	0	0	0	2
Kepulauan Bangka Belitung	1	0	0	0	0	1
Kepulauan Riau	2	0	0	0	2	0
DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0
Jawa Barat	9	0	0	0	2	7
Jawa Tengah	6	0	0	0	0	6

Provinsi	Jumlah Perda RTRW Kota	Proses RTRW				Perda
		Revisi	Rekomendasi Gubernur	Pembahasan BKPRN	Persetujuan Substansi Menteri PU	
DI Yogyakarta	1	0	0	0	0	1
Jawa Timur	9	0	0	0	1	8
Banten	4	0	0	0	0	4
Bali	1	0	0	0	0	1
Nusa Tenggara Barat	2	0	0	0	0	2
Nusa Tenggara Timur	1	0	0	0	0	1
Kalimantan Barat	2	0	0	0	0	2
Kalimantan Tengah	1	0	0	0	1	0
Kalimantan Selatan	2	0	0	0	1	1
Kalimantan Timur	4	0	0	0	0	4
Sulawesi Utara	4	0	0	0	2	2
Sulawesi Tengah	1	0	0	0	0	1
Sulawesi Selatan	3	0	0	0	1	2
Sulawesi Tenggara	2	0	0	0	0	2
Gorontalo	1	0	0	0	0	1
Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0
Maluku	2	0	0	0	0	2
Maluku Utara	2	0	0	0	0	2
Papua Barat	1	0	0	0	0	1
Papua	1	0	0	0	0	1
Indonesia	93	0	0	0	16	77

Sumber : Direktorat Jenderal Penataan Ruang

Suatu daerah yang belum memiliki Perda RTRW dapat menimbulkan dampak buruk seperti semakin menyempit atau bahkan habisnya lahan-lahan produktif strategis karena dialihfungsikan menjadi kawasan lainnya. Namun membuat Perda RTRW membutuhkan proses yang panjang karena harus melalui persetujuan pihak Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

B. Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau/Kepulauan

Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau/Kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagai rencana rinci dari RTRWN berisi tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur dan pola ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, strategi operasionalisasi perwujudan struktur dan pola ruang, serta indikasi program jangka menengah lima tahun. Salah satu isi penting dalam RTR Pulau/Kepulauan adalah strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang. Strategi operasionalisasi tersebut dimaksudkan sebagai langkah-langkah pelaksanaan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional.

Dalam RTR Pulau, dikenal beberapa jenis fungsi kota, yaitu :

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN), merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.

Dalam Tabel 6.5. di bawah ini disajikan Rencana Tata Ruang Pulau beserta jenis dan fungsi dari kawasannya berdasarkan Peraturan Presiden yang telah ditetapkan.

Tabel 6.5.

Rencana Tata Ruang Pulau

Pulau	Provinsi	Kawasan Perkotaan	Jenis	Fungsi Pelayanan
Sumatera	Aceh	Lhokseumawe	PKN	Industri, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Pertanian
Sumatera	Aceh	Sabang	PKW/ PKSN	Pariwisata, Industri, Perikanan, Pelayanan pemeriksaan lintas batas negara

Pulau	Provinsi	Kawasan Perkotaan	Jenis	Fungsi Pelayanan
Sumatera	Aceh	Banda Aceh	PKW	Industri, Perikanan, Pertanian, Pariwisata
Sumatera	Aceh	Langsa	PKW	Pertanian, Perikanan, Industri
Sumatera	Aceh	Takengon	PKW	Perkebunan, Pertanian, Industri
Sumatera	Aceh	Meulaboh	PKW	Pertanian, Perikanan, Pertambangan, Perkebunan, Industri
Sumatera	Sumatera Utara	Mebidangro (Medan-Binjai-Deli-Serdang-Karo)	PKN	Industri, Perkebunan, Pariwisata, Pertanian, Perikanan, Hutan, Pertambangan
Sumatera	Sumatera Utara	Tebingtinggi	PKW	Industri, Perkebunan, Pertanian
Sumatera	Sumatera Utara	Sidikalang	PKW	Industri, Perkebunan, Pertanian
Sumatera	Sumatera Utara	Pematang Siantar	PKW	Perkebunan, Pertanian, Industri, Pariwisata
Sumatera	Sumatera Utara	Balige	PKW	Pertanian, Pariwisata, Industri
Sumatera	Sumatera Utara	Rantau Prapat	PKW	Perkebunan, Kehutanan, Pertanian, Industri
Sumatera	Sumatera Utara	Kisaran	PKW	Perkebunan, Perikanan, Pertanian, Industri, Kehutanan
Sumatera	Sumatera Utara	Gunung Sitoli	PKW	Perkebunan, Perikanan, Pariwisata, Industri
Sumatera	Sumatera Utara	Padang Sidempuan	PKW	Industri, Pertanian, Perkebunan
Sumatera	Sumatera Utara	Sibolga	PKW	Perkebunan, Pertambangan, Perikanan, Pertanian, Industri, Pariwisata
Sumatera	Sumatera Barat	Padang	PKN	Industri, Perkebunan, Perikanan, Pertanian, Pertambangan, Pariwisata
Sumatera	Sumatera Barat	Pariaman	PKW	Industri, Pertanian, Pariwisata
Sumatera	Sumatera Barat	Sawahlunto	PKW	Industri, Perkebunan, Pertambangan, Pertanian
Sumatera	Sumatera Barat	Muarasiberut	PKW	Industri, Perikanan, Pariwisata, Pertanian
Sumatera	Sumatera Barat	Bukittinggi	PKW	Pariwisata, Perkebunan, Pertanian, Industri
Sumatera	Sumatera Barat	Solok	PKW	Perkebunan, Pertambangan, Pertanian, Pariwisata, Industri

Pulau	Provinsi	Kawasan Perkotaan	Jenis	Fungsi Pelayanan
Sumatera	Riau	Pekanbaru	PKN	Industri, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Pertambangan, Pariwisata
Sumatera	Riau	Dumai	PKN/ PKSN	Industri, Perkebunan, Perikanan, Pelayanan pemeriksaan lintas batas negara
Sumatera	Riau	Bangkinang	PKW	Industri, Perkebunan
Sumatera	Riau	Taluk Kuantan	PKW	Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Industri
Sumatera	Riau	Bengkalis	PKW	Industri, Perkebunan
Sumatera	Riau	Bagan Siapi-api	PKW	Industri, Perikanan
Sumatera	Riau	Tembilahan	PKW	Industri, Perkebunan, Pertanian
Sumatera	Riau	Rengat	PKW	Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Industri
Sumatera	Riau	Pangkalan Kerinci	PKW	Perkebunan, Pertanian, Industri, Kehutanan
Sumatera	Riau	Pasir Pangarayan	PKW	Industri migas, Perkebunan, Industri
Sumatera	Riau	Siak Sri Indrapura	PKW	Industri, Perkebunan, Pertanian
Sumatera	Kepulauan Riau	Batam	PKN/ PKSN	Perikanan, Pariwisata, Industri, Pelayanan pemeriksaan lintas batas negara
Sumatera	Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	PKW	Pariwisata, Perikanan, Industri
Sumatera	Kepulauan Riau	Tarempa	PKW	Perikanan, Pertambangan, Pariwisata, Pertambangan
Sumatera	Kepulauan Riau	Daik Lingga	PKW	Perikanan, Pertambangan
Sumatera	Kepulauan Riau	Dabo-Pulau Singkep	PKW	Perikanan, Pertambangan, Pariwisata
Sumatera	Kepulauan Riau	Tanjung Balai Karimun	PKW	Perikanan, Pertambangan, Industri
Sumatera	Kepulauan Riau	Ranai	PKSN	Industri, Perikanan, Pertambangan, Pariwisata, Pelayanan pemeriksaan lintas batas negara
Sumatera	Jambi	Jambi	PKN	Perkebunan, Pertanian, Pertambangan, Industri, Perikanan, Pariwisata
Sumatera	Jambi	Kuala Tungkal	PKW	Industri, Perkebunan, Perikanan, Pertanian

Pulau	Provinsi	Kawasan Perkotaan	Jenis	Fungsi Pelayanan
Sumatera	Jambi	Sarolangun	PKW	Industri, Perkebunan, Pertanian
Sumatera	Jambi	Muara Bungo	PKW	Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Industri
Sumatera	Jambi	Muara Bulian	PKW	Perkebunan, Pertambangan, Kehutanan, Pariwisata, Industri
Sumatera	Sumatera Selatan	Palembang	PKN	Pertanian, Industri, Kehutanan, Pertambangan, Perikanan, Pariwisata
Sumatera	Sumatera Selatan	Muara Enim	PKW	Pertanian, Pertambangan, Perkebunan, Industri
Sumatera	Sumatera Selatan	Kayuagung	PKW	Industri, Perikanan, Pertanian
Sumatera	Sumatera Selatan	Baturaja	PKW	Industri, Perkebunan, Pertanian
Sumatera	Sumatera Selatan	Prabumulih	PKW	Pertambangan, Perkebunan, Pertanian, Industri
Sumatera	Sumatera Selatan	Lubuk Linggau	PKW	Perkebunan, Pertanian, Industri
Sumatera	Sumatera Selatan	Sekayu	PKW	Industri, Perkebunan, Pertanian
Sumatera	Sumatera Selatan	Lahat	PKW	Perkebunan, Pertanian, Industri
Sumatera	Bengkulu	Bengkulu	PKW	Pertanian, Industri, Perkebunan, Perikanan
Sumatera	Bengkulu	Manna	PKW	Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Industri
Sumatera	Bengkulu	Mukomuko	PKW	Perkebunan, Perikanan, Pertanian, Industri
Sumatera	Bengkulu	Curup	PKW	Pertanian, Industri
Sumatera	Bangka Belitung	Pangkal Pinang	PKW	Pariwisata, Perkebunan, Perikanan, Pertanian, Industri
Sumatera	Bangka Belitung	Muntok	PKW	Perikanan, Pertanian, Industri, Pariwisata
Sumatera	Bangka Belitung	Tanjungpandan	PKW	Perkebunan, Pariwisata, Pertanian, Industri
Sumatera	Bangka Belitung	Manggar	PKW	Perkebunan, Pertanian, Industri
Sumatera	Lampung	Bandar Lampung	PKN	Perkebunan, Pariwisata, Industri, Pertanian, Perikanan

Pulau	Provinsi	Kawasan Perkotaan	Jenis	Fungsi Pelayanan
Sumatera	Lampung	Metro	PKW	Perkebunan, Industri, Pertanian
Sumatera	Lampung	Kalianda	PKW	Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Industri
Sumatera	Lampung	Liwa	PKW	Perkebunan, Perikanan, Pertanian, Industri, Pariwisata
Sumatera	Lampung	Menggala	PKW	Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri
Sumatera	Lampung	Kotabumi	PKW	Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Industri
Sumatera	Lampung	Kota Agung	PKW	Pariwisata, Pertanian, Industri
Jawa-Bali	DKI Jakarta-Jawa Barat-Banten	Jabodetabek	PKN	Industri, Pariwisata, Perikanan, Perdagangan dan Jasa
Jawa-Bali	Banten	Serang	PKN	Industri, Pariwisata, Pertanian, Perikanan
Jawa-Bali	Banten	Cilegon	PKW	Industri, Pariwisata, Perikanan
Jawa-Bali	Banten	Pandeglang	PKW	Pertanian
Jawa-Bali	Banten	Rangkas Bitung	PKW	Pertanian
Jawa-Bali	Jawa Barat	Bandung Raya	PKN	Industri, Pertanian, Pariwisata, Perkebunan, Perdagangan dan Jasa
Jawa-Bali	Jawa Barat	Cirebon	PKN	Pertanian, Industri, Perikanan, Pertambangan, Perdagangan dan Jasa
Jawa-Bali	Jawa Barat	Sukabumi	PKW	Pertanian, Perkebunan, Industri
Jawa-Bali	Jawa Barat	Cikampek-Cikopo	PKW	Pertanian, Industri, Pariwisata, Perikanan
Jawa-Bali	Jawa Barat	Palabuhan Ratu	PKW	Perikanan, Pariwisata, Industri
Jawa-Bali	Jawa Barat	Indramayu	PKW	Pertanian, Industri, Perikanan, Pertambangan
Jawa-Bali	Jawa Barat	Kadipaten	PKW	Pertanian, Industri, Perikanan
Jawa-Bali	Jawa Barat	Tasikmalaya	PKW	Pertanian, Industri, Perkebunan
Jawa-Bali	Jawa Barat	Pangandaran	PKN	Industri, Pariwisata, Perikanan
Jawa-Bali	Jawa Tengah	Surakarta	PKN	Industri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa

Pulau	Provinsi	Kawasan Perkotaan	Jenis	Fungsi Pelayanan
Jawa-Bali	Jawa Tengah	Kendal-Demak-Ungaran-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur)	PKN	Pertanian, Industri, Pariwisata, Perikanan, Perdagangan dan Jasa
Jawa-Bali	Jawa Tengah	Cilacap	PKN	Pertanian, Pariwisata, Pertambangan, Industri, Perikanan
Jawa-Bali	Jawa Tengah	Boyolali	PKW	Industri, Pertanian
Jawa-Bali	Jawa Tengah	Klaten	PKW	Pariwisata
Jawa-Bali	Jawa Tengah	Salatiga	PKW	Industri
Jawa-Bali	Jawa Tengah	Tegal	PKW	Pertanian, Industri, Perikanan
Jawa-Bali	Jawa Tengah	Pekalongan	PKW	Pertanian, Industri, Perikanan
Jawa-Bali	Jawa Tengah	Kudus	PKW	Pertanian, Industri
Jawa-Bali	Jawa Tengah	Cepu	PKW	Pertambangan, Industri
Jawa-Bali	Jawa Tengah	Magelang	PKW	Pariwisata, Industri
Jawa-Bali	Jawa Tengah	Wonosobo	PKW	Industri, Pertanian
Jawa-Bali	Jawa Tengah	Kebumen	PKW	Industri, Pertanian, Pariwisata
Jawa-Bali	Jawa Tengah	Purwokerto	PKW	Industri
Jawa-Bali	DI Yogyakarta	Yogyakarta	PKN	Pariwisata, Industri, Perdagangan dan Jasa
Jawa-Bali	DI Yogyakarta	Bantul	PKW	Pariwisata, Pertanian, Industri, Perikanan
Jawa-Bali	DI Yogyakarta	Sleman	PKW	Pariwisata, Pertanian, Industri
Jawa-Bali	Jawa Timur	Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertos usila)	PKN	Pertanian, Perikanan, Industri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa
Jawa-Bali	Jawa Timur	Malang	PKW	Pertanian, Perikanan, Industri, Perkebunan, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa
Jawa-Bali	Jawa Timur	Probolinggo	PKW	Pertanian, Industri, Perkebunan, Pariwisata, Perikanan
Jawa-Bali	Jawa Timur	Tuban	PKW	Industri, Pariwisata, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan

Pulau	Provinsi	Kawasan Perkotaan	Jenis	Fungsi Pelayanan
Jawa-Bali	Jawa Timur	Kediri	PKW	Industri, Pertanian, Perkebunan, Pariwisata
Jawa-Bali	Jawa Timur	Madiun	PKW	Industri, Pertanian, Perkebunan, Pariwisata
Jawa-Bali	Jawa Timur	Banyuwangi	PKW	Industri, Pertanian, Perikanan
Jawa-Bali	Jawa Timur	Jember	PKW	Industri, Perkebunan, Pertanian, Pariwisata
Jawa-Bali	Jawa Timur	Blitar	PKW	Industri, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pariwisata
Jawa-Bali	Jawa Timur	Pamekasan	PKW	Industri, Pertanian, Pariwisata, Perikanan, Perkebunan
Jawa-Bali	Jawa Timur	Bojonegoro	PKW	Industri, Pertanian, Perkebunan, Pariwisata, Pertambangan
Jawa-Bali	Jawa Timur	Pacitan	PKW	Industri, Pertanian, Perikanan, Pariwisata
Jawa-Bali	Bali	Denpasar-Bandung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita)	PKN	Pariwisata, Pertanian, Industri, Perikanan, Perdagangan dan Jasa
Jawa-Bali	Bali	Singaraja	PKW	Pariwisata, Pertanian, Perikanan, Industri
Jawa-Bali	Bali	Semarapura	PKW	Pariwisata, Pertanian, Industri
Jawa-Bali	Bali	Negara	PKW	Pariwisata, Pertanian, Industri
Kalimantan	Kalimantan Barat	Pontianak	PKN	Pertanian, Industri, Perikanan, Pariwisata
Kalimantan	Kalimantan Barat	Mempawah	PKW	Pertanian, Industri, Perikanan, Pariwisata
Kalimantan	Kalimantan Barat	Singawang	PKW	Pertanian, Industri, Perkebunan, Perikanan
Kalimantan	Kalimantan Barat	Sambas	PKW	Pertanian, Industri, Perkebunan, Perikanan
Kalimantan	Kalimantan Barat	Ketapang	PKW	Pertanian, Industri, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan
Kalimantan	Kalimantan Barat	Putussibau	PKW	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Pariwisata
Kalimantan	Kalimantan Barat	Entikong	PKW/ PKSN	Pelayanan pemeriksaan lintas batas negara, Pusat perdagangan-jasa lintas batas negara, Pertahanan dan Keamanan, Pertanian, Kehutanan, Perkebunan

Pulau	Provinsi	Kawasan Perkotaan	Jenis	Fungsi Pelayanan
Kalimantan	Kalimantan Barat	Sanggau	PKW	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan
Kalimantan	Kalimantan Barat	Sintang	PKW	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan
Kalimantan	Kalimantan Barat	Paloh-Aruk	PKSN	Pelayanan pemeriksaan lintas batas negara, Pusat perdagangan-jasa lintas batas negara, Pertahanan dan Keamanan
Kalimantan	Kalimantan Barat	Jagoibabang	PKSN	Pelayanan pemeriksaan lintas batas negara, Pusat perdagangan-jasa lintas batas, Pertahanan dan Keamanan
Kalimantan	Kalimantan Barat	Nanga Badau	PKSN	Pelayanan pemeriksaan lintas batas negara, Pusat perdagangan-jasa lintas batas, Pertahanan dan Keamanan
Kalimantan	Kalimantan Barat	Jasa	PKSN	Pelayanan pemeriksaan lintas batas negara, Pusat perdagangan-jasa lintas batas, Pertahanan dan Keamanan
Kalimantan	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	PKN	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Pariwisata
Kalimantan	Kalimantan Tengah	Kuala Kapuas	PKW	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan
Kalimantan	Kalimantan Tengah	Pangkalan Bun	PKW	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, Industri, Pariwisata
Kalimantan	Kalimantan Tengah	Buntok	PKW	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata
Kalimantan	Kalimantan Tengah	Muara Teweh	PKW	Perkebunan, Pertanian, Pertambangan, Kehutanan
Kalimantan	Kalimantan Tengah	Sampit	PKW	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, Industri, Pariwisata
Kalimantan	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	PKN	Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Industri
Kalimantan	Kalimantan Selatan	Amuntai	PKW	Pariwisata, Perkebunan, Pertanian
Kalimantan	Kalimantan Selatan	Martapura	PKW	Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Industri
Kalimantan	Kalimantan Selatan	Marabahan	PKW	Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Industri
Kalimantan	Kalimantan Selatan	Kotabaru	PKW	Perkebunan, Kehutanan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Industri

Pulau	Provinsi	Kawasan Perkotaan	Jenis	Fungsi Pelayanan
Kalimantan	Kalimantan Timur	Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang	PKN	Industri, Perkebunan, Pertambangan, Kehutanan, Perikanan, Pariwisata
Kalimantan	Kalimantan Timur	Tarakan	PKN	Perikanan, Pariwisata, Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan, Industri
Kalimantan	Kalimantan Timur	Tanjung Redeb	PKW	Industri, Kehutanan, Pertambangan, Pariwisata, Perikanan
Kalimantan	Kalimantan Timur	Sangata	PKW	Industri, Kehutanan, Pertambangan, Pariwisata, Perikanan, Perkebunan
Kalimantan	Kalimantan Timur	Nunukan	PKW/ PKSN	Pelayanan pemeriksaan lintas batas negara, Pusat perdagangan-jasa lintas batas negara, Pertahanan dan Keamanan, Perikanan, Pariwisata, Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan, Industri
Kalimantan	Kalimantan Timur	Tanjung Selor	PKW	Perikanan, Pariwisata, Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan, Industri
Kalimantan	Kalimantan Timur	Malinau	PKW	Pariwisata, Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan, Industri
Kalimantan	Kalimantan Timur	Tanlumbis	PKW	Kehutanan, Pariwisata, Industri
Kalimantan	Kalimantan Timur	Tanah Grogot	PKW	Perikanan, Perkebunan, Pertambangan, Pariwisata
Kalimantan	Kalimantan Timur	Sendawar	PKW	Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan, Pariwisata
Kalimantan	Kalimantan Timur	Simanggaris	PKSN	Perkebunan, Pertahanan dan Keamanan, Pelayanan pemeriksaan lintas batas negara, Pusat perdagangan-jasa lintas batas, Industri
Kalimantan	Kalimantan Timur	Long Midang	PKSN	Perkebunan, Pertahanan dan Keamanan, Pelayanan pemeriksaan lintas batas negara, Pusat perdagangan-jasa lintas batas, Industri
Kalimantan	Kalimantan Timur	Long Pahangai	PKSN	Perkebunan, Pertahanan dan Keamanan, Pelayanan pemeriksaan lintas batas negara, Pusat perdagangan-jasa lintas batas, Industri
Kalimantan	Kalimantan Timur	Long Nawan	PKSN	Pariwisata, Pertahanan dan Keamanan, Pelayanan pemeriksaan lintas batas negara, Pusat perdagangan-jasa lintas batas, Industri

Pulau	Provinsi	Kawasan Perkotaan	Jenis	Fungsi Pelayanan
Sulawesi	Gorontalo	Gorontalo	PKN	Kehutanan, Pertanian, Perikanan, Industri, Pariwisata, Permukiman, Pendidikan, Perdagangan dan Jasa
Sulawesi	Gorontalo	Isimu	PKW	Agroindustri, Pertanian
Sulawesi	Gorontalo	Kuandang	PKW	Agroindustri, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan
Sulawesi	Gorontalo	Tilamuta	PKW	Agroindustri, Pertanian, Perikanan, Pariwisata
Sulawesi	Sulawesi Utara	Manado-Bitung	PKN	Perdagangan dan Jasa, Industri, Perikanan, Pariwisata, Perkebunan
Sulawesi	Sulawesi Utara	Tomohon	PKW	Agroindustri, Pertanian
Sulawesi	Sulawesi Utara	Tondano	PKW	Agroindustri, Pertanian, Pariwisata
Sulawesi	Sulawesi Utara	Kotamobagu	PKW	Agroindustri, Perkebunan, Pertanian, Perikanan
Sulawesi	Sulawesi Utara	Melonguane	PKSN	Pertahanan dan Keamanan, Industri, Perdagangan dan Jasa, Perikanan, Perkebunan
Sulawesi	Sulawesi Utara	Tahuna	PKSN	Pertahanan dan Keamanan, Industri, Perikanan, Perkebunan
Sulawesi	Sulawesi Tengah	Palu	PKN	Perdagangan dan Jasa, Industri, Perkebunan, Kelautan, Pariwisata
Sulawesi	Sulawesi Tengah	Poso	PKW	Agroindustri, Kehutanan, Perikanan, Perkebunan
Sulawesi	Sulawesi Tengah	Luwuk	PKW	Pariwisata, Industri, Pengolahan migas, Perikanan
Sulawesi	Sulawesi Tengah	Buol	PKW	Agroindustri, Pertanian, Perkebunan, Perikanan Tangkap
Sulawesi	Sulawesi Tengah	Kolonedale	PKW	Industri, Pertambangan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan
Sulawesi	Sulawesi Tengah	Toli-toli	PKW	Agroindustri, Pertanian, Perikanan
Sulawesi	Sulawesi Tengah	Donggala	PKW	Agroindustri, Pertanian, Perkebunan
Sulawesi	Sulawesi Selatan	Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata)	PKN	Perdagangan dan Jasa, Industri, Perikanan, Pertanian, Pariwisata

Pulau	Provinsi	Kawasan Perkotaan	Jenis	Fungsi Pelayanan
Sulawesi	Sulawesi Selatan	Pangkajene	PKW	Agroindustri, Perikanan, Pariwisata
Sulawesi	Sulawesi Selatan	Jeneponto	PKW	Agroindustri, Pertanian, Perikanan, Pariwisata
Sulawesi	Sulawesi Selatan	Palopo	PKW	Agroindustri, Perkebunan, Pertanian
Sulawesi	Sulawesi Selatan	Watampone	PKW	Agroindustri, Pertanian, Perikanan
Sulawesi	Sulawesi Selatan	Bulukumba	PKW	Agroindustri, Pertanian, Pariwisata, Perikanan
Sulawesi	Sulawesi Selatan	Barru	PKW	Agroindustri, Perikanan, Pertanian, Perkebunan
Sulawesi	Sulawesi Selatan	Pare-Pare	PKW	Agroindustri, Perikanan, Pertanian, Perkebunan
Sulawesi	Sulawesi Barat	Mamuju	PKW	Perdagangan dan Jasa, Industri, Pariwisata, Perkebunan
Sulawesi	Sulawesi Barat	Majene	PKW	Agroindustri, Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Pariwisata
Sulawesi	Sulawesi Barat	Pasangkayu	PKW	Agroindustri, Perkebunan, Pertanian
Sulawesi	Sulawesi Tenggara	Kendari	PKN	Perdagangan dan Jasa, Pariwisata, Industri, Perikanan, Pertanian, Perkebunan
Sulawesi	Sulawesi Tenggara	Unaaha	PKW	Agroindustri, Perkebunan, Pertanian
Sulawesi	Sulawesi Tenggara	Lasolo	PKW	Agroindustri, Perkebunan, Perikanan, Pariwisata
Sulawesi	Sulawesi Tenggara	Bau-Bau	PKW	Pariwisata, Pertambangan, Industri
Sulawesi	Sulawesi Tenggara	Raha	PKW	Agroindustri, Perikanan, Pertanian
Sulawesi	Sulawesi Tenggara	Kolaka	PKW	Industri, Perkebunan, Pertambangan

Sumber : Lampiran III Perpres RI No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera
Lampiran III Perpres No. 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali
Lampiran III Perpres No. 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
Lampiran III Perpres No. 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi

Catatan : PKN = Pusat Kegiatan Nasional
PKW = Pusat Kegiatan Wilayah
PKSN = Pusat Kegiatan Strategis Nasional

C. Kawasan Lindung

Salah satu unsur pembentuk fungsi ruang dalam penataan ruang kita adalah adanya kawasan lindung. **Kawasan lindung** merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan kawasan budidaya mempunyai fungsi utama untuk dibudidayakan. Penurunan fungsi kawasan lindung dapat mengancam keberadaan kawasan-kawasan di bawahnya. Dalam Tabel 6.6. disajikan daftar kawasan lindung di Indonesia yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Tabel 6.6.
Kawasan Lindung Nasional di Indonesia

Provinsi	Kawasan Lindung	Tahapan Pengembangan
Aceh	Suaka Margasatwa Rawa Singkil	I/B/2
Aceh	Cagar Alam Hutan Pinus Jhanto	I/B/3
Aceh	Taman Nasional Gunung Leuser	I/A/4
Aceh	Taman Hutan Raya Cut Nyak Dien (Pocut Meurah Intan)	II/B/5
Aceh	Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh	I/A/6
Aceh	Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Banyak	II/A/6
Aceh	Taman Wisata Alam Laut Perairan Pulau Pinang, Siumat, dan Simanaha (Pisisi)	I/A/6
Aceh	Taman Wisata Alam Laut Sabang	I/B/6
Aceh	Taman Buru Lingga Isaq	I/F
Sumatera Utara	Suaka Margasatwa Karang Gading & Langkat Timur Laut	II/B/2
Sumatera Utara	Suaka Margasatwa Barumon	I/B/2
Sumatera Utara	Suaka Margasatwa Siranggias	II/B/2
Sumatera Utara	Suaka Margasatwa Dolok Surungan	II/B/2
Sumatera Utara	Cagar Alam Dolok Sibual-buali	II/A/3
Sumatera Utara	Cagar Alam Dolok Sipirok	I/A/3
Sumatera Utara	Cagar Alam Lubuk Raya	II/B/3
Sumatera Utara	Cagar Alam Sei Ledong	II/B/3
Sumatera Utara	Taman Nasional Gunung Leuser	I/A/4

Provinsi	Kawasan Lindung	Tahapan Pengembangan
Sumatera Utara	Taman Nasional Batang Gadis	II/A/4
Sumatera Utara	Taman Hutan Raya Bukit Barisan	I/B/5
Sumatera Utara	Taman Wisata Alam Holiday Resort	I/B/6
Sumatera Utara	Taman Buru Pulau Pini	I/F
Sumatera Barat	Suaka Margasatwa Pagai Selatan	II/B/2
Sumatera Barat	Cagar Alam Rimbo Panti Reg. 75	II/B/3
Sumatera Barat	Cagar Alam Lembah Anai	I/B/3
Sumatera Barat	Cagar Alam Batang Pangean I	II/B/3
Sumatera Barat	Cagar Alam Batang Pangean II Reg. 49	III/B/3
Sumatera Barat	Cagar Alam Arau Hilir	II/B/3
Sumatera Barat	Cagar Alam Melampah Alahan Panjang	I/B/3
Sumatera Barat	Cagar Alam Gunung Sago	II/B/3
Sumatera Barat	Cagar Alam Maninjau Utara dan Selatan	II/B/3
Sumatera Barat	Cagar Alam Gunung Singgalang Tandikat	I/B/3
Sumatera Barat	Cagar Alam Gunung Merapi	I/B/3
Sumatera Barat	Cagar Alam Air Putih	III/B/3
Sumatera Barat	Cagar Alam Barisan I	II/B/3
Sumatera Barat	Cagar Alam Air Terusan	II/B/3
Sumatera Barat	Taman Nasional Siberut	II/A/4
Sumatera Barat	Taman Nasional Kerinci Seblat	I/A/4
Sumatera Barat	Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta	II/B/5
Sumatera Barat	Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Pieh	II/B/6
Riau	Suaka Margasatwa Kerumutan	II/B/2
Riau	Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah	I/B/2
Riau	Suaka Margasatwa Bukit Rimbang-Bukit Baling	III/B/2
Riau	Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil	II/B/2
Riau	Suaka Margasatwa Balai Raja	II/B/2
Riau	Suaka Margasatwa Tasik Besar/Tasik Metas	II/B/2
Riau	Suaka Margasatwa Tasik Serkap/Tasik Sarang Burung	II/B/2
Riau	Suaka Margasatwa Pusat Pelatihan Gajah	II/B/2
Riau	Suaka Margasatwa Tasik Tanjung Padang	II/B/2
Riau	Suaka Margasatwa Tasik Belat	II/B/2
Riau	Suaka Margasatwa Bukit Batu	II/B/2
Riau	Cagar Alam Bukit Bungkok	I/B/3

Provinsi	Kawasan Lindung	Tahapan Pengembangan
Riau	Taman Nasional Teso Nilo	I/A/4
Riau	Taman Nasional Bukit Tiga Puluh	I/A/4
Riau	Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (Minas)	II/B/5
Riau	Taman Wisata Alam Sungai Dumai	I/A/6
Jambi	Cagar Alam Kelompok Hutan Bakau Pantai Timur	I/A/3
Jambi	Cagar Alam Cempaka	II/B/3
Jambi	Cagar Alam Sungai Batara	III/B/3
Jambi	Taman Nasional Bukit Tiga Puluh	I/A/4
Jambi	Taman Nasional Bukit Dua Belas	I/A/4
Jambi	Taman Nasional Berbak	I/A/4
Jambi	Taman Nasional Kerinci Seblat	I/A/4
Jambi	Taman Hutan Raya Thaha Saifuddin	II/B/5
Jambi	Taman Wisata Alam Sungai Bengkal	II/B/6
Sumatera Selatan	Suaka Margasatwa Gumai Pasemah	II/B/2
Sumatera Selatan	Suaka Margasatwa Gunung Raya	I/B/2
Sumatera Selatan	Suaka Margasatwa Isau-Isau Pasemah	II/B/2
Sumatera Selatan	Suaka Margasatwa Bentayan	I/B/2
Sumatera Selatan	Suaka Margasatwa Dangku	II/B/2
Sumatera Selatan	Suaka Margasatwa Padang Sugihan	II/B/2
Sumatera Selatan	Taman Nasional Kerinci Seblat	I/A/4
Sumatera Selatan	Taman Nasional Sembilang	II/A/4
Bengkulu	Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61	III/B/3
Bengkulu	Cagar Alam Air Ketebat Danau Tes Reg. 57	II/B/3
Bengkulu	Cagar Alam Teluk Klowe Reg. 96	III/B/3
Bengkulu	Taman Nasional Kerinci Seblat	I/A/4
Bengkulu	Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	I/A/4
Bengkulu	Taman Hutan Raya Raja Lelo	II/B/5
Bengkulu	Taman Wisata Alam Bukit Kaba	II/B/6
Bengkulu	Taman Wisata Alam Pantai Panjang - Pulau Baai	I/B/6
Bengkulu	Taman Wisata Alam Laut Enggano	II/B/6
Bengkulu	Taman Buru Semidang Bukit Kabu	II/F
Bengkulu	Taman Buru Gunung Nanu'ua	II/F
Lampung	Cagar Alam Laut Pulau Anak Krakatau	I/A/3

Provinsi	Kawasan Lindung	Tahapan Pengembangan
Lampung	Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	I/A/4
Lampung	Taman Nasional Way Kambas	I/A/4
Lampung	Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman	I/B/5
Lampung	Taman Wisata Alam Laut Lampung Barat	I/B/6
Bangka Belitung	Cagar Alam G. Lalang, G. Menumbing, G. Maras, G. Mangkol, G. Permisian, Jening Mendayung	I/B/3
Bangka Belitung	Taman Wisata Alam Laut Perairan Belitung	II/B/6
Kepulauan Riau	Taman Nasional Laut Anambas	II/B/4
Kepulauan Riau	Taman Wisata Alam Muka Kuning (Batam)	I/B/6
DKI Jakarta	Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu	I/A/4
Jawa Barat	Suaka Margasatwa Cikepuh	II/B/2
Jawa Barat	Suaka Margasatwa Gunung Sawal	II/B/2
Jawa Barat	Cagar Alam Gunung Tangkuban Perahu	I/A/3
Jawa Barat	Cagar Alam Leuweung Sancang	II/B/3
Jawa Barat	Cagar Alam Gunung Tilu	II/B/3
Jawa Barat	Cagar Alam Gunung Papandayan	I/B/3
Jawa Barat	Cagar Alam Gunung Burangrang	I/B/3
Jawa Barat	Cagar Alam Kawah Kamojang	II/B/3
Jawa Barat	Cagar Alam Gunung Simpang	II/B/3
Jawa Barat	Cagar Alam Laut Leuweung Sancang	II/B/3
Jawa Barat	Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango	I/A/4
Jawa Barat	Taman Nasional Halimun - Salak	I/A/4
Jawa Barat	Taman Nasional Gunung Ciremai	I/A/4
Jawa Barat	Taman Wisata Alam Gunung Tampomas	I/B/6
Jawa Barat	Taman Wisata Alam Laut Cijulang	I/A/6
Jawa Barat	Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi	II/F
Jawa Tengah	Cagar Alam Gunung Celering	I/B/3
Jawa Tengah	Cagar Alam Geologi Karangsembung	II/B/3
Jawa Tengah	Taman Nasional Gunung Merapi	I/A/4
Jawa Tengah	Taman Nasional Gunung Merbabu	I/A/4
Jawa Tengah	Taman Nasional Laut Karimun Jawa	I/B/4
Jawa Tengah	Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban	I/B/6
DI Yogyakarta	Taman Nasional Gunung Merapi	I/A/4

Provinsi	Kawasan Lindung	Tahapan Pengembangan
Jawa Timur	Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Yang	I/B/2
Jawa Timur	Suaka Margasatwa Pulau Bawean	I/B/2
Jawa Timur	Cagar Alam Pulau Nusa Barong	II/B/3
Jawa Timur	Cagar Alam Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup	II/B/3
Jawa Timur	Taman Nasional Alas Purwo	I/A/4
Jawa Timur	Taman Nasional Baluran	II/A/4
Jawa Timur	Taman Nasional Bromo Tengger-Semeru	I/A/4
Jawa Timur	Taman Nasional Meru Betiri	I/A/4
Jawa Timur	Taman Hutan Raya R. Suryo	I/B/5
Banten	Cagar Alam Rawa Danau	II/B/3
Banten	Cagar Alam Gunung Tukung Gede	I/B/3
Banten	Taman Nasional Halimun – Salak	I/A/4
Banten	Taman Nasional Ujung Kulon	I/A/4
Banten	Taman Wisata Alam Pulau Sangiang	I/A/6
Bali	Cagar Alam Batukahu I/II/III	I/B/3
Bali	Taman Nasional Bali Barat	I/A/4
Bali	Taman Hutan Raya Ngurah Rai	I/B/5
Bali	Taman Wisata Alam Sangeh	I/B/6
Bali	Taman Wisata Alam Danau Buyan Dan Danau Tamblingan	I/B/6
Bali	Taman Wisata Alam Laut Buleleng	I/A/6
Nusa Tenggara Barat	Suaka Margasatwa Gunung Tambora Selatan	I/B/2
Nusa Tenggara Barat	Cagar Alam Toffo Kota Lambu	II/A/3
Nusa Tenggara Barat	Cagar Alam Pulau Sangiang	I/A/3
Nusa Tenggara Barat	Cagar Alam Gunung Tambora Selatan	I/B/3
Nusa Tenggara Barat	Cagar Alam Pulau Panjang	II/B/3
Nusa Tenggara Barat	Cagar Alam Jereweh (Sekongkang)	II/B/3
Nusa Tenggara Barat	Taman Nasional Gunung Rinjani	I/A/4
Nusa Tenggara Barat	Taman Hutan Raya Nurasaka	I/A/5
Nusa Tenggara Barat	Taman Wisata Alam Bangko Bangko	II/B/6
Nusa Tenggara Barat	Taman Wisata Alam Tanjung Tanpa	II/B/6
Nusa Tenggara Barat	Taman Wisata Alam Danau Rawa Taliwang	II/B/6
Nusa Tenggara Barat	Taman Wisata Alam Laut Gili Meno, Gili Ayer, Gili Trawangan	I/B/6
Nusa Tenggara Barat	Taman Wisata Alam Laut Pulau Moyo	I/B/6
Nusa Tenggara Barat	Taman Wisata Alam Laut Pulau Satonda	II/B/6

Provinsi	Kawasan Lindung	Tahapan Pengembangan
Nusa Tenggara Barat	Taman Wisata Alam Laut Gilin Sulat dan Gili Lawang	II/A/6
Nusa Tenggara Barat	Taman Wisata Alam Laut Pulau Gili Banta	II/A/6
Nusa Tenggara Barat	Taman Buru Gunung Tambora Selatan	I/F
Nusa Tenggara Barat	Taman Buru Pulau Moyo	I/F
Nusa Tenggara Timur	Suaka Alam Laut Sawu	I/B/1
Nusa Tenggara Timur	Suaka Margasatwa Perhatu	III/B/2
Nusa Tenggara Timur	Suaka Margasatwa Kateri	III/B/2
Nusa Tenggara Timur	Suaka Margasatwa Harlu	III/B/2
Nusa Tenggara Timur	Suaka Margasatwa Ale Asisio	II/B/2
Nusa Tenggara Timur	Cagar Alam Riung	II/B/3
Nusa Tenggara Timur	Cagar Alam Maubesi (RTK. 189)	II/B/3
Nusa Tenggara Timur	Cagar Alam Way Wuul/ Mburak	II/B/3
Nusa Tenggara Timur	Cagar Alam Watu Ata	II/B/3
Nusa Tenggara Timur	Cagar Alam Wolo Tadho	II/B/3
Nusa Tenggara Timur	Cagar Alam Tambora	I/A/3
Nusa Tenggara Timur	Cagar Alam Gunung Mutis	II/B/3
Nusa Tenggara Timur	Taman Nasional Kelimutu	I/A/4
Nusa Tenggara Timur	Taman Nasional Laiwangi-Wanggameti	II/A/4
Nusa Tenggara Timur	Taman Nasional Manupeu - Tanah Daru	II/A/4
Nusa Tenggara Timur	Taman Nasional Komodo	I/A/4
Nusa Tenggara Timur	Taman Nasional Laut Komodo	I/A/4
Nusa Tenggara Timur	Taman Nasional Laut Selat Pantar	II/A/4
Nusa Tenggara Timur	Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Yohannes	I/A/5
Nusa Tenggara Timur	Taman Wisata Alam Tuti Adagae	II/B/6
Nusa Tenggara Timur	Taman Wisata Alam Kemang Beleng	II/B/6
Nusa Tenggara Timur	Taman Wisata Alam Pulau Besar	II/B/6
Nusa Tenggara Timur	Taman Wisata Alam Pulau Menipo	II/B/6
Nusa Tenggara Timur	Taman Wisata Alam Ruteng	I/B/6
Nusa Tenggara Timur	Taman Wisata Alam Egon Illimedo	II/B/6
Nusa Tenggara Timur	Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang	I/A/6
Nusa Tenggara Timur	Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere	I/A/6
Nusa Tenggara Timur	Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau Riung	III/B/6
Nusa Tenggara Timur	Taman Buru Dataran Bena	II/F
Nusa Tenggara Timur	Taman Buru Pulau Rusa	I/F
Nusa Tenggara Timur	Taman Buru Pulau Ndana	II/F
Kalimantan Barat	Suaka Alam Laut Sambas	I/B/1

Provinsi	Kawasan Lindung	Tahapan Pengembangan
Kalimantan Barat	Cagar Alam Mandor	II/B/3
Kalimantan Barat	Cagar Alam Gunung Raya Pasi	I/B/3
Kalimantan Barat	Cagar Alam Muara Kendawangan	II/B/3
Kalimantan Barat	Cagar Alam Niyut-Penrissen	I/B/3
Kalimantan Barat	Cagar Alam Laut Kepulauan Karimata	I/B/3
Kalimantan Barat	Taman Nasional Betung Kerihun	I/A/4
Kalimantan Barat	Taman Nasional Danau Sentarum	I/A/4
Kalimantan Barat	Taman Nasional Gunung Palung	II/A/4
Kalimantan Barat	Taman Nasional Bukit Baka - Bukit Raya	I/A/4
Kalimantan Barat	Taman Wisata Alam Belimbing	II/B/6
Kalimantan Barat	Taman Wisata Alam Asuansang	II/B/6
Kalimantan Barat	Taman Wisata Alam Dungan	II/B/6
Kalimantan Barat	Taman Wisata Alam Gunung Melintang	I/B/6
Kalimantan Barat	Taman Wisata Alam Bukit Kelam Komplek	II/B/6
Kalimantan Barat	Taman Wisata Alam Laut Bengkayang	II/B/6
Kalimantan Tengah	Suaka Margasatwa Lamandau	I/B/2
Kalimantan Tengah	Cagar Alam Bukit Sapat Hawung	II/B/3
Kalimantan Tengah	Cagar Alam Bukit Tangkiling	II/B/3
Kalimantan Tengah	Cagar Alam Pararawen I/II	I/B/3
Kalimantan Tengah	Taman Nasional Bukit Baka - Bukit Raya	I/A/4
Kalimantan Tengah	Taman Nasional Tanjung Puting	I/A/4
Kalimantan Tengah	Taman Nasional Sebangau	I/A/4
Kalimantan Tengah	Taman Wisata Alam Tanjung Keluang/ Teluk Keluang	II/B/6
Kalimantan Selatan	Suaka Margasatwa Pleihari Martapura	I/B/2
Kalimantan Selatan	Suaka Margasatwa Kuala Lupak	II/B/2
Kalimantan Selatan	Cagar Alam Teluk Kelumpang, Selat Laut, Selat Sebuksu	I/B/3
Kalimantan Selatan	Cagar Alam Teluk Pamukan	II/B/3
Kalimantan Selatan	Cagar Alam Sungai Lulan Dan Sungai Bulan	I/B/3
Kalimantan Selatan	Cagar Alam Teluk Pamukan	I/B/3
Kalimantan Selatan	Taman Hutan Raya Sultan Adam	II/B/5
Kalimantan Selatan	Taman Wisata Alam Pleihari Tanah Laut	II/B/6
Kalimantan Selatan	Taman Wisata Alam Laut P. Laut Barat-Selatan & P. Sembilan	II/B/6
Kalimantan Timur	Suaka Alam Laut Pulau Sebatik	I/B/1
Kalimantan Timur	Cagar Alam Muara Kaman Sedulang	II/B/3
Kalimantan Timur	Cagar Alam Padang Luwai	II/B/3

Provinsi	Kawasan Lindung	Tahapan Pengembangan
Kalimantan Timur	Cagar Alam Teluk Apar	I/B/3
Kalimantan Timur	Cagar Alam Teluk Adang	I/B/3
Kalimantan Timur	Taman Nasional Kayan Mentarang	I/A/4
Kalimantan Timur	Taman Nasional Kutai	I/A/4
Kalimantan Timur	Taman Hutan Raya Bukit Suharto	I/B/6
Kalimantan Timur	Taman Wisata Alam Laut Berau	II/B/6
Sulawesi Utara	Suaka Alam Laut Sidat	II/B/1
Sulawesi Utara	Suaka Alam Laut Selat Lembeh-Bitung	I/B/1
Sulawesi Utara	Suaka Margasatwa Gunung Manembo-nembo	II/B/2
Sulawesi Utara	Suaka Margasatwa Karakelang Utara-Selatan	I/B/2
Sulawesi Utara	Cagar Alam Gunung Ambang	I/B/3
Sulawesi Utara	Cagar Alam Dua Saudara	II/B/3
Sulawesi Utara	Cagar Alam Tangkoko Batu Angus	II/B/3
Sulawesi Utara	Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	I/A/4
Sulawesi Utara	Taman Nasional Laut Bunaken	I/A/4
Sulawesi Tengah	Suaka Margasatwa Tanjung Santigi	I/B/2
Sulawesi Tengah	Suaka Margasatwa Pati Pati	II/B/2
Sulawesi Tengah	Suaka Margasatwa Lombuyan I/II	II/B/2
Sulawesi Tengah	Suaka Margasatwa Bangkiriang	II/B/2
Sulawesi Tengah	Suaka Margasatwa Pinjan/ Tanjung Matop	II/B/2
Sulawesi Tengah	Cagar Alam Morowali	I/B/3
Sulawesi Tengah	Cagar Alam Pangi Binangga	II/B/3
Sulawesi Tengah	Cagar Alam Pamona	II/B/3
Sulawesi Tengah	Cagar Alam Gunung Tinombala	I/B/3
Sulawesi Tengah	Cagar Alam Gunung Sojol	II/B/3
Sulawesi Tengah	Cagar Alam Gunung Dako	II/B/3
Sulawesi Tengah	Cagar Alam Tanjung Api	II/B/3
Sulawesi Tengah	Taman Nasional Lore Lindu	I/A/4
Sulawesi Tengah	Taman Nasional Laiut Kepulauan Banggai	II/B/4
Sulawesi Tengah	Taman Hutan Raya Poboya Paneki (Palu)	III/B/5
Sulawesi Tengah	Taman Wisata Alam Bancea	II/B/6
Sulawesi Tengah	Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Togean dan P. Batudaka	I/A/6
Sulawesi Tengah	Taman Buru Landusa Tomata	II/F
Sulawesi Selatan	Suaka Margasatwa Komara	II/B/2

Provinsi	Kawasan Lindung	Tahapan Pengembangan
Sulawesi Selatan	Cagar Alam Faruhumpenai	II/B/3
Sulawesi Selatan	Cagar Alam Kalaena	II/B/3
Sulawesi Selatan	Taman Nasional Bantimurung - Bulusaraung	II/A/4
Sulawesi Selatan	Taman Nasional Laut Taka Bonerate	I/A/4
Sulawesi Selatan	Taman Hutan Raya Bontobahari	II/B/5
Sulawesi Selatan	Taman Wisata Alam Danau Matano	II/B/6
Sulawesi Selatan	Taman Wisata Alam Danau Mahalona	II/B/6
Sulawesi Selatan	Taman Wisata Alam Danau Towuti	I/B/6
Sulawesi Selatan	Taman Wisata Alam Malino	II/B/6
Sulawesi Selatan	Taman Wisata Alam Cani Sirenrang	II/B/6
Sulawesi Selatan	Taman Wisata Alam Lejja	II/B/6
Sulawesi Selatan	Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Kapoposang	I/B/6
Sulawesi Selatan	Taman Buru Komara	II/F
Sulawesi Selatan	Taman Buru Bangkala	II/F
Sulawesi Tenggara	Suaka Margasatwa Buton Utara	II/B/2
Sulawesi Tenggara	Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo	II/B/2
Sulawesi Tenggara	Suaka Margasatwa Tanjung Peropa	II/B/2
Sulawesi Tenggara	Suaka Margasatwa Lambusango	III/B/2
Sulawesi Tenggara	Taman Nasional Rawa Aopa - Watumohai	I/A/4
Sulawesi Tenggara	Taman Nasional Laut Kepulauan Wakatobi	I/A/4
Sulawesi Tenggara	Taman Hutan Raya Murhum	II/B/5
Sulawesi Tenggara	Taman Wisata Alam Mangolo	II/B/6
Sulawesi Tenggara	Taman Wisata Alam Laut Telok Lasolo	II/B/6
Sulawesi Tenggara	Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang	II/B/6
Sulawesi Tenggara	Taman Wisata Alam Laut Selat Tiworo	II/B/6
Sulawesi Tenggara	Taman Wisata Alam Laut Liwutongkidi (Buton)	II/B/6
Sulawesi Tenggara	Taman Buru Padang Mata Osu	III/F
Gorontalo	Suaka Margasatwa Nantu	II/B/2
Gorontalo	Cagar Alam Panua	II/B/3
Gorontalo	Cagar Alam Tanjung Panjang	II/B/3
Gorontalo	Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	I/A/4
Sulawesi Barat	Suaka Margasatwa Mampie Lampoko	II/B/2
Maluku	Suaka Margasatwa Pulau Baun	II/B/2
Maluku	Suaka Margasatwa Pulau Kobror	I/B/2
Maluku	Suaka Margasatwa Tanimbar	I/B/2

Provinsi	Kawasan Lindung	Tahapan Pengembangan
Maluku	Suaka Margasatwa Laut Pulau Kassa	III/B/2
Maluku	Cagar Alam Pulau Nustaram	II/B/3
Maluku	Cagar Alam Pulau Nuswotar	II/B/3
Maluku	Cagar Alam Masbait	II/B/3
Maluku	Cagar Alam Daab	II/B/3
Maluku	Cagar Alam Pulau Larat	I/B/3
Maluku	Cagar Alam Bekau Huhun	II/B/3
Maluku	Cagar Alam Tafermaar	II/B/3
Maluku	Cagar Alam Gunung Sahuwai	II/B/3
Maluku	Cagar Alam Masarete	II/B/3
Maluku	Cagar Alam Tanjung Sial	II/B/3
Maluku	Cagar Alam Laut Kepulauan Aru Tenggara	I/B/3
Maluku	Cagar Alam Laut Banda	I/B/3
Maluku	Taman Nasional Manusela	I/A/4
Maluku	Taman Wisata Alam Laut Laut Banda	I/B/6
Maluku	Taman Wisata Laut Pulau Kasa	II/B/6
Maluku	Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegu dan sekitarnya	II/B/6
Maluku	Taman Wisata Alam Laut Pulau Pombo	II/B/6
Maluku Utara	Cagar Alam Tobalai	II/B/3
Maluku Utara	Cagar Alam Pulau Seho	II/B/3
Maluku Utara	Cagar Alam Gunung Sibela	II/B/3
Maluku Utara	Cagar Alam Lifamatola	II/B/3
Maluku Utara	Cagar Alam Pulau Obi	I/B/3
Maluku Utara	Cagar Alam Taliabu	II/B/3
Maluku Utara	Taman Nasional Aketajawe - Lolobata	I/A/4
Papua Barat	Suaka Alam Laut Kaimana	II/B/1
Papua Barat	Suaka Margasatwa Tanjung Mubrani - Sidei - Wibain I - II	I/B/2
Papua Barat	Suaka Margasatwa Pulau Venu	II/B/2
Papua Barat	Suaka Margasatwa Laut Kepulauan Raja Ampat	I/B/2
Papua Barat	Suaka Margasatwa Laut Pulau Sabuda dan Pulau Tataruga	II/B/2
Papua Barat	Suaka Margasatwa Laut Kepulauan Panjang	II/B/2
Papua Barat	Cagar Alam Pulau Waigeo Barat	I/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Pulau Batanta Barat	II/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Pegunungan Arfak	II/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Pulau Salawati Utara	II/B/3

Provinsi	Kawasan Lindung	Tahapan Pengembangan
Papua Barat	Cagar Alam Biak Utara	I/A/3
Papua Barat	Cagar Alam Tamrau Selatan	II/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Pegunungan Yapen Tengah	II/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Pulau Supriori	I/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Pegunungan Wondiboy	II/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Pulau Waigeo Timur	I/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Pulau Misool	II/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Pulau Kofiau	II/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Laut Pantai Sausapor	II/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Teluk Bintuni	I/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Pegunungan Fak Fak	I/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Pegunungan Kumawa	II/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Tamrau Utara	II/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Tanjung Wiay	II/B/3
Papua Barat	Cagar Alam Wagura Kote	II/B/3
Papua Barat	Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih	I/A/4
Papua Barat	Taman Wisata Alam Beriat	III/B/6
Papua Barat	Taman Wisata Alam Klamono	III/B/6
Papua Barat	Taman Wisata Alam Laut Distrik Abun, Sorong	II/B/6
Papua Barat	Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padaido	II/B/6
Papua	Suaka Margasatwa Pulau Dolok	II/B/2
Papua	Suaka Margasatwa Jayawijaya	II/B/2
Papua	Suaka Margasatwa Mamberamo Foja	II/B/2
Papua	Suaka Margasatwa Danau Bian	II/B/2
Papua	Suaka Margasatwa Anggromeos	II/B/2
Papua	Suaka Margasatwa Komolon	II/B/2
Papua	Cagar Alam Cycloops	II/B/3
Papua	Cagar Alam Enarotali	II/B/3
Papua	Cagar Alam Bupul/ Kumbe	II/B/3
Papua	Cagar Alam Pegunungan Wayland	II/B/3
Papua	Taman Nasional Lorentz	I/A/4
Papua	Taman Nasional Wasur	I/A/4
Papua	Taman Wisata Alam Teluk Youtefa	II/B/6

Sumber : Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008

Keterangan :

I – IV : Tahapan Pengembangan

- A : Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Nasional
 - A/1 : Suaka Alam Laut
 - A/2 : Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut
 - A/3 : Cagar Alam dan Cagar Alam Laut
 - A/4 : Taman Nasional dan Taman Nasional Laut
 - A/5 : Taman Hutan Raya
 - A/6 : Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut
- B : Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional
 - B/1 : Suaka Alam Laut
 - B/2 : Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut
 - B/3 : Cagar Alam dan Cagar Alam Laut
 - B/4 : Taman Nasional dan Taman Nasional Laut
 - B/5 : Taman Hutan Raya
 - B/6 : Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut
- C : Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Hutan Lindung Nasional
 - C/1 : Kawasan Resapan Air
- D : Pengembangan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Nasional
- E : Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Taman Buru Nasional
- F : Pengembangan Pengelolaan Kawasan Taman Buru Nasional

D. Kawasan Andalan

Dijelaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008 bahwa **kawasan andalan** merupakan bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan disekitarnya. Penetapan kawasan andalan didasarkan pada sektor unggulan yang dimiliki wilayah tersebut. Pengembangan kawasan andalan diharapkan mampu mempersempit kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia. Dalam Tabel 6.7. di bawah ini adalah kawasan andalan di Indonesia yang telah ditetapkan.

Tabel 6.7.
Kawasan Andalan di Indonesia

Provinsi	Kawasan Andalan	Sektor Unggulan
Aceh	Banda Aceh dan sekitarnya	Pertanian, Pariwisata, Industri, Perikanan Laut
Aceh	Lhokseumawe dan sekitarnya	Industri, Pertanian, Pertambangan, Perikanan, Perkebunan
Aceh	Pantai Barat Selatan	Pertanian, Perikanan, Pertambangan, Perkebunan
Aceh	Laut Lhokseumawe-Medan & sekitarnya	Perikanan, Pertambangan
Sumatera Utara	Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro)	Industri, Perkebunan, Pariwisata, Pertanian, Perikanan
Sumatera Utara	Pematang Siantar dan sekitarnya	Perkebunan, Pertanian, Industri, Pariwisata
Sumatera Utara	Rantau Prapat-Kisaran	Perkebunan, Kehutanan, Pertanian, Perikanan, Industri
Sumatera Utara	Tapanuli dan sekitarnya	Perkebunan, Pertambangan, Perikanan Laut, Pertanian, Industri, Pariwisata
Sumatera Utara	Nias dan sekitarnya	Pariwisata, Perkebunan, Perikanan
Sumatera Utara	Laut Lhokseumawe-Medan & sekitarnya	Perikanan, Pertambangan
Sumatera Utara	Laut Selat Malaka dan sekitarnya	Perikanan, Pertambangan
Sumatera Utara	Laut Nias dan sekitarnya	Perikanan, Pertambangan
Sumatera Barat	Padang Pariaman dan sekitarnya	Industri, Perikanan Laut, Pertanian, Pariwisata, Perikanan
Sumatera Barat	Agam-Bukit Tinggi (PLTA Kuto Panjang)	Perkebunan, Pariwisata, Pertanian
Sumatera Barat	Mentawai dan sekitarnya	Pertanian, Perikanan
Sumatera Barat	Solok dan sekitarnya (Danau Kembar Di Atas/ Di Bawah-PIP Danau Singkarak-Lubuk Alung-Ketaping)	Pertambangan, Pertanian, Perkebunan, Pariwisata, Industri
Sumatera Barat	Laut Mentawai, Siberut dan sekitarnya	Perikanan Laut, Pariwisata
Riau	Pekanbaru dan sekitarnya	Industri, Perkebunan, Pertanian, Pertambangan
Riau	Duri-Dumai dan sekitarnya	Industri, Perkebunan, Perikanan

Provinsi	Kawasan Andalan	Sektor Unggulan
Riau	Rengat-Kuala Enok-Taluk Kuantan-Pangkalan Kerinci	Perkebunan, Pertanian, Industri, Kehutanan
Riau	Ujung Batu-Bagan Batu	Industri Migas, Perkebunan
Riau	Laut Selat Malaka dan sekitarnya	Perikanan, Pertambangan
Kepulauan Riau	Zona Batam-Tanjung Pinang & sekitarnya	Kelautan, Pariwisata, Industri, Perikanan
Kepulauan Riau	Natuna dan sekitarnya	Pertambangan, Perikanan Laut
Kepulauan Riau	Laut Batam dan sekitarnya	Perikanan, Pertambangan, Pariwisata
Kepulauan Riau	Laut Natuna dan sekitarnya	Perikanan Laut, Pertambangan, Pariwisata
Jambi	Muara Bulian Timur Jambi dan sekitarnya	Perkebunan, Pertanian, Pertambangan, Industri, Perikanan, Pariwisata
Jambi	Muara Bungo dan sekitarnya	Perkebunan, Pertanian, Kehutanan
Sumatera Selatan	Muara Enim dan sekitarnya	Pertanian, Pertambangan, Perkebunan
Sumatera Selatan	Lubuk Linggau dan sekitarnya	Pertanian, Perkebunan, Industri
Sumatera Selatan	Palembang dan sekitarnya	Pertanian, Industri, Pertambangan, Kehutanan, Perikanan
Sumatera Selatan	Laut Bangka dan sekitarnya	Perikanan, Pariwisata
Bengkulu	Bengkulu dan sekitarnya	Pertanian, Industri, Perkebunan, Perikanan, Pariwisata
Bengkulu	Manna dan sekitarnya	Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Industri, Pariwisata
Bengkulu	Laut Bengkulu	Perikanan, Pariwisata
Bangka Belitung	Bangka	Pertanian, Perkebunan, Industri, Pariwisata, Perikanan
Bangka Belitung	Belitung	Pertanian, Perkebunan, Industri, Pariwisata
Bangka Belitung	Laut Bangka dan sekitarnya	Perikanan, Pariwisata
Lampung	Bandar Lampung-Metro	Perkebunan, Pariwisata, Industri, Pertanian, Perikanan
Lampung	Mesuji dan sekitarnya	Pertanian, Perkebunan, Industri
Lampung	Kotabumi dan sekitarnya	Pertanian, Perkebunan, Perikanan
Lampung	Liwa-Krui	Pertanian, Perkebunan, Perikanan Laut
Lampung	Laut Krakatau dan sekitarnya	Perikanan, Pertambangan, Pariwisata
DKI Jakarta	Perkotaan Jakarta	Industri, Pariwisata, Perikanan, Perdagangan, Jasa
DKI Jakarta	Laut Pulau Seribu	Perikanan, Pertambangan, Pariwisata

Provinsi	Kawasan Andalan	Sektor Unggulan
Banten	Bojonegara-Merak-Cilegon	Industri, Pariwisata, Pertanian, Perikanan, Pertambangan
Banten	Laut Krakatau dan sekitarnya	Perikanan, Pertambangan, Pariwisata
Jawa Barat	Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur dan sekitarnya)	Pertanian, Pariwisata, Industri, Perikanan
Jawa Barat	Sukabumi dan sekitarnya	Perikanan, Pertanian, Pariwisata, Perkebunan
Jawa Barat	Purwakarta, Subang, Karawang (Purwasuka)	Pertanian, Industri, Pariwisata, Perikanan
Jawa Barat	Cekungan Bandung	Industri, Pertanian, Pariwisata, Perkebunan
Jawa Barat	Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (Ciayumaja Kuning) dan sekitarnya	Pertanian, Industri, Perikanan, Pertambangan
Jawa Barat	Priangan Timur-Pangandaran	Pertanian, Industri, Perkebunan, Pariwisata, Perikanan
Jawa Tengah	Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten (Subosuko-Wonosraten)	Industri, Pariwisata, Pertanian
Jawa Tengah	Kedung Sepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi)	Pertanian, Industri, Pariwisata, Perikanan
Jawa Tengah	Bregas	Pertanian, Kehutanan, Industri, Perikanan
Jawa Tengah	Juwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora (Wanarakuti)	Pertanian, Industri, Pertambangan, Perikanan
Jawa Tengah	Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap dan sekitarnya)	Pertanian, Pariwisata, Pertambangan, Industri, Perikanan
Jawa Tengah	Borobudur dan sekitarnya	Pariwisata
Jawa Tengah	Laut Karimun Jawa dan sekitarnya	Perikanan, Pertambangan, Pariwisata
Jawa Tengah	Laut Cilacap dan sekitarnya	Perikanan Laut, Pertambangan, Pariwisata
DI Yogyakarta	Yogyakarta dan sekitarnya	Pariwisata, Pertanian, Industri, Perikanan
Jawa Timur	Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertokusila)	Pertanian, Perikanan, Industri, Pariwisata

Provinsi	Kawasan Andalan	Sektor Unggulan
Jawa Timur	Malang dan sekitarnya	Pertanian, Perikanan, Industri, Perkebunan, Pariwisata
Jawa Timur	Probolinggo-Pasuruan-Lumajang	Pertanian, Industri, Pertambangan, Perkebunan, Pariwisata, Perikanan
Jawa Timur	Tuban-Bojonegoro	Pariwisata, Industri, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Pertambangan
Jawa Timur	Kediri-Tulung Agung-Bitar	Pertanian, Perkebunan, Industri, Perikanan, Pariwisata
Jawa Timur	Situbondo-Bondowoso-Jember	Perkebunan, Pertanian, Industri, Pariwisata, Perikanan Laut
Jawa Timur	Madiun dan sekitarnya	Pertanian, Industri, Perikanan, Perkebunan, Pariwisata
Jawa Timur	Banyuwangi dan sekitarnya	Perikanan, Pertanian
Jawa Timur	Madura dan Kepulauan	Pertanian, Perkebunan, Industri, Pariwisata, Perikanan
Jawa Timur	Laut Madura dan sekitarnya	Perikanan, Pertambangan, Pariwisata
Bali	Singaraja dan sekitarnya (Bali Utara)	Pariwisata, Pertanian, Perikanan
Bali	Denpasar-Ubud-Kintamani (Bali Selatan)	Pariwisata, Pertanian, Industri, Perikanan
Bali	Laut Bali dan sekitarnya	Perikanan, Pertambangan, Pariwisata
NTB	Lombok dan sekitarnya	Pertanian, Perikanan Laut, Pariwisata, Industri, Pertambangan
NTB	Bima	Pertanian, Industri, Pariwisata, Perikanan
NTB	Sumbawa dan sekitarnya	Pertanian, Pariwisata, Industri, Pertambangan, Perikanan
NTB	Laut Selat Lombok dan sekitarnya	Perikanan Laut, Pariwisata
NTT	Kupang dan sekitarnya	Pertanian, Industri, Pariwisata, Perikanan Laut, Pertambangan
NTT	Maumere-Ende	Kehutanan, Pariwisata, Industri, Perikanan, Pertanian, Perkebunan
NTT	Komodo dan sekitarnya	Pariwisata, Pertanian, Perkebunan, Industri, Perikanan
NTT	Ruteng-Bajawa	Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Pariwisata, Pertanian
NTT	Sumba	Pertanian, Pariwisata, Perkebunan
NTT	Laut Flores	Perikanan, Pariwisata

Provinsi	Kawasan Andalan	Sektor Unggulan
NTT	Laut Sawu dan sekitarnya	Perikanan, Pertambangan, Pariwisata
NTT	Laut Sumba dan sekitarnya	Perikanan, Pariwisata
Kalimantan Barat	Pontianak dan sekitarnya	Pertanian, Industri, Perikanan, Pariwisata
Kalimantan Barat	Singkawang dan sekitarnya	Pertanian, Industri, Perkebunan, Perikanan
Kalimantan Barat	Ketapang dan sekitarnya	Pertanian, Industri, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan
Kalimantan Barat	Kapuas Hulu dan sekitarnya	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan
Kalimantan Barat	Sanggau	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan
Kalimantan Barat	Laut Pontianak dan sekitarnya	Perikanan, Pariwisata
Kalimantan Barat	Laut Ketapang dan sekitarnya	Perikanan, Pariwisata
Kalimantan Tengah	Sampit - Pangkalan Bun	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, Industri, Pariwisata
Kalimantan Tengah	Buntok	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata
Kalimantan Tengah	Muarateweh	Pertanian, Perkebunan, Pertambangan, Kehutanan
Kalimantan Tengah	Kuala Kapuas	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan
Kalimantan Tengah	Laut Kuala Pembuang	Perikanan, Pertambangan, Pariwisata
Kalimantan Selatan	Kandangan dan sekitarnya	Pertanian, Perkebunan, Pariwisata
Kalimantan Selatan	Banjarmasin Raya dan sekitarnya	Pertanian, Industri, Perkebunan, Pariwisata, Perikanan
Kalimantan Selatan	Batulicin	Perkebunan, Kehutanan, Pertanian, Industri, Pariwisata, Perikanan
Kalimantan Selatan	Laut Pulau Laut	Perikanan, Pertambangan
Kalimantan Timur	Tanjung Redeb dan sekitarnya	Industri, Kehutanan, Pertambangan, Pariwisata, Perikanan
Kalimantan Timur	Sangkuriang, Sangata, & Muara Wahau (Sasamawa)	Industri, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan, Perikanan Laut, Pariwisata
Kalimantan Timur	Tarakan, Tanjung Salas, Nunukan, Pulau Bunyu, dan Malinau (Tatapanbuma) dan sekitarnya	Perikanan, Pariwisata, Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan, Industri
Kalimantan Timur	Bontang-Samarinda-Tenggarong, Balikpapan Penajam dan sekitarnya (Bonsamtebajam)	Industri, Perkebunan, Pertambangan, Kehutanan, Perikanan, Pariwisata

Provinsi	Kawasan Andalan	Sektor Unggulan
Kalimantan Timur	Laut Bontang-Tarakan dan sekitarnya	Perikanan, Pertambangan, Pariwisata
Gorontalo	Gorontalo	Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Pertambangan
Gorontalo	Marisa	Pertanian, Perkebunan, Perikanan
Gorontalo	Laut Tomini dan sekitarnya	Perikanan, Pariwisata
Sulawesi Utara	Manado dan sekitarnya	Perikanan Laut, Pariwisata, Industri, Pertambangan
Sulawesi Utara	Dumoga-Kotamobagu dan sekitarnya (Bolaang Mongondow)	Pertanian, Perkebunan, Perikanan
Sulawesi Utara	Laut Bunaken dan sekitarnya	Perikanan, Pariwisata
Sulawesi Utara	Laut Batutoli dan sekitarnya	Perikanan, Pertambangan, Pariwisata
Sulawesi Tengah	Poso dan Sekitarnya	Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Perkebunan, Industri
Sulawesi Tengah	Toli-Toli dan sekitarnya	Pertambangan, Perkebunan, Perikanan, Pertanian, Pariwisata
Sulawesi Tengah	Kolonedale dan sekitarnya	Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Perkebunan, Agroindustri, Pertambangan
Sulawesi Tengah	Palu dan sekitarnya	Pertambangan, Perikanan, Industri, Pertanian, Perkebunan, Pariwisata
Sulawesi Tengah	Laut Teluk Tolo Kepulauan Banggai dan sekitarnya	Perikanan, Pariwisata
Sulawesi Selatan	Mamminasata dan sekitarnya (Makassar, Maros, Sungguminasa, Gowa, Takalar)	Pariwisata, Industri, Pertanian, Agroindustri, Perikanan
Sulawesi Selatan	Palopo dan sekitarnya	Pariwisata, Perkebunan, Pertanian, Perikanan
Sulawesi Selatan	Bulukumba-Watampone	Pertanian, Perkebunan, Agroindustri, Pariwisata, Perikanan, Perdagangan
Sulawesi Selatan	Pare-Pare dan sekitarnya	Agroindustri, Pertanian, Perikanan, Perkebunan
Sulawesi Selatan	Laut Kapoposang dan sekitarnya	Perikanan, Pertambangan, Pariwisata
Sulawesi Selatan	Laut Teluk Bone dan sekitarnya	Perikanan, Pertambangan, Pariwisata
Sulawesi Selatan	Laut Singkarang-Takabonerate dan sekitarnya	Perikanan, Pertambangan, Pariwisata

Provinsi	Kawasan Andalan	Sektor Unggulan
Sulawesi Selatan	Laut Selat Makassar	Perikanan, Pariwisata
Sulawesi Barat	Mamuju dan sekitarnya	Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Agroindustri, Perikanan
Sulawesi Tenggara	Asesolo/ Kendari	Agroindustri, Pertambangan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Industri, Pariwisata
Sulawesi Tenggara	Kapolimu-Patikala Muna-Buton	Agroindustri, Pertambangan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pariwisata
Sulawesi Tenggara	Mowedong/ Kolaka	Agroindustri, Pertambangan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian
Sulawesi Tenggara	Laut Asera Lasolo	Perikanan, Pariwisata
Sulawesi Tenggara	Laut Kapontori-Lasalimu dan sekitarnya	Perikanan, Pertambangan, Pariwisata
Sulawesi Tenggara	Luat Tiworo dan sekitarnya	Perikanan, Pertambangan, Pariwisata
Maluku	Seram	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, Pariwisata
Maluku	Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar	Perikanan, Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Industri
Maluku	Buru	Perkebunan, Perikanan, Pertanian, Pariwisata
Maluku	Laut Banda dan sekitarnya	Perikanan, Pertambangan, Pariwisata
Maluku	Laut Arafuru dan sekitarnya	Perikanan Laut, Pertambangan, Pariwisata
Maluku Utara	Ternate, Tidore, Sidangoli, Sofifi, Weda dan sekitarnya	Perkebunan, Perikanan Laut, Industri, Pertambangan, Pariwisata
Maluku Utara	Bacan-Halmahera Selatan	Perkebunan, Pertanian
Maluku Utara	Kepulauan Sula	Perkebunan, Kehutanan, Industri, Pertambangan, Perikanan
Maluku Utara	Laut Halmahera dan sekitarnya	Perikanan Laut, Pertambangan, Pariwisata
Papua Barat	Bintuni	Pertanian, Perkebunan, Pertambangan, Perikanan
Papua Barat	Fak-Fak (Bomberai) dan sekitarnya	Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Industri, Pertambangan
Papua Barat	Sorong dan sekitarnya	Kehutanan, Pertambangan, Perikanan Laut, Industri
Papua Barat	Laut Raja Ampat Bintuni	Perikanan, Pertambangan, Pariwisata
Papua	Timika (Tembagapura) dan sekitarnya	Pertambangan, Kehutanan, Industri, Pariwisata, Pertanian, Perkebunan, Perikanan

Provinsi	Kawasan Andalan	Sektor Unggulan
Papua	Biak	Pariwisata, Perikanan, Industri, Pertambangan, Perkebunan, Kehutanan
Papua	Nabire dan sekitarnya (Aran Moswaren, dan Legare)	Pertanian, Perkebunan, Pertambangan
Papua	Merauke dan sekitarnya	Industri, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, Pertanian
Papua	Memberamo-Lereh (Jayapura) dan sekitarnya	Industri, Pertanian, Perkebunan, Pertambangan, Kehutanan, Perikanan
Papua	Wamena dan sekitarnya	Pertanian, Perkebunan
Papua	Laut Teluk Cendrawasih - Biak dan sekitarnya	Perikanan, Pertambangan, Pariwisata
Papua	Laut Jayapura - Sarmi	Perikanan, Pariwisata

Sumber: Lampiran IX Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008

E. Kawasan Strategis Nasional

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Tabel 6.8.

Kawasan Strategis di Indonesia

Provinsi	Kawasan Strategis Nasional	Tahapan Pengembangan
Aceh	Industri Lhokseumawe	I/A/2
Aceh	Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	I/A/2
Aceh	Pengembangan Ekonomi Terpadu Banda Aceh Darussalam	I/A/2
Aceh	Ekosistem Leuser	I/B/1
Aceh	Perbatasan Laut RI termasuk 2 pulau kecil terluar (Pulau Rondo dan Berhala) dengan negara India/Thailand/Malaysia	I/E/2
Aceh	Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyau, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas	I/E/2

Provinsi	Kawasan Strategis Nasional	Tahapan Pengembangan
Sumatera Utara	Perbatasan Laut RI termasuk 2 pulau kecil terluar (Pulau Rondo dan Berhala) dengan negara India/Thailand/Malaysia	I/E/2
Sumatera Utara	Perkotaan Medan - Binjai - Deli Serdang - Karo (Mebidangro)	I/A/1
Sumatera Utara	Danau Toba dan sekitarnya	I/B/1
Sumatera Utara	Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyu, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas	I/E/2
Sumatera Barat	Stasiun Pengamat Dirgantara Kototabang	I/D/2
Sumatera Barat	Hutan Lindung Bukit Batabuh	I/B/1
Sumatera Barat	Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat	I/B/1
Sumatera Barat	Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyu, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas	I/E/2
Riau	Hutan Lindung Bukit Batabuh	I/B/1
Riau	Hutan Lindung Mahato	I/B/1
Riau	Perbatasan Laut RI termasuk 20 pulau kecil terluar (Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Batu Mandi, Iyu Kecil, Karimun Kecil, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti, dan Nongsa) dengan negara Malaysia/Vietnam/Singapura	I/D/2
Riau	Taman Nasional Bukit Tigapuluh	I/B/1
Kepulauan Riau	Perbatasan Laut RI termasuk 20 pulau kecil terluar (Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Batu Mandi, Iyu Kecil, Karimun Kecil, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti, dan Nongsa) dengan negara Malaysia/Vietnam/Singapura	I/D/2
Kepulauan Riau	Batam, Bintan, Karimun	I/A/2
Jambi	Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat	I/B/1
Jambi	Taman Nasional Berbak	I/B/1

Provinsi	Kawasan Strategis Nasional	Tahapan Pengembangan
Jambi	Taman Nasional Bukit Tigapuluh	I/B/1
Jambi	Taman Nasional Bukit Duabelas	I/B/1
Sumatera Selatan	Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat	I/B/1
Bengkulu	Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat	I/B/1
Bengkulu	Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyu, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas	I/E/2
Lampung	Selat Sunda	III/A/2
Lampung	Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyu, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas	I/E/2
DKI Jakarta	Instalasi Lingkungan dan Cuaca	I/D/2
DKI Jakarta	Fasilitas Pengolahan Data dan Satelit	I/D/2
DKI Jakarta	Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu	I/A/1
Banten	Selat Sunda	III/A/2
Banten	Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu	I/A/1
Banten	Taman Nasional Ujung Kulon	I/B/1
Banten	Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyu, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas	I/E/2
Jawa Barat	Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu	I/A/1
Jawa Barat	Perkotaan Cekungan Bandung	I/A/1
Jawa Barat	Fasilitas Uji Terbang Roket Pamengpeuk	I/D/1
Jawa Barat	Stasiun Pengamat Dirgantara Pamengpeuk	I/D/2
Jawa Barat	Stasiun Pengamat Dirgantara Tanjung Sari	I/D/2
Jawa Barat	Stasiun <i>Telecomand</i>	I/D/2
Jawa Barat	Stasiun Bumi Penerima Satelit Mikro	I/D/2

Provinsi	Kawasan Strategis Nasional	Tahapan Pengembangan
Jawa Barat	Pangandaran - Kalipuncang - Segara Anakan - Nusakambangan (Pacangsanak)	I/B/1
Jawa Barat	Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyu, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas	I/E/2
Jawa Tengah	Pangandaran - Kalipuncang - Segara Anakan - Nusakambangan (Pacangsanak)	I/B/1
Jawa Tengah	Perkotaan Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga - Semarang - Purwodadi (Kedung Sepur)	I/A/1
Jawa Tengah	Borobudur dan sekitarnya	I/B/2
Jawa Tengah	Candi Prambanan	I/B/2
Jawa Tengah	Taman Nasional Gunung Merapi	I/B/1
Jawa Tengah	Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyu, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas	I/E/2
DI Yogyakarta	Taman Nasional Gunung Merapi	I/B/1
Jawa Timur	Perkotaan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosusila)	I/A/1
Jawa Timur	Stasiun Pengamat Dirgantara Watukosek	I/D/2
Jawa Timur	Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyu, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas	I/E/2
Bali	Perkotaan Denpasar - Badung - Gianyar - Tabanan (Sarbagita)	I/A/1
NTB	Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima	I/A/2
NTB	Taman Nasional Komodo	I/B/1
NTB	Gunung Rinjani	I/B/1
NTB	Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyu, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas	I/E/2

Provinsi	Kawasan Strategis Nasional	Tahapan Pengembangan
NTT	Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay	I/A/2
NTT	Perbatasan Darat RI dengan negara Timor Leste	I/E/2
NTT	Perbatasan Laut RI termasuk 5 pulau kecil terluar (Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mangudu) dengan negara Timor Leste/ Australia	I/E/2
Kalimantan Barat	Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa	I/A/2
Kalimantan Barat	Stasiun Pengamat Dirgantara Pontianak	I/D/2
Kalimantan Barat	Taman Nasional Betung Kerihun	I/B/1
Kalimantan Barat	Perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan (<i>Heart of Borneo</i>)	I/E/2
Kalimantan Tengah	Perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan (<i>Heart of Borneo</i>)	I/E/2
Kalimantan Tengah	Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah Aliran Sungai Kahayan Kapuas dan Barito	I/A/2
Kalimantan Tengah	Taman Nasional Tanjung Puting	I/B/1
Kalimantan Selatan	Pengembangan Ekonomi Terpadu Batulicin	I/A/2
Kalimantan Timur	Perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan (<i>Heart of Borneo</i>)	I/E/2
Kalimantan Timur	Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan	I/A/2
Kalimantan Timur	Perbatasan Laut RI termasuk 18 pulau kecil terluar (Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Sambit, Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Mantewaru, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawaikang, Miangas, Marampit, Intata, dan Kakarutan) dengan negara Malaysia dan Philipina	I/E/2
Sulawesi Utara	Perbatasan Laut RI termasuk 18 pulau kecil terluar (Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Sambit, Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Mantewaru, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawaikang, Miangas, Marampit, Intata, dan Kakarutan) dengan negara Malaysia dan Philipina	I/E/2
Sulawesi Utara	Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado - Bitung	I/A/2
Sulawesi Utara	Konservasi dan Wisata Daerah Aliran Sungai Tondano	I/B/1
Sulawesi Tengah	Perbatasan Laut RI termasuk 18 pulau kecil terluar (Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Sambit, Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Mantewaru, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawaikang, Miangas, Marampit, Intata, dan Kakarutan) dengan negara Malaysia dan Philipina	I/E/2

Provinsi	Kawasan Strategis Nasional	Tahapan Pengembangan
Sulawesi Tengah	Pengembangan Ekonomi Terpadu Batui	I/A/2
Sulawesi Tengah	Poso dan sekitarnya	I/C/1
Sulawesi Tengah	Kritis Lingkungan Balingara	I/B/1
Sulawesi Tengah	Kritis Lingkungan Buol-Lambunu	I/B/1
Sulawesi Selatan	Perkotaan Makassar - Maros - Sungguminasa - Takalar (Mamminasata)	I/A/1
Sulawesi Selatan	Pengembangan Ekonomi Terpadu Parepare	I/A/2
Sulawesi Selatan	Toraja dan sekitarnya	I/C/1
Sulawesi Selatan	Stasiun Bumi Sumber Alam Parepare	I/D/2
Sulawesi Selatan	Soroako dan sekitarnya	I/D/2
Sulawesi Tenggara	Pengembangan Ekonomi Terpadu Buton, Kolaka, dan Kendari	I/A/2
Sulawesi Tenggara	Taman Nasional Rawa Aopa - Watumohai dan Rawa Tinondo	I/B/1
Maluku	Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram	I/A/2
Maluku	Laut Banda	I/D/1
Maluku	Perbatasan Laut RI termasuk 20 pulau kecil terluar (Pulau Ararkula, Karaweira, Panambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batu Goyang, Larat, Asutubun, Selaru, Batarkusu, Masela, Miatimiarang, Leti, Kisar, Wetar, Liran, Kolepon, dan Laag) dengan negara Timor Leste/Australia	I/E/2
Maluku Utara	Perbatasan Laut RI termasuk 8 pulau kecil terluar (Pulau Jiew, Budd, Fani, Miossu, Faniido, Bras, Bepondi, dan Liki) dengan negara Palau	I/E/2
Papua Barat	Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat	I/B/1
Papua Barat	Perbatasan Laut RI termasuk 8 pulau kecil terluar (Pulau Jiew, Budd, Fani, Miossu, Faniido, Bras, Bepondi, dan Liki) dengan negara Palau	I/E/2
Papua	Perbatasan Laut RI termasuk 20 pulau kecil terluar (Pulau Ararkula, Karaweira, Panambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batu Goyang, Larat, Asutubun, Selaru, Batarkusu, Masela, Miatimiarang, Leti, Kisar, Wetar, Liran, Kolepon, dan Laag) dengan negara Timor Leste/Australia	I/E/2
Papua	Perbatasan Laut RI termasuk 8 pulau kecil terluar (Pulau	I/E/2

Provinsi	Kawasan Strategis Nasional	Tahapan Pengembangan
	Jiew, Budd, Fani, Miossu, Fanildo, Bras, Bepondi, dan Liki) dengan negara Palau	
Papua	Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak	I/A/2
Papua	Stasiun Bumi Satelit Cuaca dan Lingkungan	I/D/2
Papua	Stasiun <i>Telemetry Tracking and Command</i> Wahana Peluncur Satelit	I/D/2
Papua	Timika	I/D/2
Papua	Taman Nasional Lorentz	I/B/1
Papua	Konservasi Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni	I/B/1
Papua	Perbatasan Darat RI dengan negara Papua Nugini	I/E/2

Sumber : Lampiran X Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008

Keterangan :

I – IV : Tahapan Pengembangan

- A : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dengan Sudut Kepentingan Ekonomi
 - A/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
 - A/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan
- B : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup
 - B/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
 - B/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan
- C : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya
 - C/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
 - C/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan
- D : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dengan Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi
 - D/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
 - D/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan
- E : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan
 - E/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan
 - E/2 : Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

BAB VII

STATISTIK SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN ISU GENDER

A. Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian PU

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, khususnya yang berhubungan dengan infrastruktur pekerjaan umum, SDM menjadi salah satu faktor penentu karena berperan sebagai perencana, penyusun, pelaksana, hingga pemantau serta pengawas, walaupun dalam pelaksanaan tentunya juga melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan SDM di Kementerian PU perlu diarahkan pada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, serta pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan.

Dari sisi jumlah, pegawai (dalam hal ini adalah PNS) di Kementerian PU mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke 2011. Hal ini salah satunya disebabkan oleh penerimaan pegawai secara *online* yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai baru. Namun pada tahun 2012 penerimaan pegawai baru dihentikan sementara waktu. Oleh karena, itu jumlah pegawai di tahun 2012 dan 2013 tidak terjadi peningkatan. Penerimaan pegawai secara langsung dimulai kembali pada tahun 2013.

Di tahun 2014, tercatat pegawai di Kementerian PU berjumlah 20.486 orang, baik yang bertugas di kantor pusat maupun balai serta satuan kerja di daerah. Jumlah tersebut terdiri dari 15.059 laki-laki dan 5.427 perempuan seperti terlihat pada Tabel 7.1a. - 7.1b. dan Gambar 7.1 di bawah ini.

Tabel 7.1a
Perkembangan Jumlah SDM Kementerian PU Tahun 2010-2014

Unit Organisasi	2010			2011			2012		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
Pejabat Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sekretariat Jenderal	1.227	556	1.783	1.004	452	1.456	925	441	1.366
Inspektorat Jenderal	130	60	190	152	100	252	140	100	240
Ditjen Penataan Ruang	320	173	493	376	242	618	356	233	589
Ditjen Sumber Daya Air	6.115	1.280	7.395	6.451	1.558	8.009	6.286	1.614	7.900
Ditjen Bina Marga	5.282	1.522	6.804	5.702	1.756	7.458	5.607	1.762	7.369
Ditjen Cipta Karya	1.453	646	2.099	1.583	799	2.382	1.506	821	2.327
Balitbang	859	304	1.163	927	380	1.307	853	368	1.221
BP Konstruksi	340	97	437	340	152	492	293	151	444
Kementerian PU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	15.726	4.638	20.364	16.535	5.439	21.974	15.966	5.490	21.456

Tabel 7.1b.
Perkembangan Jumlah SDM Kementerian PU Tahun 2010-2014 (lanjutan)

Unit Organisasi	2013			2014		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
Pejabat Negara	0	0	0	2	0	2
Sekretariat Jenderal	926	427	1.353	834	422	1.256
Inspektorat Jenderal	128	101	229	123	107	230
Ditjen Penataan Ruang	347	234	581	341	227	568
Ditjen Sumber Daya Air	6.200	1.619	7.819	5.840	1.612	7.452
Ditjen Bina Marga	5.620	1.752	7.372	5.426	1.738	7.164
Ditjen Cipta Karya	1.428	803	2.231	1.395	796	2.191
Balitbang	814	358	1.172	769	354	1.123
BP Konstruksi	259	146	405	246	146	392
Kementerian PU	0	0	0	83	25	108
Jumlah	15.722	5.440	21.162	15.059	5.427	20.486

Sumber : Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Catatan : Lk : Laki-Laki ; Pr : Perempuan

PNS dengan Unit Organisasi yang belum terdata dimasukkan pada unit Kementerian PU

Data Tahun 2011 Status: 21 Juni 2011

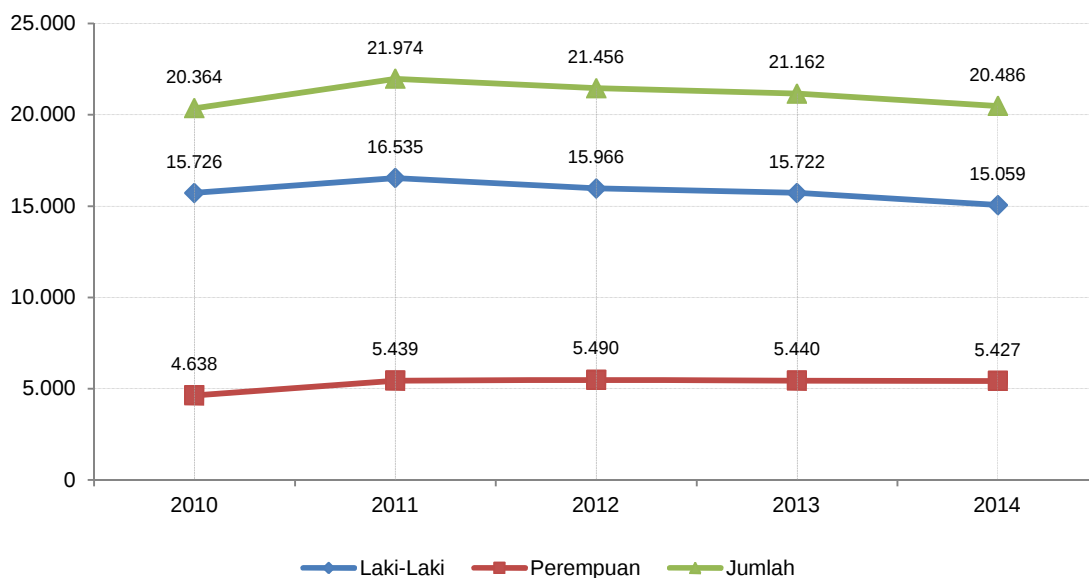
Data Tahun 2012 Status: 14 Agustus 2012

Data Tahun 2013 Status: 01 April 2013

Data Tahun 2014 Status: 05 September 2014

Gambar 7.1.

Perkembangan Jumlah SDM Kementerian PU Tahun 2010-2014



Penempatan pegawai Kementerian PU berbanding lurus dengan kebutuhan beban kerja serta prioritas pada bidang tugas pelayanan teknis. Jumlah pegawai paling banyak berada di tiga unit organisasi yang menjadi fokus kegiatan pembangunan Kementerian PU, yaitu Sumber Daya Air, Bina Marga dan Cipta Karya. Persentase pegawai pada masing-masing unit organisasi tersebut di tahun 2014 adalah 36,38%, 34,97% dan 10,70%. Sementara di Ditjen Penataan Ruang, jumlah persentase pegawainya sebanyak 2,77%. Distribusi pegawai berdasarkan unit organisasi dapat dilihat pada Tabel 7.2a. – 7.2b. dan Gambar 7.2 di bawah ini.

Tabel 7.2a.

Persentase SDM Kementerian PU Tahun 2010-2014

Unit Organisasi	2010			2011			2012		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
Pejabat Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Jenderal	6,03	2,73	8,76	4,57	2,06	6,63	4,31	2,06	6,37
Inspektorat Jenderal	0,64	0,29	0,93	0,69	0,46	1,15	0,65	0,47	1,12
Ditjen Penataan Ruang	1,57	0,85	2,42	1,71	1,10	2,81	1,66	1,09	2,75
Ditjen Sumber Daya Air	30,03	6,29	36,31	29,36	7,09	36,45	29,30	7,52	36,82
Ditjen Bina Marga	25,94	7,47	33,41	25,95	7,99	33,94	26,13	8,21	34,34
Ditjen Cipta Karya	7,14	3,17	10,31	7,20	3,64	10,84	7,02	3,83	10,85
Balitbang	4,22	1,49	5,71	4,22	1,73	5,95	3,98	1,72	5,69
BP Konstruksi	1,67	0,48	2,15	1,55	0,69	2,24	1,37	0,70	2,07
Kementerian PU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	77,22	22,78	100,00	75,25	24,75	100,00	74,41	25,59	100,00

Tabel 7.2b.

Persentase SDM Kementerian PU Tahun 2010-2014 *(lanjutan)*

Unit Organisasi	2013			2014		
	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr
Pejabat Negara	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Sekretariat Jenderal	4,38	2,02	6,39	4,07	2,06	6,13
Inspektorat Jenderal	0,60	0,48	1,08	0,60	0,52	1,12
Ditjen Penataan Ruang	1,64	1,11	2,75	1,66	1,11	2,77
Ditjen Sumber Daya Air	29,30	7,65	36,95	28,51	7,87	36,38
Ditjen Bina Marga	26,56	8,28	34,84	26,49	8,48	34,97
Ditjen Cipta Karya	6,75	3,79	10,54	6,81	3,89	10,70
Balitbang	3,85	1,69	5,54	3,75	1,73	5,48
BP Konstruksi	1,22	0,69	1,91	1,20	0,71	1,91
Kementerian PU	0,00	0,00	0,00	0,41	0,12	0,53
Jumlah	74,29	25,71	100,00	73,51	26,49	100,00

Sumber : Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Catatan : Lk : Laki-Laki ; Pr : Perempuan

PNS dengan Unit Organisasi yang belum terdata dimasukkan pada unit Kementerian PU

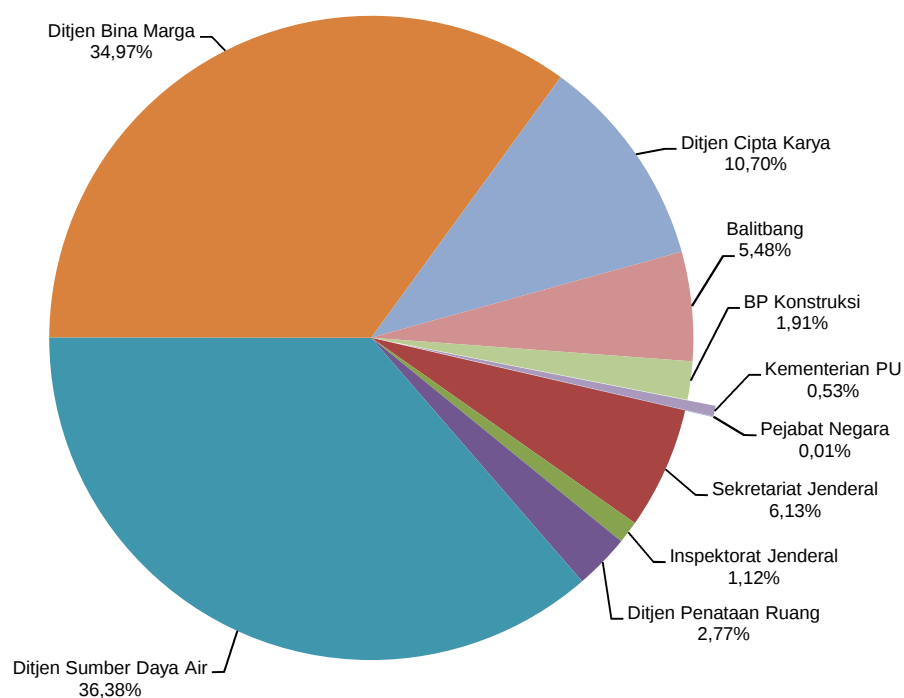
Data Tahun 2011 Status: 21 Juni 2011

Data Tahun 2012 Status: 14 Agustus 2012

Data Tahun 2013 Status: 01 April 2013

Data Tahun 2014 Status: 05 September 2014

Gambar 7.2.
Persentase SDM Kementerian PU Tahun 2014



Dilihat dari golongan kepangkatan, jumlah pegawai Kementerian PU pada tahun 2014 yang sudah menjadi Golongan IV berjumlah 1.397 orang atau 6,82% dari seluruh jumlah pegawai. Kemudian yang termasuk dalam Golongan III ada sebanyak 10.936 orang atau 53,38%, serta Golongan II atau kurang sebanyak 8.153 orang atau 39,80%.

Tabel 7.3a.

Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Golongan Kepangkatan

Status : 5 September 2014

Unit Organisasi	Golongan IV			Golongan III		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
Pejabat Negara	2	0	2	0	0	0
Sekretariat Jenderal	105	55	160	477	306	783
Inspektorat Jenderal	33	12	45	83	92	175
Ditjen Penataan Ruang	41	16	57	242	197	439
Ditjen Sumber Daya Air	346	44	390	2.420	1.045	3.465
Ditjen Bina Marga	353	28	381	2.492	1.084	3.576
Ditjen Cipta Karya	113	32	145	789	618	1.407
Balitbang	121	42	163	468	274	742
BP Konstruksi	36	10	46	184	124	308
Kementerian PU	8	0	8	27	14	41
Jumlah	1.158	239	1.397	7.182	3.754	10.936

Tabel 7.3b.

Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Golongan Kepangkatan (*lanjutan*)

Status : 5 September 2014

Unit Organisasi	Golongan II dan Kurang			Jumlah		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
Pejabat Negara	0	0	0	2	0	2
Sekretariat Jenderal	252	61	313	834	422	1.256
Inspektorat Jenderal	7	3	10	123	107	230
Ditjen Penataan Ruang	58	14	72	341	227	568
Ditjen Sumber Daya Air	3.074	523	3.597	5.840	1.612	7.452
Ditjen Bina Marga	2.581	626	3.207	5.426	1.738	7.164
Ditjen Cipta Karya	493	146	639	1.395	796	2.191

Unit Organisasi	Golongan II dan Kurang			Jumlah		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
Balitbang	180	38	218	769	354	1.123
BP Konstruksi	26	12	38	246	146	392
Kementerian PU	48	11	59	83	25	108
Jumlah	6.719	1.434	8.153	15.059	5.427	20.486

Sumber : Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

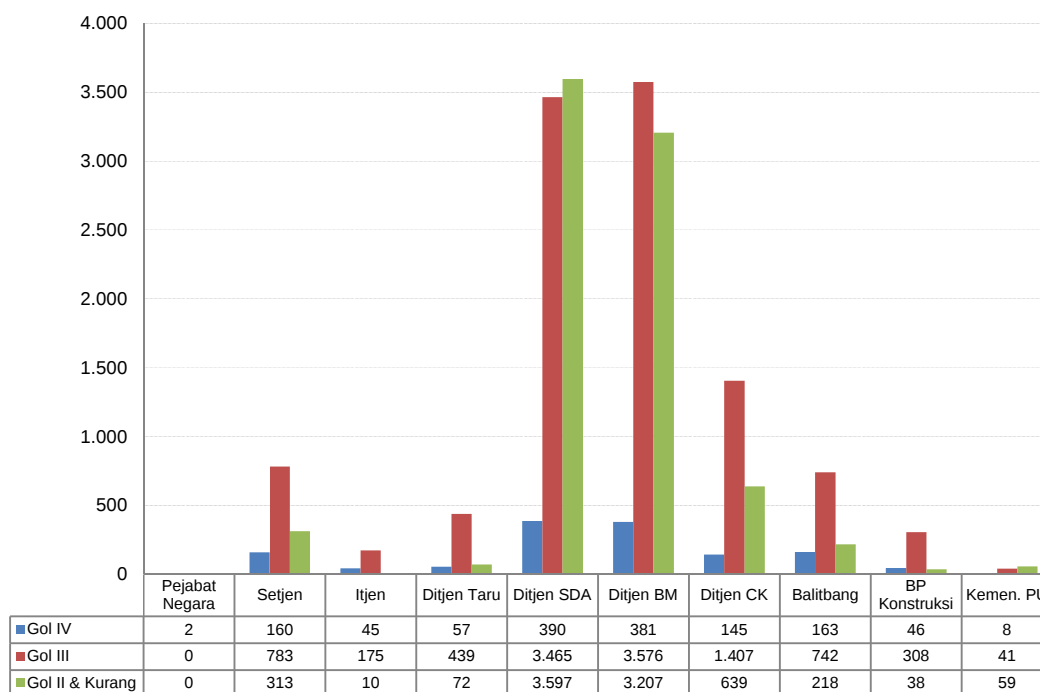
Catatan : Lk : Laki-Laki ; Pr : Perempuan

PNS dengan Unit Organisasi yang belum terdata dimasukkan pada unit Kementerian PU

Gambar 7.3.

Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Golongan Kepangkatan

Status : 5 September 2014



Tabel 7.4a.

Persentase SDM Kementerian PU Menurut Golongan Kepangkatan

Status : 5 September 2014

Unit Organisasi	Golongan IV			Golongan III		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
Pejabat Negara	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Jenderal	0,51	0,27	0,78	2,33	1,49	3,82
Inspektorat Jenderal	0,16	0,06	0,22	0,41	0,45	0,85
Ditjen Penataan Ruang	0,20	0,08	0,28	1,18	0,96	2,14
Ditjen Sumber Daya Air	1,69	0,21	1,90	11,81	5,10	16,91
Ditjen Bina Marga	1,72	0,14	1,86	12,16	5,29	17,46
Ditjen Cipta Karya	0,55	0,16	0,71	3,85	3,02	6,87
Balitbang	0,59	0,21	0,80	2,28	1,34	3,62
BP Konstruksi	0,18	0,05	0,22	0,90	0,61	1,50
Kementerian PU	0,04	0,00	0,04	0,13	0,07	0,20
Jumlah	5,65	1,17	6,82	35,06	18,32	53,38

Tabel 7.4b.

Persentase SDM Kementerian PU Menurut Golongan Kepangkatan (*lanjutan*)

Status : 5 September 2014

Unit Organisasi	Golongan II dan Kurang			Jumlah		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
Pejabat Negara	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Sekretariat Jenderal	1,23	0,30	1,53	4,07	2,06	6,13
Inspektorat Jenderal	0,03	0,01	0,05	0,60	0,52	1,12
Ditjen Penataan Ruang	0,28	0,07	0,35	1,66	1,11	2,77
Ditjen Sumber Daya Air	15,01	2,55	17,56	28,51	7,87	36,38
Ditjen Bina Marga	12,60	3,06	15,65	26,49	8,48	34,97
Ditjen Cipta Karya	2,41	0,71	3,12	6,81	3,89	10,70

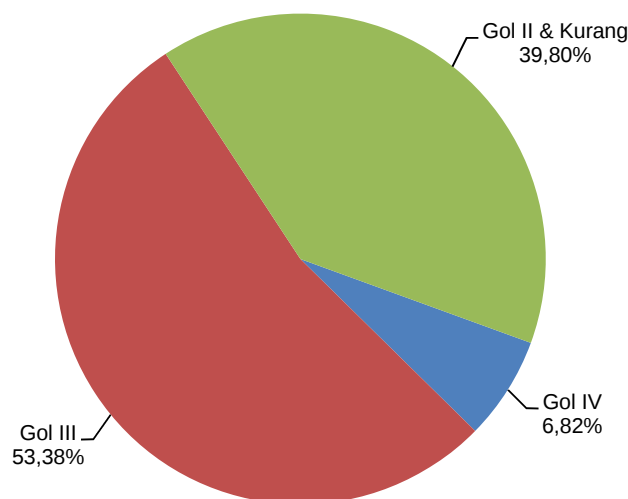
Unit Organisasi	Golongan II dan Kurang			Jumlah		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
Balitbang	0,88	0,19	1,06	3,75	1,73	5,48
BP Konstruksi	0,13	0,06	0,19	1,20	0,71	1,91
Kementerian PU	0,23	0,05	0,29	0,41	0,12	0,53
Jumlah	32,80	7,00	39,80	73,51	26,49	100,00

Sumber : Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Catatan : Lk : Laki-Laki ; Pr : Perempuan

PNS dengan Unit Organisasi yang belum terdata dimasukkan pada unit Kementerian PU

Gambar 7.4.
Persentase SDM Kementerian PU Menurut Golongan Kepangkatan
Tahun 2014



Salah satu keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, begitu pula di Kementerian PU. Meskipun bukan satu-satunya parameter untuk mengukur kualitas SDM, namun pendidikan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas seseorang dalam menjalankan tugasnya.

Berkaitan dengan jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan, jumlah pegawai di Kementerian PU pada tahun 2014 yang menamatkan pendidikan sampai dengan jenjang SLTA atau kurang berjumlah 8.605 orang atau 42%; D1-D3 912 orang atau 4,45%; D4/S1 8.272 orang atau 40,38%; S2 2.626 orang atau 12,82%; dan S3 71 orang atau 0,35%.

Setelah dilakukan penerimaan secara *online* beberapa tahun terakhir, jumlah pegawai dengan jenjang pendidikan D4/S1 mengalami peningkatan sesuai dengan persyaratan penerimaan yang dibutuhkan. Selain itu peningkatan juga terjadi pada jumlah pegawai dengan jenjang pendidikan S2 yang pada tahun 2013 berjumlah 2.120 orang menjadi 2.626 orang di tahun 2014, serta jenjang pendidikan S3 dari 65 orang menjadi 71 orang. Data mengenai jumlah serta persentase pegawai Kementerian PU menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan seperti terdapat pada Tabel 7.5. dan 7.6. serta Gambar 7.5 dan 7.6 di bawah ini.

Tabel 7.5.

Jumlah SDM Kementerian PU

Menurut Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan Tahun 2012-2014

Tingkat Pendidikan	2012			2013			2014		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
SLTA atau kurang	8.667	2.029	10.696	8.331	1.902	10.233	7.108	1.497	8.605
D1 - D3	713	388	1.101	708	380	1.088	605	307	912
D4/S1	4.820	2.595	7.415	4.970	2.679	7.649	5.325	2.947	8.272
S2	1.561	443	2.004	1.647	473	2.120	1.955	671	2.626
S3	59	4	63	61	4	65	66	5	71
Jumlah	15.820	5.459	21.279	15.717	5.438	21.155	15.059	5.427	20.486

Sumber : Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Catatan : Lk : Laki-Laki ; Pr : Perempuan

Data Tahun 2012 Status: 14 Agustus 2012

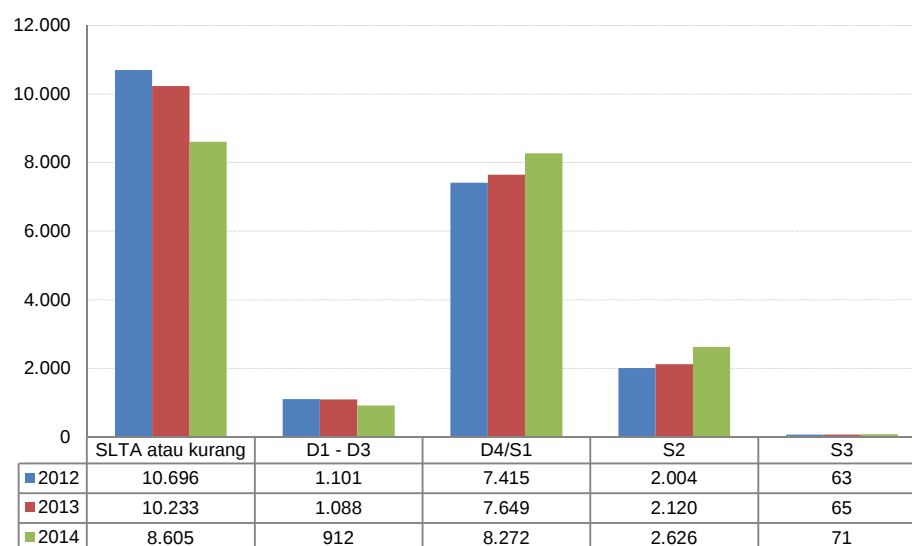
Data Tahun 2013 Status: 01 April 2013

Data Tahun 2014 Status: 05 September 2014

Gambar 7.5.

Jumlah SDM Kementerian PU

Menurut Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan Tahun 2012-2014



Tabel 7.6.

Persentase SDM Kementerian PU

Menurut Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan Tahun 2012-2014

Tingkat Pendidikan	2012			2013			2014		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
SLTA atau kurang	40,73	9,54	50,27	39,38	8,99	48,37	34,70	7,31	42,00
D1 - D3	3,35	1,82	5,17	3,35	1,80	5,14	2,95	1,50	4,45
D4/S1	22,65	12,20	34,85	23,49	12,66	36,16	25,99	14,39	40,38
S2	7,34	2,08	9,42	7,79	2,24	10,02	9,54	3,28	12,82
S3	0,28	0,02	0,30	0,29	0,02	0,31	0,32	0,02	0,35
Jumlah	74,35	25,65	100,00	74,29	25,71	100,00	73,51	26,49	100,00

Sumber : Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

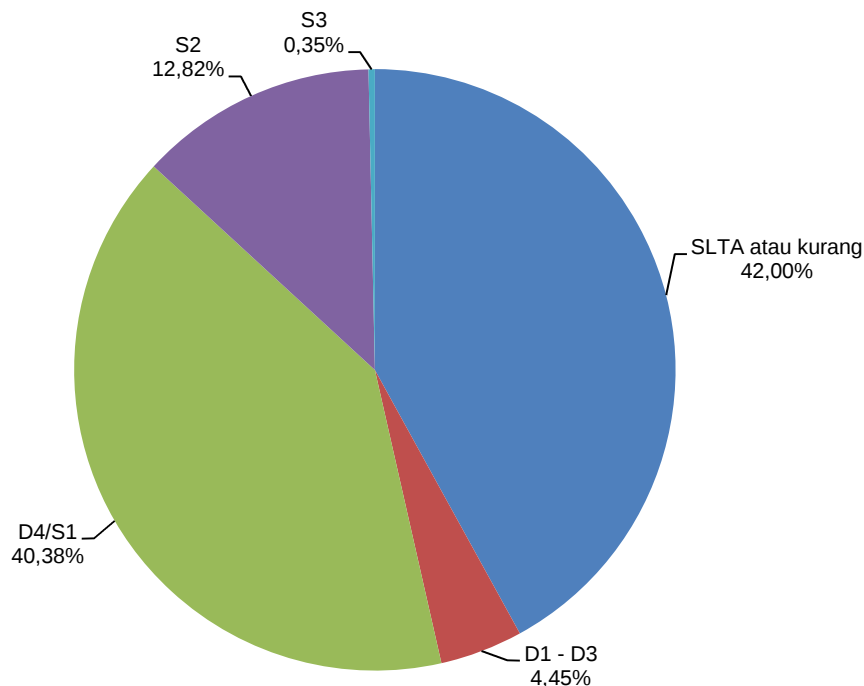
Catatan : Lk : Laki-Laki ; Pr : Perempuan

Data Tahun 2012 Status: 14 Agustus 2012

Data Tahun 2013 Status: 01 April 2013

Data Tahun 2014 Status: 05 September 2014

Tabel 7.6.
Persentase SDM Kementerian PU
Menurut Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan Tahun 2014



B. Isu Gender

Pembangunan nasional pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik laki-laki, perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, mereka yang memiliki kebutuhan khusus, lanjut usia, remaja putra dan putri, maupun anak usia dini. Apabila hasil pembangunan belum termanfaatkan secara setara dan adil oleh kaum laki-laki dan perempuan, maka hal tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan yang mengindikasikan masih besarnya perbedaan manfaat yang diterima.

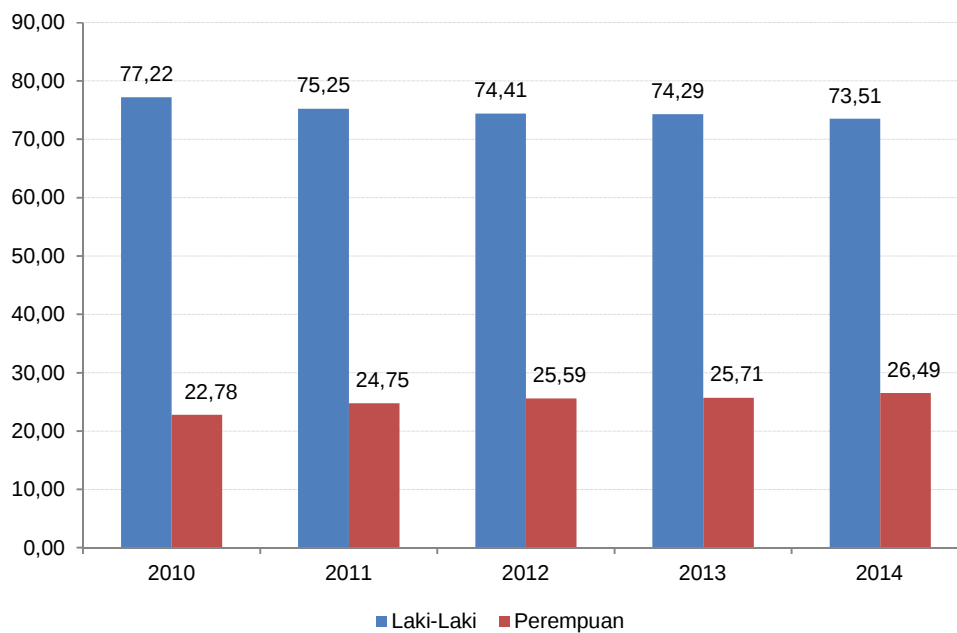
Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Secara umum tujuan PUG adalah memastikan perempuan dan laki-laki diperlakukan secara adil dan setara dalam memperoleh Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat (AKPM) yang sama atas pembangunan. Perlu dibentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender, yaitu program yang dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan laki-laki dan perempuan dengan ketersediaan data terpilah sehingga intervensi yang dilakukan dapat tepat sasaran.

Sesuai dengan salah satu strategi dalam Rencana Strategis Kementerian PU Tahun 2010-2014, pengarusutamaan gender telah menjadi komitmen Kementerian PU yang akan diterapkan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, serta implementasinya melalui program dan kegiatan. Konsep setara dan adil harus menjadi pegangan setiap tahapan kegiatan dimana setara berarti seimbang relasi antara laki-laki dan perempuan (dan orang lanjut usia, anak-anak, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/*difable*, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi). Sementara adil dapat diartikan sebagai tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan (dan orang lanjut usia, anak-anak, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/*difable*, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi) maupun laki-laki.

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan bidang Pekerjaan Umum salah satunya terlihat dari jumlah pegawai di Kementerian PU. Meskipun secara persentase jumlah pegawai perempuan di Kementerian PU hanya berkisar seperempat dari jumlah pegawai keseluruhan, namun menunjukkan peningkatan dari tahun 2013 yang tercatat 25,71% menjadi 26,49% di tahun 2014. Sementara persentase laki-laki di tahun 2014 tercatat 73,51%.

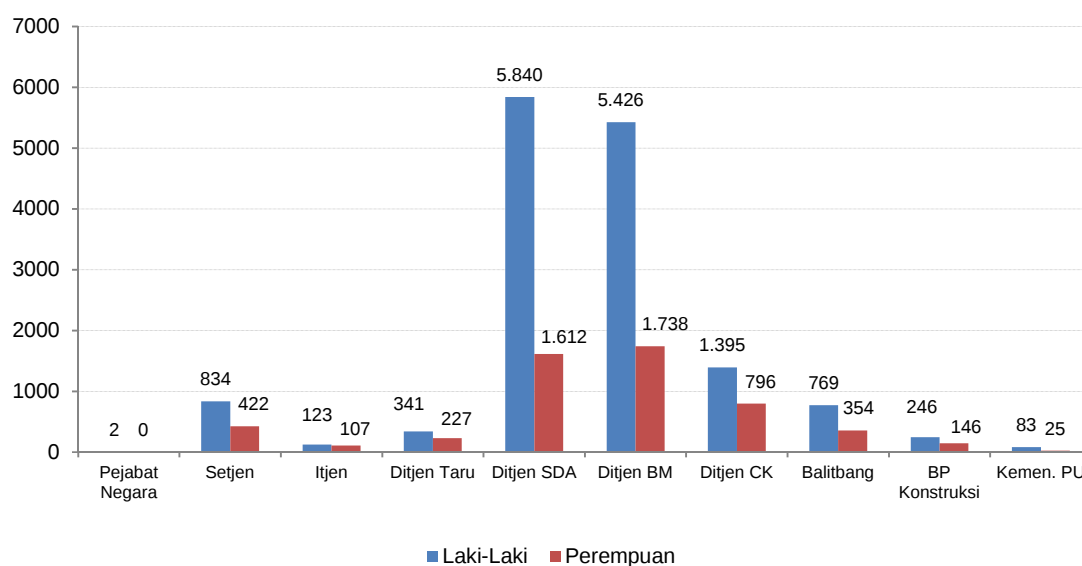
Gambar 7.7.

Persentase SDM Kementerian PU Tahun 2010-2014

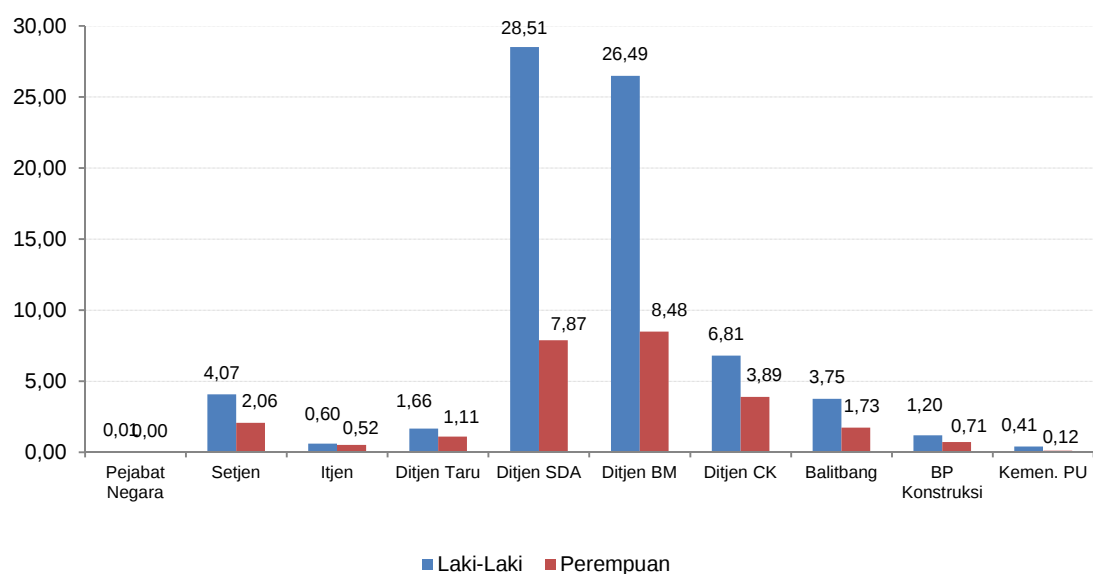


Jumlah pegawai perempuan pada unit organisasi mengikuti distribusi pegawai secara keseluruhan. Namun dari persentase, pegawai perempuan paling banyak berada di Direktorat Jenderal Bina Marga dengan 8,48% atau sebanyak 1.738 orang, kemudian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan 7,87% atau 1.612 orang, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya 3,89% atau 796 orang. Sementara pegawai laki-laki paling banyak berturut-turut berada di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan 28,51% atau 5.840 orang, Direktorat Jenderal Bina Marga dengan 26,49% atau 5.426 orang, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan 6,81% atau 1.395 orang.

Gambar 7.8.
Jumlah SDM Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin dan
Unit Organisasi Tahun 2014

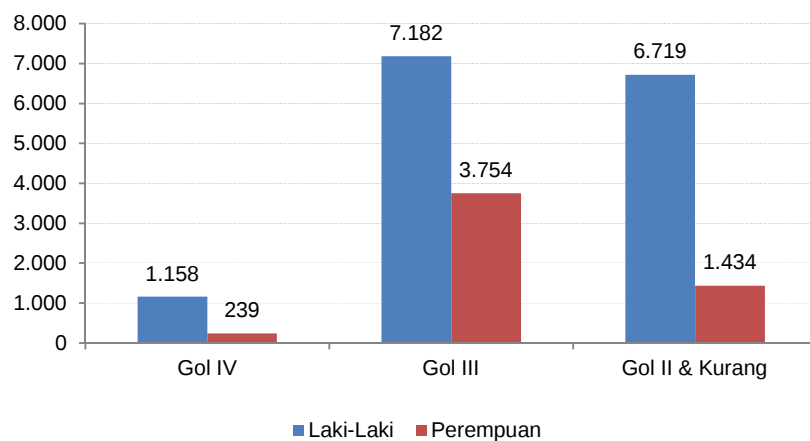


Gambar 7.9.
Persentase SDM Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin dan
Unit Organisasi Tahun 2014

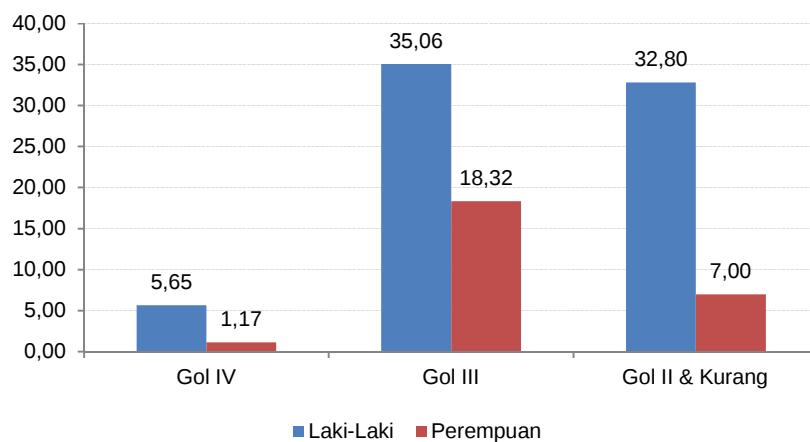


Jika dilihat dari tingkat golongan kepangkatan, pegawai perempuan di Kementerian PU pada tahun 2014 yang sudah masuk Golongan IV ada sebanyak 239 orang atau 1,17%; Golongan III 3.754 orang atau 18,32%; serta Golongan II atau kurang sebanyak 1.434 orang atau 7%.

Gambar 7.10.
Jumlah SDM Kementerian PU
Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2014



Gambar 7.11.
Persentase SDM Kementerian PU
Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2014



Keterlibatan kaum perempuan dalam proses pembangunan, khususnya sebagai pegambil kebijakan, salah satunya terlihat dari jumlah perempuan yang menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan. Di Kementerian PU, meskipun jumlah laki-laki yang menduduki jabatan lebih banyak, sesuai dengan persentase pegawai laki-laki yang juga lebih banyak, namun kaum perempuan tetap mendapat peran sesuai dengan kapasitasnya.

Komposisi pejabat di Kementerian PU mengalami perubahan seiring dengan terjadinya mutasi, reorganisasi maupun pergantian karena purnabakti. Pada tahun 2014, ada sebanyak 1.362 pejabat yang menduduki jabatan Eselon I hingga Eselon IV. Jumlah tersebut terdiri dari 1.017 pejabat laki-laki dan 345 pejabat perempuan. Atau secara persentase, komposisi pejabat di Kementerian PU di tahun 2014 terdiri dari 74,67% laki-laki dan 25,33% perempuan. Persentase perempuan yang menjabat juga meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat 22,53%.

Tabel 7.7a.

Jumlah Pejabat Kementerian PU Tahun 2010-2014

Unit Organisasi	2010			2011			2012		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
Sekretariat Jenderal	131	54	185	150	66	216	144	64	208
Inspektorat Jenderal	15	8	23	13	8	21	15	9	24
Ditjen Penataan Ruang	65	29	94	70	38	108	65	36	101
Ditjen Sumber Daya Air	322	42	364	343	53	396	324	48	372
Ditjen Bina Marga	211	28	239	223	31	254	212	34	246
Ditjen Cipta Karya	78	25	103	79	40	119	74	42	116
Balitbang	107	33	140	108	41	149	106	40	146
BP Konstruksi	78	15	93	78	16	94	74	17	91
Jumlah	1.007	234	1.241	1.064	293	1.357	1.014	290	1.304

Tabel 7.7b.
Jumlah Pejabat Kementerian PU Tahun 2010-2014 (lanjutan)

Unit Organisasi	2013			2014		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
Sekretariat Jenderal	166	61	227	163	62	225
Inspektorat Jenderal	15	9	24	15	9	24
Ditjen Penataan Ruang	69	38	107	68	40	108
Ditjen Sumber Daya Air	333	59	392	314	80	394
Ditjen Bina Marga	214	40	254	212	41	253
Ditjen Cipta Karya	69	40	109	71	48	119
Balitbang	109	39	148	103	44	147
BP Konstruksi	74	19	93	71	21	92
Jumlah	1.049	305	1.354	1.017	345	1.362

Sumber : Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Catatan : Lk : Laki-Laki ; Pr : Perempuan

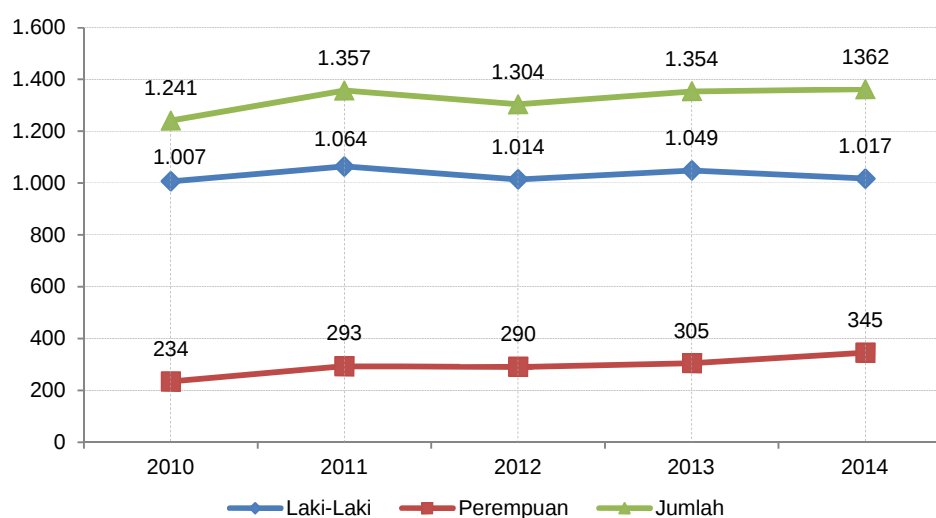
Data Tahun 2011 Status: 21 Juni 2011

Data Tahun 2012 Status: 14 Agustus 2012

Data Tahun 2013 Status: 01 April 2013

Data Tahun 2014 Status: 05 September 2014

Gambar 7.12.
Jumlah Pejabat Kementerian PU Tahun 2010-2014



Tabel 7.8a.

Persentase Pejabat Kementerian PU Tahun 2010-2014

Unit Organisasi	2010			2011			2012		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
Sekretariat Jenderal	10,56	4,35	14,91	11,05	4,86	15,92	11,04	4,91	15,95
Inspektorat Jenderal	1,21	0,64	1,85	0,96	0,59	1,55	1,15	0,69	1,84
Ditjen Penataan Ruang	5,24	2,34	7,57	5,16	2,80	7,96	4,98	2,76	7,75
Ditjen Sumber Daya Air	25,95	3,38	29,33	25,28	3,91	29,18	24,85	3,68	28,53
Ditjen Bina Marga	17,00	2,26	19,26	16,43	2,28	18,72	16,26	2,61	18,87
Ditjen Cipta Karya	6,29	2,01	8,30	5,82	2,95	8,77	5,67	3,22	8,90
BP Konstruksi	8,62	2,66	11,28	7,96	3,02	10,98	8,13	3,07	11,20
Balitbang	6,29	1,21	7,49	5,75	1,18	6,93	5,67	1,30	6,98
Jumlah	81,14	18,86	100,00	78,41	21,59	100,00	77,76	22,24	100,00

Tabel 7.8b.

Persentase Pejabat Kementerian PU Tahun 2010-2014 (lanjutan)

Unit Organisasi	2013			2014		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
Sekretariat Jenderal	12,26	4,51	16,77	11,97	4,55	16,52
Inspektorat Jenderal	1,11	0,66	1,77	1,10	0,66	1,76
Ditjen Penataan Ruang	5,10	2,81	7,90	4,99	2,94	7,93
Ditjen Sumber Daya Air	24,59	4,36	28,95	23,05	5,87	28,93
Ditjen Bina Marga	15,81	2,95	18,76	15,57	3,01	18,58
Ditjen Cipta Karya	5,10	2,95	8,05	5,21	3,52	8,74
BP Konstruksi	8,05	2,88	10,93	7,56	3,23	10,79
Balitbang	5,47	1,40	6,87	5,21	1,54	6,75
Jumlah	77,47	22,53	100,00	74,67	25,33	100,00

Sumber : Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Catatan : Lk : Laki-Laki ; Pr : Perempuan

Data Tahun 2011 Status: 21 Juni 2011

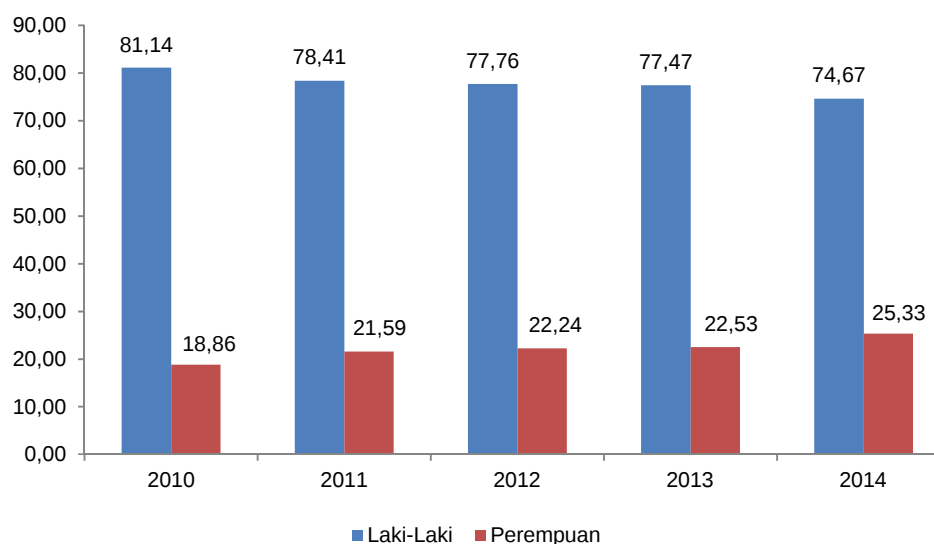
Data Tahun 2012 Status: 14 Agustus 2012

Data Tahun 2013 Status: 01 April 2013

Data Tahun 2014 Status: 05 September 2014

Gambar 7.13.

Jumlah Pejabat Kementerian PU Tahun 2010-2014



Dari Gambar 7.14. terlihat bahwa pejabat perempuan paling banyak berada di Ditjen Sumber Daya Air, yaitu 80 orang atau 5,87% dari jumlah seluruh pejabat di Kementerian PU. Pejabat perempuan paling banyak berikutnya terdapat di Ditjen Sekretariat Jenderal, yaitu sebanyak 62 orang atau 4,55%. Sementara pejabat laki-laki paling banyak berada di Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Bina Marga dengan persentase masing-masing 23,05% dan 15,57%.

Tabel 7.9.

Jumlah Pejabat Kementerian PU Menurut Jenjang Eselon

Status : 5 September 2014

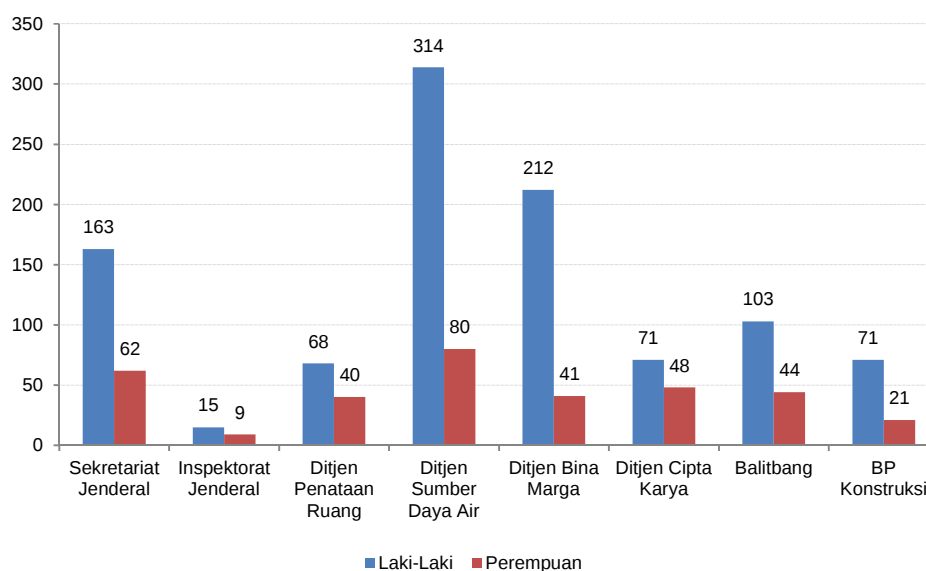
Unit Organisasi	Eselon I			Eselon II			Eselon III			Eselon IV		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
Sekretariat Jenderal	6	0	6	10	1	11	42	15	57	105	46	151
Inspektorat Jenderal	1	0	1	5	1	6	4	0	4	5	8	13
Ditjen Penataan Ruang	1	0	1	5	1	6	22	8	30	40	31	71

Unit Organisasi	Eselon I			Eselon II			Eselon III			Eselon IV		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
Ditjen Sumber Daya Air	1	0	1	19	0	19	92	16	108	202	64	266
Ditjen Bina Marga	1	0	1	15	0	15	67	5	72	129	36	165
Ditjen Cipta Karya	1	0	1	6	1	7	24	11	35	40	36	76
Balitbang	1	0	1	3	2	5	35	7	42	64	35	99
BP Konstruksi	1	0	1	5	0	5	21	6	27	44	15	59
Jumlah	13	0	13	68	6	74	307	68	375	629	271	900

Sumber : Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Catatan : Lk : Laki-Laki ; Pr : Perempuan

Gambar 7.14.
Jumlah Pejabat Kementerian PU Menurut Jenjang Eselon
Status : 5 September 2014



Tabel 7.10a.
 Persentase Pejabat Kementerian PU Menurut Jenjang Eselon
 Status : 5 September 2014

Unit Organisasi	Eselon I			Eselon II		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
Sekretariat Jenderal	0,44	0,00	0,44	0,73	0,07	0,81
Inspektorat Jenderal	0,07	0,00	0,07	0,37	0,07	0,44
Ditjen Penataan Ruang	0,07	0,00	0,07	0,37	0,07	0,44
Ditjen Sumber Daya Air	0,07	0,00	0,07	1,40	0,00	1,40
Ditjen Bina Marga	0,07	0,00	0,07	1,10	0,00	1,10
Ditjen Cipta Karya	0,07	0,00	0,07	0,44	0,07	0,51
Balitbang	0,07	0,00	0,07	0,22	0,15	0,37
BP Konstruksi	0,07	0,00	0,07	0,37	0,00	0,37
Jumlah	0,95	0,00	0,95	4,99	0,44	5,43

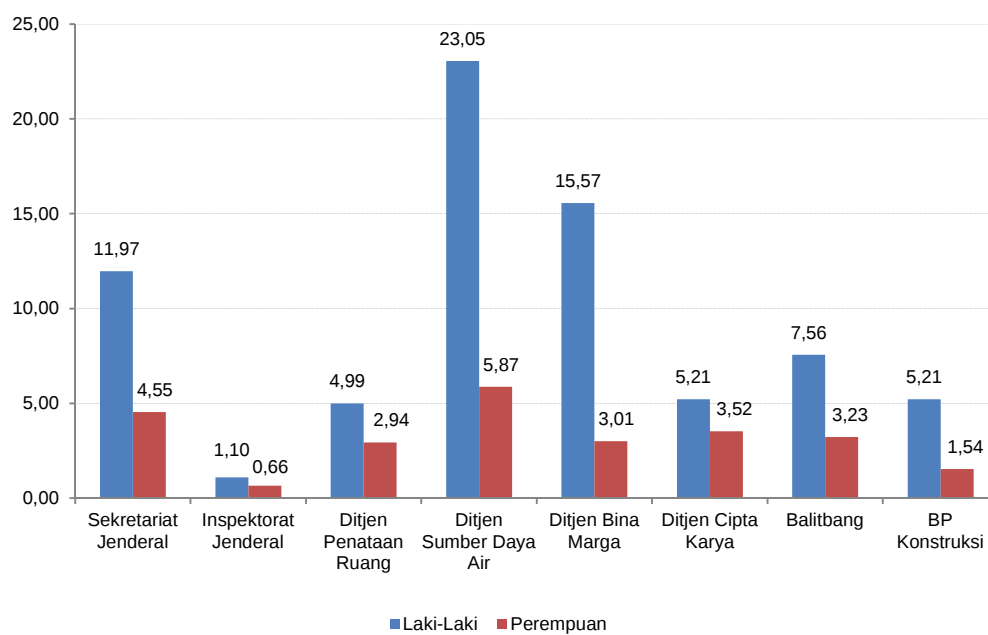
Tabel 7.10b.
 Persentase Pejabat Kementerian PU Menurut Jenjang Eselon (*lanjutan*)
 Status : 5 September 2014

Unit Organisasi	Eselon III			Eselon IV		
	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
Sekretariat Jenderal	3,08	1,10	4,19	7,71	3,38	11,09
Inspektorat Jenderal	0,29	0,00	0,29	0,37	0,59	0,95
Ditjen Penataan Ruang	1,62	0,59	2,20	2,94	2,28	5,21
Ditjen Sumber Daya Air	6,75	1,17	7,93	14,83	4,70	19,53
Ditjen Bina Marga	4,92	0,37	5,29	9,47	2,64	12,11
Ditjen Cipta Karya	1,76	0,81	2,57	2,94	2,64	5,58
Balitbang	2,57	0,51	3,08	4,70	2,57	7,27
BP Konstruksi	1,54	0,44	1,98	3,23	1,10	4,33
Jumlah	22,54	4,99	27,53	46,18	19,90	66,08

Sumber : Biro Kepegawaian dan Ortala, Kementerian PU

Catatan : Lk : Laki-Laki ; Pr : Perempuan

Gambar 7.15.
Persentase Pejabat Kementerian PU Menurut Jenjang Eselon
Status : 5 September 2014



BAB VIII

P E N U T U P

Dalam rangka menyebarkan data dan informasi hasil pembangunan bidang prasarana dan sarana ke-PU-an, Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum (BIS-PU) dapat digunakan sebagai dukungan data dan informasi dalam pengambilan keputusan bagi para pimpinan di Kementerian PU untuk menyusun berbagai kebijakan program pembangunan. BIS-PU diharapkan juga dapat melengkapi serta memberikan data dan informasi ke-PU-an tingkat nasional dalam sajian yang lebih mudah untuk digunakan oleh *stakeholder* dan masyarakat.

Rintisan BIS-PU dimulai pada tahun 2003 dengan nama Buku Penyediaan Informasi Statistik Prasarana Kimpraswil. Pada tahun 2006 BIS-PU berganti nama menjadi Buku Induk Kestatistikan dan pada tahun 2007 menjadi Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum. Di tahun 2012, digunakan nama Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum (BIS-PU) yang dibuat dengan format yang berbeda dalam hal penekanan pada informasi mengenai objek hasil pembangunan infrastruktur ke-PU-an beserta beberapa dokumentasinya. Kemudian di tahun 2013 dan 2014 BIS-PU dibuat dengan format data agregat menurut provinsi dan diupayakan urut beberapa tahun. Selain dalam format buku, informasi dalam BIS-PU juga dapat dilihat dalam format digital *e-book* melalui media *Dashboard* Data Literal Infrastruktur Pekerjaan Umum pada *website* PU-net.

Pusdata telah berupaya maksimal dalam menyediakan data dan informasi infrastruktur perkerjaan umum serta penyelenggaraan sistem informasi dalam mendukung manajemen Kementerian Pekerjaan Umum untuk tingkat nasional secara lengkap. Namun demikian, upaya tersebut masih dirasakan belum dapat memenuhi

kebutuhan akan data dan informasi yang senantiasa dinamis keragaman jenisnya dan meningkat jumlah pengguna informasinya.

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan data dan informasi mengenai infrastruktur PU di tingkat nasional dapat tersedia dengan lebih terstruktur, lengkap dan akurat sehingga dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk keperluan dukungan dan referensi data dan informasi.

Lebih jauh, dengan diterbitkannya BIS-PU ini diharapkan dapat terjadi peningkatan kerjasama antar unit kerja di dalam dan di luar Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga jaringan kerjasama dalam pertukaran data dan informasi berjalan secara mutual dan dapat saling melengkapi untuk dapat digunakan sebagai masukan kegiatan dan dapat menghasilkan *outcome* yang bermanfaat dalam rangkaian dukungan informasi bagi pembangunan nasional.



Pusat Pengolahan Data (PUSDATA) Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta 12110 - Telp: 021-7392262